

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi yang strategis untuk pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai jumlah penduduk pada Tahun 2019 sebanyak 1.440.698 jiwa penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tegal berkembang cukup pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini sedikit banyak juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Tegal. Kondisi umum daerah Kabupaten Tegal dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

A. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.878 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Luas (Ha)
1	Margasari	13	8.683
2	Bumijawa	18	8.856
3	Bojong	17	5.852
4	Balapulang	20	7.491
5	Pagerbarang	13	4.300
6	Lebaksiu	15	4.095
7	Jatinegara	17	7.962
8	Kedungbanteng	10	8.762
9	Pangkah	23	3.551
10	Slawi	10	1.389
11	Dukuhwaru	10	2.630
12	Adiwerna	21	2.386
13	Dukuhturi	18	1.748
14	Talang	19	1.839
15	Tarub	20	2.682
16	Kramat	20	3.849
17	Suradadi	11	5.573
18	Warureja	12	6.231
Jumlah		287	87.878

Sumber : *Selayang Pandang Kabupaten Tegal, Tahun 2019*

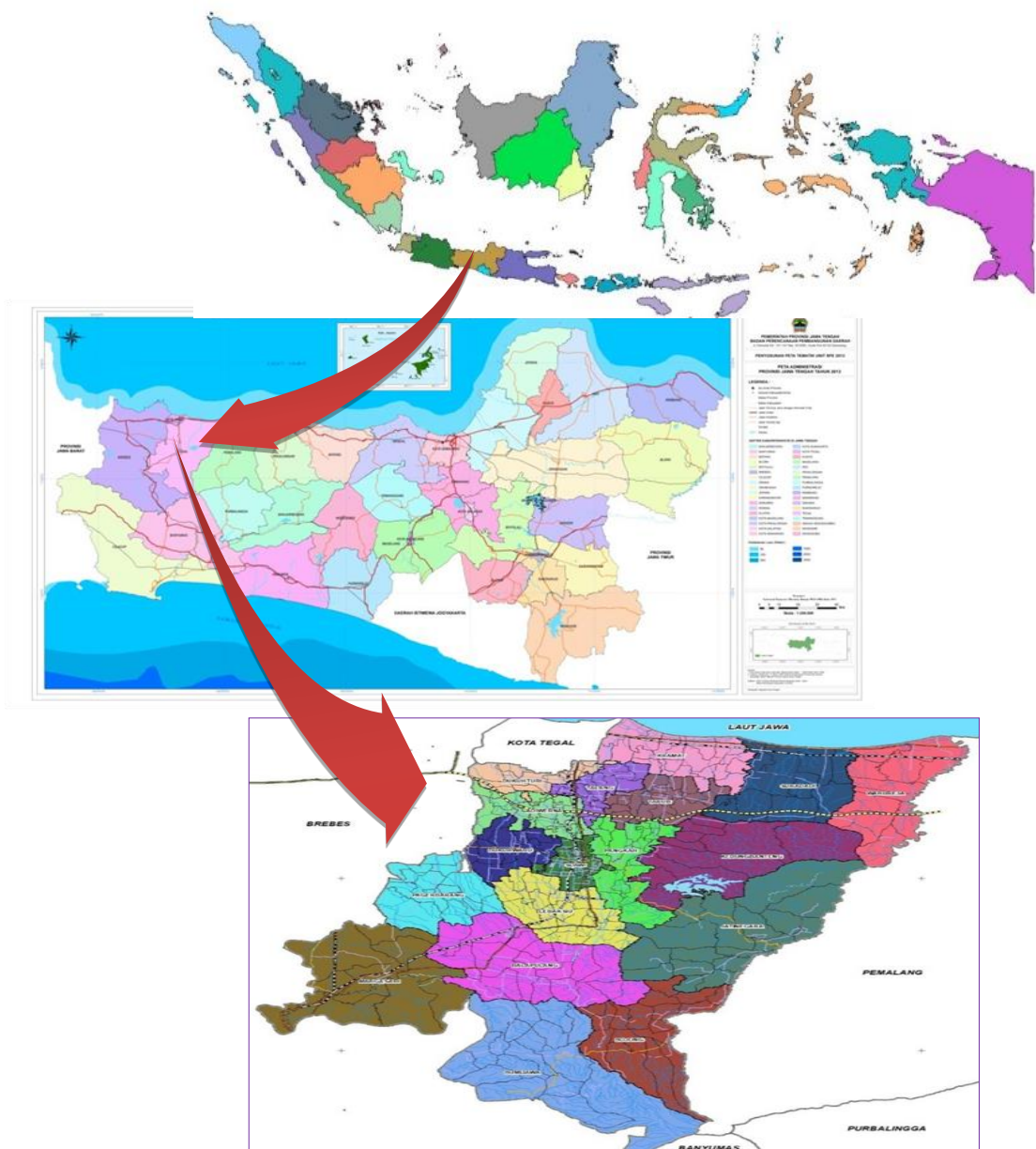
Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah kecamatan Bumijawa (8.856 Ha), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (1.389 Ha). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

B. Letak dan lokasi

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak di : 108° 57'6" s/d 109° 21'30" BT dan antara 6° 50'41" s/d 7° 15'30" LS.

Gambar 2. 1. Peta Konstelasi Kabupaten Tegal dengan Wilayah Sekitarnya



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis dimana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut :

- Jalan TOL Pejagan - Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang - Tegal - Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta - Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi - Purwokerto

C. Topografi

Kabupaten Tegal secara Topografi terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

- Daerah pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja
- Daerah dataran rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah
- Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat) yaitu :

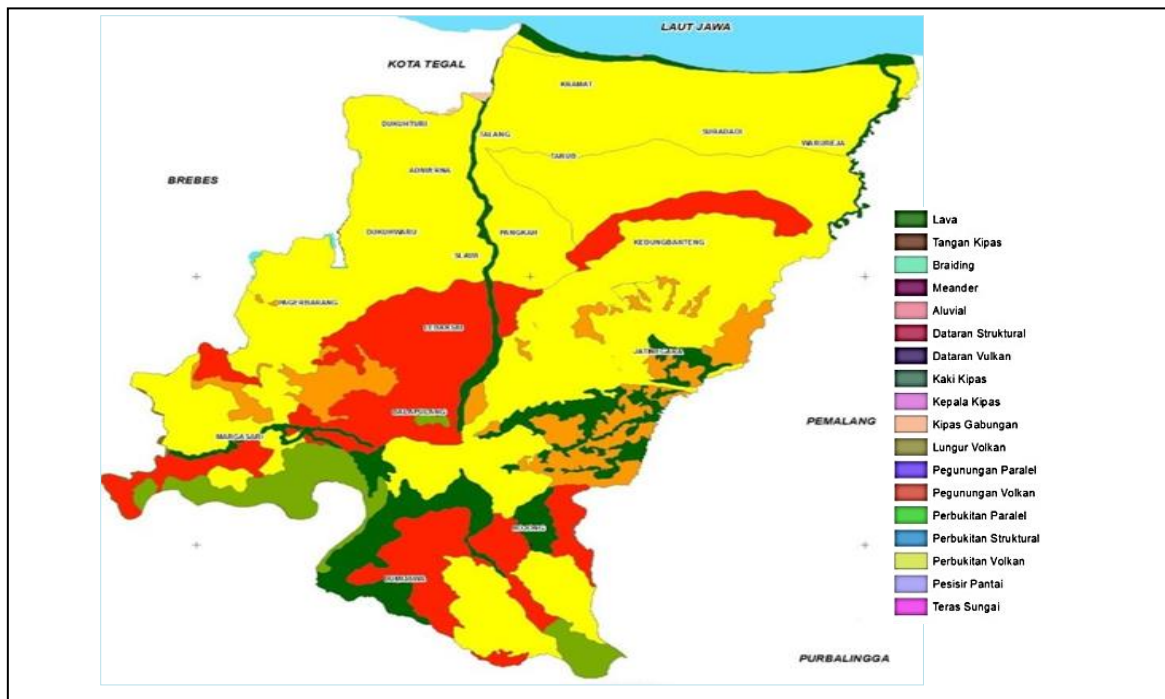
- Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter

D. Jenis Tanah dan Geologi

1) Jenis Tanah

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utaman yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69 %), Grumosol (9,42 %), Andosol (4,29 %) dan jenis lain-lain (3,67 %). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698 hektar yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal



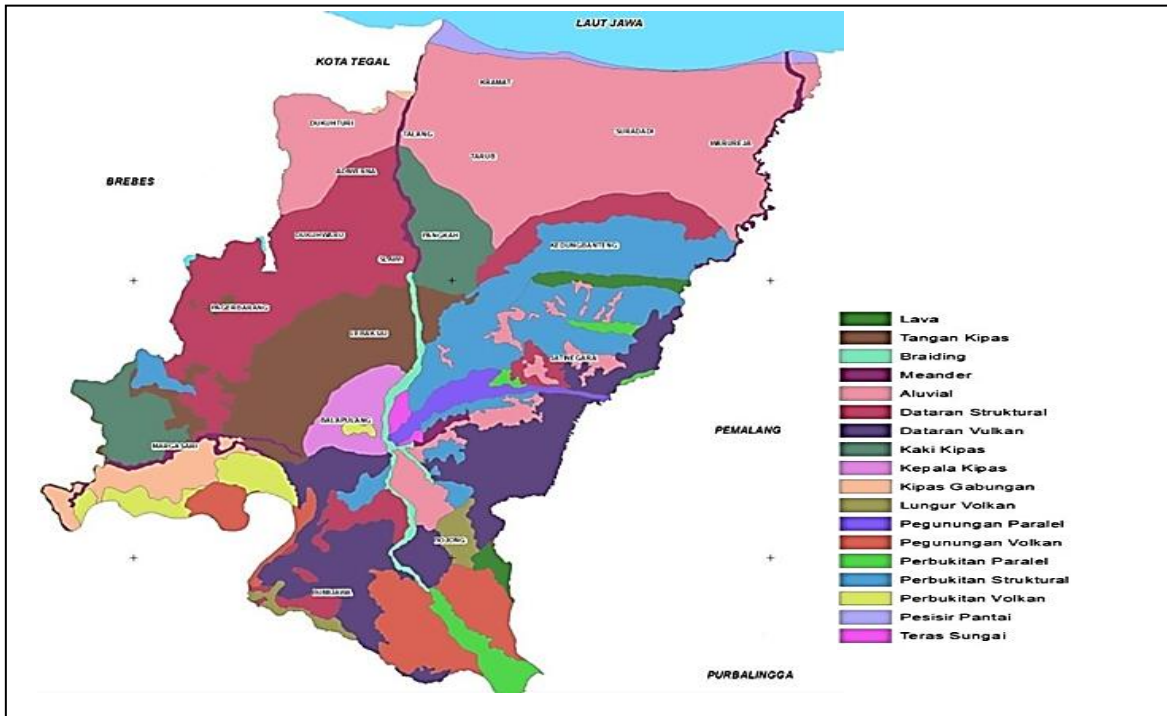
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

2) Geologi

Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.879 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur vulkan, pegunungan paralel, pegunungan vulkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan vulkan, pesisir pantai, serta teras sungai.

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

E. Hidrologi

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi water storage di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel.

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS)

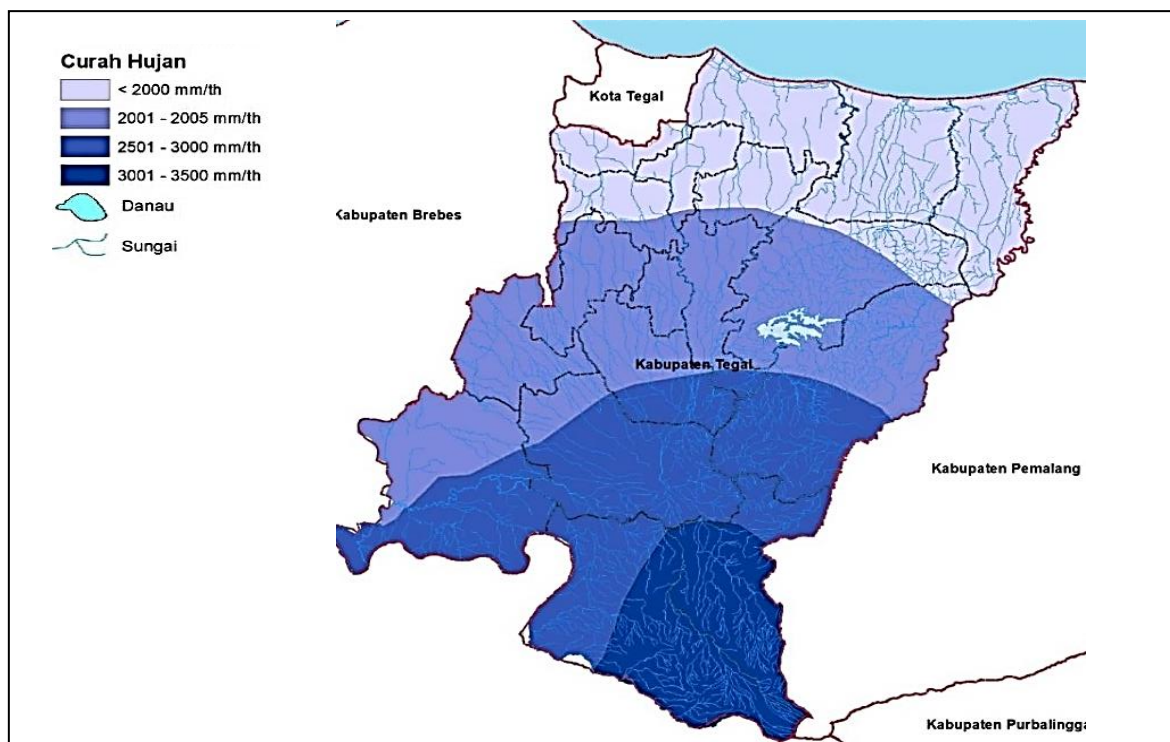
No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulang, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Slawi, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8	Pemali	11.079	Balapulang, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang
9	Kumisik	12.788	Balapulang, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	Jumlah	97.604	

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

F. Klimatologi

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan Kelembaban 82 %, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 Knots, Suhu udara rata-rata 26,9°C dan Lama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm. Gambaran tentang sebaran wilayah berdasarkan curah hujan dapat dilihat dalam peta sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Peta Sebaran Wilayah Berdasarkan Curah Hujan



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

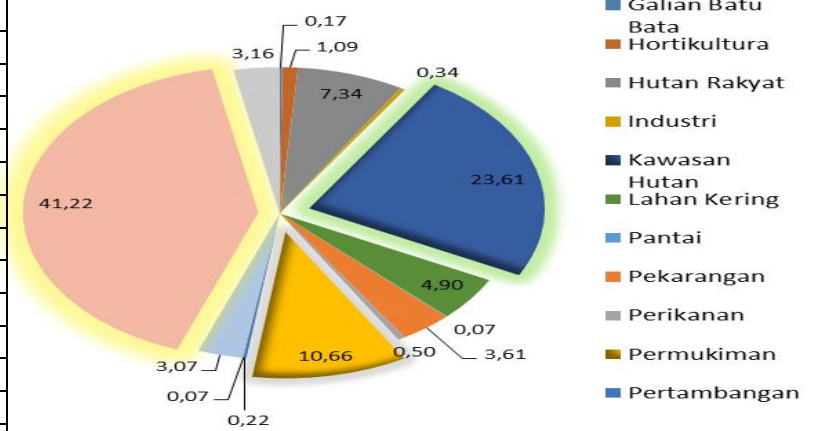
G. Penggunaan Lahan

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Tegal merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Berdasarkan interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi Liputan Tahun 2016, Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh penggunaan lahan sawah basah sekitar 41,22 % dari luas wilayah Tegal ini berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan di Kabupaten Tegal, disusul kawasan hutan sekitar 23,61%.

Untuk lahan kering seluas 13.154 Ha komposisinya adalah tegalan, hutan rakyat dan hortikultura. Berdasarkan kondisi eksisting Bangunan permukiman seluas 10.529 Ha dan lahan pekarangan seluas 3.564 Ha di Kabupaten, apabila disandingkan dengan data jumlah penduduk Tahun 2018 sebanyak 1.437.225, dengan demikian secara kepadatan penduduk netto terkategori kepadatan tinggi 139 jiwa/Ha (1.635 jiwa/km²). Kondisi ini membutuhkan lahan yang cukup untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan

Tataguna	Luas (Ha)
Galian Batu Bata	163
Hortikultura	1.073
Hutan Rakyat	7.247
Industri	334
Kawasan Hutan	23.313
Lahan Kering	4.835
Pantai	65
Pekarangan	3.564
Perikanan	491
Permukiman	10.529
Pertambangan	217
Peternakan	64
Sarana Prasana	3.032
Sawah	40.704
Tubuh Air	3.125
Jumlah	98.756



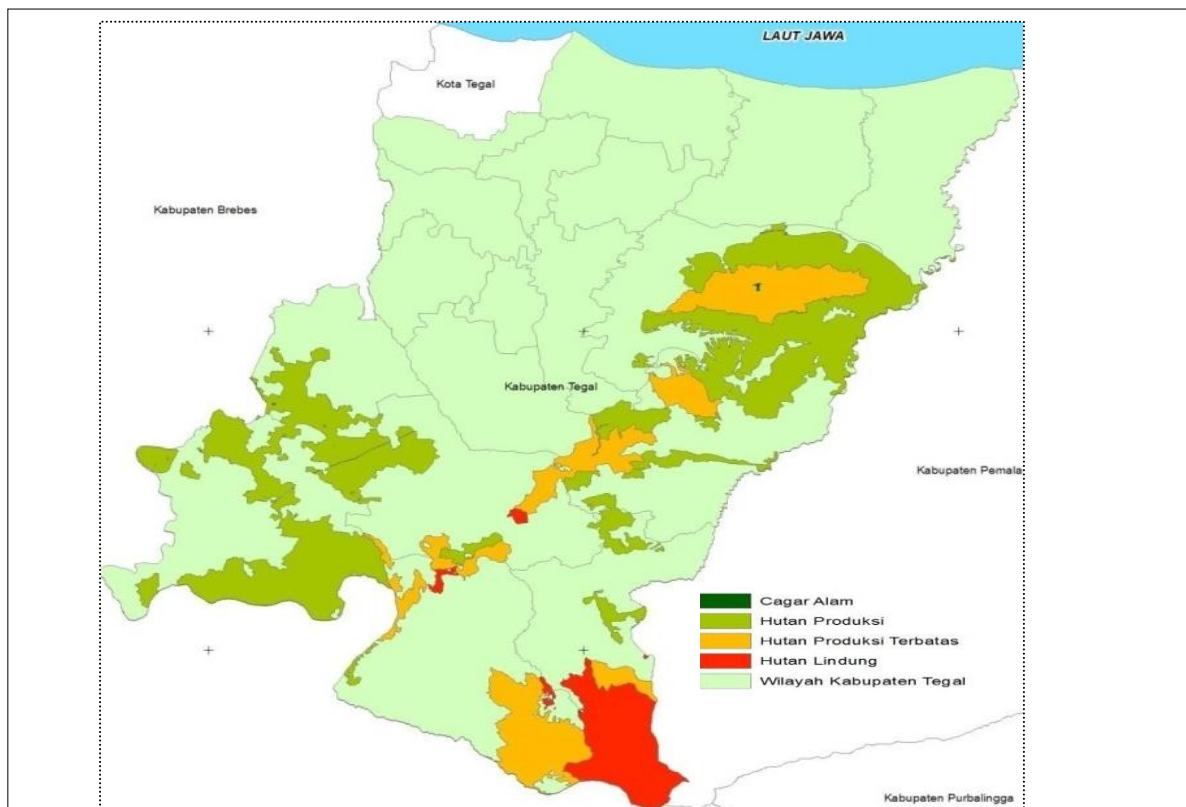
Sumber : Interpretasi Citra Resolusi Tinggi, Tahun 2017

H. Sumber Daya Hutan

1) Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Luas kawasan Hutan di Kabupaten Tegal adalah 23.313 Ha atau setara dengan 27 % dari wilayah Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 6 Peta Sebaran Kawasan Hutan



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Tabel 2. 4 Status dan Fungsi Hutan

No	Status dan Fungsi hutan	Luas (Ha)	%
1	Areal Penggunaan Lain	74.686,25	73,01
2	Hutan Lindung	2.961,41	3,37
3	Hutan Poduksi Tebatas	6.672,40	7,58
4	Hutan Produksi	14.097,34	16,03
5	Cagar Alam	8,60	0,01
	Jumlah	98.426,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

2) Pengelolaan Hutan

Perum Perhutani Unit I yaitu KPH Pemalang, KPH Balapulang, dan KPH Pekalongan Barat yang sebagian besar kawasan-nya berada di kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT). Bentuk pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK – HT) dengan komoditas tanamannya jati dan pinus. Selain itu Kabupaten Tegal juga memiliki kawasan Cagar Alam Guci yang saat ini telah berubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam (TWA) dan merupakan salah satu objek wisata.

Tabel 2. 5 Pengelolaan Hutan

No	KPH	Luas Berdasarkan Fungsi (Ha)				Jumlah
		HL	HPT	HP	CA/TW A/SM	
A	KPH BALAPULANG					
	BH Linggapada	-	399,4	2.732,5	-	3.131,9
	BH Margasari	-	-	3.737,6		3.737,6
B	KPH PEMALANG					
	BH Jatinegara	-	2.649,9	5.844,4	6,6	8.500,9
C	KPH PEKALONGAN BARAT					
	BH Bumijawa	2.961,4	3.623,1	1.782,9	2,0	8.369,4
	Jumlah	2.961,4	6.672,4	14.097,3	8,6	23.739,8

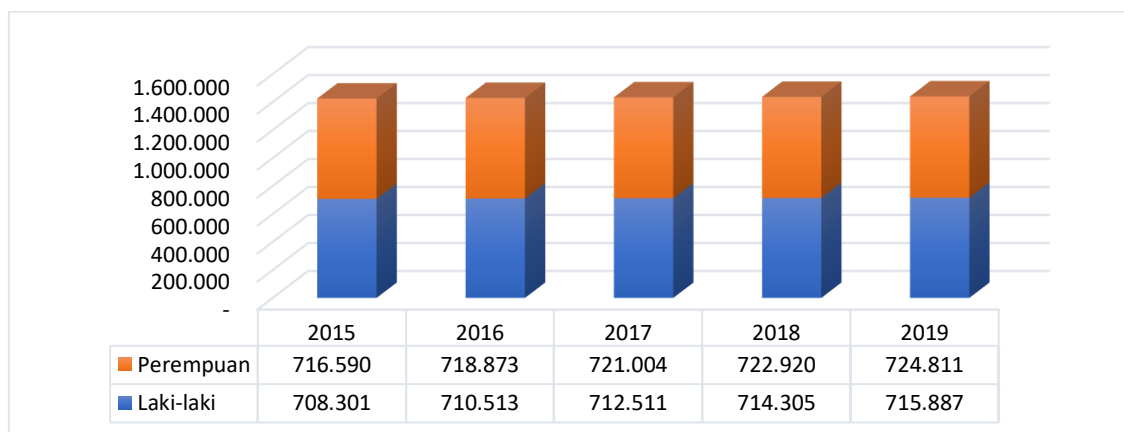
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

I. Kondisi Demografi

1) Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Gambar 2. 7. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2019

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 adalah 1.440.698 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 715.887 jiwa dan perempuan 724.811 jiwa. Sex ratio Kabupaten Tegal adalah 98,77 yang berarti bahwa 100 jumlah penduduk wanita terdapat 99 jumlah penduduk laki-laki. Dengan dependency ratio Kabupaten Tegal adalah 50,69 % dimana setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 51 penduduk usia non- produktif. Angka dependency ratio tersebut menandakan bahwa tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Tegal masih tinggi.

Tabel 2. 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio

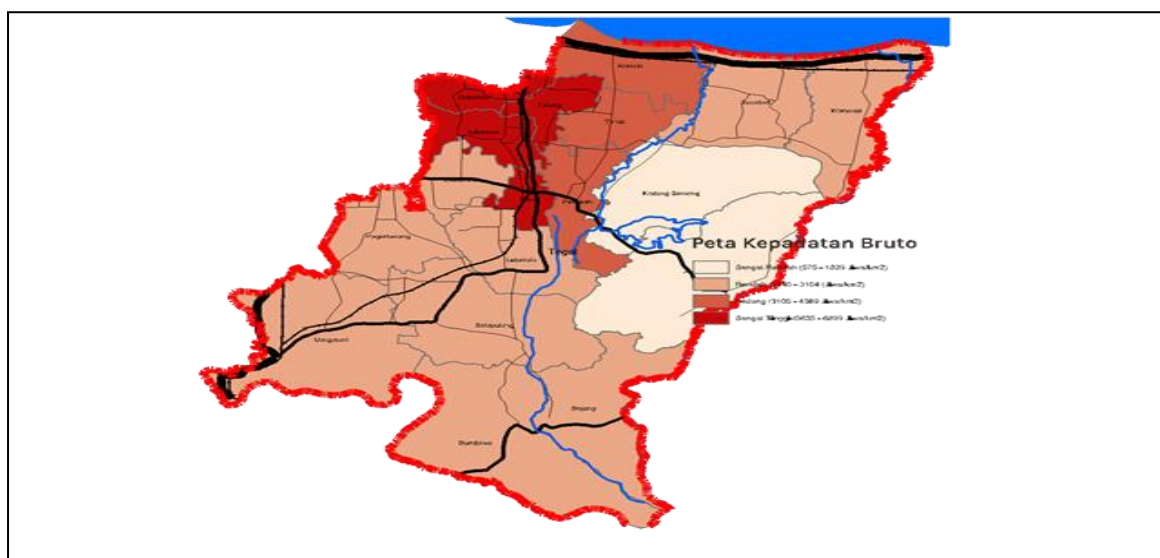
Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
Margasari	49.782	50.348	100.130	98,88
Bumijawa	43.726	42.815	86.541	102,13
Bojong	32.041	32.104	64.145	99,80
Balapulang	42.295	42.645	84.940	99,18
Pagerbarang	26.927	28.308	55.235	95,12
Lebaksiu	43.118	44.582	87.700	96,72
Jatinegara	25.819	26.184	52.003	98,61
Kedungbanteng	18.224	19.627	37.851	92,85
Pangkah	52.203	52.350	104.553	99,72
Slawi	33.976	36.015	69.991	94,34
Dukuhwaru	29.426	30.664	60.090	95,96
Adiwerna	61.603	60.794	122.397	101,33
Dukuhturi	45.609	45.078	90.687	101,18
Talang	48.047	47.626	95.673	100,88
Tarub	38.834	39.683	78.517	97,86
Kramat	52.768	53.791	106.559	98,10
Suradadi	42.379	42.329	84.708	100,12
Warureja	29.109	29.868	58.977	97,46
Tahun 2019	715.887	724.811	1.440.698	98,77
Tahun 2018	714.305	722.920	1.437.225	98,81
Tahun 2017	712.511	721.004	1.433.515	98,82

Sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

2) Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.609 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Slawi dan Dukuhwaru. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedung Banteng sebesar 462 jiwa/km² karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Adanya perbedaan kepadatan tiap kecamatan tentu berpengaruh terhadap pembangunan wilayah seperti infrastruktur tiap kecamatan.

Gambar 2. 8. Peta Sebaran Kepadatan Penduduk



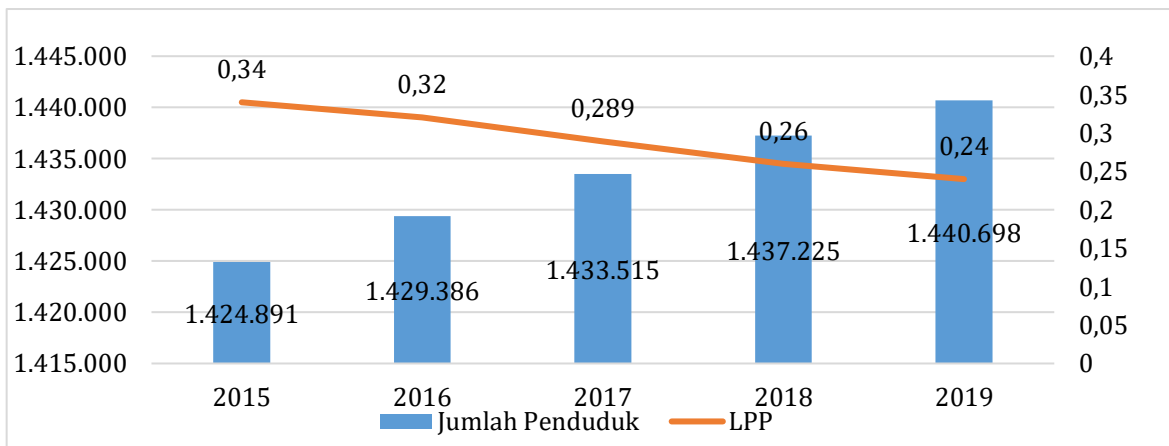
Sumber : *Selayang Pandang Kabupaten Tegal, Tahun 2019*

Dengan perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan tingkat pelayanan di setiap kecamatan. Oleh karena itu untuk kecamatan dengan kepadatan terendah perlu diperhatikan lagi agar tidak ada kesenjangan dalam pembangunan nantinya. Untuk melihat kepadatan penduduk secara riil terkategori kepadatan tinggi 139 jiwa/Ha (13.580 jiwa/km²).

3) Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Tegal dari beberapa tahun yang lalu. Pertumbuhan penduduk dapat berupa peningkatan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk positif) atau juga penurunan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk negatif). Laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tegal beberapa tahun yang akan datang. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga memengaruhi berbagai potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Tegal baik berupa ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya tenaga kerja, sarana dan prasarana, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Berikut adalah grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal dari tahun 2015-2019.

Gambar 2. 9. Pertumbuhan Penduduk 5 Tahun Terakhir (2015-2019)



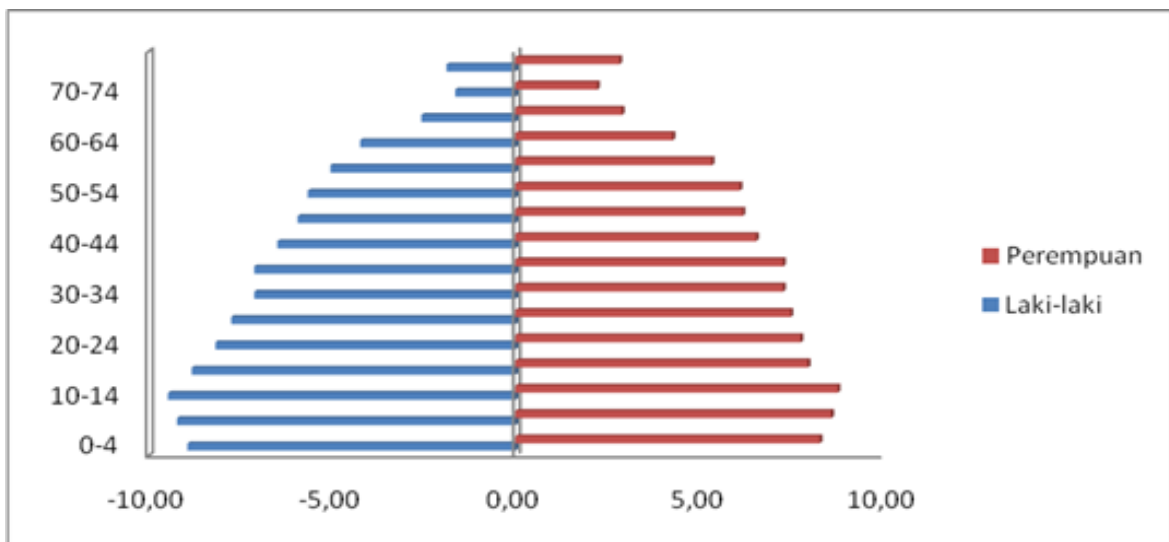
Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2019

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal cenderung linear dan meningkat dari tahun ke tahun (Proyeksi pertumbuhan penduduk, lihat garis biru putus - putus). Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Tegal selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal cenderung menurun. Artinya, penambahan marginal jumlah penduduk dari tahun ketahun cenderung menurun. Selain itu, apabila dibandingkan dengan LPP nasional dan LPP Provinsi Jawa Tengah, LPP Kabupaten Tegal cenderung lebih rendah.

4) Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 adalah 1.440.698 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 715.887 jiwa dan perempuan 724.811 jiwa sehingga sex ratio mencapai 98,77. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin tahun 2015-2019 tersebut dapat dilihat pada Tabel.

Gambar 2. 10 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2019

Berdasarkan grafik piramida penduduk Kabupaten Tegal diketahui bahwa komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif usia 15-59 tahun. Piramida tersebut merupakan piramida penduduk muda (*expansive*) yang menggambarkan

tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten Tegal mengalami *bonus demografi*. Namun pada penduduk usia 10-29 mengalami penurunan, dimana penurunan tersebut mengindikasikan bahwa adanya migrasi keluar Kabupaten Tegal. Jumlah kelahiran (*fertilitas*) di tahun tertentu akan berpengaruh pada demografi Kabupaten Tegal, sehingga penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal semakin banyak. Akan tetapi penambahan usia produktif harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar seimbang. Namun Angka kematian kasar di Kabupaten Tegal rata-rata dibawah angka 1 berarti kematian yang terjadi masih terbilang sedikit. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada piramida penduduk Kabupaten Tegal

Piramida penduduk Kabupaten Tegal adalah bentuk piramida yang termasuk ke dalam piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Piramida ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuk piramida secara keseluruhan yang menyerupai kerucut
- b. Jumlah penduduk usia muda relatif banyak dan penduduk usia tua jauh lebih sedikit ;
- c. Menunjukkan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka kematian (khususnya untuk penduduk berusia 0-4 tahun dan penduduk usia tua);
- d. Piramida penduduk jenis ini umumnya merupakan piramida penduduk di daerah-daerah berkembang.

Piramida penduduk tersebut dengan jelas menggambarkan proporsi jumlah penduduk usia muda dan usia produktif di Kabupaten Tegal jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Proporsi penduduk ini juga memengaruhi angka rasio ketergantungan yang ada di Kabupaten Tegal, dimana penduduk usia tua yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif sangat sedikit, tetapi penduduk usia produktif harus menanggung penduduk usia muda yang cukup banyak.

5) Penduduk Menurut Kelompok Umur

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 956.072 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 484.626.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 50,69 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 51 penduduk tidak produktif, sebagaimana tersaji pada tabel.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Usia	2015	2016	2017	2018	2019
0 – 4	124.234	127.359	125.515	123.783	122.171
5 – 9	125.050	130.038	129.132	128.043	126.880
10 – 14	129.197	132.020	131.447	131.111	130.677
15 – 19	102.001	122.982	121.999	120.599	119.260
20 – 24	86.494	112.441	113.627	114.588	115.193
25 – 29	117.547	107.145	108.147	109.527	111.032
30 – 34	118.285	106.826	105.112	103.541	102.491
35 – 39	107.324	105.616	104.683	103.564	102.348
40 – 44	105.301	93.835	93.783	93.757	93.559
45 – 49	92.621	87.240	87.274	87.140	86.919
50 – 54	82.794	82.826	83.794	84.609	85.240
55 – 59	70.648	70.870	72.930	74.713	76.313
60 – 64	46.182	55.728	58.461	61.180	63.717
65 +	117.202	94.460	97.611	101.070	104.898
Jumlah	1.424.891	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.698

Sumber : *Selayang Pandang Kabupaten Tegal, Tahun 2020*

J. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, dengan mensinkronkan dengan arah kebijakan pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

1) Arah Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang saling terintegrasi, Lestari dan berwawasan lingkungan. Memperhatikan kondisi geografis wilayah dan kawasan strategis di regional maupun di dalam wilayah Kabupaten Tegal. Kabupaten secara regional telah ditetapkan bagian dari kawasan strategis provinsi Bregasmalang yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang, dimana kawasan ini dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah;

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten serta industri menengah dan besar di bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten;
- b. pengembangan kawasan agropolitan di bagian selatan wilayah Kabupaten;
- c. pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat;
- d. pengembangan kawasan minapolitan di bagian utara wilayah Kabupaten;
- e. pengembangan sistem pelayanan perkotaan didukung infrastruktur wilayah yang terpadu;
- f. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri dan sentra produksi pertanian;

- g. pemantapan pelestarian kawasan lindung;
- h. pengembangan kawasan pariwisata; dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

2) Pengembangan Struktur Ruang

Berdasarkan rencana pengembangan struktur ruang, secara hirarki sistem perkotaan Kabupaten Tegal telah ditetapkan menjadi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kecamatan Slawi dan Adiwerna, dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu seluruh Ibukota Kecamatan dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat pusat kegiatan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan jaringan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA). sistem jaringan prasarana lainnya (SPAM, SPAL, Persampahan).

Strategi pengembangan struktur ruang ini dilakukan melalui Pengembangan sistem perkotaan yang terpadu dan saling bersinergi antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan melalui:

- menyusun dan menetapkan rencana rinci pengembangan sistem pelayanan perkotaan;
- a. mengoptimalkan fungsi PKL, dan PPK dalam penyediaan ruang bagi sektor informal dan RTH;
 - b. mengembangkan kawasan permukiman dengan menyediakan prasarana dasar dan penyediaan RTH serta pengembangan komunitas dalam permukiman;
 - c. merevitalisasi perdagangan dan jasa dengan penyediaan pasar tradisional bersih yang menampung komoditas lokal; dan
 - d. menetapkan lingkungan siap bangun guna penyediaan perumahan yang tersebar di PKL, dan PPK
 - e. Menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan
 - f. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang menghubungkan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan

Sedangkan strategi Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri dan sentra produksi pertanian, dilakukan melalui:

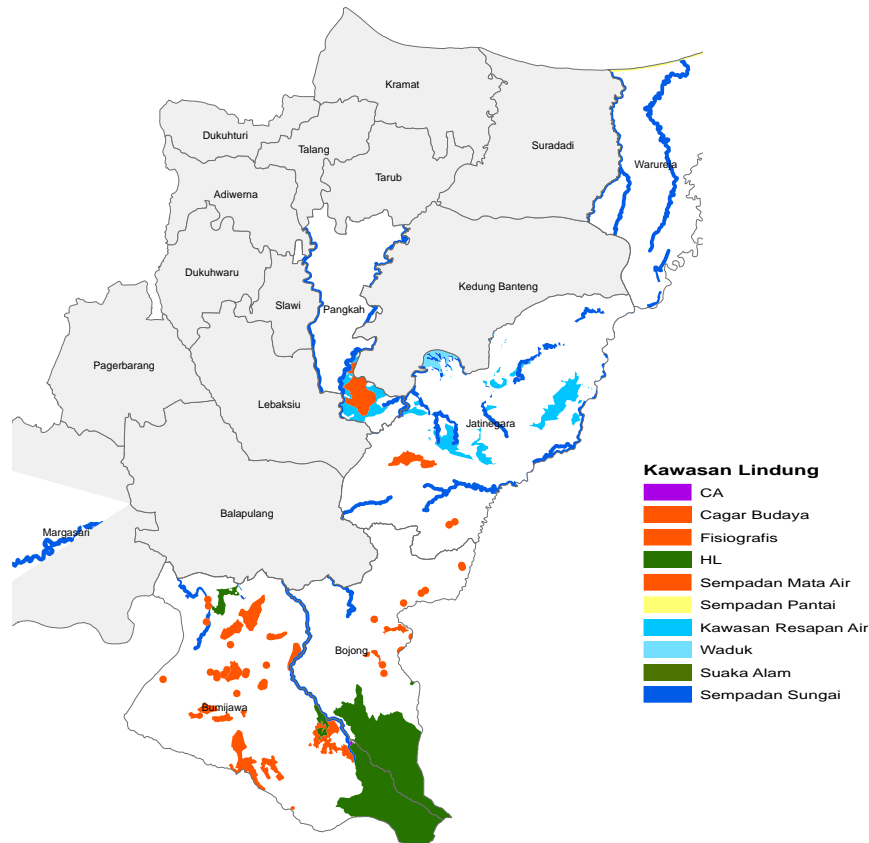
- a. mengembangkan prasarana pengairan dan pendukungnya;
- b. mengembangkan kembali embung-embung/ waduk lapangan;
- c. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi industri, pertanian dan pariwisata;
- d. mengembangkan prasarana telematika, yang lebih luas jangkauan pelayanannya hingga menjangkau daerah terisolir;
- e. menyediakan prasarana energi pada wilayah pelosok dengan pengembangan mikrohidro; dan
- f. mengembangkan prasarana lingkungan dengan mendukung Sistem Penyediaan Air Minum regional dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional.

3) Pengembangan Kawasan Lindung

Kawasan lindung memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe

ekosistem, dan keunikan alam serta sumber daya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Di kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari: Kawasan hutan lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan mata air).

Gambar 2. 11. Peta Pengembangan Kawasan Lindung



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Fokus pengembangan kawasan lindung adalah Pemantapan pelestarian kawasan lindung dengan strategi meliputi:

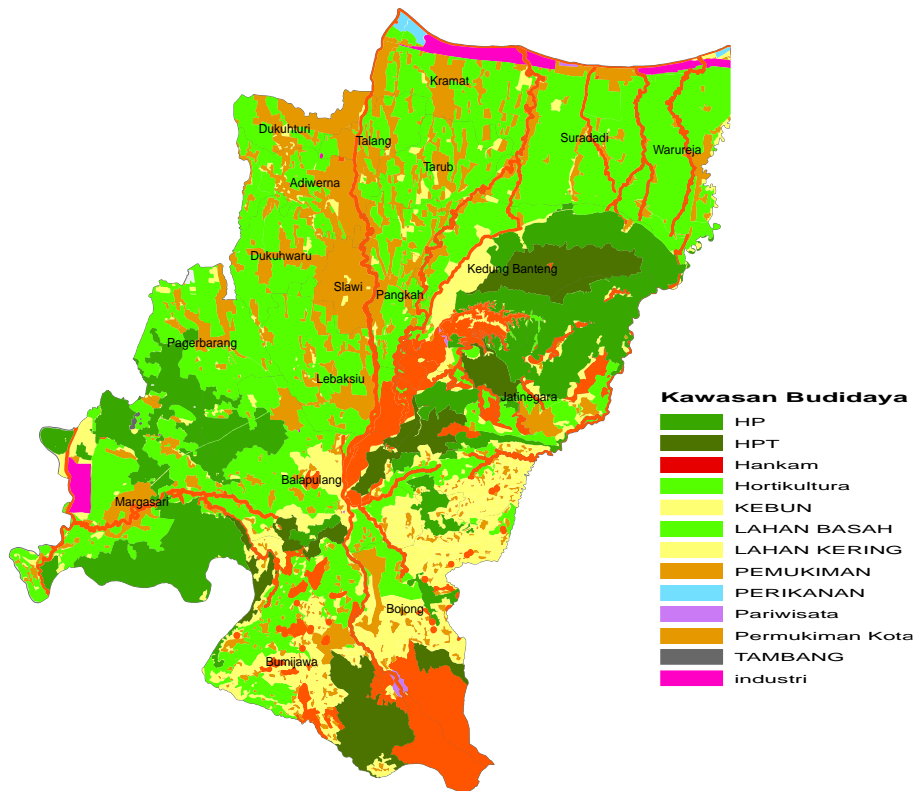
- a. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya
- b. mempertahankan fungsi lindung secara ketat dan melarang alih fungsi pada kawasan lindung;
- c. mengembangkan prasarana dan sarana peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;
- d. mencegah kegiatan penambangan liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan; dan
- e. mengembalikan rona alam melalui proses reklamasi pada lahan paska penambangan.

4) Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik

bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Oleh karena itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai. Meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan lainnya.

Gambar 2. 12. Peta Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Untuk mendukung kebijakan kedaulatan pangan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 telah ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 41.296 Ha (47% dari luas wilayah Kabupaten Tegal). Dalam Perda RTRW pengembangan wilayah untuk permukiman penduduk sampai dengan Tahun 2032 dialokasikan 15.951 Ha, sedangkan kondisi eksisting permukiman saat ini adalah 14.093 Ha. Alokasi pengembangan permukiman saat ini hanya terkonsentrasi di perkotaan, sedangkan di perdesaan pengembangannya belum optimal.

Alokasi pengembangan wilayah untuk industri berada di wilayah pantura dan margaayu seluas 1.214 Ha, Namun kondisi eksisting lahan yang dialokasikan untuk industri khususnya di Pantura merupakan permukiman dan lahan tambak masyarakat, sehingga apabila masyarakat ingin melakukan investasi di bidang industri dapat dilakukan di lokasi tersebut.

Tabel 2. 8. Kawasan Budidaya dan Lindung

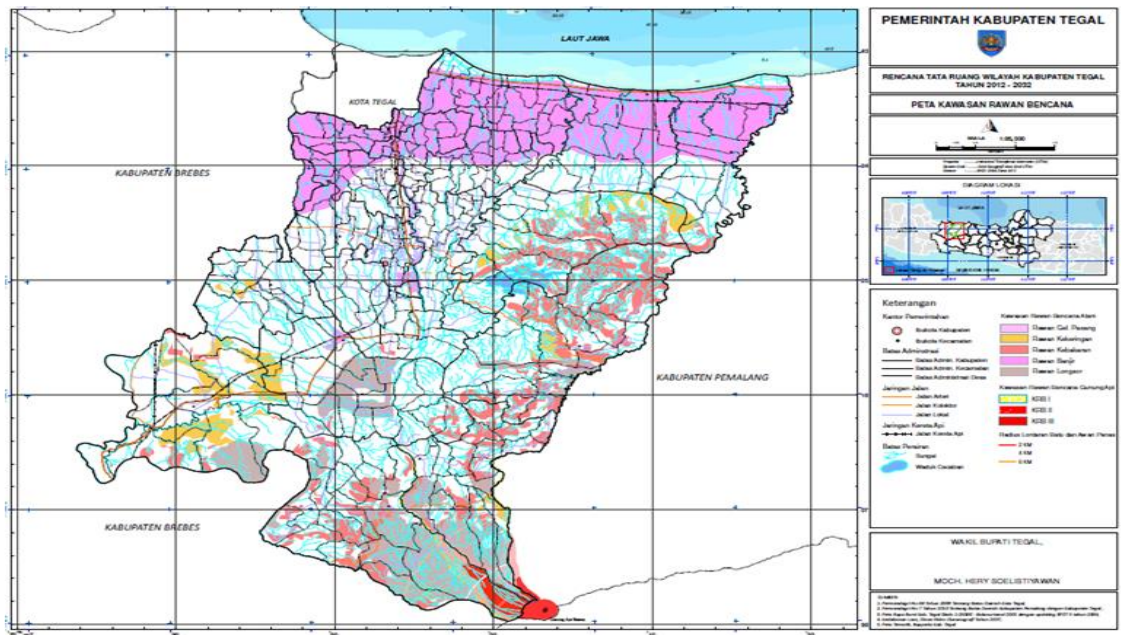
KAWASAN	LUAS (Ha)	KAWASAN	LUAS (Ha)
A. KAWASAN BUDIDAYA	86.200	B. KAWASAN LINDUNG	12.226
Hankam	63	Cagar Alam	10
Hortikultura	786	Cagar Budaya	11
Hutan Produksi	14.770	Fisiografis	1.588
Hutan Produksi Terbatas	6.520	Hutan Lindung	2.753
Industry	1.214	Kawasan Resapan Air	1.571
Kebun	3.966	Sempadan Mata Air	315
Lahan Sawah Basah	35.946	Sempadan Pantai	234
Lahan Sawah Kering	6.629	Sempadan Sungai	5.206
Pariwisata	87	Suaka Alam	13
Permukiman Desa	7.275	Waduk	524
Perikanan	237		
Permukiman Kota	8.676		
Pertambangan	33		

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

K. Wilayah Rawan Bencana

Apabila dilihat kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Slamet Tegal merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah (tanah longsor), Abrasi, Angin Topan dan dan Kebakaran Hutan.

Gambar 2. 13. Peta Kawasan Rawan Bencana Alam



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Daerah Rawan Longsor; Daerah yang sering terjadi longsor adalah wilayah bagian selatan yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Pangkah. Hal ini lebih disebabkan karena secara topografis daerah tersebut merupakan daerah perbukitan dan kaki Gunung Slamet, serta daerah tersebut memiliki curah hujan yang sangat tinggi, serta vegetasi tutupan lahan dan merupakan daerah patahan
- b. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu kawasan di sekitarpuncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupalelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gasvulkanik beracun, dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjirbandang, dan longsoran material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya di daerah Kaki Gunung Slamet meliputi Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa.
- c. Daerah Rawan Banjir; yaitu kawasan yang mengalami genanganakibat curah hujan tinggi, luapan air sungai, serta tidak adanya/tidak berfungsinya drainase utama di wilayah permukiman khususnya di wilayah perkotaan. Daerah yang rawan banjir adalah yang dilalui oleh Sungai Jembangan meliputi : Kecamatan Slawi. Adiwerna, Talang dan Dukuh Turi, serta wilayah permukiman yang dilalui oleh Sungai Cacaban khusunya di wilayah Pantura yaitu Kecamatan Suradadi dan Kramat.
- d. Daerah Rawan Abrasi; Kabupaten memiliki wilayah Pantai Utara sepanjang sekitar 37 Km, beberapa tempat khususnya daerah – daerah yang berdekatan dengan muara sungai menjadi salah satu penyebab abrasi pantai. Wilayah yang sering terjadi abrasi meliputi Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat, Desa Maribaya Kecamatan Kramat, Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja, Desa Demangharja Kecamatan Suradadi, Desa Suradadi Kecamatan Suradadi, Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi, Purwahamba Kecamatan Suradadi;

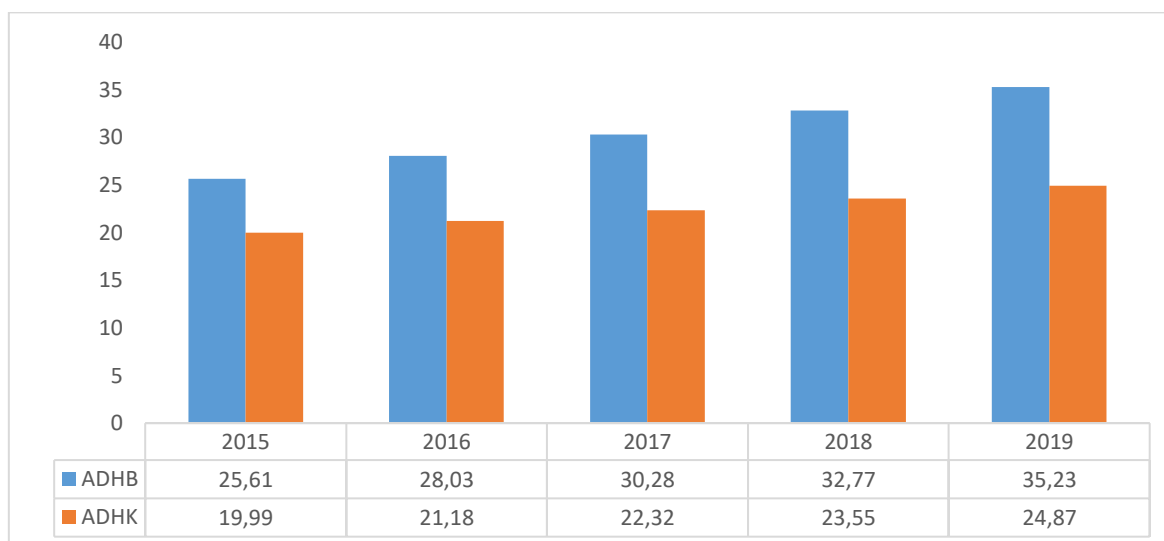
- e. Daerah Rawan Angin Topan; dimana angin dengan kecepatan dan dayarusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi diKecamatan Balapulang, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Margasari, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa.
- f. Daerah Rawan Kekeringan; yaitu kawasan dengan ketersediaan airrendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat,khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahaniklim dan pemanasan global yang mengancam yaitu khususnya pada daerah yang bukan merupakan Cekungan Air Tanah (CAT), meliputiKecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Warureja.
- g. Daerah Rawan Gelombang Pasang; Untuk rawan gelombang pasang didasarkan pada jarak dengan pantai, karakteristik lahan (morfologi dan ketinggian wilayah) serta ada tidaknya penghalang baik alam maupun buatan, meliputi: Kecamatan Kramat (Desa Kramat dan Desa Maribaya), Kecamatan Suradadi (Desa Bojongsana, Desa Purwahamba, dan Desa Suradadi) dan Kecamatan Warureja (Desa Demangharja).
- h. Daerah Rawan Kebakaran Lahan adalah daerah yang merupakan kawasan hutan khususnya yang komoditas tanamannya tanaman jati yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Margasari, Jatinegara, Kedungbanteng dan Sebagian Warureja.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal tahun 2019 mencapai 5,58 %, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,51 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 10,70%. Sedangkan seluruh kategori dicapai oleh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif.

Gambar 2. 14. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2015-2019 (Rp. Triliun)



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2018.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, diantaranya kategori Jasa Perusahaan mencatat sebesar 8,44%, kategori penyediaan Akomodasi dan makanan Minum sebesar 8,68%, kategori Real Estat 4,99%, kategori Industri Pengolahan sebesar 6,44%, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 10,70%, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,13%, kategori jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,90%, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,74%, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,55%, kategori Konstruksi sebesar 5,21 % kategori, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,81 %, kategori Jasa Lainnya 8,92 %, kategori Pertanian, kategori Kehutan, dan Perikanan sebesar -0,09 %, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,61 %, kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 3,40 %, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,74%.

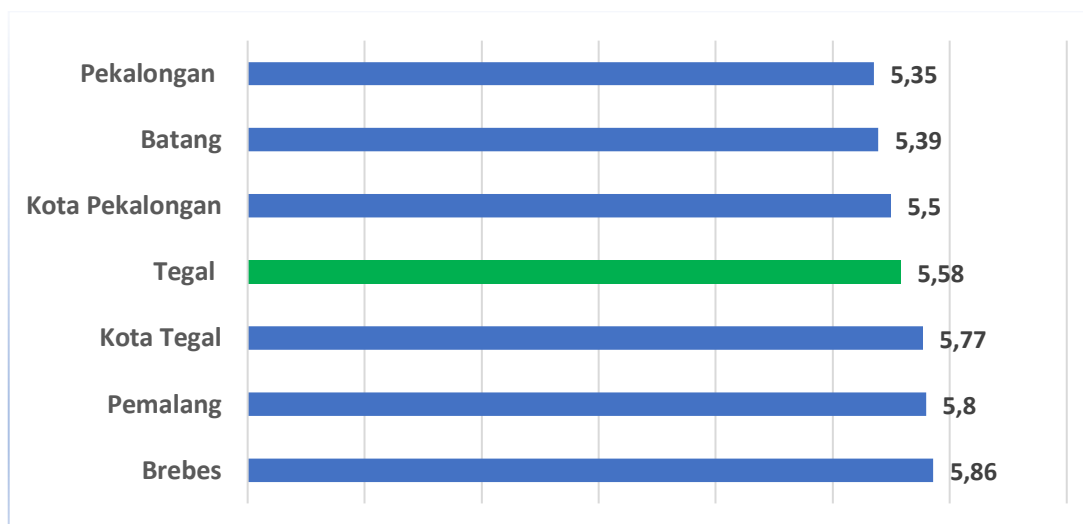
**Tabel 2. 9 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2015-2019**

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018	2019
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,81	3,06	1.35	1.44	-0,69
B Pertambangan dan Penggalian	2,10	6,75	6.50	5.19	3,55
C Industri Pengolahan	6,80	7,27	6.95	6.66	6,44
D Pengadaan Listrik dan Gas	3,73	1,65	5.65	4.78	5,74
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	2.35	4.09	4.30	5,74
F Konstruksi	5,54	5.35	7.22	5.85	3,40
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,12	5.19	3.80	4.43	5,21
H Transportasi dan Pergudangan	8,69	6.85	6.09	6.50	6,81
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	6.10	6.33	6.74	7,13
J Informasi dan Komunikasi	9,00	7.60	7.50	9.51	8,68
K Jasa Keuangan dan Asuransi/	7,05	6.86	5.09	4.24	10,70
L Real Estat	7,30	7.83	4.50	4.07	3,90
M Jasa Perusahaan	9,23	8.43	6.50	6.14	4,99
N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,10	2.96	3.25	3.46	8,44
O Jasa Pendidikan	6,92	7.08	6.57	8.40	3,61
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,98	6.93	6.10	8.78	6,02
Q Jasa lainnya	3,13	4.37	5.43	7.70	6,74
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	5,49	5,92	5,38	5,51	5,58

Sumber : BPS Kab. Tegal Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah 5,58 % menduduki peringkat keenam dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (5,35%) sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kota Tegal (5,86%).

Gambar 2. 15. Pertumbuhan ekonomi Se Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2019

B. PDRB

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2019 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 35.231.687,56 juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2019 mencapai Rp 24.866.727,91 juta. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar matapencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya klaster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthor, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat danteh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsuhnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat

industri adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil –hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor *tersier* untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Hal tersebut dibuktikan pada saat kondisi makro ekonomi Indonesia yang bergejolak pada tahun 2015 tidak terlalu mempengaruhi kondisi makro ekonomi Kabupaten Tegal. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkuat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun.

Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi

besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.879.322,43	15,15	4.097.190,91	14,62	4.191.174,92	13,79	4.395.637,80	13,29	4.495.443,15	12,76
B	Pertambangan dan Penggalian	1.138.617,76	4,45	1.253.014,46	4,47	1.367.812,76	4,50	1.501.669,83	4,54	1.521.873,96	4,32
C	Industri Pengolahan	8.516.055,92	33,25	9.604.453,44	34,27	10.607.567,68	34,91	11.694.230,31	35,35	12.189.624,62	34,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16.016,37	0,06	17.334,93	0,06	19.374,69	0,06	21.020,22	0,06	22.354,71	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.922,55	0,39	10.237,01	0,37	10.787,76	0,36	11.320,91	0,03	11.780,69	0,03
F	Konstruksi	1.935.916,03	7,74	2.071.862,50	7,56	2.272.526,44	7,48	2.514.327,11	7,60	2.740.426,54	7,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.999.444,07	15,62	4.276.012,13	15,26	4.592.693,59	15,12	4.942.943,53	14,94	5.449.555,30	15,47
H	Transportasi dan Pergudangan	678.087,35	2,65	735.051,72	2,62	819.818,16	2,70	899.883,09	2,72	993.903,23	2,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.069.660,33	4,18	1.196.647,19	4,27	1.300.911,86	4,28	1.402.152,54	4,24	1.567.013,84	4,45
J	Informasi dan Komunikasi	645.062,14	2,52	708.874,41	2,53	7991.444,75	2,60	863.787,54	2,61	1.046.918,11	2,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	590.903,79	2,30	643.374,04	2,30	696.744,87	2,29	751.377,45	2,27	793.394,40	2,25
L	Real Estat	409.786,78	1,60	452.379,95	1,61	485.883,21	1,60	535.851,35	1,62	562.973,80	1,60
M	Jasa Perusahaan	103.454,47	0,40	114.790,86	0,41	126.292,27	0,42	141.499,73	0,43	153.322,63	0,44
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	583.200,27	2,28	675.999,28	2,21	664.248,22	2,19	695.063,70	2,10	731.135,80	2,08
O	Jasa Pendidikan	1.288.282,96	5,03	1.424.096,19	5,08	1.575.268,51	5,18	1.766.445,24	5,34	1.888.350,37	5,36
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	198.743,34	0,78	215.363,43	0,77	233.313,25	0,77	256.424,33	0,78	282.368,04	0,80
Q	Jasa lainnya	546.165,87	2,13	586.514,11	2,09	629.951,34	2,07	685.599,42	2,07	781.248,37	2,22
	Total	25.608.642,44	100	28.025.643,38	100	30.383.814,24	100	33.079.234,10	100	35.231.687,56	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Tabel 2. 11 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 - 2019 atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

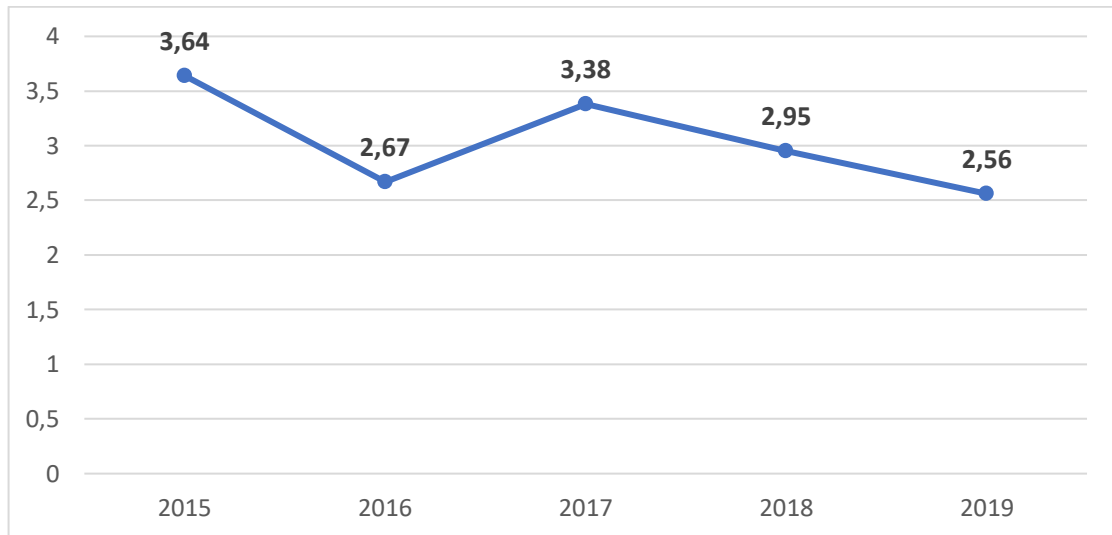
No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.832.654	2,81	2.919,344	3,06	2.958.745,2	1,35	3.001.385,12	12,74	3.011.429,74	-0,69
B	Pertambangan dan Penggalian	794.797,71	2,10	848.474,09	6,75	903.624,91	6,50	950.494,40	4,04	984.192,72	3,55
C	Industri Pengolahan	6.322.825,6	6,80	6.782.532,8	7,27	7.245.198,2	6,95	7.737.577,82	32,85	7.935.855,49	6,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.423,63	3,73	15.677,59	1,65	16.562,92	5,65	17.354,26	0,07	18.350,99	5,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.294,84	0,30	9.513,22	2,35	9.902,65	4,09	10.328,77	0,04	10.679,68	3,40
F	Konstruksi	1.564.698,24	5,54	1.648.467,47	5,35	1.767.539,31	7,22	1.871.005,74	7,94	1.980.596,87	5,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.468.214,13	4,12	3.648.221,49	5,19	3.786.804,37	3,80	3.954.562,55	16,79	4.307.730,96	6,81
H	Transportasi dan Pergudangan	599.869,73	8,69	640.964,42	6,85	679.998,81	6,09	724.207,50	3,07	776.580,01	7,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	907.506,46	7,18	962.864,89	6,10	1.023.815,80	6,33	1.092.854,31	4,64	1.214.937,64	8,68
J	Informasi dan Komunikasi	692.670,72	9,00	745.335,96	7,60	801.236,16	7,50	877.419,74	3,73	1.048.72,46	10,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	441.095,37	7,05	471.375,08	6,86	495.346,36	5,09	516.328,24	2,19	529.174,58	3,90
L	Real Estat	365.375,63	7,30	393.993,84	7,83	411.723,56	4,50	428.500,96	1,82	460.391,86	4,99
M	Jasa Perusahaan	83.967,53	9,23	91.048,23	8,43	96.966,36	6,50	102.918,94	0,44	111.605,92	8,44
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	437.110,91	5,10	450.068,43	2,96	464.695,65	3,25	480.794,36	2,04	492.986,72	3,61
O	Jasa Pendidikan	851.008,20	6,92	911.281,14	7,08	971.127,23	6,57	1.052.730,62	4,47	1.107.659,41	6,02
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.940,58	4,98	166.751,02	6,93	176.922,33	6,10	192.456,53	0,82	208.639,12	6,74
Q	Jasa lainnya	457.021,52	3,13	477.002,67	4,37	502.890,27	5,43	541.628,51	2,30	617.143,74	8,92
	Total	19.999.475,45	100	21.182.917,23	100	22.322.100,13	100	23.552.548,37	100	24.866.727,91	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

C. Laju Inflasi

Selama tahun 2019 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mencapai 2,51 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,95 persen. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan yang mengalami inflasi sebesar 5,56 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,93 persen. Berikutnya kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,25 persen dan memberikan andil inflasi 0,73 persen.

Gambar 2. 16. Perkembangan Inflasi

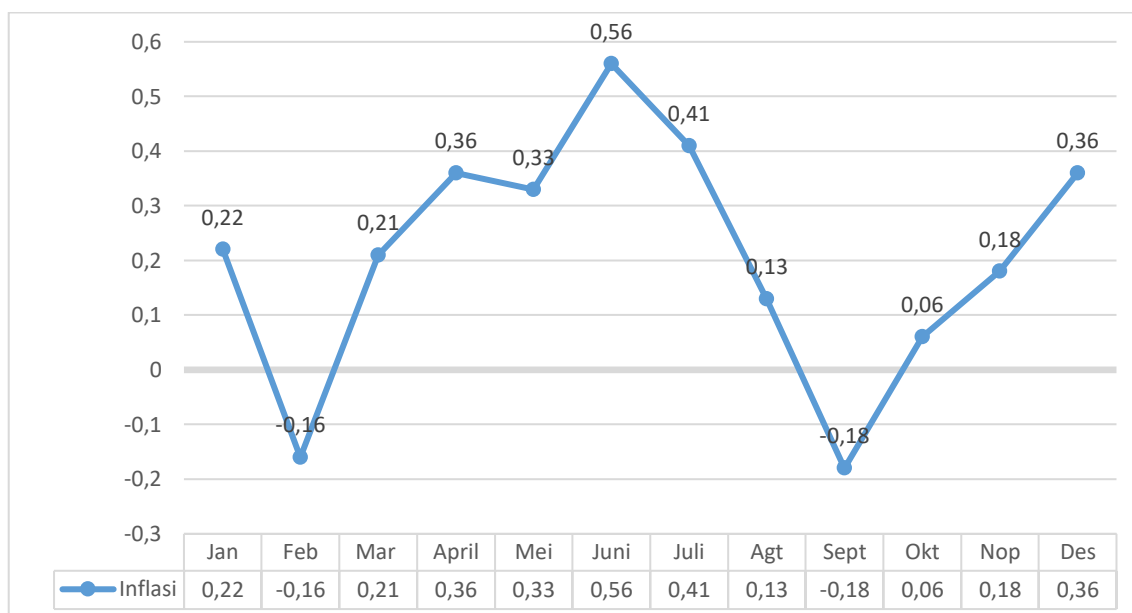


Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2019

Sedangkan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; yang pada tahun 2018 memberikan andil inflasi terbesar, selama tahun kalender 2019 mengalami inflasi sebesar 0,86 persen dan memberikan andil inflasi yang cukup besar, yakni 0,26 persen. Kelompok yang lain, yakni kelompok sandang memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen; kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,14 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 0,13 persen; dan terakhir kelompok kesehatan 0,12 persen.

Kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Bumbu-Bumbuan yang mengalami inflasi sebesar 42,88 persen; sub kelompok Sayur-sayuran sebesar 13,21 persen; dan sub kelompok Buah-buahan sebesar 7,84 persen. Sedangkan sub kelompok lainnya mengalami inflasi dibawah 5 persen, bahkan sub kelompok daging dan hasil-hasilnya mengalami deflasi sebesar 0,18 persen; yang utamanya disebabkan penurunan harga daging ayam ras. Secara keseluruhan, sub kelompok yang mengalami penurunan indeks cukup besar yakni sub kelompok Bahan Bakar, Penerangan dan Air; yang turun sebesar 0,34 persen; dimana hal tersebut utamanya dikarenakan penurunan harga bensin dan tarif listrik.

Gambar 2. 17. Pergerakan Inflasi Bulanan Januari 2019 – Desember 2019



Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2019

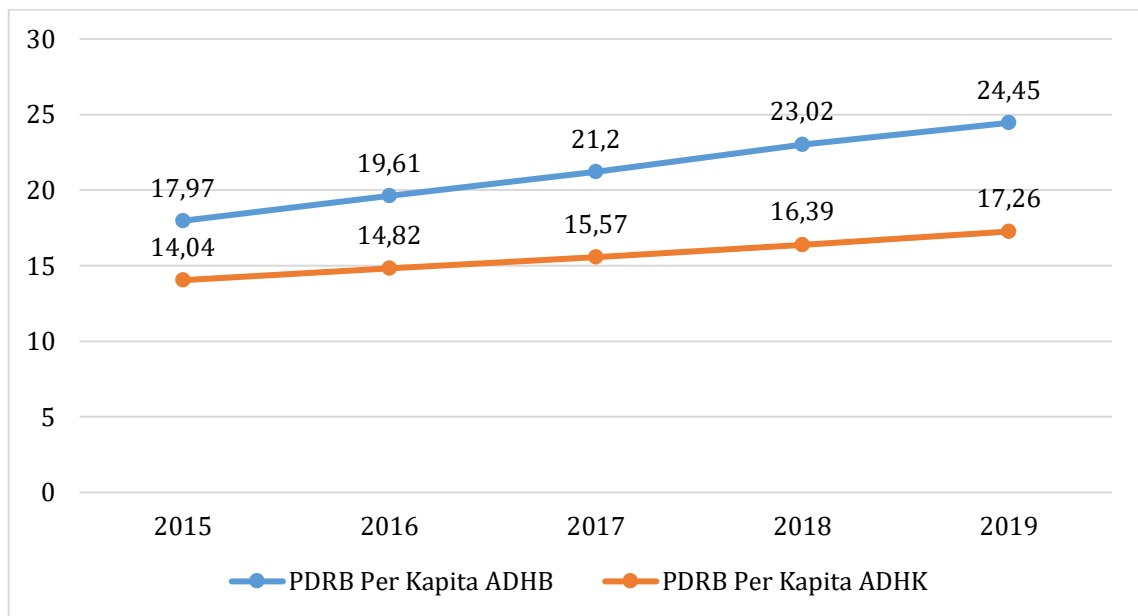
Kenaikan indeks (inflasi) paling tajam terjadi pada bulan Juni 2019 sebesar 0,56 persen; sedangkan penurunan indeks (deflasi) paling tajam terjadi pada bulan September sebesar 0,18 persen. Pada bulan-bulan musim panen padi pada setiap subround yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember fluktuasi harga cukup terkendali dan masih dalam rentang harga yang wajar.

D. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 17,97 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 24,45 juta rupiah (lihat tabel). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Gambar 2. 18. PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2015-2019

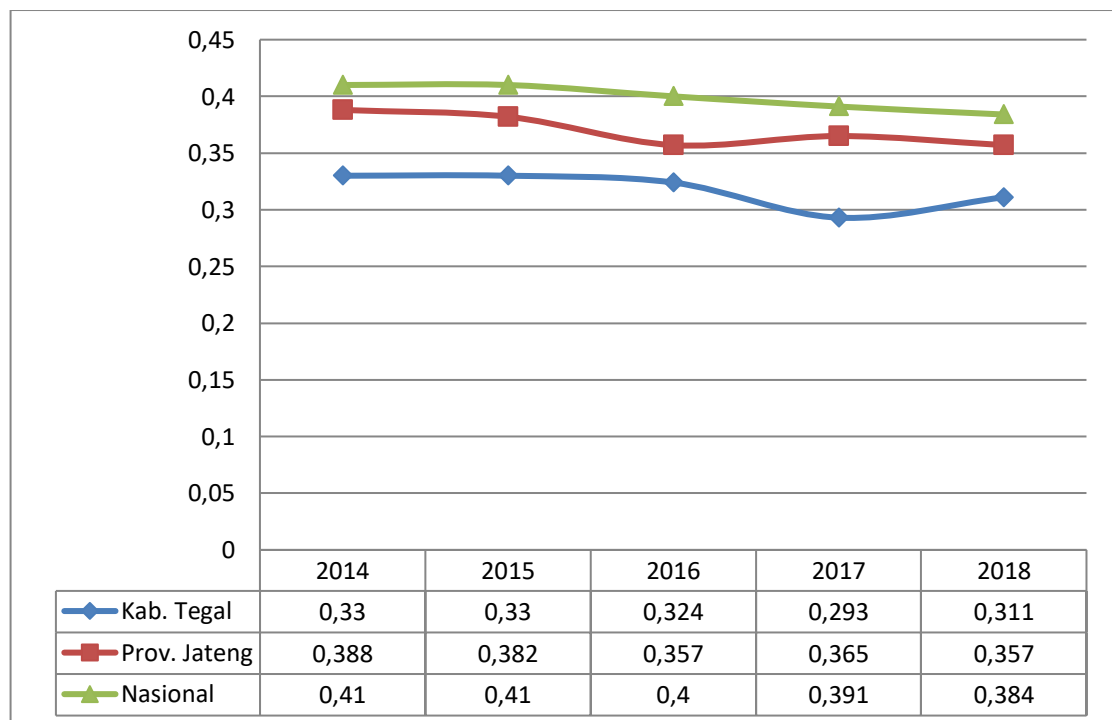


Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2019

E. Indeks GINI

Ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kab. Tegal menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2018 sebagaimana tersaji dalam gambar grafik indek gini.

Gambar 2. 19. Gini Ratio Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional



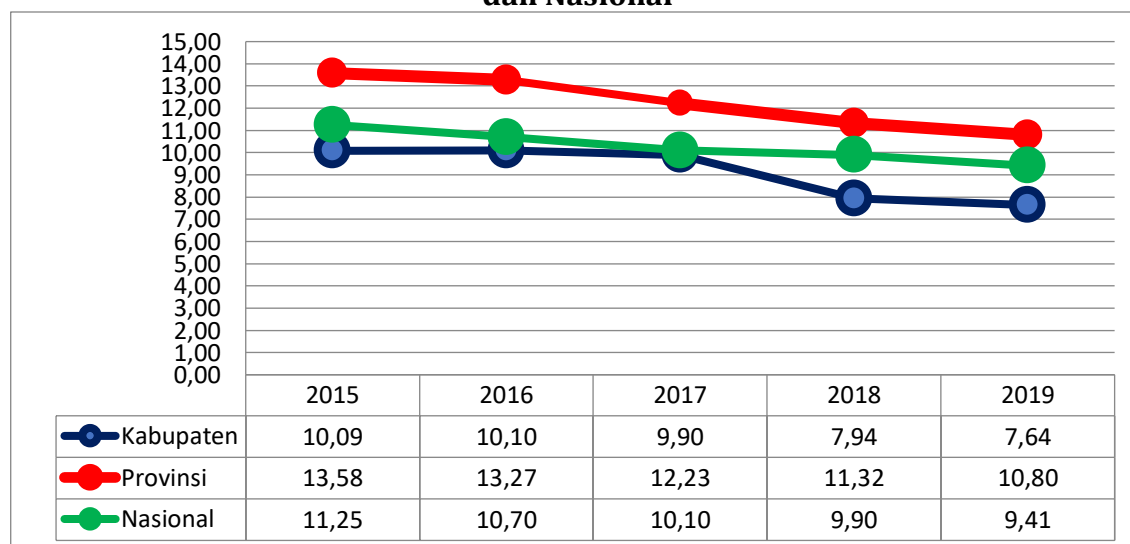
Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2019

Berdasarkan kriteria menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi, maka ditentukan bila $G < 0,35$ ketimpangan taraf rendah ; bila G antara $0,35 - 0,5$ ketimpangan taraf sedang ; dan bila $G > 0,5$ ketimpangan taraf tinggi. Untuk Kabupaten Tegal dibawah $0,35$ sehingga dikatakan ketimpangan taraf rendah, dan dibandingkan Gini Provinsi Jawa Tengah maupun Gini Nasional maka Gini Kabupaten Tegal masih dibawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Namun ketimpangan rendah belum bisa menampakan kondisi lebih baik, karena akan menjadi permasalahan berikutnya bila homogen kondisi sama-sama miskin atau kondisi sama-sama kaya belum bisa ditentukan.

F. Penduduk Miskin

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal terus mengalami penurunan. Penurunan cukup signifikan pada tahun 2019 dimana penduduk miskin tercatat sebanyak 109,94 ribu jiwa (berkurang 4,12 ribu jiwa) atau 7,64% terhadap total jumlah penduduk, jumlah ini turun sebesar 0,3% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018 mencapai 114,06 ribu jiwa atau 7,94 %. Penduduk miskin di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2015-2019 secara persentase selalu lebih rendah jika dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 20. Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2019

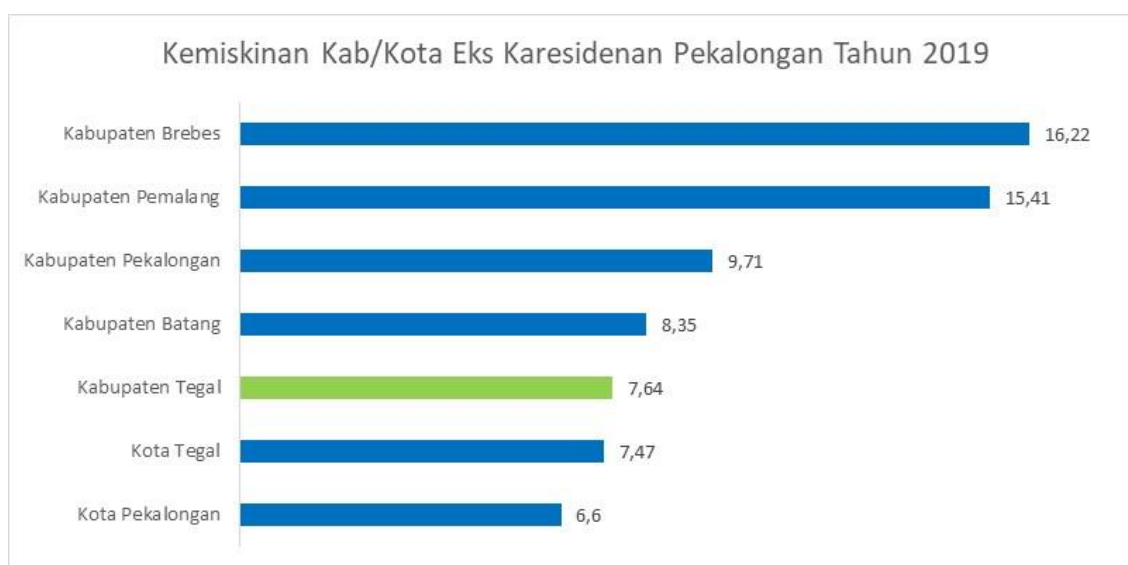
Penurunan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2019 menunjukkan keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada 4 (empat) tahun terakhir seperti Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang memfokuskan pada kegiatan jambanisasi dengan sasaran keluarga miskin; Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni masing-masing sasaran keluarga miskin mendapat bantuan @Rp. 20 juta rupiah; dan **Program Yuh Sekolah Maning**, yaitu memberikan fasilitas dan insentif bagi anak-anak putus sekolah dari keluarga miskin. Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2015-2019, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 12 Penduduk Miskin Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk Miskin	143.540	144.220	141.800	114.060	109.940
2.	Jumlah Penduduk	1.424.891	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.671
3.	Persentase (%)	10,09	10,10	9,9	7,94	7,64

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2019

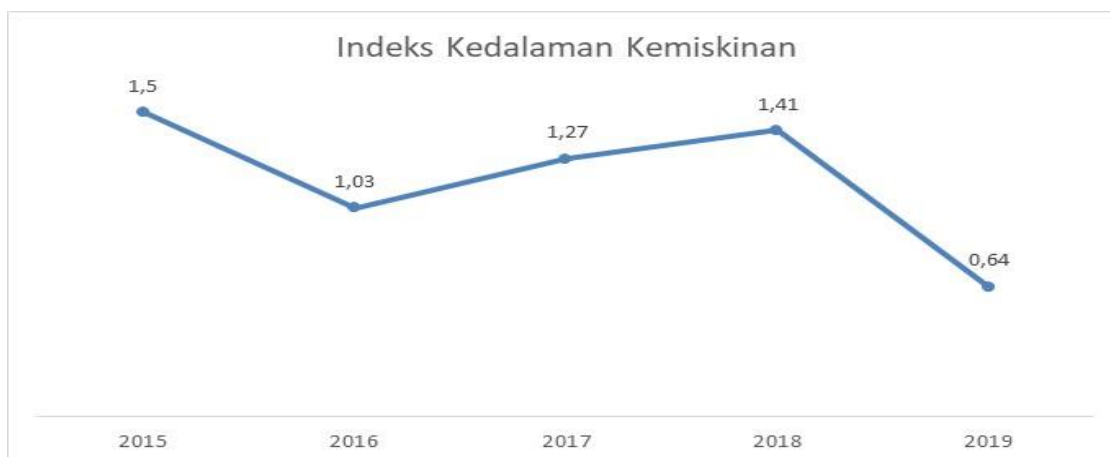
Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2019 merupakan yang terbaik jika disandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten di eks karesidenan Pekalongan. penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 21. Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan

Sumber: Bappeda dan Litbang, Tahun 2019

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah 7,64% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (6,60%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (16,22%). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tegal dari tahun 2015 – 2019 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung turun, pada tahun 2017 adalah 1,27, tahun 2018 naik menjadi 1,41 selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 0,64. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil. Ada kenaikan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.

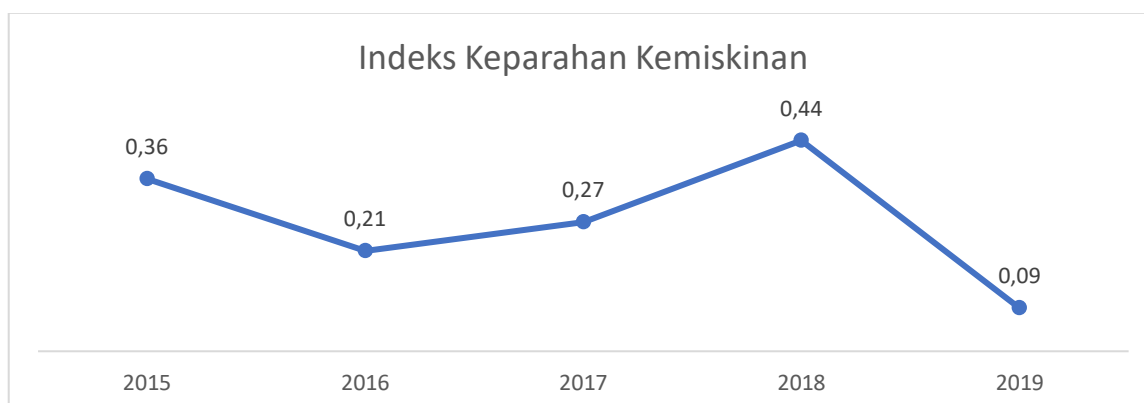
Gambar 2. 22. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2019

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, 2016). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 2. 23. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal

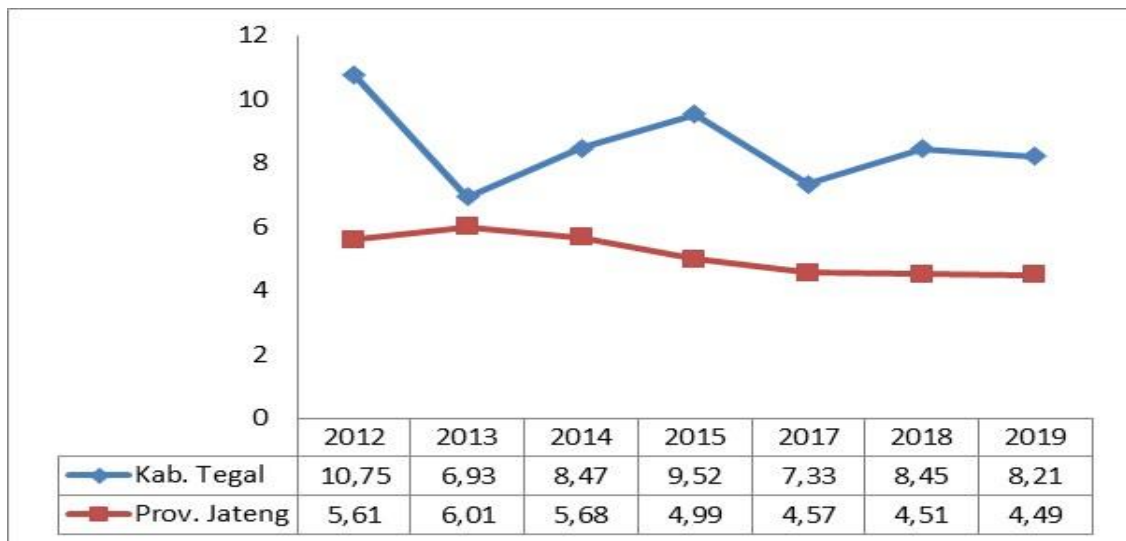
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaen Tegal dari tahun 2015 – 2019 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung turun. Dari angka Indeks Keparahan Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin rendah. Penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin homogen kasus/ karakter/keadaannya. Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

G. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Pada Tahun 2019 Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 57.742 orang atau 8,21%.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal meningkat antara tahun 2012-2015, tetapi menurun di tahun 2017 (data tahun 2016 tidak tersedia dari BPS). Secara umum, gap antara TPT Kabupaten Tegal dengan TPT Provinsi Jawa Tengah menjadi menurun di tahun 2017. Namun demikian TPT Kabupaten Tegal Tahun 2019 turun menjadi 8,21%; lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2018 dan rata-rata Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tegal agar APBD dan kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan daya ungkit yang besar untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal menunjukkan grafik yang naik turun sepanjang tahun 2012-2019. Sebagai perbandingan dengan kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah, dapat dicermati dalam gambar berikut ini:

**Gambar 2. 24. TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012 - 2019**

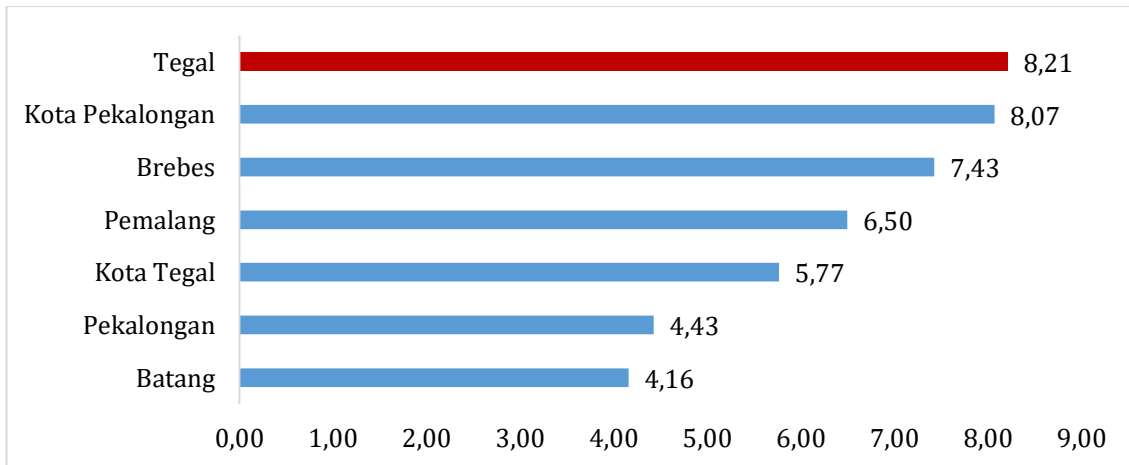


Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2019

Angka pengangguran pada tahun 2016 dan 2015 menunjukkan angka yang tetap, yaitu 9,52%. Hal ini disebabkan oleh kondisi makro ekonomi tahun 2016 dan 2015 di Kabupaten Tegal relative tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Angka TPT di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu 8,21%. Hal ini terjadi karena karakteristik pengangguran di Kabupaten Tegal relatif berpendidikan menengah (SMK) dan tinggi (PT). Pencari kerja di Kabupaten Tegal cenderung memilih pekerjaan yang disukai dan memilih menunda memperoleh pekerjaan ketimbang bekerja namun bukan pada pekerjaan yang diinginkan atau lebih suka menganggur.

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal pada Tahun 2019 menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan pada 5 (lima) tahun ke depan. Data kinerja TPT Tahun 2019 disandingkan dengan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 25. TPT Kabupaten /Kota se Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber: Bappeda dan Litbang, Tahun 2019

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah 8,21% merupakan TPT yang paling tinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan, sedangkan TPT paling rendah adalah di Kabupaten Batang (4,16%). Jika dibandingkan dengan data kinerja TPT di seluruh Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah eks Karesidenan Pekalongan secara umum termasuk kategori tinggi TPT nya, hanya Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang relatif rendah. Berbagai upaya kebijakan akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada 5 (lima) tahun ke depan, antara lain dengan Program Kewirusahaan Pemuda dan pendirian Sentra Pelayanan Publik untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan.

H. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

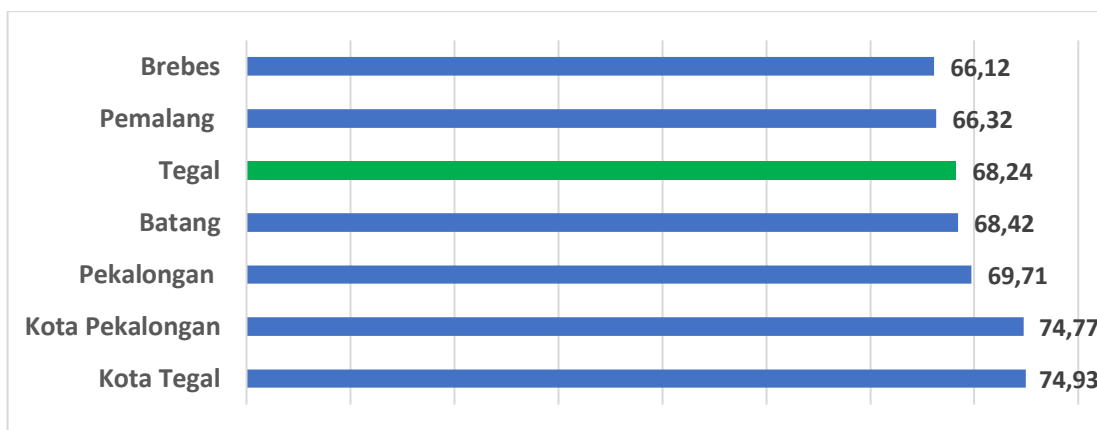
Tabel 2. 13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2015 - 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
IPM :	65,04	65,84	66,44	67,33	68,24
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,90	71,02	71,14	71,28	71,40
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12	12,01	12,06	12,34	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,30	6,54	6,55	6,70	6,86
Pengeluaran (Ribu Rupiah/orang/tahun)	8.367	8.709	9.136	9.433	9.798

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, pada Tahun 2019 IPM Kabupaten Tegal sebesar 68,24% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. IPM paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (65,67) sedangkan IPM yang paling tinggi adalah Kota Tegal (74,44).

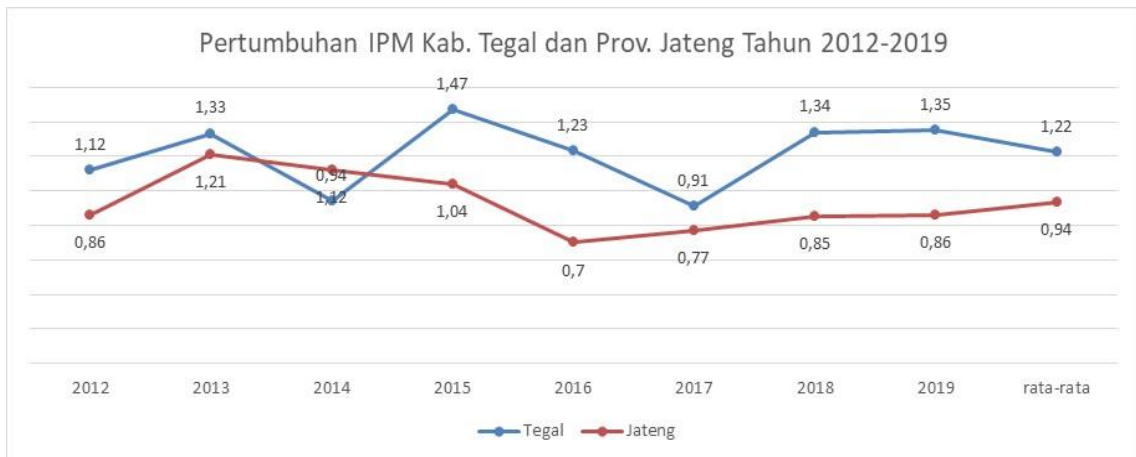
Gambar 2. 26. IPM Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun secara level IPM Tegal masih dibawah Jawa Tengah, akan tetapi pemerintah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

Gambar 2. 27. Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah

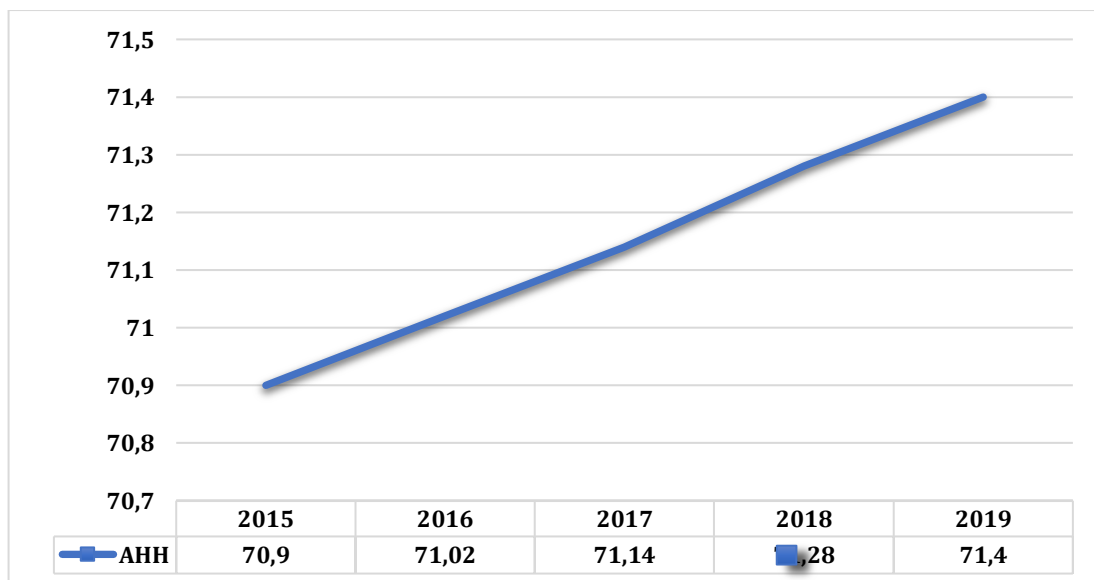


Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

I. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2019 angkanya menunjukkan 71,40 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71,28 tahun pada tahun 2018 atau 71,14 tahun pada tahun 2017. Tingginya AHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi AHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia produktif.

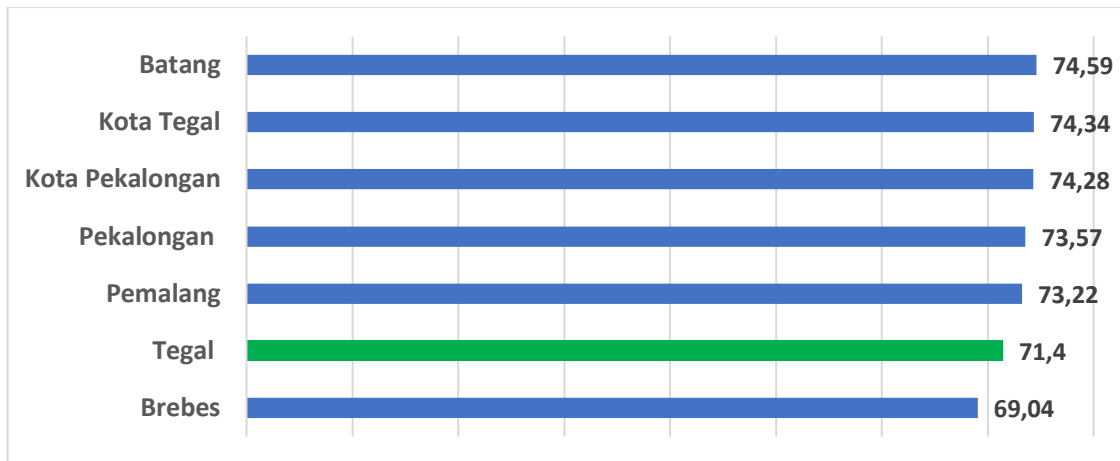
Gambar 2. 28. Angka Harapan Hidup Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, AHH Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah 71,4 tahun menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Angka Harapan Hidup (AHH) paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (69,04 tahun) sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (74,59 tahun).

Gambar 2. 29. Perbandingan Angka Harapan Hidup di Eks Karisidenan Pekalongan

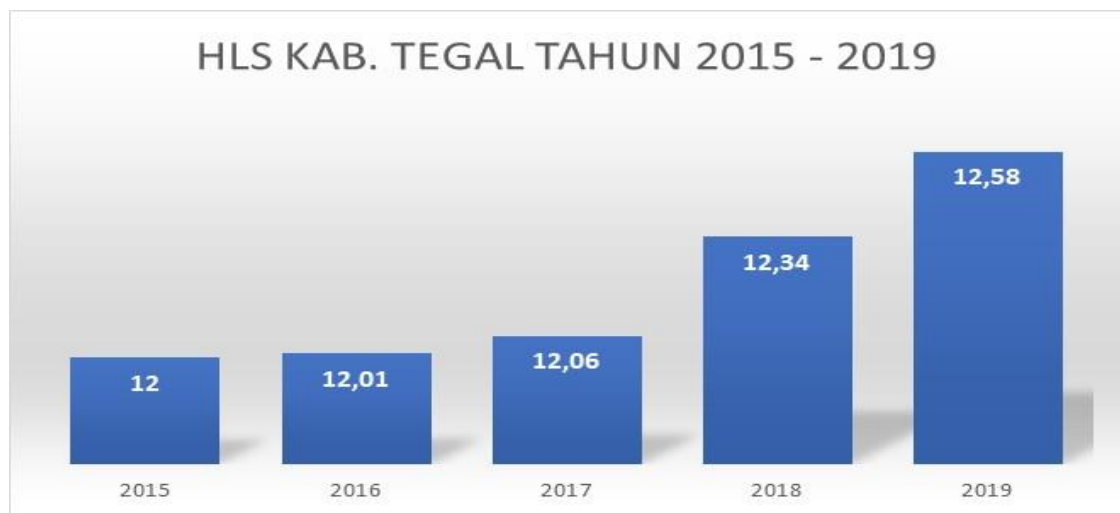


Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

J. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2017 angkanya 12,06 tahun, tahun 2018 telah menjadi 12,34 tahun dan tahun 2019 sebesar 12,58 tahun.

Gambar 2. 30. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2015 – 2019

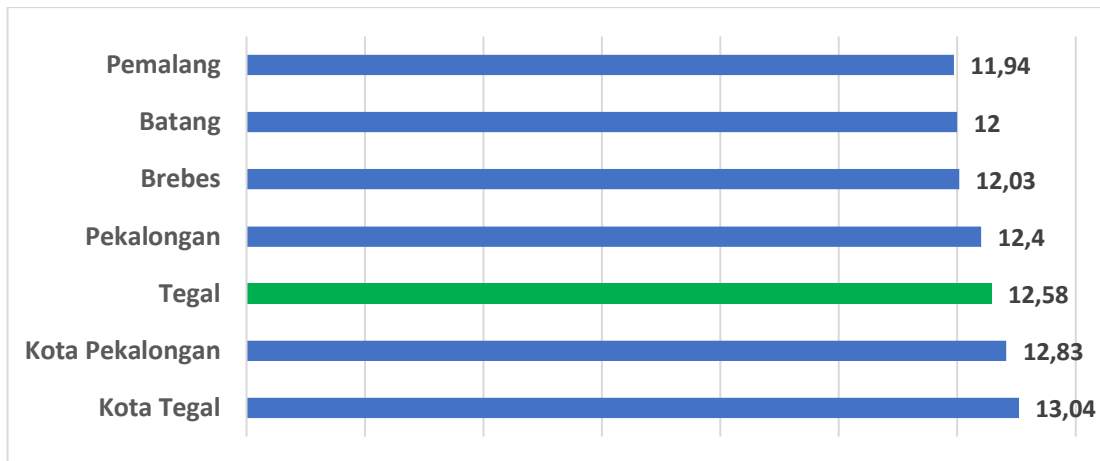


Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Mencermati angka yang ada, progres pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Setiap tahun grafik peningkatan kinerjanya cukup tinggi, sehingga perlu dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah 12,58 tahun menduduki peringkat ketiga tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (11,94 tahun) sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang paling tinggi adalah Kota Tegal (13,04 tahun).

Gambar 2. 31. Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

K. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2017 menunjukkan angka 6,55 tahun, meningkat menjadi 6,7 tahun pada tahun 2018. tahun 2019 angkanya menjadi 6,86 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada gambar berikut:

Gambar 2. 32. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2015 -2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tahun 2017, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

L. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi focus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Tegal menunjukkan tren menurun dalam 5 tahun terakhir.

Angka kematian ibu dari setiap 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami penurunan. Akan tetapi tahun 2018 AKI Kab. Tegal sedikit meningkat, walaupun masih dalam kondisi yang cukup terkendali. Penurunan angka kematian ibu disebabkan oleh keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan, utamanya pelayanan kepada ibu hamil dan persalinan ibu.

Gambar 2. 33. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2015 -2019



Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Upaya yang sudah dilakukan menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mengadakan pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelatihan PONEC, Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti call center penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian Makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, pemberian TTD (Tablet Tambah Darah), Pengadaan alat kesehatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONEC, Pembinaan calon pengantin oleh Puskesmas, Kelas Bumil, kerja sama lintas sektor (tokoh keluarga (toga) dan tokoh masyarakat (toma), sekolah, SKPD lain),

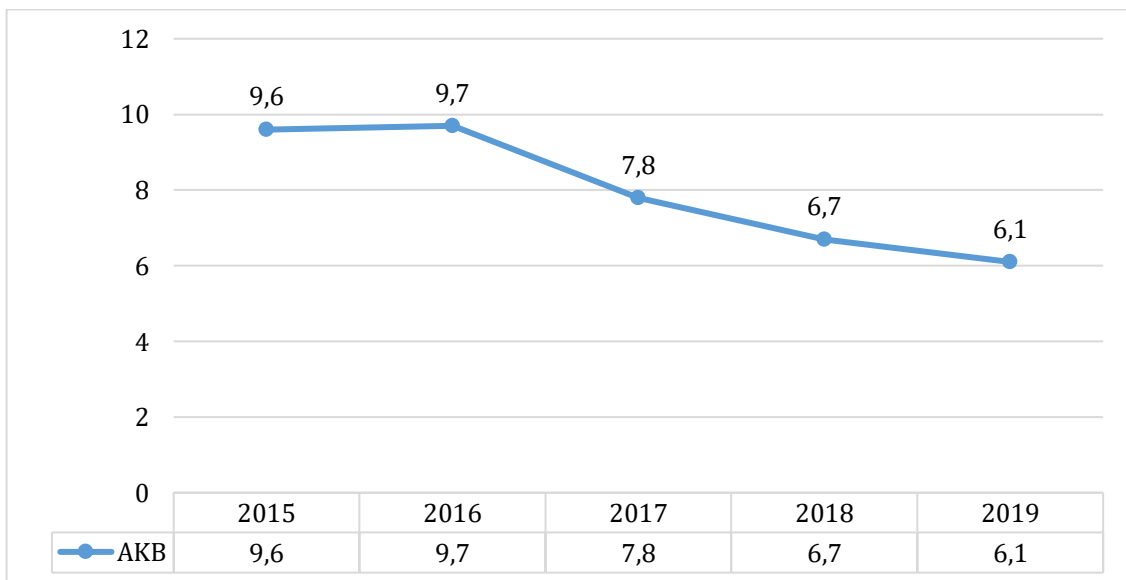
pelaksanaan program gubernur Jawa Tengah 5NG (*Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng*).

M. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usiasatu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi, dan komplikasi kehamilan. Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Tegal dari tahun 2015 sampai dengan 2019 fluktuatif namun cenderung menurun setiap tahunnya.

Angka kematian bayi dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 ke tahun 2016 angka kematian bayi meningkat, namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan. Tahun 2019 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tegal adalah 6,1. Dengan kondisi yang relatif berfluktuatif, meskipun cenderung mengalami penurunan, tentu hal ini menjadi keprihatinan dan perlu upaya keras untuk terus menurunkan kembali angka kematian bayi di Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 34. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2015 -2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

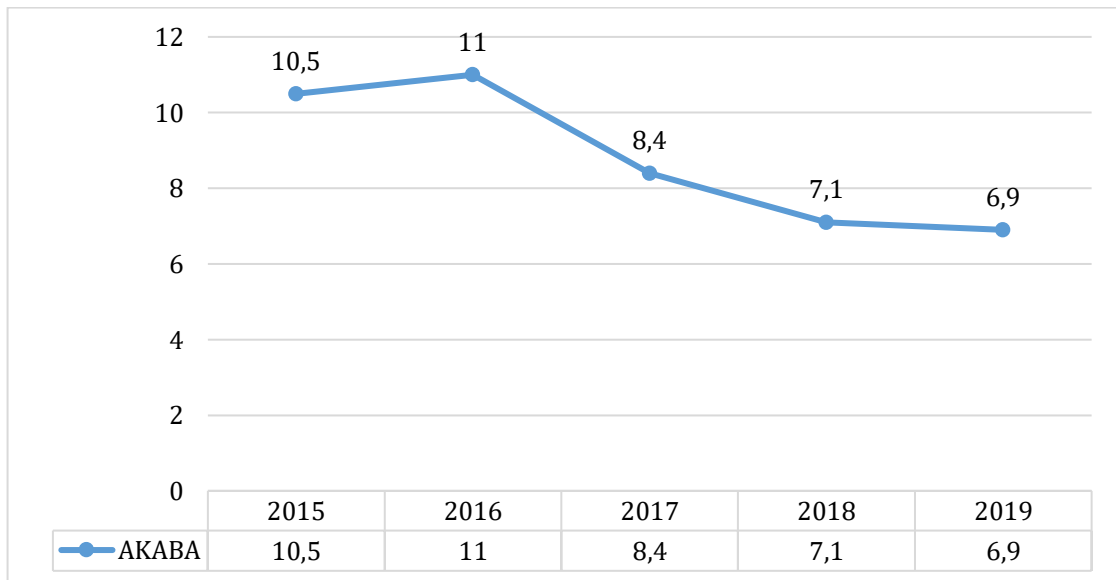
Upaya yang sudah dilakukan menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK, puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), mengadakan rumah tunggu kelahiran, konseling IMD dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, konseling ASI Eksklusif, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, Pengadaan alkes ,obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, kerja sama lintas sektor (toga, toma, sekolah, SKPD lain), Pelatihan Kader Motivator ASI.

Dengan upaya yang dilakukan mulai dari screening oleh bidan dokter dan dokter spesialis serta pemantauan ibu hamil resti melalui program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di mana semua ibu hamil risiko tinggi (risti) dipantau. Selain itu dengan klarifikasi dan Audit Maternal Perinatal (AMP) bila ada kematian menjadi pembelajaran dlm penanganan ibu hamil resti.

N. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKB dan Akaba tahun 2015-2016 naik disebabkan karena Kasus BBLR dan asfiksia di Kabupaten Tegal masih cukup banyak. BBLR dan asfiksia menjadi penyumbang kematian terbanyak. Hal ini disebabkan karena riwayat kehamilan ibu yang Kurang energi Kronis (KEK) atau proses persalinan tidak normal. Perlu intervensi terhadap ibu hamil KEK dengan pemberian PMT ibu hamil, untuk petugas perlu update skill penanganan BBLR dan asfiksia. AKABA menggambarkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 KH. Angka kematian balita di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun secara signifikan pada 2 (dua) tahun terakhir.

Gambar 2. 35. Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2015 -2019



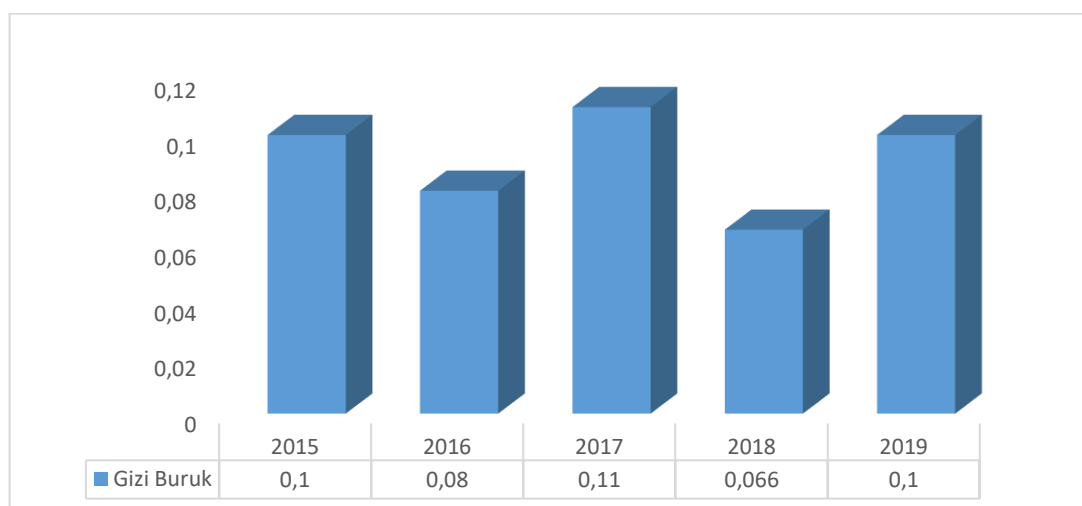
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Data menunjukkan angka kematian balita usia 5 tahun per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan tetapi kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 dan tahun tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai pada angka 7,1. Menyikapi kondisi ini, kerjasama semua pihak perlu lebih ditingkatkan lagi untuk dapat terus menekan angka kematian balita di tahun-tahun yang akan datang.

O. Gizi Buruk dan Stunting

Balita yang mengalami gizi buruk sejak Tahun 2014 hingga tahun 2018 bersifat fluktuatif, pada tahun 2014 sampai tahun 2016 angkanya menurun. Tetapi angka ini kemudian naik pada tahun 2017 dan kembali menurun pada tahun 2018, tahun 2019 naik menjadi 0,1. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati gambar berikut :

Gambar 2. 36. Kasus Gizi Buruk Kabupaten Tegal Tahun 2015 -2019



Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Kasus balita gizi buruk umumnya terjadi karena tidak ada makanan (faktor kemiskinan), dan ada makanan tetapi tidak diasupkan (faktor perilaku dan pola asuh). Dari kasus balita gizi buruk di Kabupaten Tegal, 70% diantaranya karena faktor kemiskinan, sedangkan sisanya karena perilaku dan pola asuh anak yang salah. Penyebab kedua ini biasanya terjadi karena orang tua malas atau tidak tlaten dalam memberikan makanan pada anak balitanya. Bisa juga karena anak diserahkan sepenuhnya kepada pembantu yang tidak tahu mengenai masalah gizi atau tidak peduli pada kesehatan anak, sehingga anak akhirnya kekurangan gizi

Sedangkan Stunting menjadi isu kesehatan anak dan balita yang mendapat penanganan serius di Kabupaten Tegal. Grafik perkembangan stunting tahun 2015-2019 dapat dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 2. 14 Kasus Stunting Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	6.98	7.63	5.39	5.9	5.3

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Pada tahun 2016, angka stunting mengalami kenaikan dibanding angka tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh penanganan stunting yang belum menjadi isu strategis nasional berpengaruh terhadap pelaporan dan penanganan kejadian stunting di masyarakat. Namun pada tahun 2018 dan 2019 grafik kasus stunting dapat ditekan karena kerjasama semua pihak dalam menekan angka stunting.

P. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Tabel 2. 15 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2015 - 2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
-----------	------	------	------	------	------

Indeks Pembangunan Gender	87,03	86,76	86,76	87,52	86,95
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2020

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Selama tahun 2019 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 86,95 naik 0,57 poin dibanding IPG tahun 2017. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM.

Q. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan fluktuasi kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2019. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2. 16 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2015 - 2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Pemberdayaan Gender	77,06	Tidak rilis data	51,15	68,90	69,25

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2020

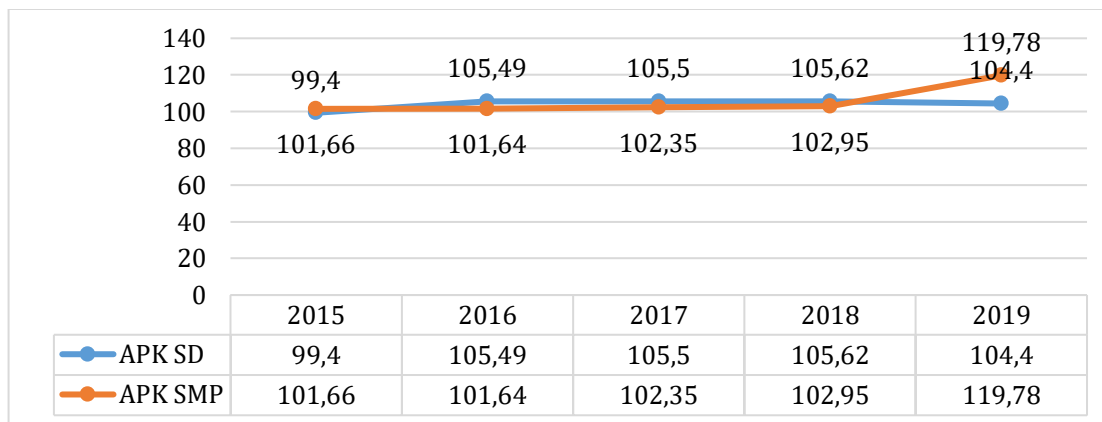
Data yang dirilis DP3AP2KB sejak tahun 2015-2019, pada tahun 2016 tidak ada rilis data. Data tahun 2017 menunjukkan tren menurun karena dari komposit IDG yang ada, sumbangan perempuan dalam pendapatan pekerja hanya 29,03% dari angka ideal 50%. Kontribusi yang rendah pada komposit ini menyebabkan sedikit penurunan IDG pada tahun 2017.

R. Angka Partisipasi Kasar

APK (Angka Partisipasi Kasar) digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilai APK semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang

berusia di luar usia resmi sekolah. APK SD/MI Kabupaten Tegal secara umum dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kecenderungan peningkatan, namun tahun 2015 mengalami penurunan dikarenakan adanya perpindahan peserta didik khususnya yang berasal dari luar Kabupaten Tegal. APK Kabupaten Tegal tahun 2015-2019 adalah sebagaimana dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 2. 37. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

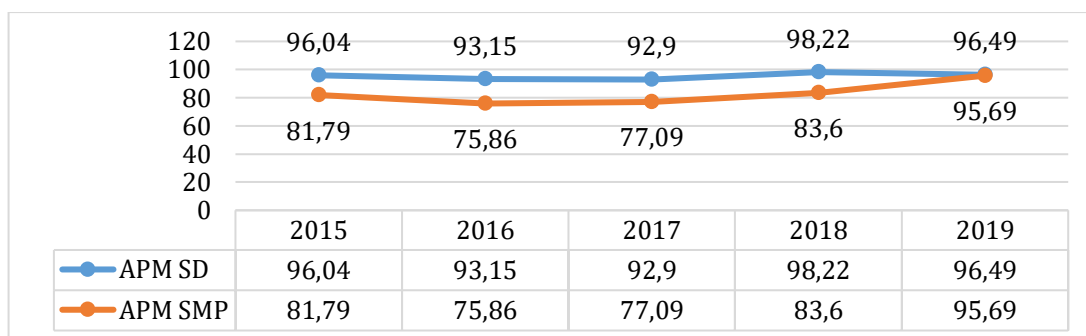
APK SMP secara umum dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kecenderungan peningkatan, namun tahun 2016 sedikit mengalami penurunan dikarenakan adanya perpindahan peserta didik khususnya yang berasal dari luar Kabupaten Tegal, terdapat peserta didik Kabupaten Tegal yang bersekolah di luar Kabupaten Tegal.

S. Angka Partisipasi Murni

APM (Angka Partisipasi Murni) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Di tahun 2019 APM SD/MI mencapai 96,49%. Artinya bahwa anak sekolah setingkat SD/MI di kabupaten Tegal yang sesuai dengan usia sekolah dari jenjang yang ada sebesar 96,49%, selebihnya 3,51% merupakan siswa SD yang tidak atau belum berusia 7-12 tahun.

APM SMP/MTs Tahun 2019 sebesar 95,69% yang artinya masih ada anak usia lebih atau kurang 13-15 tahun duduk di jenjang sekolah SMP/MTs dengan sebesar 4,31% dari jumlah keseluruhan siswa yang ada. Menurut BPS, APM dianggap sebagai indikator yang lebih baik daripada APK karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Gambar 2. 38. Angka Partisipasi Murni Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP mengalami penurunan pada tahun 2015 menuju tahun 2016 dikarenakan kondisi siswa SMP yang menempuh jenjang SMP pada tahun 2016 lebih banyak yang berada di luar usia sekolah SMP, yaitu 13-15 tahun. Akibatnya, jumlah APM pada tahun 2016 lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga pada APM SD pada tahun 2016. Siswa SD yang sedang menempuh pendidikan di SD yang usianya sesuai dengan usia siswa SD yaitu 7-13 tahun lebih sedikit ketimbang tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di bawah usia ideal SD, yaitu di bawah 7 tahun.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 3 (tiga) fokus layanan, yaitu: fokus layanan urusan wajib, fokus layanan urusan pilihan dan fokus fungsi penunjang urusan pemerintahan.

A. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

1). Pendidikan

a) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan

Tingkat kelulusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan diharapkan dapat meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal. Adapun data tingkat kelulusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai Tabel berikut ini.

Tabel 2. 17 Tingkat Kelulusan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Lulusan PAUD	30.150	31.918	32.468	35.907	42.681
2.	Angka Lulusan pendidikan Kesetaraan	99,20	96,97	97,75	0	92,08
	Jumlah Kelulusan Paket A dan Kelulusan	58 100%	47 95,92%	78 96,30%	0	101 84,87%
	Jumlah Kelulusan Paket B dan Kelulusan	361 98%	529 96,36%	587 97,67%	0	757 93,92%
	Jumlah Kelulusan Paket C dan Kelulusan	1.023 99,61%	941 98,64%	823 99,28%	0	1.265 97,46%

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Angka Lulusan Uji Kompetensi Peserta Kursus dan Pelatihan	73	86	85	65	103

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2020

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat Tingkat Kelulusan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dari angka kelulusan PAUD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 meningkat. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan semakin meningkatnya pelayanan pendidikan PAUD. Kemudian untuk persentase tingkat kelulusan Uji Kompetensi Peserta Kursus dan Pelatihan tahun 2015 meningkat sampai dengan tahun 2016 dan pada tahun 2017 kembali turun menjadi 85% . Tahun 2019 mengalami kenaikan hingga 103.

b) Pendidikan Dasar

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja dari program pendidikan dasar dapat terlihat dari semakin menurunnya angka putus sekolah SD dan SMP, semakin baiknya angka kelulusan SD dan SMP, serta semakin membaiknya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di tingkat SD dan SMP. Adapun data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Program Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun

No	Uraian Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Putus Sekolah SD	0,17	0,16	0,15	0,14	0,06
2	Angka Putus Sekolah SMP	0,61	0,72	0,31	0,13	0,13
3	Angka Kelulusan Sekolah SD	100	100	100	100	100
4	Presentase Angka Kelulusan Sekolah SMP	99,96	99,98	99,97	99,96	99,96

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Angka putus sekolah SD dan SMP menunjukkan tren yang menurun sepanjang tahun. Hal ini disebabkan keberhasilan program penurunan Angka Putus Sekolah melalui Program Yuh Sekolah Maning maupun Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Sementara partisipasi kelulusan selalu di atas 99,90%. Siswa yang tidak lulus SMP umumnya karena sakit dan terkendala mengulang ujian melalui jalur formal sehingga biasanya tersalurkan melalui jenjang pendidikan non formal.

c) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk meningkatkan rasio guru terhadap murid yaitu jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2015-2019 adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2. 19 Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	3.179	3.070	2.885	2.641	3.783
1.2.	Jumlah Murid	130.201	127.430	126.809	126.072	131.269
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:40,95	1:41,51	1:43,95	1:47,73	1:34,69
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	1.390	1.253	1.276	1.228	1.235
2.2.	Jumlah Murid	36.206	36.712	31.715	35.590	46.303
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:26,04	1:29,29	1:24,85	1:28,98	1:19,66

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar perkelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru perkelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2015-2019, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 2. 20 Rasio Guru per Kelas dan Rasio Guru per Mapel Tahun 2015 -2019

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.	Rasioguru/Kelas	1:0,15	1:0,2	1:0,25	1:0,3	1:0,8
2.	Rasioguru/Mapel	1:1:27	1:1:29	1:1:31	1:1:32	1:1:28

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari isian tabel tersebut diatas bahwa untuk Rasio Guru Per Kelas, Rasio Guru per mata pelajaran cenderung tidak ideal sehingga dari data tersebut diharapkan akan terjadi rasio guru per kelas 2024 menjadi 1:0,55 dan untuk rasio guru/mapel menjadi 1:1:27

d) Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk bisa mewujudkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan dibutuhkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar lainnya. Sarana dan Prasarana pendidikan dan kebudayaan dipastikan baik dan berfungsi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 21 Kondisi Sarpras Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas	11,35	12,76	13,56	15	17,82
2.	Sarana Prasarana Dikdas	79,44	79,44	81,48	84,11	78,99
3.	Sarana dan Prasarana Kebudayaan	15,56	16,76	17,78	19,29	20,65

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tegal , Tahun 2020

Dari data pada tabel tersebut diatas kondisi 5 tahun ke depan diharapkan Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas tahun 2024 menjadi 30,45%, Sarana dan Prasarana Dikdas diharapkan 88,89% pada tahun 2024 dan sarana dan prasarana kebudayaan pada tahun 2024 diharapkan menjadi 37,7 %.

2). Kesehatan

a) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan pengendalian penyakit mencakup penyakit menular dan penyakit tidak menular. Berikut capaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit dari tahun 2015 – 2019:

Tabel 2. 22 Capaian Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap	%	83	96	96	95	100,4
2.	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	90	100
3.	Prevalensi AFP Rate kasus Lumpuh layuh penderita per 100.000 penduduk <15 th	per 100.000 penduduk < 15 th	0,66	2	2,28	2,28	2
4.	Angka Penemuan kasus TB	per 100.000 penduduk	81	142	215	195	256
5.	Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB	%	91	93	94,5	88	82
6.	Jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS	Orang	129	141	154	158	151
7.	Cakupan HIV/AIDS yang mendapat pengobatan ARV	%	53	55	57	54	73,4
8.	Angka Penemuan kasus baru Kusta	per 100.000 penduduk	1,6	1,3	1,45	1,48	1,47
9.	Angka kesakitan DBD	per 100.000 penduduk	30	43	18	5	25,8
10.	Angka kematian DBD	%	2,8	2,9	1,2	1,38	0,8
11.	Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani	%	72,8	115	97	93	92,46
12.	Cakupan penderita Diare yang ditangani	%	195	157,9	130	118	101,1
13.	peayanan kesehatan pada usia produktif	%	N/A	N/A	0,58	34,67	21,3
14.	peayanan kesehatan penderita Hipertensi	%	N/A	N/A	23,82	24,07	29,9
15.	peayanan kesehatan penderit Diabetes Melitus	%	N/A	N/A	24,05	14,18	100
16.	peayanan ksehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	%	N/A	N/A	100	36,83	64,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, Tahun 2020

b) Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Kualitas pelayanan kesehatan terus ditingkatkan, diantaranya dengan akreditasi puskesmas, pembinaan pengelolaan kefarmasian, indikator – indikator pada program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan antara lain:

Tabel 2. 23 Capaian Kinerja Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	65	N/A	90	96,55	100
2.	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	80	N/A	100	99,51	99,07
3.	Puskesmas terakreditasi	%	20,69	48,28	82,76	100	100
4.	Cakupan pelayanan perijinan	%	89,97	N/A	100	100	100
5.	Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional/hari	Orang	20	20	35	45	50
6.	Penduduk peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	N/A	N/A	N/A	80,04**	82,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, Tahun 2020

Semua puskesmas di Kabupaten Tegal sudah terakreditasi, dengan status terakreditasi dasar, madya, dan utama. Belum ada puskesmas yang terakreditasi paripurna. Setiap tiga tahun, dilakukan reakreditasi untuk menjaga kualitas pelayanan.

Tabel 2. 24 Persebaran 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Tegal Per Desember 2019

No.	Puskesmas	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Kesmas	Tenaga Kesling	Tenaga Gizi	Tenaga ATLM	Pemenuhan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Minimal
1	Margasari	4	1	20	28	2	1	2	2	2	Memenuhi
2	Kesambi	3	0	11	16	2	1	1	2	1	Belum Memenuhi
3	Bumijawa	4	1	22	38	3	2	1	2	0	Belum Memenuhi
4	Bojong	3	1	6	29	2	3	2	1	2	Memenuhi
5	Danasari	2	0	8	20	0	3	1	1	1	Belum Memenuhi
6	Balapulang	3	1	25	24	3	1	1	3	1	Memenuhi
7	Kalibakung	2	0	7	26	2	2	1	1	1	Belum Memenuhi
8	Pagerbarang	2	1	10	23	1	1	1	1	2	Memenuhi
9	Lebaksiu	2	1	15	30	3	1	2	1	1	Memenuhi
10	Kambangan	2	1	8	26	1	2	2	2	1	Memenuhi
11	Jatinegara	3	0	18	28	2	1	2	1	2	Belum Memenuhi
12	Kedungbanteng	2	1	14	30	2	2	2	2	2	Memenuhi
13	Pangkah	2	1	10	29	3	1	2	2	1	Memenuhi
14	Penusupan	2	1	10	29	3	1	1	2	1	Memenuhi
15	Slawi	3	1	8	29	1	1	1	1	1	Memenuhi
16	Dukuhwaru	3	1	9	34	1	1	1	2	2	Memenuhi
17	Pagiyanten	2	1	5	31	1	1	2	1	1	Memenuhi
18	Adiwarna	2	1	16	30	2	1	1	1	1	Memenuhi
19	Dukuhturi	2	1	8	30	1	1	2	1	2	Memenuhi
20	Kupu	2	1	9	25	1	2	1	1	1	Memenuhi
21	Talang	2	1	12	26	2	1	1	1	1	Memenuhi
22	Kaladawa	2	1	5	26	3	2	2	1	1	Memenuhi
23	Tarub	4	1	16	29	1	1	2	1	2	Memenuhi
24	Kesamiran	2	1	9	23	1	1	1	1	1	Memenuhi
25	Kramat	2	1	7	31	1	1	1	2	1	Memenuhi
26	Bangun Galih	3	1	4	30	2	2	2	1	2	Memenuhi
27	Suradadi	2	2	11	14	2	1	1	2	2	Memenuhi
28	Jatibogor	3	1	6	30	1	1	1	2	1	Memenuhi
29	Warurejo	2	1	16	32	3	1	2	2	2	Memenuhi

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, Tahun 2020

c) Kesehatan Masyarakat

Capain kinerja pada Kesehatan Masyarakat antara lain:

**Tabel 2. 25 Capaian Kinerja Kesehatan Masyarakat
Tahun 2015 - 2019**

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	%	62,3	78,75	84,98	85,6	90
2	Cakupan Penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	62,3	78	79,6	84,46	100
3	Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat	%	87	43,69	90	86	90
4	Cakupan desa yang melaksanakan STBM	%	44,9	52,9	61,7	63	66,2
5	Cakupan desa ODF (Open Defecation Free) / SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	%	7,6	10,45	16,72	16,72	100
6	Cakupan pembinaan pengelolaan limbah medis fasyankes	%	25	31,03	35	45	76
7	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	%	55	63,4	75,86	74	75
8	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	84,6	81,2	80	81	81
9	Persentase Desa Siaga Strata Mandiri	%	3,8	5,9	7,7	7,7	11,7
10	Cakupan penjangkaran Siswa SD/MI	%	96,3	96,1	98,9	98	97,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tegal, Tahun 2020

Dinas Kesehatan telah menambah jumlah puskesmas mampu persalinan. Puskesmas mampu persalinan memberi pelayanan ibu melahirkan selama 24 jam. Puskesmas PONED dan mampu persalinan dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang terstandar, mengingat masih banyak ibu melahirkan di dukun bayi yang belum memenuhi standar pelayanan ibu melahirkan.

Saat ini cakupan Desa ODF (*Open Defecation Free*) atau Desa SBS (Stop Buang Air Besar) sebanyak 287 desa atau sebesar 100% dari 287 desa/kelurahan di Kabupaten Tegal. Capaian tersebut melebihi target tahun 2019, yaitu 6,97% atau sebanyak 20 desa/kelurahan. Walaupun belum berstatus ODF, sebanyak 177 desa sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Artinya, sebanyak 177 desa sedang berusaha meningkatkan kesehatan dengan 5 pilar STBM yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan/ Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun/ CTPS, Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga/ PAM-RT, Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga, Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga. Hambatan yang dihadapi pada program ini antara lain budaya masyarakat terkait sanitasi, misal buang air besar di sungai dan kebun, membakar sampah plastik yang notabene mencemari udara, membuang sampah anorganik pada kebun dan tidak diolah dengan baik, dan belum semua masyarakat mempraktikkan cuci tangan pakai sabun dengan baik.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain pemberian bantuan jamban bagi masyarakat (pemicu) melalui kegiatan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), penyelenggaraan klinik sanitasi di puskesmas yang memberikan pelayanan konsultasi terkait sanitasi, dan kegiatan **PDPM** (Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat).

d). Kesehatan Keluarga

Indikator – indikator Kesehatan Keluarga antara lain:

**Tabel 2. 26 Capaian Indikator Kesehatan Keluarga
Tahun 2015 – 2019**

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	74,25	98,2	97,25	83,93	98,01
2.	Cakupan ibu hamil mendapat layanan kesehatan	%	78,8	100	98,14	94,78	102,52
3.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	120,8	100,3	52,6	56	44,54
4.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	67,4	94,5	98,8	88,6	98,15
5.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	%	92	99	130	100	100
6.	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	%	71	94	96,22	91,67	96,68
7.	Cakupan Ibu Hamil K4	%	69,16	90,26	92,61	85,15	94,7
8.	Cakupan Lansia terlayani kesehatan	%	78,39	30,71	66,19	33,71	49
9.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	9,6	9,7	7,9	6,7	6,1
10.	Angka Kematian Balita	Per 1.000 kelahiran hidup	10,5	11	8,4	7,1	6,9
11.	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani	%	92,5	99,1	100	100	100
12.	Cakupan kunjungan bayi	%	99,2	103,35	98,2	100	100,2
13.	Prevalensi Balita gizi buruk	%	0,1	0,16	0,11	0,066	0,1

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
14.	Prevalensi Balita gizi baik	%	99,03	98,54	99,8	98,65	99,7
15.	Cakupan Balita gizi buruk dan gizi kurang mendapat PMT	%	N/A	N/A	100	100	100
16.	Cakupan Anak usia 6-24 bln dari Gakin mendapat MP-ASI	%	17,63	20	88,58	92	92
17.	Cakupan Ibu Hamil KEK mendapat PMT	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Kasus gizi buruk dan gizi kurang masih terjadi di Kabupaten Tegal. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal antara lain memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada balita gizi buruk, pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk dan gizi kurang, pemberian MPASI pada balita dari keluarga miskin, dan pemberian pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK). Pelayanan kesehatan rutin yang dilakukan antara lain pemberian vitamin A dan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita di posyandu dan puskesmas. Hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran pada kegiatan pemberian MPASI. Hal ini menyebabkan MPASI hanya diberikan pada balita gizi kurang dari keluarga miskin. Balita gizi kurang dari keluarga mampu diberi penyuluhan terkait pemenuhan gizi seimbang bagi balita gizi kurang.

e). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS. Suradadi)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit yang dilaksanakan sesuai standar. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data pelayanan RS mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan yang dilaksanakan sesuai Standar sebesar 3% setiap tahunnya sehingga mencapai target sampai Tahun 2024 sebesar 100%.

Tabel 2. 27 Kinerja Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelayanan RS sesuai Standar	58	64	70	89	91

Sumber : RSUD Suradadi Kab. Tegal, Tahun 2020

F). Pelayanan Penunjang (Rumah Sakit Dokter Soeselo Slawi)

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah melakukan pelayanan dan pengelolaan penunjang medis dan non medis sesuai dengan indikator yang ada. Ada beberapa indikator yang sudah tercapai akan tetapi masih ada juga beberapa indikator yang perlu di tingkatkan. Berikut capaian kinerja pelayanan penunjang di RSUD Dr. Soeselo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

**Tabel 2. 28 Standar Ketenagaan Pelayanan Rumah Sakit Kelas B
Tahun 2015-2019**

No	Pelayanan	Jenis Tenaga	standar	2015	2016	2017	2018	2019
1	Radiologi	Radiografer	2/alat	7	7	8	9	9
2	Laboratorium	Analisis	16	13	13	13	14	15
3	BDRS	TTD	6	6	6	6	6	6
4	Haemodialisa	perawat	2/alat	6	6	7	8	8
5	Rehab medik	Fisio,TW,OT	10	9	10	10	10	10
6	Farmasi	Apoteker	13	9	9	11	11	12
		TTK	20	22	22	25	27	33
7	Gizi	Nutrisionis		8	8	8	8	8
8	Sanitasi &loundry	kesling		3	3	3	3	3
9	IPSRs	Bangunan	13	2	2	2	2	2
		Listrik	13	2	2	2	3	4
		Ac	13	2	2	2	2	2
		Elektronik	13	1	1	1	1	1
		pertukangan	13	2	2	2	2	2

Sumber : RSUD dr Soeselo Slawi, Tahun 2020

Berdasarkan data di atas masih ada tenaga yang secara kuantitas masih kurang dan masih ada yang secara kompetensi belum memiliki sertifikat pelatihan yang di tentukan diantaranya perawat Haemodialisa, Tenaga Teknis Darah

g) Standar Sarana, Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit kelas B Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor:56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit, menurut Jenis Sarana, Prasarana dan peralatan maupun kondisinya masih ada yang perlu di tambah dan perlu di tingkatkan kualitasnya. Adapun kondisi sarana dan prasarana dan peralatan RSUD dr Soeselo dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 29 Tabel Sarana dan Prasarana Peralatan Rumah Sakit
Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Persentase Sarpras Rumah Sakit (%)					
		Standar	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sarana dan Prasarana	100	50	60	68	71	73
2	Peralatan	≥ 60 %	75	80	85	87	88

Sumber : RSUD dr Soeselo Slawi Kab. Tegal, Tahun 2020

Persentase penunjang medis adalah persentase indikator standar pelayanan minimal penunjang medis yang terpenuhi dan prosentasi Peralatan Medis dan penunjang medis yang terpenuhi. Sedangkan penunjang Non Medis merupakan rata-rata akumulasi persentase standar pelayanan minimal, pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. Sebagai berikut:

Tabel 2. 30 Penunjang Medis Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Persentase Penunjang Medis (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Pelayanan Penunjang Medis	70,8%	54,1%	70,8%	79,1%	79,1%
2	Persentase Pelayanan Penunjang Non Medis	68	73	87	88	90

Sumber : RSUD dr Soeselo Slawi Tahun 2020

Berdasarkan Data pada Tabel diatas di simpulkan bahwa Pelayanan Penunjang medis maupun penunjang non medis belum maksimal sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan.

3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Tegal berdasarkan kewenangannya meliputi Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Infrastruktur Jaringan Drainase, dan Pembangunan Infrastruktur Bangunan Sumberdaya Air (SDA).

i. Infrastruktur Jalan

Secara kewilayahan Kabupaten mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis yang terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan dimana berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km kilometer dan jalan desa sepanjang 691,28 km. Sedangkan untuk Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 kilometer, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 kilometer, serta jalan desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km.

Secara kewilayahan regional Bregasmalang di bagian Utara terlitasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlitasi oleh Jalan Kolektor Primer (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah tengah Randudongkal (Pemalang), Jatinegara – Slawi - Dukuhwaru (Kab Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kab. Brebes).

Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2015-2019

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	302,68	35,72	374,11	44,15	377,94	44,6	528,9	62,42	576,24	68,01
2.	Rusak Ringan	120,56	14,23	117,37	13,85	170,34	20,1	118,7	14,00	105,73	12,48
3.	Rusak Sedang	177,37	20,93	150,93	17,81	139,51	16,5	82,98	9,79	70,94	8,37
4.	Rusak Berat	246,66	29,11	204,86	24,18	159,48	18,8	116,8	13,78	94,35	11,14

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
	Total	847,27	100	847,27	100	847,27	100	847,3	100	847,27	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 94,355 km atau sekitar 11,14%. Kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tegal berada pada jalan jalan kecil yang bukan jalan strategis dimana sebagian besar berfungsi sebagai jalan usaha pertanian. Sedangkan jalan rusak berat dan berfungsi sebagai jalan strategis akan menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

Untuk menjamin konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, rusak ringan, maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruk jalan mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartikan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik, secara dimensi dan kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Hirarki dan kewenangan, drainase yang menjadi kewenangan kabupaten adalah drainase sekunder yaitu yang sejajar dengan jalan kabupaten. Kebutuhan drainase Kabupaten 490,15 km saat ini baru terbangun sekitar 57,85%. Dari data capaian penyediaan jaringan drainase di Kabupaten Tegal terdapat peningkatan panjang drainase dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 32 Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2015-2019

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun (km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	Jalan Kabupaten	847,27	847,27	847,27	847,27	847,27
b	Jalan yang harus berdrainase	477,46	477,46	477,46	477,46	490,15
c	Jalan yang tidak harus berdrainase	169,45	169,45	169,45	169,45	160,79
d	Jalan yang berdrainase	211,17	221,98	232,79	254,41	277,95
e	% Jalan berdrainase (d/b)	44,23	46,49	48,76	53,28	57,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

ii. Infrastruktur Jembatan

Data Infrastruktur jembatan di Kabupaten Tegal pada Tahun 2015 berjumlah 436 unit, sedangkan pada akhir Tahun 2019 berjumlah 444 unit. Hal ini selama kurung waktu 5 tahun terkahir terdapat pembangunan jembatan baru dan updating data jembatan.

Tabel 2. 33 Jumlah Jembatan Kabupaten Tahun 2015-2019

No	Kondisi Jalan	Jumlah Jembatan Per Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
1.	Baik	250	57,34	266	61,01	282	64,7	298	67,12	301	67,79
2.	Rusak Ringan	26	5,96	50	11,47	69	15,8	93	20,95	91	20,5
3.	Rusak Sedang	50	11,47	52	11,93	57	13,1	30	6,76	30	6,76
4.	Rusak Berat	110	25,23	68	15,6	28	6,42	23	5,18	22	4,95
	Total	436	100	436	100	436	100	444	100	444	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut di atas, kondisi jembatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin baik dimana jembatan yang baik sebanyak 301 unit (67,79%), sedangkan yang masih dalam kondisi rusak berat dan sedang adalah 22 unit (4,95%). Sebagaimana infrastruktur Jalan, infrastruktur jembatan haruslah mengikuti infrastruktur jalan, dimana ke depan Kondisi Jembatan harus dalam kondisi mantap yaitu mantap dalam arti sesuai dengan fungsi jalan yaitu dimensi (panjang dan lebar) harus sesuai dengan fungsinya.

iii. Infrastruktur Bangunan Sumberdaya Air (SDA)

Infrastruktur sumberdaya air berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air, meliputi: wilayah sungai, jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan sistem pengendalian banjir. Pengembangan wilayah sungai yang merupakan WS strategis nasional adalah WS Pemali Comal terdiri atas Pengelolaan sumber daya air sungai, Pengembangan waduk; dan Pengembangan embung. Terkait dengan pengembangan waduk dan embung, Di Kabupaten Tegal terdapat Waduk Cacaban yang mempunyai kapasitas yang saat ini mempunyai kapasitas 49,02 juta m³ dan dapat mengalir lahan sawah seluas 17.481 Ha. Sedangkan Jumlah Embung atau waduk lapang di Kabupaten Tegal

Tabel 2. 34 Jumlah dan Luas Embung

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (m ²)
1	Adiwerna	6	39.315
2	Dukuhturi	2	9.778
3	Dukuhwaru	10	52.209
4	Kedungbanteng	1	15.535
5	Kramat	17	88.872
6	Lebaksu	28	134.637
7	Pangkah	9	34.609
8	Slawi	10	47.298
9	Talang	3	18.557
10	Tarub	17	83.538
11	Suradadi	5	21.600
12	Warureja	3	5.800
	Total	111	551.748

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

Jaringan irigasi di Kabupaten Tegal terdiri dari jaringan teknis (primer, sekunder, tersier) dan jaringan non teknis. Kedua jaringan ini hampir tersebar

merata di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tegal. Kondisi saluran-saluran irigasi ini perlu perawatan karena sebagian dari saluran-saluran ini, terutama saluran teknis mengalami kerusakan pada fisik bangunannya. Selain itu perlu juga adanya peningkatan terhadap saluran non teknis dan ssemi teknis lainnya agar berfungsi lebih optimal untuk mengairi seluruh persawahan areal persawahan yang ada di Kabupaten Tegal.

Lahan sawah di Kabupaten Tegal sekitar 40.133 Ha. Untuk komoditas padi pada Tahun 2017 luas tanam mencapai 61.995 Ha dan luas panen mencapai 65.660 Ha, sedangkan untuk jumlah produksinya mencapai 373.524 Ton, dengan produktivitas 5,69 Ton / Ha. Dilihat dari distribusi per kecamatan, kecamatan Warureja menjadi penyumbang lahan tanam padi tersebar di Kabupaten Tegal yaitu sekitar 7.102 Ha.

Berdasarkan jenis pengairan di Kabupaten Tegal, sebagian besar sawah tersebut merupakan sawah irigasi teknis yaitu sekitar 32.600 Ha. Berdasarkan kewenangan irigasi, Daerah irigasi untuk lahan pertanian di Kabupaten Tegal terbagi menjadi 3 yaitu DI yaitu:

Tabel 2. 35 Panjang Irigasi Kabupaten Tahun 2019

Kewenangan	Jumlah DI	Panjang Saluran (m)	Luas Daerah Irigasi (Ha)
Kabupaten	208	276,02	9.281
Provinsi	11	84.597	6.956
Pusat	3	240.686	24.083
Total	222	325.559	40.320

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

Gambaran kinerja pada aspek pembangunan infrastruktur sumberdaya air di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 2. 36 Panjang Irigasi Kabupaten Tahun 2015-2019

No	Kondisi Jaringan Irigasi	Panjang Irigasi Per Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	137	46,96	146	50,05	155	53,1	164,5	56,39	160,58	58,17
2.	Rusak Ringan	46	15,77	49	16,8	52	17,8	67,2	22,97	44,82	16,24
3.	Rusak Sedang	25,88	8,87	23,74	8,138	21,69	7,44	44,85	15,37	59,00	21,37
4.	Rusak Berat	82,84	28,40	72,98	25,02	63,03	21,6	15,43	5,26	11,62	4,21
	Total	291,72	100	291,72	100	291,72	100	291,7	100	276,02	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan Kewenangannya, Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sebanyak 208 DI dengan luas 9.208 hektare. Kebutuhan air Daerah irigasi Kabuaten tersebut dipenuhi melalui jaringan irigasi. Panjang Saluran irigasi

saat ini mencapai 291,7 km, dengan kondisi jaringan irigasi yang mantap 160,58 km (58,17%). Sedangkan yang mengalami kerusakan ringan 59,00 km (21,37%). Sedangkan kondisi cakupan daerah irigasi kewenangan kabupaten tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 37 Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2015-2019

Kondisi DI	Kondisi Daerah Irigasi Per Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Luas Daerah Irigasi (Ha)	15.497	15.497	15.497	15.497	9.281
Luas Daerah Irigasi Baik (Ha)	9.721	10.360	10.987	12.298	5.302,49
% luas DI Baik	62,73	66,85	70,90	79,36	58,17

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

Peningkatan kondisi daerah irigasi kabupaten, dikarena alokasi anggaran yang stabil untuk perbaikan infrastruktur irigasi baik saluran, bangunan bendung, Selain itu secara lokasi sebagian besar Daerah Irigasi Kabupaten berada di daerah atas yaitu Kecamatan Bojong, Jatinegara, Margasari dan Bumijawa, dan bangunan Irigasinya letaknya jauh dari permukiman penduduk.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan layak untuk hidup dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan air di Kabupaten Tegal di tahun 2017 adalah sebesar 114.681.200 m³/tahun dan di tahun 2021 diproyeksikan sebesar 120.310.960 m³/tahun.

b) Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur antara lain dilihat dari ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). Untuk melihat berapa nilai ketaatan (persentase) antara realisasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR.

i. Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Beberapa dokumen RTR yang harus dan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 38 Jumlah Dokumen RTR Kabupaten Tahun 2015-2019

No	Dokumen RTR	Target sesuai UU 26/2017	2015	2016	2017	2018	2019	Kondisi Sampai 2019
1	RTR Wilayah (RTRW)	1						1
2	RTR Kawasan Strategis Kab (KSK)							
	KSK Ekonomi	9	0	0	0	0	0	0
	KSK Sosial Budaya	4	0	0	0	0	0	0
3	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)							
	Dok RDTR	18	4	4	5	5	0	18
	Perda RDTR	18	0	0	0	0	0	0

No	Dokumen RTR	Target sesuai UU 26/2017	2015	2016	2017	2018	2019	Kondisi Sampai 2019
4	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	10	3	0	0	0	0	3

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

Dari data di atas, sampai dengan saat baru hanya 1 (satu) dokumen RTR yang sudah mendapatkan legalisasi hukum yaitu Perda 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Sedangkan dokumen RTR detail baru dalam tahap penyusunan dokumen namun belum ada yang diperdakan, karena harus mengacu dan menunggu pada RTRW yang saat sedang dalam proses legalisasi Perda Revisi RTRW.

ii. Pemanfaatan Ruang

Terbitnya Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 bertujuan sebagai pedoman pemanfaatan ruang di Kabupaten Tegal agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdayaguna serasi selaras seimbang dan berkelanjutan, serta mampu mensejahterakan masyarakat. Sehingga walaupun dalam skala makro RTRW ini dijadikan sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Khusus di Pemerintah Kabupaten indikator yang digunakan adalah pemanfaatan ruang dalam rencana pola ruang LP2B, agar tidak digunakan untuk budidaya non pertanian.

Tabel 2. 39 Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tahun 2015-2019

Uraian	2016	s/d 2019
Kawasan LP2B	35.976	35.976
Eksiting Sawah	31.193	31.193
kesalahan Rencana Pola	4.301	4.301
Pemanfaatan tidak sesuai	482	482
% Ketaatan	98,66	98,66

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam rencana pola ruang yang ditetapkan menjadi kawasan LP2B, dimana kondisi eksisting lahan tersebut merupakan lahan terbangun baik permukiman maupun industri bukan lahan sawah basah. Sedangkan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang Perda RTRW adalah 1,34% , dengan kata lain ketaatan terhadap RTRW sebesar 98,66%.

4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a) Infrastruktur Air Minum

Infrastruktur sistem jaringan bersih di Kabupaten Tegal dibagi menjadi jaringan perpipaan dan non perpipaan. Jaringan air minum perpipaan untuk wilayah perkotaan sampai pada akses layanan rumah tangga dilayani oleh PDAM. Sedangkan untuk perpipaan wilayah perdesaan difasilitasi melalui program Pamsimas. Untuk jaringan non perpipaan masyarakat di Kabupaten Tegal dipenuhi dari layanan. Data layanan air minum sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 40 Data Layanan Air Minum Tahun 2015-2019

Uraian	Capaian Layanan Air Minum				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Total (jiwa)	1.415.009	1.420.106	1.424.891	1.429.386	1.429.386
Jumlah Penduduk wilayah Teknis PDAM (jiwa)	664.694	664.694	664.694	664.694	664.694
Jumlah Penduduk Perdesaaan Teknis PAMSIMAS (jiwa)	404.540	404.540	404.540	404.540	404.540
Target Capaian PDAM dr Total Penduduk (%)	46,97	46,81	46,65	46,50	46,50
Target Capaian Pamsimas dr Total Penduduk (%)	28,59	28,49	28,39	28,30	28,30
Layanan PDAM (SR)	25.037	30.809	36.363	40.521	42.742
Layanan PDAM (Jiwa)	162.559	200.035	236.096	263.093	277.513
Layanan Pamsimas (Jiwa)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Non Perpipaan (Sumur dan Mata Air)	N/A	64,69	N/A	N/A	66,82
Capaian Air Minum PDAM (%)	11,49	14,09	16,57	18,41	19,41
Capaian Air Minum Pamsimas (%)	-	-	-	-	-
Capaian Akses Air Minum Keseluruhan (%)	N/A	78,75	N/A	N/A	86,23

Sumber : Hasil Analisa berbagai sumber, Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Secara teknis jangkauan jaringan air minum perpipaan PDAM seharusnya dapat mencapai 46,5% wilayah Kabupaten Tegal. Capaian layanan PDAM meningkat dalam kurun waktu 5 tahun dari 11,49% menjadi 19,49%. Namun saat ini tidak bisa meningkatkan layanannya lagi karena kondisi ketersediaan sumber air terbatas. Untuk Layanan Pamsimas seharusnya dapat memenuhi 28,30%, namun saat ini baru dapat melayani wilayah di Kabupaten Tegal sebesar 19,49%. Secara keseluruhan terdapat peningkatan yang significant layanan akses air minum selama 5 tahun terakhir dari 78,75% menjadi 86,23%.

b) Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi di Kabupaten Tegal fokus pada prasarana sanitasi permukiman yaitu pada akses pada jamban sehat.

Tabel 2. 41 Rumah Berjamban Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Akses (%)		KK yg belum berjamban	
			2015	2019	Unit	%
1	BOJONG	36.354	65	98,8	436	1,2
2	DUKUHTURI	27.905	71,9	98,2	502	1,8

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Akses (%)		KK yg belum berjamban	
			2015	2019	Unit	%
3	SLAWI	20.108	96,3	98	402	2,0
4	DUKUHWARU	18.615	85,4	97,3	503	2,7
5	KRAMAT	30.434	66,8	96,7	1.004	3,3
6	MARGASARI	28.318	42,9	95,5	1.274	4,5
7	BUMIJAWA	22.912	70,3	93,7	1.443	6,3
8	JATINEGARA	16.835	45,3	92,7	1.229	7,3
9	LEBAKSIU	27.427	51,5	87,1	3.538	12,9
10	SURADADI	23.277	61,5	87	3.026	13,0
11	BALAPULANG	23.620	56,2	86,8	3.118	13,2
12	TALANG	28.025	54,6	85,8	3.980	14,2
13	ADIWERNA	34.090	33,8	83,6	5.591	16,4
14	WARUREJA	16.841	33,2	82,8	2.897	17,2
15	PANGKAH	29.141	49,7	81,5	5.391	18,5
16	TARUB	20.994	48,2	81,5	3.884	18,5
17	KEDUNG BANTENG	14.911	42,2	79	3.131	21,0
18	PAGERBARANG	17.390	46,8	73,4	4.626	26,6
	Total	437.197	55,8	88,7	45.975	10,5

Sumber : Hasil Olah Data Sanitarian, Tahun 2020

Dari data tabel di atas diketahui bahwa dalam rentang waktu 3 tahun (2015 – 2019) Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruk jamban sehat dari 55,8 % menjadi 88,7%. Namun demikian masih ada desa yang masih dibawah 80% dalam capaian infrastruktur sanitasi (jamban) yaitu Kecamatan Kedungbanteng dan Pagerbarang.

c) Kawasan Kumuh

Luas dan sebaran lokasi kumuh di Kabupaten Tegal telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 484 Tahun 2015 yang telah direvisi dengan Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal, berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya pengurangan lahan kumuh tersebut, luas dan sebaran pengurangan Kawasan kumuh di Kabupaten Tegal tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 42 Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Luas sesuai SK 239/2016	Luas Pengurangan (Ha)					Kondisi Sampai 2019	
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	Adiwerna	166,5	N/A	N/A	N/A	N/A	97,74	68,76	
2	Dukuhturi	53,2	N/A	N/A	N/A	N/A	1,32	51,88	
3	Jatinegara	18,4	N/A	N/A	N/A	N/A	0	18,4	
4	Kedungbanteng	30,4	N/A	N/A	N/A	N/A	0	30,4	
5	Kramat	18,5	N/A	N/A	N/A	N/A	6,72	11,78	
6	Lebaskiu	68,9	N/A	N/A	N/A	N/A	0	68,9	
7	Slawi	28,5	N/A	N/A	N/A	N/A	4,2	24,3	
8	Suradadi	48,6	N/A	N/A	N/A	N/A	0	48,6	
9	Talang	32,5	N/A	N/A	N/A	N/A	2,2	30,3	
10	Tarub	9,88	N/A	N/A	N/A	N/A	0	9,88	
11	Warureja	12,4	N/A	N/A	N/A	N/A	0	12,4	
	Total	487,78	N/A	N/A	N/A	N/A	112,18	375,6	
							Percentase	23%	77%

Sumber : Program Kotaku, 2020

Dari data di atas terdapat 2 desa lokasi kumuh yang telah menjadi target nasional yaitu Desa Harjosari Lor dan Harjosari Kidul seluas 50 Ha, upaya pengurangan kawasan kumuh telah dilakukan melalui kolaboratif anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Dari luasan kawasan kumuh 487,78 Ha telah terjadi penurunan luas kawasan kumuh seluas 112, 18 Ha (23%), sehingga sampai dengan akhir Tahun 2019 luas kumuh di kabupaten Tegal menjadi 375,6 Ha

d) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin juga berpengaruh pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mendasarkan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, jumlah RTLH di Kabupaten tercatat sebesar 42.675 Kepala Rumah Tangga (KRT) terdiri dari:

- Prioritas Utama adalah Kelompok Rumah Tangga yang mempunyai tingkat keparahan (7 Indikator) tidak layak sebanyak : 1.331 KRT
- Prioritas 1, 10 persen KRT termiskin yang mempunyai tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 4.268 KRT;
- Prioritas 2, 10 persen KRT termiskin yang mempunyai tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 4.268 KRT;

Tabel 2. 43 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015-2019

Uraian	Jumlah RTLH Kumulatif setiap Tahun (KRT)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Data RTLH 40% desil terendah	42.675	42.675	42.675	42.675	42.675
Kumulatif Realisasi RTLH	863	2.461	2.942	3.829	5.198
% Capaian RTLH	2,02	5,77	6,89	8,97	12,18

Sumber : Olah data SIMAS, Tahun 2020

Untuk prioritas utama RTLH di Kabupaten telah ditangani secara tuntas pada Tahun 2015, sedangkan 2016 – 2018 sasaran RTLH adalah KRT yang berada pada prioritas I yaitu 10 persen kelompok termiskin dari PBDT. Besaran Anggaran alokasi RTLH Kabupaten Tegal mulai tahun 2016 sebesar Rp. 20 Juta per KRT. Angka ini lebih tinggi dari alokasi Pemerintah Pusat sebesar Rp 15 Juta dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp 10 Juta.

5). Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

a) Penegakan Perundang-undangan Daerah

Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah agar jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2015-2019 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2. 44 Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penegakan Perda					
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	637	293	503	108	110
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	510	192	371	82	96
	c. Penyelesaian Penegakan Perda	80,06	65,53	73,76	76	87,2
2.	Penegakan K3					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	204	597	1.756	1673	1.623
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	233	180	1.688	1603	1.587
	c. Penyelesaian Penegakan K3 (%)	79,25	88,23	96,13	96	97,7

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2016 dibanding tahun 2015 mengalami penurunan, sehingga perlu ada penanganan yang lebih instensif. Untuk tahun 2018 dibandingkan sampai tahun 2019 mengalami kenaikan, sehingga perlu kerjasama yang baik agar penegakan Perda semakin naik dari tahun ke tahun. Penegakan K3 dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan.

b) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah untuk meningkatkan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga diseluruh wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam dan PKL yang berjualan disepanjang bahu jalan, sesuai SPM patroli dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait. Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tegal mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun patroli siaga mengalami peningkatan pada tahun 2015 hanya 37 % sedangkan tahun 2019 sebesar 72%.

Tabel 2. 45 Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah patroli siaga per tahun	404	444	630	767	730
2.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
3.	patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	37	41	58	70	72

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2020

Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sehingga untuk periode yang akan datang agar bisa meningkat.

c) Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran antara lain untuk meningkatkan rasio Linmas per RT dan penanganan kebakaran di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2019 rasio tersebut mencapai 1 : 1,06. Hal ini berarti bahwa untuk setiap RT di Kabupaten Tegal tersedia jumlah Linmas sebanyak 1 orang lebih. Rasio ini lebih besar bila dibandingkan dengan yang ada dalam Permendagri nomor : 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menargetkan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 1 orang setiap RT. Rasio Linmas Terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 sebanyak 539 orang sedangkan jumlah Linmas sebanyak 7.295 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah Linmas terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 sebesar 1:13. Jumlah penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal pada tahun 2015 mencapai 60 kebakaran, kebakaran yang tertangani 100%. Pada tahun 2019 terjadi kebakaran sebanyak 193 kejadian kebakaran jumlah ini lebih banyak dari tahun 2018 yaitu 153 kejadian kebakaran. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal. Penanganan bencana kebakaran akan bertambah baik apabila Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terpenuhi yaitu ada 9 WMK, maka perlu penambahan mobil pemadam kebakaran (1 pos WMK 1 mobil Damar) mobil yang dimiliki sekarang berjumlah 7 unit (2 rusa berat, 5 layak pakai) sehingga masih kurang 4 unit mobil Damkar. Juga perlu ada penambahan SDM pemadam kebakaran (1 pos WMK membutuhkan 18 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2. 46 Rasio Jumlah Linmas per RT Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Linmas	7.206	7.206	7.206	7.234	7.295
2.	Jumlah RT	6.860	6.860	6.875	6.889	6.889
3.	Rasio jumlah Linmas per RT	1:1,05	1:1,05	1:1,05	1:1,06	1:1,06

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Rasio jumlah Linmas per RT dari tahun ke tahun cenderung tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas per RT mengalami kenaikan.

Tabel 2. 47 Rasio Jumlah Linmas Terlatih Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Linmas	7.206	7.206	7.206	7.234	7.295
2.	Jumlah Terlatih	90	180	240	320	480
3.	Rasio jumlah Linmas	1:80	1:40	1:30	1:22	1:15

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2020

Rasio jumlah Linmas terlatih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun belum semua melaksanakan pelatihan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas terlatih mengalami kenaikan.

Tabel 2. 48 kasus kebakaran tertangani Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Jumlah Kasus Kebakaran				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kebakaran	60	78	99	153	193
2.	Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	32	42	56	88	193
3.	Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	53	54	57	58	160

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, ini merupakan usaha yang harus ditingkatkan agar untuk tahun-tahun mendatang semua jenis kebakaran bisa ditangani secara maksimal, sehingga resiko kebakaran bisa ditekan sekecil mungkin.

d) Jumlah LSM yang Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Besarnya jumlah LSM aktif dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

Jumlah LSM di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 sebanyak 72, Tahun 2015 menjadi 73, kemudian pada Tahun 2016 dan 2017 sebanyak 75 selanjutnya pada Tahun 2018 menjadi sebanyak 79 LSM. Dengan naiknya jumlah LSM yang mendaftar di Kesbangpolinmas setiap tahun menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah meningkatkan. Kinerja merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Review Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

e) Kondisi Keamanan Ketentraman Ketertiban Masyarakat

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) tercapai 100% (sangat tinggi) dari Tahun 2015-2019. Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Indikator pertama yaitu jumlah dialog umat beragama tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu 1 kali dialog yang terdiri dari dialog rutin intern anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dan dialog antara pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dengan Masyarakat Kabupaten Tegal. Dialog Kerukunan Umat Beragama membahas berbagai permasalahan seputar potensi-potensi konflik dan kejadian konflik antar umat beragama di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal guna menemukan solusi untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang akan dan telah terjadi. Indikator kedua yaitu Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama yang untuk saat ini hanya 1 jenis yaitu berupa brosur/ pamphlet yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat sebanyak 1 kali. Kecamatan dipilih sebagai sasaran pelaksanaan diskusi tersebut dengan argument bahwa telah ditangkapnya salah satu warga setempat sebagai pelaku aksi teror dan tahun 2017 telah dipulangkan eks-warga Gafatar yang sebagian berasal dari Desa Pekiringan Kecamatan Talang. Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menagani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator yaitu cakupan siskamling dengan jumlah desa telah tercapai 100%. Cakupan siskamling yang dimaksud yaitu siskamling yang telah terintegrasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Di Kabupaten Tegal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah terbentuk hingga ke tingkat Desa.

Pendidikan politik masyarakat dengan indikator pertama yaitu Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% yaitu terdapat sampai saat ini di tahun 2018 terdapat 92 buah organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftarkan dan telah lolos verifikasi sehingga terdaftar dalam system database ormas Kabupaten Tegal.

f) Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Untuk tahun 2015 dan 2016 nya mengalami kenaikan, tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2018 mengalami kenaikan, dan tahun 2019 mengalami penurunan, sehingga perlu usaha peningkatan usaha agar penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik bisa mengalami peningkatan.

Tabel 2. 49 Jumlah Penanganan Bencana Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kegiatan penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	76	72	54	65	54
Jumlah kejadian bencana	83	76	60	70	63
Kegiatan penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	91,57	94,74	90,00	92,86	85,71

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Tegal, Tahun 2020

g) Prosedur Tanggap Darurat Bencana

Dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang dapat disusun untuk dua tahun 2017 dan 2018 cenderung tetap, sedangkan untuk tahun 2019 mengalami kenaikan.

Tabel 2. 50 Jumlah Peraturan Penanganan Bencana

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang dapat disusun	-	-	2	2	3
Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang harus disusun	10	10	10	10	10
dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang dapat disusun	-	-	20,00	20,00	30,00

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Tegal, 2019

h) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Masyarakat siap siaga bencana dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif kadang naik juga kadang turun misalnya untuk dua tahun pertama mengalami kenaikan, dan tahun berikutnya mengalami penurunan, begitu juga untuk tahun berikutnya mengalami kenaikan dan pada tahun terakhir mengalami kenaikan, untuk itu perlu usaha-usaha yang keras agar masyarakat yang siap siaga bencana mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

Tabel 2. 51 Jumlah Penanganan Bencana

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah masyarakat yang dibina dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	120	130	340	490	425
Jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pembinaan	14.435	10.475	35.807	36.240	22.648
masyarakat siap siaga bencana	0,83	1,24	0,95	1,35	1,88

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Tegal, Tahun 2019

Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan bencana. Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tegal antara lain kekeringan di kecamatan-kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat dan Kedungbanteng. Banjir di Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Warureja, Suradadi, Kramat. Tanah longsor di Kecamatan Tarub, Pangkah, Bumijawa, Bojong dan Jatinegara. Berikut disajikan data kebencanaan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 52 Kondisi Kebencanaan Tahun 2015-2019

Indikator	Kebencanaan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Desa Tangguh Bencana	0	0	2	2	2
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Milyard)	4	4,1	4,5	6,5	5,7
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten	1	1	1	1	1
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,27	0,21	0.15	0.2	0.3

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, Tahun 2020

Desa tangguh bencana saat ini masih belum menyeluruh di desa-desa kawasan rawan bencana. Desa tangguh bencana masih merupakan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun yang akan datang diharapkan desa tangguh bencana dapat meningkat dengan memanfaatkan penganggaran melalui APBDesa.

6) Sosial

a) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah untuk meningkatkan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu anak, usia lanjut, disabilitas dan tuna sosial. Hasil dari upaya penanganan tersebut dapat dilihat dalam data Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi Penurunan jumlah PMKS dan terwujudnya keberfungsian sosial Penyandang PMKS.

Tabel 2. 53 Layanan PMKS Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rehabilitasi Sosial Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial	1.875	1.875	1.925	1.925	2.142
2.	Jumlah Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial yang seharusnya direhabilitasi Sosial	1.982	1.982	2.000	2.000	2.567
3.	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial	94,60	94,60	96,25	96,25	83,44

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, Tahun 2020

Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial

masih perlu ditingkatkan terhadap jumlah Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial yang seharusnya direhabilitasi Sosial karena semakin meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial yang semakin meningkat yang seharusnya direhabilitasi Sosial

b) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial adalah untuk dapat meningkatkan PSKS yang aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai Mitra dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di masyarakat. Hasil dari upaya tersebut dapat dilihat dalam data Pemberdayaan Sosial mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan dapat meningkatkan kapasitas PSKS.

Tabel 2. 54 Data Layanan PSKA Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial.	750	825	825	925	930
2.	Jumlah Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial yang seharusnya diberdayakan	1.015	1.050	1.050	1.145	1.325
3.	Cakupan Pemberdayaan Sosial	73,89	78,57	78,57	80,78	70,18

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, Tahun 2020

Jumlah Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial yang seharusnya diberdayakan semakin meningkat sehingga cakupan Pemberdayaan Sosial dari Jumlah Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial yang diberdayakan masih harus ditingkatkan.

Pemberdayaan disabilitas dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai upaya memberikan layanan pembangunan kepada difabel. Keberadaan difabel difasilitasi melalui Loka Bina Karya (LBK) yang diampu Dinas Sosial dan kelompok Disabel Slawi Mandiri (DSM) dan Forum Peduli Disabel (FPD) Kab. Tegal. Berikut data penyandang disabilitas miskin.

Tabel 2. 55 Pemberdayaan Disabilitas Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyandang disabilitas miskin yang mendapat pemberdayaan	3.2	3.46	5.2	6.5	7,1

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, Tahun 2020

Upaya pemberdayaan difabel dilakukan melalui strategi Aksi Bersama Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Melalui aksi bersama ini, Pemkab dan Pemdes berkomitmen menangani isu kemiskinan melalui penanganan anak putus sekolah, RTLH, jamban sehat dan pemberdayaan difabel. Dari upaya ini, penyandang disabilitas miskin yang mendapat pemberdayaan meningkat setiap tahunnya.

c) Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat yang beresiko sosial dan masyarakat yang terkena bencana. Hasil dari Upaya yang telah dilakukan dalam pemberian perlindungan dan jaminan sosial tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti tersaji dalam tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi Peningkatan.

Tabel 2. 56 Layanan Perlindungan Sosial

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Penanganan Kebencanaan dan Kelompok Beresiko Sosial	63.375	63.450	63.825	63.824	63.835
2.	Jumlah Penanganan Bencana dan Kelompok Beresiko Sosial yang seharusnya mendapat pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial	63.678	63.725	63.845	63.850	63.885
3.	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,52	99,57	99,97	99,96	99,92

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, Tahun 2020

Potensi Bencana dan jumlah Kelompok Beresiko Sosial yang seharusnya mendapat pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial semakin meningkat sehingga Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Penanganan Bencana dan Kelompok Beresiko Sosial yang seharusnya mendapat pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial harus semakin ditingkatkan. Untuk meningkatkan perlindungan sosial dan kesehatan, warga Kabupaten Tegal difasilitasi mendapat jaminan sosial dan kesehatan sebagaimana dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 57 Jaminan Perlindungan Sosial dan Kesehatan Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (%)	60	63	67	71	75
2.	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan (%)	90.01	90.04	90.05	90.8	91,2

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, Tahun 2020

Data penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan kesehatan mendasari pada upaya *Universal Health Coverage* (UHC). Dari data penduduk miskin yang ter-cover dalam PBDT dan memperoleh jaminan kesehatan hingga tahun 2019 tinggal sedikit yang belum memperoleh jaminan kesehatan.

d) Penanganan Fakir Miskin

Penanganan Fakir Miskin dilakukan melalui pendataan sosial terhadap kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir dan miskin. Dengan adanya pendataan tersebut maka jumlah kelompok masyarakat fakir miskin yang ditangani semakin meningkat. Hasil dari data Kemiskinan yang terverifikasi dan penanganan fakir miskin mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti tabel dibawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi

Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tabel 2. 58 Data Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Tegal

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	612.423	623.456	688.943	697.893	595.792
2.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang seharusnya ditangani	684.497	698.425	714.497	722.124	718.557
3.	Cakupan Penanganan Fakir Miskin	89,47	89,26	96,42	96,64	82,91

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, Tahun 2020

Kebutuhan pendataan sosial dan penanganan fakir miskin yang seharusnya ditanganisemakin meningkat dari jumlah pendataan sosial dan penanganan fakir miskin yang tertangani sehingga penanganan terhadap kelompok masyarakat fakir miskin harus terus ditingkatkan.

B. Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1.) Tenaga Kerja

a) Perusahaan Taat Aturan Hubungan Industrial

Perusahaan yang taat pada aturan Hubungan Industrial pada kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu mencapai 13.3 %.

Tabel 2. 59 Perusahaan Taat Aturan Hubungan Industrial Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Perusahaan yang taat aturan Hubungan Industrial	11.8%	11.9%	12.8%	13.3%	22,7%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020

b) Pencari Kerja yang ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Tegal pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 sangat bervariasi. Pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hal ini karena meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja. Secara rinci pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 60 Pencari Kerja yang ditempatkan Tahun 2015 -2019

Uraian	Jumlah Pencari Kerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pencari Kerja yang terdaftar	9,432	11,788	16,077	15,464	10.432
Pencari Kerja yang ditempatkan	750	715	4,555	8,383	2.780
Persentase	8%	6%	28%	54%	26,65%

2.) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai capaian kinerja pemberdayaan perempuan 2015-2019. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2015 -2019

No.	Uraian	Kinerja Pemberdayaan Perempuan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	350	350	400	700	-
2.	Jumlah pekerja perempuan di dalam negeri (Jiwa)	5.481	5.804	6.144	6.221	925
3.	Jumlah pekerja perempuan di Luar negeri (Jiwa)	783	879	516	821	1243
4.	Jumlah total pekerja perempuan (Jiwa)	6.264	6.683	6.630	7.042	2168
5.	Persentase pekerja perempuan di Dalam negeri (%)	87,5	86,85	92,67	88,34	42,72
6.	Persentase pekerja perempuan di Luar negeri (%)	12,5	13,15	7,78	11,36	0,573
7.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS (Jiwa)	5.721	5.388	5.926	5.341	4862
8.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai Anggota DPRD (Jiwa)	10	10	10	10	11
9.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif (%)	20	20	20	20	24

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Capaian kinerja APE telah menunjukkan kinerja yang baik, Kabupaten Tegal berada pada posisi APE Madya. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan yang lebih baik lagi.

Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi Negara hadir dalam melindungi segenap warga Negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran didalam kehidupan rumah tangga

Tabel 2. 62 Rasio KDRT Tahun 2015-2016

No.	Uraian	Kasus KDRT				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah KDRT	51	12	7	6	11
2.	Jumlah Rumah Tangga	431.974	430.290	444.490	447.591	450,211
3.	Rasio KDRT	0,0012	0,0027	0,00157	0,0013	0,0024

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cukup efektif untuk menindaklanjuti pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Angka KDRT perlu dipertahankan untuk ditekan. Meski demikian KDRT yang ada masih fenomena gunung es, yaitu kecenderungan korban KDRT untuk melapor dimungkinkan masih rendah karena merasa malu atau takut melapor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikoordinasikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Berikut disajikan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2. 63 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	61	78	126	53	66
Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	100	100	100	100	100

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, Tahun 2020.

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penanganan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang baik. Pada tahun 2016 jumlah laporan cukup tinggi, dan pada tahun-tahun selanjutnya jumlah laporan menurun. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum.

Perempuan ASN menduduki posisi manajer cukup mendapat tempat dalam struktur birokrasi di Kabupaten Tegal. Kondisi kinerja selalu meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dicermati dalam gambar berikut.

Tabel 2. 64 Perempuan ASN sebagai Manajer Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	25.22	26.13	26.75	27.95	28.69

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, Tahun 2020

Keberadaan perempuan ASN menduduki posisi manajer dimungkinkan karena kapasitas ASN perempuan tidak kalah bersaing dengan ASN laki-laki dari segi kapasitas, kompetensi dan kepemimpinan. Sehingga penempatan jabatan ASN perempuan dapat diterapkan, meningkat setiap tahunnya.

b) Perlindungan Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati Tabel berikut.

Tabel 2. 65 Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Capaian Pemenuhan Hak Anak	350	350	400	500	500
2.	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk.	3,48	4,18	5,22	6,62	20,6
3.	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	1,33	1,33	1,39	1,39	4,9
4.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani.	0	2	5	5	5,1
5.	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).	0	50	100	100	120
6.	Persentase Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk. Kecamatan	0	0	2	2	27,8

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.

3.) Pangan

a) Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak azazi yang harus dipenuhi. Ketersediaan pangan suatu wilayah didasarkan pada ketersediaan pangan utama, jumlah konsumsi pangan dan jumlah penduduk. Tabel berikut memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal

Tabel 2. 66 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama(ton)	183.158	214.863	221.533	221.928	221.928
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515	1.433.515
3.	Jumlah Komsumsi Pangan Utama(ton)	133.574	133.156	133.155	134.588	134.588
4.	Ketersediaan Pangan Utama (ton) terhadap Jumlah Komsumsi Pangan Utama	137,12	161,36	166,37	164,89	164,89

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan tabel dapat dilihat pada tahun 2015 ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal belum mampu memenuhi kebutuhan penduduknya karena dari jumlah konsumsi yang mencapai 176.765 hanya tersedia pangan utama 133,695 atau hanya dapat memenuhi 75,63 persen dari total kebutuhan.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal terus meningkat dapat dilihat pada tahun 2019 Jumlah ketersediaan pangan utama 221.928 ton dan jumlah penduduk 1.433.51 Jiwa, secara otomatis konsumsi pangan utama meningkat menjadi 134.588 dengan ketersediaan pangan utama mencapai 164.89 persen.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan pangan dihitung dengan mempertimbangkan dari 1) sisi permintaan (demand) dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk, indeks konsumsi beras penduduk pertahun dan 2) sisi ketersediaan (supply) dengan mempertimbangkan produksi padi, produksi beras dan tingkat produktifitas lahan sawah dalam pemenuhan kebutuhan beras.

Kebutuhan total beras di tahun 2031 sebesar 187.820,44 ton sedangkan ketersediaan padi di tahun 2031 sebesar 1.440.981,12 ton dan ketersediaan beras di tahun 2013 sebesar 936.637, 65 ton. Dari hasil perhitungan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Tegal, dapat diketahui bahwa Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masyarakat. Sedangkan untuk posisi daya dukung lahan sawah sampai akhir tahun perencanaan mempunyai nilai $\alpha > 1$, berarti wilayah tersebut mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

b) Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal

Pangan merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas serta perbaikan kualitas penduduk. Distribusi dan akses pangan memiliki peranan yang sangat strategis karena mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Distribusi pangan diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan. Tabel berikut menjelaskan tentang Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019

Tabel 2. 67 Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Distribusi dan Akses Pangan					
	-Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	48,28	49,95	77,68	104,22	104,22
	- Stabilitas harga dan pasokan	87,07	85,14	98,67	91,64	91,64
2.	Penganekaragaman dan Keamanan					
	- Skor pola pangan harapan	83,8	83,6	72,1	78,6	78,6
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	73,58	-	-	-
3.	Penanganan kerawanan pangan					
	- Penanganan daerah rawan pangan	7	16	9	15	9

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, Tahun 2020

Indikator dari jenis pelayanan Distribusi dan Akses Pangan adalah Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, serta indikator stabilitas harga dan pasokan pangan. Target komoditas yang wajib dipantau untuk diketahui informasi pasokan, harga dan akses adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah. capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah pada Tahun 2017 sebesar 77,68% dan Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 104,22%. Adapun stabilitas harga dan pasokan pangan tercapai 98,67% pada Tahun 2017 namun turun menjadi 91,64% di Tahun 2019.

Indikator dari jenis pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Pada Tahun 2017 skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tegal sebesar 72,1% dan Tahun 2019 meningkat menjadi 78,6%.

Indikator dari Penanganan Kerawanan Pangan pada Tahun 2018 sebanyak 15 Desa, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 9. Dukungan untuk pencapaian jenis pelayanan ini antara lain dengan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Kabupaten Tegal.

c) Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; dan sebagainya.

4.) Pertanahan

Urusan pertanahan berdasarkan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Terkait dengan urusan pertanahan maka pemerintah kabupaten Tegal hanya fokus pada koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan pertanahan serta memfasilitasi proses pengurusan sertifikasi tanah – tanah yang merupakan aset pemerintah kabupaten.

Tabel 2. 68 Sertifikat Tanah Pemerintah Darah Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Bidang tanah Keseluruhan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah Bidang tanah yang telah bersertifikat					
	a. Swadaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	b. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	2.500	3.250	5.000	25.000	45.000
3	Jumlah Bidang Tanah Milik Kabupaten	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	a. Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	N/A	816
	b. Belum Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	N/A	677

Sumber : BPN dan Dinas Perkimtaru Kab. Tegal, Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir hanya mampu menyelesaikan hak atas tanah milik Pemda dengan jumlah 816 bidang atau sekitar 52,22 % dari jumlah total bidang tanah yang dimiliki Pemda

5.) Lingkungan Hidup

a) Tata Lingkungan

Tata Lingkungan diharapkan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal yang dilakukan bisa berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan. Hal ini sudah ditunjukkan mulai tahun 2018 berbagai kegiatan KLHS pada Perda RTRW 1 paket, RDTR Kecamatan 1 Paket dan RPMJD 2019-2024. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Lingkungan (Kerusakan Biomassa) telah dilakukan sejak Tahun 2017 dan 2018 untuk 2 lokasi, sedangkan Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar limbah B3 Tahun 2018 untuk 1 lokasi. Adapun terkait Kajian Dampak Lingkungan tertuang dalam tabel untuk selama 5 Tahun.

Tabel 2. 69 Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL)	42	64	70	55	72
2.	SPPL (usaha kecil/mikro)	410	107	140	151	364

Sumber : DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

Kondisi tersebut diatas diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal dari semula sebesar 63,78 (kurang) menjadi bernilai cukup (66 s/d 74) serta seluruh rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan perizinannya layak lingkungan hidup.

b) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi meningkatnya jumlah pemantauan lingkungan, meningkatnya jumlah kampung iklim yang terbentuk, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), meningkatnya jumlah usahawan/kegiatan yang memiliki IPLC, dan menurunnya tingkat kerusakan lingkungan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua pihak yang terkait.

Tabel 2. 70 Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pemantauan lingkungan	63	65	54	55	68

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
2	Jumlah Rekomendasi Ijin Pembuangan Limbah Cair	4	4	9	3	4
3	Jumlah Pembinaan usaha	15	15	20	20	50
4	Jumlah Wilayah yang terkena Kerusakan Lingkungan	4	6	8	10	4

Sumber : DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

Perhitungan dari keenam jenis kajian dihasilkan rata-rata Pengendalian Kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui metode skoring yang berbeda ataupun skoring tunggal.

c) Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan

Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup selalu terawasi, dapat dicegah dan/atau dihentikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lingkungan hidup oleh pelaku usaha, penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, dan dapat tertangani dan/atau terselesaikan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Beberapa raihan kinerja dalam bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan, termasuk di tingkat provinsi juara lomba kelurahan bersih hijau 1 kelurahan tahun 2017, juara Proklim 1 Kelurahan tahun 2016, Penerima Penghargaan Kalpataru 1 orang di tahun 2013 dan 2 orang di tahun 2015, Penerima Penghargaan Pelestari Sumber Daya Genetik 1 orang di Tahun 2015. Terkait penerapan sanksi administrasi di tahun 2015 sebanyak 21 buah, Tahun 2016 sebanyak 6 buah, Tahun 2017 sebanyak 18 buah terbanyak, dan Tahun 2018 mulai menurun menjadi 4 buah. Perusahaan yang mengikuti PROPERNAS sebanyak 2 di tahun 2013, 8 perusahaan di Tahun 2014, 11 Perusahaan di Tahun 2017 dan 2 perusahaan di tahun 2018. Properda diikuti sebanyak 5 perusahaan di Tahun 2015, 7 perusahaan di Tahun 2016, 10 Perusahaan di tahun 2017 dan 3 Perusahaan di tahun 2018. Penanganan dan / atau penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 3 ditahun 2017, 9 di tahun 2017 dan 7 di tahun 2018.

Tabel 2. 71 Data Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Sekolah Adiwiyata - Tingkat Nasional - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten Denominator : Sekolah potensi minat adiwiyata (dikali %)					
		3	5	7	2	2
		19	22	24	2	4
		35	44	60	10	9
2.	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan Denominator : Total Perusahaan (dikali %)	23,2 % (43 dari 185)	30,3% (63 dri 208)	47,2 % (110 dri 233)	50,38 % (1310 dri 233)	61,25 (147 dari 240)
3.	Jumlah Penerapan Sanksi Administrasi Denominator : Hasil mapping sanksi administrasi (dikali %)	21	6	18	4	1

Sumber : DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

d) Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Hasil dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 72 Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah volume sampah yang terangkut (m ³)	251,42	289,89	347,00	512,37	566
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	960,09	458,00	496,00	640,46	573,41
3	sampah terangkut	26,19	63,29	70,00	80,00	98

Sumber: DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

Volume sampah yang terangkut per hari di Kabupaten Tegal Tahun diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan.

Tabel 2. 73 Bank Sampah Tahun 2015 - 2019

No.	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bank Sampah (unit)	81 unit	86 unit	86 unit	120 unit	149 unit
2.	Potensi Bank Sampah yg dibentuk (unit)	90 unit	100 unit	100 unit	129 unit	178 unit
3.	BS yg dibentuk (%)	90	86	86	93	84

Sumber : DLH Kab. Tegal, Tahun 2020.

Dalam penanganan sampah secara 3R, telah dibentuk Bank Sampah di komunitas masyarakat sebanyak 120 unit di tahun 2018 ini. Hal ini di harapkan

dapat meningkat di tahun 2024, sehingga program pengurangan sampah plastik di harapkan dapat secara maksimal di terapkan. Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 74 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Kondisi TPS				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah TPSS (unit)	45	72	113	118	124
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	88,71	141,92	222,75	240,66	206,43
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.424.890	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.566.587
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0.062	0.099	0,155	0,082	0,155

Sumber: DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

Sebelum sampah diangkut / dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 113 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 222,75 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem controlled landfill sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 75 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2015-2019

No	Uraian	Kondisi TPA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Volume Sampah (m ³)	91.766	104.359	124.708	137.883	
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m ²)	41.691	41.691	41.691	41.691	41.691

Sumber: DLH Tahun 2020

6.) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan Catatan Sipil adalah memberikan layanan kepada Penduduk untuk mendapatkan akta Catatan Sipil. Untuk mewujudkan layanan tersebut dilaksanakan oleh aparat dinas Dukcapil dibidang pelayanan pencatatan Sipil dan koordinasi dengan instansi yang terkait. Data penduduk berdasarkan cakupan kepemilikan akta kelahiran mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terus meningkat. Pada Tahun 2014 cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun sebanyak 47,01%, Tahun 2016 sebanyak 48,21%, kemudian Tahun 2017

meningkat cukup signifikan menjadi sebanyak 63,29%, Tahun 2018 sebanyak 63,3% dan pada Tahun 2019 kembali meningkat cakupannya menjadi sebanyak 64,11%. Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun ini sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia Sedangkan data cakupan akte kematian belum dapat disajikan karena tidak adanya data pembandingan jumlah penduduk yang meninggal per tahun.

b) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah untuk memberikan layanan kepemilikan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga dan KIA mengalami peningkatan dari capaian yang sudah ada. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan SDM yang cukup juga kompeten. Data kepemilikan KTP el, KK dan KIA mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan utamanya KTP elektronik, KK dan KIA.

Tabel 2. 76 Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik, KK, KIA Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kepemilikan KTP el	83,17	84,21	73,42	84,13	97,08
2.	Kartu Keluarga (KK)	76,32	78,52	83,75	88,68	90,86
3.	Kepemilikan KIA	-	-	7.415	-	9,68

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kepemilikan dokumen kependudukan KK dan KTP-el setiap tahunnya meningkat. Namun demikian peningkatan hasil pelayanan pendaftaran penduduk di atas belum merata untuk seluruh wilayah Kabupaten Tegal dan masih di bawah target Nasional. Masih banyak penduduk pada wilayah-wilayah tertentu yang belum memiliki KK dan KTP-el. Selain itu dibutuhkan juga dukungan dan keterlibatan segenap pemangku kepentingan agar pelayanan pendaftaran penduduk dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu untuk pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), akan dilaksanakan secara bertahap. Penerbitan KIA di Kabupaten Tegal dilaksanakan pada tahun 2017 kemudian di tahun 2018 terhenti karena tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk pencetakan KIA dan pada tahun 2019 dilaksanakan kembali penerbitan KIA.

c) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pengelolaan Informasi Adminduk adalah memberikan pelayanan SIAK, dan layanan database kependudukan sesuai perkembangan terjamin. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras bidang yang terkait. Data layanan SIAK mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan dapat menjamin layanan SIAK bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah PATEN dan OPD yang sudah melakukan perjanjian Kerjasama (PKS) layanan Administrasi Kependudukan dengan Dinas Dukcapil.

Tabel 2. 77 Layanan SIAK Antara Disdukcapil Dengan Rumah Paten dan OPD Yang Telah Melakukan PKS Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Kondisi Layanan SIAK				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Aplikasi pokok SIAK (unit)	2	3	3	3	3
2.	Aplikasi pendukung SIAK (unit)	1	2	2	3	4
3.	Jaringan SIAK (unit)	22	22	22	22	22
4.	Perangkat Keras SIAK (user)	26	26	29	33	34
5.	SDM IT SIAK (org)	1	2	2	3	4
6.	Layanan Pengolahan Data (unit)	32	33	4	5	5
7.	Profil dan Data Agregat (unit)	50	50	50	50	50

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Aplikasi pokok terdiri atas SIAK (Data Penduduk), BCard (Aplikasi Pencetakan KTP el) dan Benroll (Aplikasi Perekaman KTPel) dan Aplikasi Pendukung berupa Suplemen , SMS Gateway, Website. Jaringan SIAK melayani 3 Bidang di Dinas Dukcapil dan 18 Kecamatan. Perangkat keras yang dimiliki berupa Unit PC, Printer , Printer KTPel, Jaringan Kabel, server, kelengkapan internet dan lain-lain.

d) Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pemanfaat data yaitu OPD dan instansi lainnya (pemerintah dan swasta). Inovasi pada semua jenis produk layanan Adminduk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengurusan/pelayanan Adminduk bagi Petugas selaku pengelola layanan dan Masyarakat selaku penerima layanan.

Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan sinergitas semua bidang pada Disdukcapil dan OPD yang terkait. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mulai tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Dari data selama kurun waktu tersebut diharapkan akan terjadi penggunaan/pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pemanfaat secara signifikan untuk kegiatan pelayanan publik dan perencanaan.

Tabel 2. 78 Data Lembaga Pemanfaat Data, Jumlah Perjanjian Kerja Sama Dan Jumlah Inovasi Pelayanan Tahun 2015 - 2019

NO	URAIAN	Layanan Pemanfaatan Data				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lembaga pemanfaat data	*	*	70	32	87
2.	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)	*	*	3	7	13
3.	Jumlah Inovasi Pelayanan	*	*	2	3	3

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang dapat disajikan hanya mulai

tahun 2017 sampai dengan 2019 dikarenakan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan baru terbentuk pada Januari 2017. Penurunan jumlah lembaga pemanfaat data disebabkan karena sesuai regulasi yang berlaku bahwa data rincian penduduk tidak dapat diberikan dalam bentuk softcopy. Data rincian penduduk dapat diberikan dalam bentuk hak akses data yang diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selama ini lembaga terbanyak pemanfaat data adalah Desa.

7.) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola Pemerintahan Desa seperti Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa serta Adminstrasi Pemerintahan Desa lainnya. Dalam Tahun 2014, Desa hanya memperoleh Dana ADD antara Rp. 80.000.000 – 100.000.000 Salah satu faktor penting dalam UU Desa adalah adanya Dana Transfer yang besar untuk pembangunan di desa, bersumber dari APBN dan APBD. Adapun sejak Tahun 2015-2019, alokasi DD dan ADD sebagai berikut:

Tabel 2. 79 Alokasi Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2019

No.	URAIAN	Alokasi DD dan ADD (x Rp 1.000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	DD – APBN	81.620159	183.211.736	234.026.299	282.703.163	340.458.369
2.	ADD – APBD	114.148.118	120.409.105	120.521.520	118.087.607	122.510.452

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dana Transfer tersebut diatas tersalur 100% dari RKUD ke RKD, namun demikian penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu RKPDes dan APBDes sebagai syarat penyaluran dana transfer yang telah ditentukan batas waktu penyusunannya, yaitu RKPDes paling lambat disusun Akhir Oktober Tahun berjalan dan APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember Tahun Berjalan dalam pelaksanaannya belum mematuhi ketentuan batas waktu. Adapun data Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, sebagai berikut:

Tabel 2. 80 Dokumen Perencanaan Tingkat Desa Tahun 2015 – 2019

NO	URAIAN	Jumlah Desa yg memiliki Dok Perencanaan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	RKPDes;					
	1.Desember s/d Januari	50	75	100	125	150
	2.Pebruari s/d Maret	231	206	181	156	131
2.	APBDes					
	1.Januari s/d Pebruari	50	75	100	125	150
	2.Maret s/d April	231	206	181	156	131

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan RKPdes dan APBdes disamping karena adanya peraturan yang baru juga karena kapasitas SDM di Pemerintah Desa yang masih minim dalam memahami sistem pemerintahan desa sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang baru, Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Data LPPD sebagai berikut:

Tabel 2. 81 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Desa Tahun 2015 - 2019

NO	URAIAN	Jumlah Desa Yg Menyusun LPPD				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/LPPD	75	90	115	120	127
	a. Januari –Maret	206	191	166	161	154
	b. > Maret					

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari data diatas, terlihat dari tahun ke tahun, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) semakin membaik. Semakin banyak Desa yang menyusun LPPD sesuai dengan batasan waktunya, yaitu Januari-Maret. Namun demikian masih banyak Desa yang penyusunan LPPD nya setelah Maret, hal ini menunjukkan masih perlunya pendampingan yang optimal kepada Pemerintah Desa oleh Dinas Permasdes maupun lembaga lain.

Tabel 2. 82 Data Pengelolaan Asset Desa Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	Jumlah Desa yg Menyusun Data Asset Desa				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Neraca Aset	0	0	5	10	15
2	KIB/KIR	0	0	25	50	65

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa masih belum sesuai ketentuan. Pemerintah Desa masih dalam tahap awal inventarisir aset desa, belum dalam bentuk neraca aset desa. Dikarenakan Permendagri nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa di Ketentuan Bagian Kedua Administrasi Umum Pasal 5 Ayat 2 huruf c. Masalah Buku Inventaris dan Kekayaan Desa belum dilaksanakan dan baru dilaksanakan tahun 2017.

b) Penataan Desa

Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa ditandai jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya bertambah/meningkat. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan koordinasi semua stake holder yang terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa. Mulai Tahun 2015 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa. Sebagai ilustrasi berikut tersaji data hasil kegiatan mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun terjadi perubahan/ peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.

Tabel 2. 83 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2015-2019

No	Uraian	Kondidi Kapasitas Aparatur Desa				
		2015	2016	2017	2018	2019
A.	Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya (%)	10,34	15,75	38,17	50,15	55,19

No	Uraian	Kondisi Kapasitas Aparatur Desa				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki kompetensi (%)	9,48	15,42	22,53	32,74	33,15
1.1	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	400	650	950	1380	1.680
1.2	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa	4215	4215	4215	4215	4.232
2.	Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib (%)	0	0	17,08	40,92	60,57
2.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades	0	0	48	115	117
2.2	Jumlah Desa	281	281	281	281	281
3	Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib	0	0	100	108,18	95
3.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa	0	0	281	23	17
3.2	Jumlah Desa	281	281	281	281	281
4	Desa tertib penyusunan Perdes (%)	5,69	8,54	9,60	11,03	11,07
4.1	Jumlah Desa yang menyusun Perdes sesuai Peraturan	16	24	27	31	33
4.2	Jumlah Desa yang melaksanakan penyusunan Perdes	281	281	281	281	281
5	Desa tertib menyediakan data perkembangan Desa (%)	32,02	48,04	60,49	80,07	90,15
5.1	Jumlah Desa yang menyajikan data perkembangan Desa dengan benar	90	135	170	225	253
5.2	Jumlah Desa yang dievaluasi data perkembangan Desanya	281	281	281	281	281
6	peningkatan Desa kurang berkembang menjadi berkembang (%)	14,89	22,50	19,35	28,00	100
6.1	Jumlah Desa kurang berkembang meningkat menjadi Desa berkembangmen	7	9	6	7	25
6.2	Jumlah Desa kurang berkembang	47	40	31	25	0
1.	Monitoring dan evaluasi pemilihan kepala desa (desa)	-	-	48	115	117
2.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang menejemen Pemerintahan Desa (org)	400	650	950	1380	1.680
3.	monitoring dan Evaluasi pengadaan perangkat Desa	0	0	281	23	17

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun semakin bertambah/meningkat. Dari kondisi awal pada tahun 2015 sebesar 10,34 %

semakin meningkat hingga pada tahun 2019 sebesar 55,19 %. Untuk mencapai kondisi tersebut telah dilakukan kerja keras semua stake holder yang terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa mulai Tahun 2015 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut dengan telah dilaksanakannya berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa sebagaimana tersaji dalam tabel diatas.

c) Kemasyarakatan Desa

Kemasyarakatan Desa adalah pemberdayaan masyarakat yang ditandai Lembaga Kemasyaraktan Aktif dan LEM Yang Berdaya. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat. Hasil dari pembinaan tersebut dapat dilihat dalam data pengelolaan asset dan kelompok desa binaan mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 84 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (unit)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Lembaga Ekonomi Masyarakat					
	Jml UED-SP	35	36	39	41	41
	Jml Kelp UP2K-PKK	710	635	397	397	738
	Jml CPPD	4	4	5	5	5
	Jml Pasar Desa	3	3	3	3	24
	Jml Pokmas TTG	5	5	5	33	46
	Jml KUB	8	8	8	8	8
2.	Lembaga Kemasyarakatan					
	Jml KPMD	281	281	281	281	281
	Jml Posyandu	1315	1405	1064	1248	1518
	Jml kelompok PKK RW	1684	1397	1990	1990	1360
	Jml kelompok PKK RT	6160	6537	9546	9546	6337

Sumber: Dispermasdes Kab. Tegal, Tahun 2020

Dari Data tersebut dapat diketahui Jumlah lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat yang ada mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend yang semakin baik.

Tabel 2. 85 Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	a. Jumlah Kelompok PKK RW	1684	1397	1990	1990	1.360
	b. Jumlah Kelompok PKKRW Aktif	1684	1397	1990	1990	1.360
	c. PKK Aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	33	33	33	33	33
3.	Jumlah Desa binaan dengan jumlah Desa	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49

Sumber: Dispermasdes Kab. Tegal, Tahun 2020.

Dari data diatas menggambarkan semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sekaligus dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK, dengan Jumlah Desa binaan PKK setiap tahun sebanyak 33 Desa. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari: Posyandu, *BKB UP2K-PKK*, Pos *PAUD*, Posbindu Lansia dan Kebun Percontohan PKK. tiap tahun 11,49 % dari jumlah Desa di Kabupaten Tegal.

d) Pengembangan Desa

Sasaran yang hendak dicapai melalui pengembangan desa adalah perkembangan BUMDES dan pengembangan desa di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui koordinasi keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal, bersama dengan Dinas/Instansi terkait serta Pemerintah Desa dan masyarakat pedesaan.

Kondisi data jumlah Bumdes. jumlah kawasan pedesaan, jumlah kerjasama desa mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti tabel dibawah. Data tersebut menjadi landasan untuk mencapai sasaran program selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang.

Tabel 2. 86 Kondisi BUM Desa Tahun 2015-2019

No	Uraian	Kondisi BUM Desa				
		2015	2016	2017	2018	2019
	BUMDES tumbuh dan berkembang	0	33	40	12	30
	Jumlah BUMDES	0	15	25	35	65
1.	Status Bumdes Dasar	0	15	15	20	47
2.	Status Bumdes Tumbuh	0	5	10	15	15
3.	Status Bumdes Berkembang	0	0	0	0	0
4.	Status Bumdes Maju	0	0	0	0	0

Sumber: *Dispermasdes, 2020*

Pada akhir tahun 2019, jumlah BUMDesa yang telah berdiri di Kabupaten Tegal sebanyak 65 BUMDesa, yang berdasarkan statusnya terdiri dari BUMDesa dasar sebanyak 47, dan BUMDesa tumbuh sebanyak 15.

8.) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Indonesia umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya agar dapat terkendali sesuai yang direncanakan yaitu terjadinya Zero Growth. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian kelahiran pada pasangan usia subur. Data Laju Pertumbuhan Penduduk mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi penurunan LPP Kabupaten Tegal sebesar 0,01 tiap tahunnya sehingga target LPP Tahun 2024 sebesar 0,219 bisa tercapai.

Tabel 2. 87 Laju Pertumbuhan Tahun 2015-2019

No	Uraian	Laju Pertumbuhan Penduduk				
		2015	2016	2017	2018	2019

1.	Jumlah Penduduk	1.424.891	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.698
2.	LPP	0,34	0,32	0,289	0,260	0,241
	Penurunan LPP	0,22	0,02	0,031	0,029	0,019

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Perkembangan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Tegal dalam dekade 5 tahun terakhir dari tahun 2015- 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 88 Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2015-2019

No	Tahun	TFR
1	2015	2.30
2	2016	2.28
3	2017	2.42
4	2018	2.47
5	2019	2,24

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa TFR Kabupaten Tegal berfluktuatif. Kenaikan TFR perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Secara umum penyebab naiknya TFR adalah bertambahnya pasangan usia subur (PUS) sehingga perlu adanya perhatian yang lebih terhadap mereka untuk mengendalikan tingkat kehamilan dan kelahiran.

b) Keluarga Berencana

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tegal cukup menggembarakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Tegal mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak perkeluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 sebanyak 205.527 peserta dari 302.589 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Adapun persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) selama kurun waktu tahun 2015-2019 masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 89 Peresentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Peresentase Pemakaian Alat Kontrasepsi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	214.769	210.584	206.398	203.349	205,527
2.	Jumlah PUS	300.902	293.088	294.221	297.296	302,589
3.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	71.38	71.85	70.15	68.40	67,92

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 sebanyak 205.527 peserta dari 302.589 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya. Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada tahun 2019 mencapai 67,92%, sedangkan pada tahun 2017 – 2019 terus mengalami penurunan.

c. Keluarga Sejahtera

Untuk Pelaksanaan dan memantapkan Ketahanan Keluarga diperlukan peranan dari berbagai aspek didalamnya melalui program Tribina yakni Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia. Melalui kegiatan ini setiap kelompok Tribina akan memperoleh sekaligus dapat memantapkan setiap program dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.

Tribina merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak baik secara fisik, motorik, kecerdasan, emosional, sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya kepada balita dan anak remaja disamping itu tribina juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan masa lanjut usia (Lansia) yang produktif, mandiri dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan masyarakat.

Tabel 2. 90 Cakupan Ketahanan Keluarga Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Cakupan Ketahanan Keluarga				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	81,91% 62,3	83,03% 83,03	83,03% 83,03	71,36% 60,66	75,46% 64,30
2.	Cakupan Anggota BKR ber KB	46,88	81,64	42,57	28,11	67,71
3.	Cakupan Anggota BKL ber KB	63,48	77,37	34,6	37,85	44,56
4.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mhsw	46,6 % (48 dri 103 sek)	48,03% (49 dri 102 sek)	47,17 % (50 dri 106 sek)	48,11 % (51 dri 106 sek)	48,11% (51 dari 106 sek)
5.	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	81,66%	80,79%	80,02%	58,21%	42,61%
6.	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	1	1	1	1	1
7.	Cakupan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	1.176 (81,1 %)	1.214 (83,72 %)	1.351 (93,17 %)	1.486 (98,18 %)	1486 (98,18%)
8.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kel.	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi yaitu pada Tahun 2015 sebesar 81,91% menjadi sebesar 75,46% di tahun 2019. Sedangkan cakupan anggota Bina Keluarga

Remaja (BKR) ber KB dan Bina Kelompok Lansia (BKL) dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi.

9.) Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tegal terutama menuju pusat – pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lokasi wisata. Selain itu menunjang konektivitas, keberadaan Infrastruktur perhubungan mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan jalan. Indikator yang mudah dibaca dari keselamatan jalan adalah adanya penurunan angka kecelakaan di jalan. Berikut ini gambaran angka kecelakaan di Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 91 Angka Kecelakaan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kejadian	Korban			Penurunan
		MD	LB	LR	
2015	575	162	0	679	7,85
2016	631	172	1	723	-9,74
2017	487	156	0	512	22,82
2018	476	152	0	509	2,26
2019	619	170	0	629	

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tegal, Tahun 2020

Keterangan:

- MD : Meninggal Dunia
 LB : Luka Berat
 LR : Luka Ringan

Tabel di atas menggambarkan 5 tahun terakhir terjadi penurunan angka kecelakaan dari 624 kejadian menjadi 476 Kejadian atau penurunan sekitar 23,7%. Harapannya angka kecelakaan ini terus menurun dari tahun ke tahun. Untuk menurunkan angka kecelekaan lalu lintas, maka diperlukan upaya – upaya terkait dengan sektor perhubungan.

a) Infrastruktur Lalu Lintas

i. Kelengkapan Jalan /Rambu Lalu Lintas

Infrastruktur Lalu Lintas adalah memberikan pelayanan lalu lintas pada masyarakat melalui pemasangan rambu – rambu lalu lintas sesuai Standar. Fungsi dari Rambu perlengkapan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, angka, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk bagi pengguna jalan.

Tabel 2. 92 Kelengkapan Rambu Lalu Lintas Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kebutuhan Rambu	19.802	19.802	19.802	19.802	19.802

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
2	Rambu Terpasang	N/A	N/A	N/A	N/A	3.449
	Persentasi Rambu (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	17,42

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, Tahun 2020

ii. Lokasi Parkir

Aktifitas yang terjadi pada pusat – pusat kegiatan seperti pusat perdagangan jasa, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, seringkali berdampak pada munculnya titik – titik kemacetan akibat kantong – kantong parkir yang belum teratur dan dikelola dengan baik. Dinas Perhubungan telah melakukan pengelolaan parkir di beberapa ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, gambaran sebaran . Gambaran pengelolaan lokasi parkir di Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 93 Titik Lokasi Parkir Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lokasi yang berpotensi untuk pengelolaan Parkir	300	300	300	300	300
2	Jumlah Lokasi Parkir yg telah dikelola	133	144	157	171	203
	Persentasi lokasi parkir (%)	44,3	48,0	52,3	57,0	67,0

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun lokasi parkir yang terkelola di Kabupaten baru mencapai 67%. Sisanya masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan masih berpotensi pada munculnya titik kemacetan dan rawan pencurian kendaraan bermotor.

iii. Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasi nya. Misalnya pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, industri, permukiman dan infrastruktur akan memengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut.

Tabel 2. 94 Analisa Dampak Lalu Lintas Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Usaha Besar yang berpotensi pada perubahan sistem transportasi	12	12	12	12	12

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
2	Jumlah andalin yang disetujui	N/A	N/A	N/A	7	9
	Persentasi jumlah Andalin (%)	N/A	N/A	N/A	58,3	75

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, Tahun 2020

Kebijakan implementasi Andalin diterapkan sejak Tahun 2015 sebagai amanat Permen Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 dan Nomor 11 Tahun 2017. Tabel di atas menunjukkan bahwa saat ini Andalin masih berupa pelayanan permohonan andalin dari pemrakasa atau pengelola tertentu yang berpotensi pada perubahan sistem transportasi.

b) Infrastruktur Angkutan

i. Infrastruktur Terminal, Shelter dan Halte

Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Tegal dilayani oleh 5 Terminal yang terdiri atas 3 terminal penumpang dan 2 terminal barang. 3 terminal penumpang dengan pola pelayanan tipe c yaitu terminal dukuhsalam slawi, terminal trayeman dan terminal adiwerna. 2 terminal barang yaitu terminal/rest area klonengan dan maribaya. Sedangkan jumlah fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang telah terpasang sebanyak 30 unit.

Tabel 2. 95 Terminal dan Halte Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah sampai tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Terminal/Shelter	102	102	102	102	102
2	Halte	10	10	16	25	30
3	Terminal/Shelter	5	5	5	5	5
	Persentasi Terminal/Shelter (%)	14,7	14,7	14,7,4	29,61	29,4

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, Tahun 2020

ii. Trayek Angkutan Lalu Lintas

Seluruh angkutan umum penumpang yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Sejak tahun 2017 jumlah angkutan turun sebanyak 972 unit (angkutan penumpang) dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya karena banyak yang tidak aktif. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2018 sebanyak 124.

Tabel 2. 96 Jumlah Trayek Lalu Lintas Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah sampai tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Angkutan Umum	980	981	972	972	972
2	Jumlah Ijin Trayek	242	394	516	640	650

No	Uraian	Jumlah sampai tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Rasio Ijin Trayek	0,25	0,4	0,53	0,66	0,66

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, Tahun 2020

iii. Kelayakan Kendaraan

Seluruh angkutan umum di Kabupaten baik yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Jumlah angkutan umum yang telah melakukan ujikir pada tahun 2018 sebanyak 7.139 unit kendaraan dari 9.166 unit kendaraan (angkutan penumpang dan angkutan barang). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 97 Jumlah Angkutan yg melakukan Uji KIR Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah sampai tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Angkutan Penumpang dan Barang	8.573	8.832	8.899	9.166	9,857
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1.852	1.909	1.968	2.027	1.920

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, Tahun 2020

c) Infrastruktur Keselamatan Jalan

i. Perlintasan Sebidang

Apabila ditinjau dari sistem jaringan kereta api, Kabupaten terlantasi oleh 3 jalur rel kereta api yaitu 1) Jalur Jakarta – Tegal- Semarang – Surabaya di bagian utara yang melewati Kecamatan Kramat, Surdadi dan Warureja, 2) Jalur Tegal – Purwokerta di bagian tengah yang melewati Kecamatan Dukuhturi, Talang, Adiwerna, Slawi, Lebaksiu, Balapulang dan Margasari, serta 3) Jalur Jakarta – Cirebon – Purwakerta di bagian barat yang hanya melintasi Desa Kalisalak Kecamatan Margasari. Keberadaan jalur kereta api banyak yang crossing dengan jalan kabupaten, sehingga perlu difasilitasi pengamanan perlintasan sebidang.

Tabel 2. 98 Jumlah Perlintasan sebidang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah sampai tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Perlintasan Sebidang	53	53	53	53	53
2	Jumlah Gardu Pengaman	7	12	14	17	18
	Persentasi Gardu Pengaman (%)	13,21	22,64	26,42	32,08	33,96

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, Tahun 2020

Dari jumlah 53 perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Tegal, Sampai dengan saat ini baru dibangun gardu pengaman mencapai 18 unit atau sekitar 32,96%.

ii. Penerangan Jalan Umum

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan. Lampu Penerangan Jalan Umum disamping digunakan sebagai penerang jalan, lampu ini juga berfungsi untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas dan juga memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Sampai dengan Tahun 2019 jumlah LPJU sudah mencapai 86,28% dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal.

10.) Komunikasi dan Informatika

a) Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan Pemerintah mendorong terbentuknya Lembaga Komunikasi Masyarakat/Kelompok Informasi Masyarakat (LKM/KIM) untuk penyebarluasan informasi tentang pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah kepada seluruh masyarakat dan menyerap aspirasi dari masyarakat dan disampaikan balik kepada pemerintah, dimana LKM/KIM adalah sebagai media penghubung yang terkoordinir antara pemerintah dan masyarakat. Dengan Program Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media diharapkan LKM/KIM dapat terbentuk di 287 desa di seluruh Kabupaten Tegal.

Selain itu sesuai dengan undang-undang tersebut diatas, Pemerintah wajib mewujudkan badan publik terbuka artinya badan publik yang dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan serta hasil kegiatan dalam pembangunan dapat diakses oleh publik dan masyarakat sejauh informasi tersebut adalah bukan informasi yang dikecualikan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permohonan informasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan oleh publik dan masyarakat dapat dilakukan melalui Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Tabel 2. 99 Data Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Jumlah Badan Publik Yang Terbuka Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kualifikasi tingkat KIP Badan Publik	0	0	0	41,60	68,55
2	Jumlah Desa yang telah terbentuk LKM/KIM	6	6	6	6	10
3	Pengembangan KIM	4	6	8	10	33

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dari Tahun 2015 sampai 2019 telah melakukan klarifikasi tingkat KIP Badan Publik dan telah terbentuk LKM/KIM di 30 Desa dalam 5 Kecamatan (Slawi, Lebaksiu, Pangkah, Dukuhwaru dan Adiwerna). Adapun persentase pengembangan KIM pada tahun 2019 mengalami peningkatan 33% dibanding tahun 2018 sebesar 10%.

b) Teknologi Informasi dan Persandian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka Pemerintah diharapkan meningkatkan Indeks SPBE. Indeks SPBE merupakan pengukuran tingkat

maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan pada domain tata kelola SPBE, kebijakan internal dan layanan SPBE. Domain kebijakan internal terdiri atas 2 aspek yaitu tata kelola dan layanan. Domain tata kelola SPBE terdiri atas 3 aspek yaitu kelembagaan, strategi dan perencanaan dan teknologi informasi dan komunikasi. Domain Layanan SPBE terdiri atas 2 aspek yaitu administrasi pemerintahan dan layanan publik. Tujuan pengukuran indeks SPBE adalah 1) mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. 2) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE. 3) menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu Indeks KAMI merupakan tools untuk menganalisa dan mengevaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) keamanan informasi di sebuah organisasi sesuai dengan kriteria pada SNI ISO / IEC 27001 yaitu 1) tata kelola 2) pengelolaan resiko 3) kerangka kerja 4) pengelolaan aset 5) aspek teknologi.

Tabel 2. 100 Indeks SPBE dan Indeks Keamanan Informasi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	NA	1,9	1,8	2,82
2	Indeks Keamanan Informasi	NA	NA	NA	147	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian SPBE Kabupaten Tegal baru dilaksanakan tahun 2017 dan penilaian Indeks Keamanan Informasi mulai dilaksanakan tahun 2018.

c) Sumber Daya TIK

Tujuan pengembangan Sumber Daya TIK adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan, maupun sikap terhadap tugas-tugasnya di bidang TIK. Dalam pengembangan sumber daya TIK pada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung *e-Government*/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan berdasar Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang TIK yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam tahap selanjutnya, implementasi SPBE/*e-Government* akan berkembang menjadi Smart City yang membutuhkan sumber daya TIK yang dapat memahami dan menjalankannya Program Smart City, dimana Pemerintah Kabupaten Tegal juga sudah memiliki sebanyak 20 PNS fungsional Pranata Komputer. Berkaitan dengan bimbingan teknis TIK, berikut data jumlah ASN yang telah mengikuti bimtek di Kabupaten Tegal sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 101 Jumlah Aparatur Pemerintah Yang Mengikuti Bimtek TIK

Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bimtek internet sehat bagi masyarakat	0	0	0	100	100
2	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah	0	0	0	0	100
3	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah desa	0	0	0	100	100
4	Bimtek TIK untuk Pranata Komputer Penilaian Angka Kredit	0	0	0	20	40
5	Bimtek TIK untuk Kompetensi Pengelola Smart City	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari data diatas terlihat bahwa dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 bimbingan teknis berkaitan dengan pengembangan sumber daya TIK telah dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk masyarakat, aparatur pemerintah desa dan pranata komputer di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tegal berjumlah 20 orang pranata komputer dimana bimtek berkaitan dengan penilaian angka kredit.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sebuah unit layanan pengadaan yang memiliki kontribusi penting dalam penyelenggaraan proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal secara efisien dan efektif dan dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP/JP).

Untuk peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pelaku pengadaan sangat dibutuhkan bimtek e-procurement secara berkala dan kontinyu dan peningkatan standarisasi LPSE Kabupaten Tegal kepada standar yang telah ditetapkan oleh LKPP hingga ke standar ideal 17. Tabel 10.5 berikut menggambarkan Penyelenggaraan LPSE dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019.

Tabel 2. 102 Jumlah Bimtek Pelaku Pengadaan Dan Tingkat Standarisasi LPSE Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2017	2018	2019
1	Bimtek <i>e-Procurement</i> Bagi Pelaku Pengadaan	0	0	118	238	340
2	Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	0	0	7	10	12

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Bimtek *e-Procurement* Bagi Pelaku Pengadaan yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2017. Pada Bimtek Tahun 2019 Pelaku Pengadaan berjumlah 340 orang berasal dari OPD dan Bagian (60), Kelompok Kerja (30) dan Penyedia (40). Pada Tahun 2018 berjumlah 238 orang dimana jumlah pelaku di Tahun 2017 ditambah dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 60 orang dan Pejabat Pengadaan (PP) sejumlah 60 orang, dan terlihat pula bahwa proses Standarisasi LPSE telah dimulai sejak Tahun 2016 ketika LPSE masih unit bagian dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tegal.

11.) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu badan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019 Jumlah koperasi di Kabupaten Tegal mengalami penurunan dari 629 unit menjadi 439 unit, Namun dari tingkat keaktifan mengalami kenaikan dari 34,34% menjadi 58,31% di Tahun 2019. Perkembangan Jumlah dan tingkat keaktifan koperasi di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 103 Koperasi Aktif dan Sehat Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah koperasi aktif	216	146	152	252	256
2.	Jumlah koperasi tidak aktif	413	497	292	183	183
3.	Jumlah koperasi	629	643	444	435	439
	koperasi Aktif (%)	22,93	34,34	22,71	34,23	58,31

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Tahun 2020

Dilihat dari tingkat keaktifan, koperasi di Kabupaten Tegal dapat dikategorikan rendah (58%). Secara umum tingkat keaktifan koperasi dipengaruhi oleh keaktifan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi. Terdapat pula koperasi yang dibentuk karena adanya bantuan yang mengharuskan kelompok membentuk koperasi, sehingga pasca penerimaan bantuan, koperasi tidak lagi aktif dalam mengembangkan usaha koperasi

b) Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019, jumlah UKM di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu dari 33.520 unit menjadi 172.761 unit. Sedangkan jumlah UKM yang mempunyai legalitas mengalami peningkatan yaitu

dari 3.941 unit menjadi 7.368 unit. Perkembangan Jumlah dan UKM yang mempunyai legalitas di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 104 Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah seluruh UKM	33.520	33.530	142.412	166.092	172.761
2	UKM formal	3.941	4.193	5.060	5.916	7.368
3	UKM non Formal	29.579	29.337	137.352	160.176	165.393

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, Tahun 2020

Kenaikan jumlah UKM harusnya dibarengi dengan upaya pembinaan dan akses kemudahan dalam perijinan dan permodalan ke perbankan, karena jumlah UKM yang besar ini mampu menurunkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

c) Jumlah BPR/LKM

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga non perbankan baik koperasi maupun non koperasi yang bergerak di simpan pinjam atau didalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil. BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perkonomiannya. Jumlah BPR pada tahun 2015 berjumlah 13 , namun pada tahun 2019 mengalami penurunan 7,69% yaitu menjadi 12. Untuk jumlah LKM non Koperasi pada tahun 2015 berjumlah 557, mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2017, namun tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 105 Jumlah BPR/LKM Non Koperasi Tahun 2015- 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah BPR	13	13	11	11	11
2	Jumlah LKM Non Koperasi	557	572	618	207	6

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal Tahun 2020

12.) Penanaman Modal

a) Program Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah mendorong meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi tersebut dengan menarik para investor lokal maupun Luar Negeri untuk menanamkan modalnya di kabupaten Tegal. Nilai investasi PMA dan PMDN mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 106 Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2015 – 2019

Tahun	PMDN		PMA	
	Jml Proyek	Nilai Investasi	Jml Proyek	Nilai Investasi
2015	4.806	724.380.209.176	2	226.216.300
2016	5.628	656.376.500.000	5	1.107.984.000.000
2017	5.266	566.881.900.000	4	1.243.150.000.000
2018	7.257	1.073.862.531.863	3	480.800.000.000
2019	7.072	1.418.065.799.693	8	820.334.969.198

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi jumlah investor PMDN pada tahun 2015 – 2016 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5.266 investor. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 7.257 investor dengan nilai investasi mencapai 1.073.862.531.863, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 7.072 dengan nilai investasi sebesar 1.418.065.799.693. Dengan Peningkatan jumlah investasi PMDN mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus semakin ditingkatkan.

b) Indeks Kepuasan Masyarakat Perizinan

pelayanan perizinan yang optimal dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Tegal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat terkait perizinan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 107 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks kepuasan Masyarakat perijinan	72,38	73,87	75,32	77,61	78,08

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal Tahun 2020

Dengan melihat Tabel di atas pada tahun 2015 – 2019 selalu terjadi peningkatan kepuasan masyarakat dalam pengurusan izin, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memperoleh pelayanan perizinan yang cukup baik.

c) Pengendalian PMPTSP

Kepatuhan Perusahaan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan sangat diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal. Pengendalian PMPTSP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para investor yang dilaksanakan melalui Tim Pengendali OPD yang terkait. Kondisi kepatuhan

perusahaan yang berizin mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 108 Kepatuhan Perusahaan Berizin Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah Perusahaan berizin	5.270	5.475	755
2	Jumlah Perusahaan	11.714	11.714	1678
3	Persen Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin	45	46,73	45

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal Tahun 2020

Jumlah Perusahaan Berizin pada tahun 2017 sebanyak 5.270 meningkat pada tahun 2018 menjadi 5.475 dengan Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin meningkat 1,73% dari 45 % pada tahun 2017 menjadi 46,73% tahun 2018.

13.) Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda.

Tabel 2. 109 Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Organisasi Pemuda aktif (%)	20	31	31	50	70
2.	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi	4	3	5	6	12
3.	Persentase Wirausaha pemuda (%)	Blm ada program	Blm ada program	Blm ada program	Blm ada program	10

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Banyaknya jumlah atlet berprestasi menggambarkan pembinaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bidang olahraga. Selanjutnya dalam rangka menyongsong bonus demografi, meningkatkan ekonomi lokal dan pembangunan manusia maka akan dilaksanakan program penumbuhan wirausaha pemuda untuk meningkatkan persentase wirausaha pemuda. Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Kegiatan olahraga yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal yaitu POPDA, PORDA, Kejuaraan cabang sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, catur, renang, bola volley.

Tabel 2. 110 Organisasi Pemuda dan Klub Olahraga Kabupaten Tegal

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	30	33	33	33	33
2.	Jumlah Organisasi/Klub Olahraga	56	56	24	24	24
3.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	11	11	11	11	5
4.	Jumlah Kegiatan Olahraga	9	9	9	9	5

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, Tahun 2020

14.) Statistik

Mendasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang *reliable, up to date* dan relevan diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisa pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengembangkan program Satu Data Kabupaten Tegal melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral OPD dan Kabupaten/Kota dalam aplikasi Single Data System dan Open Data yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas.

Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD, instansi dan lembaga terkait di Tingkat Pusat dan Daerah. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah.

Capaian kinerja sejak Tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten melalui penerbitan buku Selayang Pandang Kabupaten Tegal, Nilai Tukar Petani, Analisis Sistuisi Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tegal dan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Tegal.

Pembangunan membutuhkan kekuatan, dan tanpa kekuatan pembangunan akan runtuh. Salah satu kekuatan agar pembangunan yang akan dilaksanakan kuat adalah tersedianya data statistik yang berkualitas. Dukungan ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam melakukan asesmen dan perumusan kebijakan pembangunan, alat kontrol terhadap implementasi perencanaan, termasuk kebijakan yang bersifat evaluasi terhadap hasil kerja akhir. Apa yang menjadi sumber kekuatan tersebut, semuanya tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah memerlukan data berkualitas. Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 111 Jumlah Ketersediaan Data Sheet Dan Laju Penggunaan Statistik Sektoral Pemerintah Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Data Sektoral Statistik yg Terintegrasi dgn SDS	0	0	0	0	550
2	Laju Akses Data Statistik Sektoral Oleh Masyarakat dan Stakeholders (%)	0	0	0	0	5
3	LPSE					

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dari Tahun 2015 sampai 2019, data baru dapat terwujud pada Tahun 2019 karena dalam melaksanakan pengumpulan, mengolah, menyusun, dan menganalisis serta mempublikasikan statistik sektoral baru mulai pelaksanaan pada akhir Tahun 2018 dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tegal baru terbentuk pada Tahun 2017 sehingga laju akses data juga belum termanfaatkan.

15.) Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 112 Indeks SPBE dan Indeks Keamanan Informasi Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	NA	1,9	1,8	2,82
2	Indeks Keamanan Informasi	NA	NA	NA	147	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian SPBE Kabupaten Tegal baru dilaksanakan tahun 2017 dan penilaian Indeks Keamanan Informasi mulai dilaksanakan tahun 2018.

16.) Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun demikian harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud karya-karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Disisi lain kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujudkan dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Tabel 2. 113 Kondisi Budaya Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi dan dikaji	16,98	18,41	20,14	20,05	21,40
2.	Jumlah pelaku seni, kesenian dan sanggar seni yang dibina	Pelaku seni : 520 Sanggar Seni : 311	Pelaku seni : 600 Sanggar Seni : 327	Pelaku seni : 625 Sanggar Seni : 331	Pelaku seni : 775 Sanggar Seni : 360	Pelaku seni : 1060 Sanggar Seni : 459
3.	Persentase tradisi yang dikembangkan	24	24	39	45	50

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Kurun waktu 2015-2019 pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal menunjukkan perkembangan sebagai berikut: 1) persentase benda cagar budaya dan situs budaya yang dibangun/direhab dan dikaji dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan ; 2) Jumlah pelaku seni, kesenian dan sanggar seni yang dibina semakin tahun semakin meningkat; 3) Persentase tradisi yang dikembangkan dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan.

17.) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat belajar masyarakat selain pada dunia pendidikan dan sebagai wadah di mana terdapat bahan pustaka yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan juga untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Dalam hal ini untuk memujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal mempunyai sasaran untuk mengembangkan dan meningkatkan penumbuhan perpustakaan serta minat baca masyarakat. Adapun hasil Indikator Perpustakaan selama Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 114 Indikator Perpustakaan Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan pemustaka	25.213	31.926	24.667	31.243	35.909
2.	Peningkatan koleksi judul	2.336	3.692	4.786	6.038	6.289
3.	Peningkatan perpustakaan berbasis TIK	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal

Jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan. Capaian kinerja pada tahun 2014-2018 selengkapnyanya sebagaimana Tabelberikut.

Tabel 2. 115 Jumlah Perpustakaan Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Perpustakaan Daerah (milik Pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah mobil perpustakaan keliling	1	3	3	3	3
3.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	34	34	36	56	64
4.	Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah	6	8	16	19	21
5.	Jumlah Perpustakaan OPD	16	16	43	43	26
6.	Jumlah Perpustakaan Ekstensi	4	15	16	16	31
	Total Perpustakaan (1+2+3+4)	62	77	115	138	146

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal

Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2015-2019 tidak mengalami perubahan yaitu Kabupaten Tegal memiliki 1 perpustakaan daerah milik Pemda dan perpustakaan yang dikelola oleh desa/kelurahan 64 unit, perpustakaan tempat ibadah 21 unit, perpustakaan ekstensi 31 unit dan perpustakaan OPD 26 unit. Secara total jumlah perpustakaan di tahun 2019 ada 146 unit.

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, dan tingginya ketersediaan buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan oleh pengunjung. Data jumlah pengunjung Perpustakaan Pemda Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 116 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	22.135	26.646	15.777	14.319	21.780
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	3.078	5.280	8.890	16.924	14.129
2.	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Pemda	39.163	42.186	43.586	47.331	50.631

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Jumlah pengunjung di perpustakaan milik Pemda Kabupaten Tegal mengalami penurunan pada tahun 2015 sebanyak 22.135 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 21.780 orang, sedangkan pengunjung perpustakaan keliling mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebanyak 3.078 orang, pada tahun 2018 sebanyak 14.129 orang. Koleksi buku di perpustakaan Pemda juga terus mengalami peningkatan dari 39.163 buku di tahun 2015 hingga 50.631 buku di tahun 2019.

18.) Kearsipan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan membangun birokrasi yang baik, efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola kearsipan yang baik. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi.

a) Audit Kearsipan

Audit kearsipan merupakan penilaian tata kelola kearsipan yang dilaksanakan oleh LKD dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 48 OPD, 4 BUMD, 2 Ormas dan 281 Desa. Baik atau tidaknya hasil audit dapat dilihat dari nilai LAKE (Laporan Audit Kinerja Eksternal LKD, Desa dan Ormas, dan nilai LAKI (Laporan Audit Kinerja Internal) OPD dan BUMD.

Tabel 2. 117 Penilaian LAKE dan LAKI Kearsipan Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan Nilai LAKE LKD	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	27	33	52
2.	Peningkatan jumlah OPD dan BUMD dengan Nilai LAKI Cukup	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian
3.	Peningkatan jumlah Desa dan Ormas dengan Nilai LAKE Cukup	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tegal, Tahun 2020

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal belum melaksanakan audit kearsipan terhadap 48 OPD, 4 BUMD, 2 Ormas dan 281 Desa.

b) Pengelolaan Arsip

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan kearsipan yang baik. OPD dan Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik.

Tabel 2. 118 Kondisi Pengelolaan Arsip Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah OPD yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	4	54	48	48	48
2.	Persentase jumlah OPD yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	7,40	100	100	100	100
3.	Jumlah Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	29	49	63	77	113

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
4.	Persentase jumlah Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	10,32	17,44	22,41	27,40	40,21
5.	Jumlah OPD yang telah digitalisasi kearsipan dengan baik.	3	5	13	48	48
6.	Persentase jumlah OPD yang telah digitalisasi kearsipan dengan baik.	5,55	9,26	27,08	100	100

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Mendasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2019 seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah mengelola arsip dengan baik hal ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2015 dimana jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengolah arsip dengan baik sebanyak 7,4%. Persentase jumlah desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebanyak 10,32% menjadi 40,21% pada tahun 2019. Sama halnya dengan jumlah OPD yang telah digitalisasi kearsipan dengan baik dari tahun 2015-2019 juga terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 mencapai 100%

C. Fokus Layanan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

a) Produksi Perikanan

Produksi perikanan laut di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.664.974 kg. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2015-2019). Sedangkan jumlah produksi perikanan di perairan budidaya pada tahun 2017 sebanyak 1.933.115 kg, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2017 mencapai 20,43 kg/perkapita/tahun. Berikut secara lengkap disajikan data tentang jumlah produksi dan konsumsi ikan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2015-2019 sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 119 Produksi Perikanan Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perikanan laut					
	- Produksi (kg)	796.631	1.315.879	1.441.201	1.343.621	1.664.974
	- Nilai (Rp 000)	7.447.623	9.436.612	10.603.486	11.343.111	12.887.350
2.	Perairan Umum					
	- Produksi (kg)	189.390	247.810	209.018	207.802	206.982
	-Nilai (Rp 000)	1.786.754	2.920.102	3.686.047	3.116.167	3.104.377
3.	Perikanan Budidaya					

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	- Produksi (kg)	2.059.158	1.874.041	1.933.115	2.047.818	2.511.329
	-Nilai (Rp 000)	36.926.775	40.937.539	75.021.353	86.814.081	127.440.566
	Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)	19,46	20,43	20,43	21,10	21,10

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Tabel 2. 120 Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengolahan hasil perikanan					
	- Produksi (kg)	3.603.151	3.212.586	3.409.674	2.047.818	2.543.756
	- Nilai (Rp.000,-)	7.926.932	7.067.689	7.501.283	4.514.145	5.596.263

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

b) Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Pada tahun 2019 jumlah produksi daging mencapai 10.167.793 kg, adapun jumlah konsumsi daging mencapai 5.79 kg/kapita/tahun. Jumlah produksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018, di mana produksi daging mencapai 10.057.415 kg dan konsumsi daging 5,79 kg/kapita/tahun, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk Kabupaten Tegal. Konsumsi telur di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mencapai 4,80 kg/kapita/tahun, dengan jumlah produksi sebanyak 10.249.993 kg. Jumlah konsumsi susu di kabupaten Tegal tahun 2017 mencapai 0.43 kg/kapita/tahun. konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 121 Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, telur dan susu Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Daging :					
	Produksi (kg)	6.809.218	9.675.621	9.784.502	10.057.415	10.167.793
	Konsumsi(kg/kapita /th)	4,61	4,69	4,69	5,79	5.79
2.	Telur					
	Produksi (kg)	10.861.860	10.203.264	10.249.993	10.258.158	10.261.185

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Konsumsi(kg/kapita /th)	4,71	4,80	4,80	6,01	6,02
3.	Susu					
	Produksi (kg)	633.323	713.192	713.428	713.890	705.877
	Konsumsi(kg/kapita /th)	0,42	0,43	0,43	3,53	3,53

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal dan BPS Tahun 2020

2) Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah pada urusan bidang pariwisata mencakup: (1). Destinasi Pariwisata, dengan kewenangan: pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/ kota; (2). Pemasaran pariwisata, dengan kewenangan: pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri tentang daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (3). pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kewenangan: penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota; dan (4). pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan kewenangan: pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tegal Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 122 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah obyek wisata (obyek)	37	37	37	37	37
2.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	771.697	905.829	1.053.957	950.771	1.189.877
	a. Wisatawan Manca Negara	308	1.721	1.470	3.805	3.247
	b. Wisatawan Nusantara	771.389	904.108	1.052.487	946.966	1.186.630
3.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	257.232	301.943	351.319	315.655	297.469

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal

Jumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Tegal sejak tahun 2015-2019 sebanyak 37 DTW. Jumlah kunjungan ke-3 Daerah Tujuan Wisata (DTW) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tersebut sebanyak 1.189.877 orang pada tahun 2019 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara 1.186.630 dan wisatawan mancanegara sebesar 3.247 orang, hal ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2014-2018).

PAD sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD unggulan di

Kabupaten Tegal. Berikut data 5 tahun terakhir PAD sektor pariwisata di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 123 PAD Sektor Pariwisata Tahun 2015-2019

No	Tahun	PAD Pariwisata terhadap PAD
1	2015	35,18
2	2016	40,57
3	2017	41,23
4	2018	26,63
5	2019	30,73

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Capaian tahun 2018 menurun dibanding capaian tahun 2017. Hal ini disebabkan karena jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola pemerintah menurun. Destinasi obyek wisata yang dikelola masyarakat berkembang sehingga menjadi alternatif daerah kunjungan wisata bagi masyarakat di samping obyek wisata yang dikelola pemda.

3) Pertanian

a) Kelembagaan SDM Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Secara lengkap komposisi jumlah penyuluh di Kabupaten Tegal sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2. 124 Jumlah Penyuluh Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyuluh PNS :					
	a. Pertanian	88	88	108	108	108
	b. Perikanan	6	-	-	-	-
	c. Kehutanan	15	-	-	-	-
2.	Penyuluh THL - TBPP	81	77	49	49	49
		81	81	81	81	81
3.	Penyuluh Swadaya :					
	a. Pertanian	132	-	-		
	b. Perikanan	11	-	-		
	c. Kehutanan	30	-	-		
	Jumlah	363				

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan peraturan perundangan baru yang berlaku maka pada tahun 2017 penyuluh pertanian menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penyuluh PNS di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 93 orang penyuluh, maka di Tahun 2015 menjadi 88 orang penyuluh. Demikian pula Penyuluh Kehutanan dari PNS, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 20 orang penyuluh menjadi 15 orang penyuluh pada Tahun 2015. Adapun penyuluh pertanian relatif tetap.

b) Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Perkembangan sektor pertanian dipengaruhi oleh produktivitas dari masing-masing komoditi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain luas tanam, luas panen serta hasil produksi. Pada tabel berikut menjelaskan tentang produktivitas komoditi pertanian, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019

Tabel 2. 125 Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Padi					
	Luas Tanam (ha)	64.819	76.761	64.297	61.149,9	56.050
	Luas Panen (ha)	62.628	65.499	65.660	64.037	57.620
	Produksi (ton)	382.161	394.023	373.525	377.924	360.431
	Produktivitas (ton/ha)	6,10	6,02	5,69	5,90	6,25
2.	Jagung					
	Luas Tanam (ha)	0/S	12.799	10.028	16.348,9	21.238
	Luas Panen (ha)	16.141	15.699	7.982	16.465	17.506
	Produksi (ton)	121.994	118.288	45.069	124.200	117.236
	Produktivitas (ton/ha)	7,55	7,53	5,65	7,54	6,69
3.	Kedelai					
	Luas Tanam (ha)	92	68	151	419,7	119
	Luas Panen (ha)	90	60	104	308	75
	Produksi (ton)	166	108	154	173	81
	Produktivitas (ton/ha)	1,86	1,81	1,48	5,62	1,07
4.	Ketela Pohon					
	Luas Tanam (ha)	387	292	286	201	299
	Luas Panen (ha)	501	287	259	222	238
	Produksi (ton)	9.122	6.710	5.928	1.623	4.377
	Produktivitas (ton/ha)	18,22	23,35	22,89	73,11	18,37
5.	Ketela Rambat					
	Luas Tanam (ha)	83	50	38	79,8	88
	Luas Panen (ha)	95	55	35	72	82
	Produksi (ton)	933	637	346	1.066	663
	Produktivitas (ton/ha)	10,51	11,56	9,89	14,80	8,03
6.	Kacang Tanah					
	Luas Tanam (ha)	199	126	66	130,6	168
	Luas Panen (ha)	197	135	75	117	106
	Produksi (ton)	494	363	90	147	141
	Produktivitas (ton/ha)	2,51	2,69	1,20	1,25	1,3
7.	Kacang Hijau					
	Luas Tanam (ha)	55	11	9	36,8	7
	Luas Panen (ha)	58	14	0	32,9	3
	Produksi (ton)	60	16	0	48	3
	Produktivitas (ton/ha)	1,04	1,20	0	1,47	1,2
	Sayuran dan Buah Semusim					
1.	Bawang Merah					
	Luas Tanam (ha)	1.783	1.926	2.414	1.901	1.666
	Luas Panen (ha)	2.091	1.884	2.323	1.901	1.741

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Produksi (ton)	212.204	19.828	248.276	161.966	168.797
	Produktivitas (ton/ha)	10,15	10,52	106,86	85,20	72,27
2.	Cabe					
	Luas Tanam (ha)	303	327	360	495	592
	Luas Panen (ha)	353	328	397	418	628
	Produksi (ton)	3.130	3.581	38.705	25.185	41.827
	Produktivitas (ton/ha)	8,87	10,92	97,49	74,08	79,39
3.	Kentang					
	Luas Tanam (ha)	418	459	409	400	1.950
	Luas Panen (ha)	348	548	406	338	413
	Produksi (ton)	3.761	11.866	87.160	80.205	96.540
	Produktivitas (ton/ha)	10,81	21,65	214,68	74,08	79,39
4.	Kubis					
	Luas Tanam (ha)	1.179	1.162	1.090	975	1.950
	Luas Panen (ha)	1.276	1.202	1.108	948	761
	Produksi (ton)	21.313	26.190	195.015	169.360	99.982
	Produktivitas (ton/ha)	16,70	18,82	177,81	132,43	131,38
5.	Semangka					
	Luas Tanam (ha)	109	123	72	42	135
	Luas Panen (ha)	109	123	72	42	113
	Produksi (ton)	1.389	1.689	7.185	5.562	19.358
	Produktivitas (ton/ha)	12,74	13,73	99,79	132,43	171,31
	Tanaman Hias					
1.	Melati					
	Luas Tanam (ha)	1	-	10.000	0	2.000
	Luas Panen (ha)	337	341	3.419.250	2.095.440	2.182.390
	Produksi (ton)	5.807	4.796	5.263.728	2.585.981	3.142.270
	Produktivitas (ton/ha)	17,23	14,07	1,54	1,23	3,04
	Perkebunan Rakyat					
1.	Kelapa Dalam					
	Luas Tanam (ha)	4.186	3.665	3.370,66	3.180,76	2.905
	Luas Panen (ha)	2.283	2.123	2.027,40	1.903,4	1.638
	Produksi (ton)	2.155	1.887	1.807,94	1.814	1.296
	Produktivitas (ton/ha)	0,94	0,89	891,75	0,953	0,791
2.	Cengkeh					
	Luas Tanam (ha)	1.282	1.325	1.323,48	1.821.32	1.851,42
	Luas Panen (ha)	768	765	764,17	768,40	742,2
	Produksi (ton)	85	140	140,31	110	63,64
	Produktivitas (ton/ha)	0,11	0,18	183,61	0,143	0,085
3.	Teh					
	Luas Tanam (ha)	163	163	164,73	165,73	170,93
	Luas Panen (ha)	121	129	128,43	135,35	135,30
	Produksi (ton)	35	35	35,06	56,39	33,49
	Produktivitas (ton/ha)	0,29	0,27	273,02	0,41	0,247
4.	Tebu					
	Luas Tanam (ha)	3.548	3.265	2.687,30	1.809,857	1.856,029
	Luas Panen (ha)	3.548	3.265	2.669,18	1.804,857	1.856
	Produksi (ton)	15.872	14.299	30.912,06	7.104,132	7.066
	Produktivitas (ton/ha)	4,47	4,38	11,58	3,925	3,807

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, Tahun 2020

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, palawija sayuran dan buah-buahan relatif stagnan bahkan beberapa cenderung berfluktuatif seperti tanaman padi dari tahun 2010–2014 pergerakannya tidak stabil. Ditahun 2012 produktivitas mencapai 5,94 ton/ha dan mengalami penurunan di tahun 2013 sebanyak 5.76 ton/ha. Sedangkan untuk produktivitas tanaman hias melati pada tahun 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2011-2012. Pada tahun 2014 produktivitas tanaman hias mencapai 25,16 ton/ha sedangkan pada tahun 2011, 2012 masing-masing mencapai 3,50 ton/ha, 3,07 ton/ha.

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas.

Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan contoh tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi ($\sum (P_i \times H_i)$).

Tabel 2. 126 Perhitungan Nilai Produksi Total Kabupaten Tegal

No	Komoditas	Produksi (Pi) Kuantum 2012	Harga /Satuan (Hi)	Nilai Produksi/satuan dalam Rupiah (Pi x Hi)
1	Bahan Makanan			
	Padi	373.524	409.900	153.107.487.600
2	Sayuran			-
	Kangkung	3.026	7.500	22.695.000
	Sawi/Cesim	35.020	14.000	490.280.000
	Bawang Merah	248.239	16.069	3.988.952.491
3	Buah-Buahan			
	Pisang	96.629	20.000	1.932.580.000
	Mangga	31.024	25.000	775.600.000
	Jambu Biji	9.153	25.000	228.825.000
	Jambu Air	3.905	50.000	195.250.000
	Pepaya	10.242	10.000	102.420.000
	Nangka	18.263	45.000	821.835.000
	Belimbing	2.243	40.000	89.720.000
4	Peternakan			
	Sapi Potong (ekor=250kg)	1.315.845	101.750	133.887.228.750
	Kerbau (ekor=250kg)	26.593	110.000	2.925.230.000
	Domba/Kambing (ekor=20kg)	930.958	65.000	60.512.270.000
	Kambing (ekor=20kg)	493.740	100.000	49.374.000.000
	Ayam Kampung (ekor=2kg)	6.500.169	57.357	372.830.193.333
	Ayam Buras (16 telur=1kg)	237.802	50.000	11.890.100.000
	Itik (ekor=1,5kg)	162.154	70.000	11.350.780.000
	Lainnya (puyuh, kelinci, angsa)	117.241	30.000	3.517.230.000
	Burung Dara	2.289	30.000	68.670.000
	Telur Ayam Kampung	7.144.390	2.000	14.288.780.000
	Telur Itik	912.840	2.000	1.825.680.000
	Telur Puyuh	43.642	500	21.821.000
	Susu	713.428	4.000	2.853.712.000
	Jumlah Total			827.101.340.174

Sumber Data : KLHS RPJMD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Ketersediaan lahan dari hasil perhitungan tahun 2017 sebesar 104.908,85 Ha. Perhitungan kebutuhan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Kemampuan lingkungan hidup dalam pemenuhan lahan untuk hidup layak dihitung dengan memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak perpenduduk yang dilihat dari dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan lahan di Kabupaten Tegal di tahun 2017 adalah sebesar 215.027,25 Ha dan di tahun 2031 diproyeksikan sebesar 225.583,05 Ha.

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dapat ditentukan status daya dukung lahan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil perhitungan diatas didapatkan bahwa :

- Untuk Tahun 2017 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L , (215.027,25 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.
- Untuk Tahun 2031 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L , (225.583,05 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.

c) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk dapat lebih berkembang dari kondisi eksisting saat ini,hal ini dapat dilihat darikontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRBKabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 13,29 %. Selain merupakan kontributor ketiga terbesar dalam perekonomian wilayah, angka di atas menunjukkan bahwa inflasi di sektor pertanian relatif lebih rendah daripada inflasi pada sektor lainnya. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini. Sebagaimana Tabel 2.152 di bawah ini.

Tabel 2. 127 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2015-2019

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019*
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian:					
	- ADH Berlaku	3.879.322,43	4.114.690,91	3.755.551,54	4.395.637,80	4.495.443,15
	- ADH Konstan	2.832.654,60	2.935.344,86	2.657.779,26	3.001.385,12	3.011.429,74
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADH Berlaku	25.590.642,44	27.727.792,98	30.044.412,28	33.079.234,10	33.079.234,10
	- ADH Konstan	19.992.675,45	21.265.717,23	21.265.717,23	23.552.548,37	23.552.548,37
3.	Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	15,16	14,84	12,50	13,29	12,76
	- ADH Konstan	14,17	13,80	11,88	12,74	12,14

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

d) Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Pada tahun 2019 jumlah produksi daging mencapai 10.167.793 kg, adapun jumlah konsumsi daging mencapai 5.79 kg/kapita/tahun. Jumlah produksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018, di mana produksi daging mencapai 10.057.415 kg dan konsumsi daging 5,79 kg/kapita/tahun, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk Kabupaten Tegal. Konsumsi telur di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mencapai 4,80 kg/kapita/tahun, dengan jumlah produksi sebanyak 10.249.993 kg. Jumlah konsumsi susu di kabupaten Tegal tahun 2017 mencapai 0.43 kg/kapita/tahun. konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 128 Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, telur dan susu Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Daging :					
	Produksi (kg)	6.809.218	9.675.621	9.784.502	10.057.415	10.167.793
	Konsumsi(kg/kapita /th)	4,61	4,69	4,69	5,79	5.79
2.	Telur					
	Produksi (kg)	10.861.860	10.203.264	10.249.993	10.258.158	10.261.185
	Konsumsi(kg/kapita /th)	4,71	4,80	4,80	6,01	6,02
3.	Susu					
	Produksi (kg)	633.323	713.192	713.428	713.890	705.877
	Konsumsi(kg/kapita /th)	0,42	0,43	0,43	3,53	3,53

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal dan BPS, Tahun 2020

4) Perdagangan

a) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Tegal dari tahun 2015 sampai tahun 2017 meningkat tetapi tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 2. 129 Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Ribuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai Ekspor	153.188.157.270	209.619.490.505	228.638.224.198	169.760.204.000	205.000.000.000
2.	Nilai Impor	64.630.930.460	16.312.612.489	54.801.884.058		
3.	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor - Nilai Impor)	88.557.226.810	193.306.878.015	173.836.380.139	199.306.877.015	102.000.000.000

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, Tahun 2020

b) Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua. Pada tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan mencapai 15,73% dan atas dasar harga konstan adalah sebesar 29,13%. Perbedaan kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor ini relatif mengalami inflasi yang cukup tinggi. Sebagai sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian dan dengan tren yang stabil meningkat, maka sektor perdagangan selainya menjadi sektor utama yang dikembangkan. Ditopang dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis, perkembangan kota kecamatan yang cukup pesat, dan kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan yang signifikan, maka pada dasarnya sektor perdagangan dapat berkembang tanpa adanya campur tangan pemerintah secara masif. Tugas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengembangan sektor ini adalah menerapkan regulasi yang menjamin keadilan dalam berusaha, serta menyediakan infrastruktur pendukung sektor perdagangan yang dapat diakses oleh semua orang. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 130 Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB Tahun 2014 - 2019

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019*
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor):					
	- ADH Berlaku	1.935.916,03	2.101.862,50	4.725.986,05	4.942.943,53	5.449.555,30
	- ADH Konstan	1.564.698,24	1.648.467,47	3.872.572,30	3.954.562,55	4.307.730,96
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	25.590.642,44	27.727.792,98	30.044.412,28	33.079.234,10	35.231.687,56
	- ADH Konstan	19.992.675,45	21.265.717,23	21.265.717,23	23.552.548,37	24.806.727,91
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) thd PDRB					
	- ADH berlaku	15,96	15,63	15,42	15,73	15,47
	- ADH Konstan	17,57	17,35	17,16	17,31	17,37

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

5) Perindustrian

a) Produk Lokal dan Lembaga Usaha yang Terstandarisasi

Kabupaten Tegal memiliki potensi industri yang sangat besar baik industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil maupun Aneka. Potensi Industri tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Tegal. Dalam upaya mempersiapkan daya saing ekonomi daerah perlu adanya standarisasi produk dan lembaga usahanya. Peningkatan standarisasi produk dan Lembaga usaha dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 131 Produk Lokal dan Lembaga Usaha yang Terstandarisasi

Tahun 2015 – 2019

Uraian	Kondisi Per Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Produk Lokal dan Lembaga Usaha yang Terstandarisasi	0.10%	0.13%	0.13%	0.17%	0,19%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Tegal, Tahun 2020

b) IKM yang memperoleh Legalitas Usaha

Sektor industri di Kabupaten Tegal didominasi oleh industri makanan, tekstil dan mesin. Industri makanan terutama didorong oleh adanya pabrik teh yang berskala nasional, serta industri kecil dan menengah yang memproduksi makanan ringan serta tempe dan tahu. Pertumbuhan industri makanan sangat pesat, untuk menjalankan usahanya perlu adanya legalitas usaha dalam operasionalnya. Perkembangan IKM dibidang industri dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 132 IKM yang memperoleh Legalitas Usaha Tahun 2015- 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
IKM yang memperoleh Legalitas Usaha	0.39%	N/A	0.43%	0.45%	1,92%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Tegal Tahun 2020

6) Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya. Adapun jumlah transmigran yang diberangkatkan selama Tahun 2015-2019 sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 2. 133 Jumlah Transmigran Tahun 2015 – 2019

Tahun	Lokasi	Jumlah	
		KK	Jiwa
2015	Kab Bangka Barat Bangka Belitung	6	23
2016	Kab Pahuwato Provinsi Gorontalo	3	8
	Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo	4	14
2017	Kab Kolaka Timur Sulawesi Tenggara	2	13
	Kab Bukit Aren Provinsi Gorontalo	2	8
2018	Kab Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu	3	15
2019	Tanjung Buka sp.6 Kab. Bulungan Kalimantan Utara	3	16
JUMLAH		23	97

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2020

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Administrasi Pemerintahan

a). Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi 1) pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara padainstansi Daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Gambaran umum mengenai capaian di Sekretariat daerah sebagai berikut:

i. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah difokuskan pada indikator Persentase Indeks reformasi birokrasi, presentase OPD rumpun pemerintahan sebesar skor LKJIP B, Nilai SAKIP Kabupaten, Persentase IKM Kecamatan dan Persentase IKM Kabupaten. Indikator-inidkator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum yang menjadi tanggungjawab koordinasi Sekretariat Daerah. Berikut digambarkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 134 Capaian Kinerja Pemerintah Derah Tahun 2015-2019

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks reformasi birokrasi	43,94	44,56	45,01	45,25	63,69
2	Persentase OPD rumpun pemerintahan skor LKJIP B + (%)	51,56	53,87	54,74	55,41	66,66
3	Nilai SAKIP Kabupaten	56,7	56,9	57,0	60,01	61,36
4	Persentase IKM Kecamatan (%)	68,45	69,04	69,22	71,28	77,77
5	Persentase IKM Kabupaten (%)	70,5	70,8	71,4	71,8	78,37

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019

Capaian kinerja pemerintah daerah difokuskan pada indikator Persentase Indeks reformasi birokrasi Tahun 2019 63,69, presentase OPD rumpun pemerintahan sebesar skor LKJIP B +, sebesar 66,66% (Nilai A: 1, BB: 6, B: 25, CC: 7, C: 7, D: 1), Nilai SAKIP Kabupaten sebesar 61,36, Persentase IKM Kecamatan sebesar 77,77 dan Persentase IKM Kabupaten sebesar 78,37. Indikator-inidkator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum yang menjadi tanggungjawab koordinasi Sekretariat Daerah. Peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah tersebut memerlukan upaya-upaya tertentu untuk dapat meningkatkannya. Salah satunya mengoptimalkan peran koordinasi, asistensi dan fasilitasi Asisten Sekda yang mengampu semua OPD di Kabupaten Tegal.

ii. Koordinasi Implementasi Peraturan-Peraturan Pemerintah

Kabupaten Tegal sebagai wilayah yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia wajib melaksanakan atau mengimplementasikan peraturan pemerintah yang ada. Di samping itu, Kabupaten Tegal juga memerlukan kerjasama daerah atau kerjasama antara daerah untuk akselerasi kinerja pembangunan. Berikut digambarkan kondisi implementasi peraturan pemerintah dan kerjasama daerah.

Tabel 2. 135 Koordinasi Implementasi Peraturan-Peraturan Pemerintah 2015-2019

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase peraturan pemerintahan yang diimplementasikan	89,7	89,9	91,2	92,6	92,8
2.	Persentase kerjasama antar Pemerintah Daerah yang terealisasi	100	100	100	100	120

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019

Capaian presentase peraturan pemerintahan yang diimplementasikan yang semakin baik dari tahun 2015 sebesar 89,7 semakin meningkat setiap tahun dan pada tahun 2019 tercapai sebesar 92,8. Kabupaten Tegal juga memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah untuk akselerasi kinerja pembangunan, untuk Tahun 2019 dari target 20 terealisasi sebanyak 24 (120%), kerjasama antar pemerintah daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa koordinasi Setda dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah dan kerjasama antar pemerintah daerah relatif telah berlangsung optimal meskipun ke depan perlu dilakukan upaya-upaya koordinasi lebih sinergis agar peraturan pemerintah yang ada semua dapat diimplementasikan dalam bentuk peraturan pelaksanaan di daerah maupun pelaksanaan melalui program dan kegiatan yang ada.

iii. Layanan Bidang Hukum, Pengadaan Barang Jasa dan Kehumasan Kepala Daerah

Pembentukan Perda, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Daerah di samping layanan di bidang penyebarluasan informasi kehumasan kepala daerah. Berikut capaian kinerja bidang hukum, pengadaan barang dan jasa serta kehumasan lima tahun terakhir.

Tabel 2. 136 Layanan Bidang Hukum, Pengadaan Barang Jasa dan Kehumasan Kepala Daerah Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	100	100	100	100	100
2.	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	100	100	100	100	300
3	Persentase OPD lelang selesai	98,9	99,5	99,7	99,8	96

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
4.	Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara <i>on-line (e- procurement)</i>	100	100	100	100	100
5	Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019

Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan sebesar 100% (target 8 Perda), sedangkan penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi sebanyak 21 dari 7 target (300%).

Persentase OPD yang melakukan lelang selesai tidak terpenuhi dari 126 total yang ditenderkan ada 5 gagal tender (96%). Namun proses selesai yang ada seringkali tidak di awal waktu hal ini terjadi karena terlambatnya OPD dalam mengumumkan paket pekerjaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pelelangan (SIRUP) di awal tahun.

Kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat telah optimal. Hal ini menggambarkan upaya mendiseminasikan informasi pembangunan kepada masyarakat telah berlangsung sesuai SOP.

b). Sekretariat DPRD

i. Peningkatan Fungsi Legislasi.

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi dimana DPRD memiliki kekuasaan untuk menyusun peraturan daerah. Untuk mengukur kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya menggunakan indikator penganggaran raperda, jumlah prolegda dan jumlah perda yang ditetapkan dalam 1 tahun. Data selama kurun waktu 5 tahun dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 137 Persentase integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	47,86	49,51	51,11	52,31	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020

Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah ada disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja (Renja) pada setiap alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tegal, sehingga kinerja DPRD Kabupaten Tegal belum sepenuhnya terarah dan akuntabel.

Tabel 2. 138 Data Raperda yang dianggarkan, Prolegda, dan Perda yang

di tetapkan dari tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pembahasan Perda yang dianggarkan	7	7	7	7	8
2.	Jumlah Prolegda	30	10	22	13	15
3.	Jumlah Perda ditetapkan	14	14	13	7	8

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari tabel diatas, bisa dilihat kemampuan anggaran untuk pembahasan Raperda cukup konsisten setiap tahun yaitu 7 (tujuh) Raperda, meskipun jumlah prolegda yang diagendakan dari tahun ke tahun cukup fluktuatif, begitu juga dengan jumlah perda yang ditetapkan pada tahun 2015 dan 2016 dapat mencapai dua kali lipat (14) dari raperda yang dianggarkan (7), selanjutnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2018 dari 7 raperda yang dianggarkan dapat menghasilkan 7 buah perda.

ii. peningkatan fungsi pengawasan

Sesuai fungsinya DPRD sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka melalui program ini diharapkan adanya optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menggambarkan jalannya fungsi pengawasan DPRD maka menggunakan indikator Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan yang dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 139 Program peningkatan fungsi pengawasan tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan	52,88	52,97	53,21	54,22	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Persentase integrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD masih belum sepenuhnya sinkron disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja DPRD pada setiap alat kelengkapan DPRD sehingga ada beberapa program DPRD yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada atau tidak cukupnya anggaran.

2) Perencanaan

a) Perencanaan Penganggaran Pogram

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, top-down & bottom-up. Perencanaan

dan penganggaran program adalah untuk memastikan penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Tegal yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sesuai tahapan. Adapun pencapaian penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti tabel dibawah, dan diharapkan 5 tahun kedepan dengan target 100% dapat diwujudkan.

Tabel 2. 140 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program Disusun Tepat Waktu Tahun 2015-2019

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan data diatas maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik tahapan maupun waktunya. Hal ini perlu dipertahankan dan secara kualitas masih diperlukan adanya peningkatan di masa mendatang.

b) Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui koordinasi stakeholder rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Pencapaian keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dengan dokumen perangkat daerah rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial sesuai tahapan dalam tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 141 Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Keselarasn Dokumen Perencanaan Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD rumpun Pemkesos (%)	95	96	96	97	97

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2020

Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial dengan dokumen perencanaan OPD rumpun

pemerintahan dan kesejahteraan sosial belum mencapai 100% dikarenakan masih adanya kegiatan inisiatif dari OPD yang muncul setelah penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai akibat adanya dinamika dalam pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan sosial.

c) Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur

Perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD di bidang perekonomian dan infrastruktur dapat menghasilkan kondisi perekonomian dan infrastruktur daerah yang baik sesuai dengan harapan masyarakat. Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen RKPD rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan Renja OPD pada rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur. Dengan keselarasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pembangunan ekonomi dan kondisi infrastruktur di kabupaten Tegal. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan dokumen perangkat daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur sesuai tahapan dapat dilihat dalam tabel dibawah.

Tabel 2. 142 Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur Tahun 2015-2019

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Keselarasn Dokumen Perencanaan Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD rumpun Ekbangtur (%)	94	94	95	96	96

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Keselarasn dokumen perencanaan daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan dokumen perencanaan OPD rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur belum dapat mencapai 100% dikarenakan terdapat perbedaan dalam penerapan detail teknis kegiatan khususnya yang menyangkut konstruksi bangunan.

d) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan adalah untuk mengendalikan kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan dan mengevaluasi capaian indikator pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian operasional kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan serta evaluasi kinerja pembangunan. Hasil pencapaian kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan serta capaian indikator pembangunan sesuai target dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 143 Tingkat Kesesuaian Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2015-2019

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata - Rata Deviasi Capaian Kinerja Fisik (%)	20,88	17,21	13,75	15,05	3,80

2.	Rata – Rata Deviasi Capaian Kinerja Keuangan (%)	34,80	28,59	22,73	21,86	11,63
3.	Rata – Rata Deviasi (%)	27,84	22,90	18,24	18,46	7,72
4	Tingkat Kesesuaian Rencana dan Realisasi Kegiatan (%)	72,16	77,1	81,76	81,54	92,28

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Tingkat kesesuaian rencana dan Realisasi Kegiatan dicerminkan dengan adanya rata-rata deviasi kegiatan yang dicapai. Semakin kecil deviasi antara rencana dan realisasi kegiatan semakin baik kinerja kegiatan pembangunan. Berdasarkan Tabel diatas, tingkat kesesuaian antara rencana dan realiasi kegiatan dalam 5 tahun terakhir semakin membaik. Tahun 2019 rata - rata deviasi kegiatan mencapai 7,72% dan merupakan yg terbaik selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan realisasi kegiatan tahun 2019 mencapai 92,28 %.

Tabel 2. 144 Tingkat Capaian Indikator Pembangunan Sesuai Target Tahun 2015-2019

No	Indikator Pembangunan	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Indikator sasaran tercapai	123	132	159	178	161
	Jumlah Indikator sasaran	200	200	200	200	200
	<i>Tingkat Capaian Indikator Tercapai (%)</i>	61,50	66,00	79,50	89,00	83,85
2.	Jumlah Indikator Program Tinggi/Sangat Tinggi	323	335	357	402	444
	Jumlah Indikator Program	518	518	518	518	518
	<i>Tingkat CapaianTinggi/Sangat Tinggi (%)</i>	62,36	64,67	68,92	77,61	85,71
3.	Jumlah IKD tercapai	153	177	196	253	219
	Jumlah IKD	315	307	307	307	307
	<i>Tingkat Capaian Indikator Tercapai (%)</i>	48,57	57,65	63,84	82,41	71,33
4.	<i>Tingkat Capaian Indikator Sesuai Target (%)</i>	57,48	62,78	70,75	83,01	80,30

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Tingkat capaian indikator pembangunan sesuai target dapat dijadikan ukuran kinerja pembangunan yangdicerminkan dengan rata-rata indikator pembangunan yang tercapai baik indikator sasaran, indikator program maupun indikator kinerja daerah. Dengan tingkat ketercapaian > 80% menunjukkan kinerja yang cukup baik dan harus dapat dipertahankan serta ditingkatkan di masa mendatang.

3) Keuangan dan Aset Daerah

a) Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Dalam Pengelolaan Keuangan daerah terdapat fungsi Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan yang antara lain mempunyai tugas mengusahakan dan

mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, berikut data capaian 5 tahun terakhir terkait indikator capaian Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan.

Tabel 2. 145 Indikator Capaian Kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2015 - 2019

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu (%)	92	93	95	95	100
2	Persentase ketersediaan Dana kasda terhadap kebutuhan anggaran kas per bulan (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Capaian kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dalam tahun 2019 dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya. Namun untuk ketepatan penerbitan Sp2D secara tepat waktu belum bisa mencapai 100%. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan administrasi. Untuk itu perlu adanya koordinasi antar semua pihak agar persyaratan administrasi dalam penerbitan SP2D dapat dipenuhi.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Tegal yang semakin baik, kondisi tersebut merupakan pencapaian dari Indikator sasaran RPJMD tahun 2014-2019, berikut data capaian 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 146 Capaian Kinerja Keuangan Daerah atas Audit LKDP BPK Tahun 2015 - 2019

Indikator	Realisasi Capaian				
	2015	2016	2017	2018	2019
Opini WTP atas Audit LKDP BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah berhasil mempertahankan WTP sejak Tahun 2016 atau sudah 3 kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, BPK masih menemukan beberapa permasalahan namun dampak permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan pengelolaan pendapatan, persediaan dan aset tetap, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.

b) Penyusunan Anggaran Daerah

APBD harus disusun mengikuti ketentuan Permendagri No 13 tahun 2006, dimana APBD harus disusun tepat waktu. Berikut capaian kinerja Program Penyusunan Anggaran Daerah 5 tahun Tahun 2015 - 2019.

Tabel 2. 147 Capaian Indikator Program Penyusunan Anggaran Daerah Tahun 2015 - 2019

Indikator	Realisasi Capaian				
	2015	2016	2017	2018	2019
APBD tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
APBD-P tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
b. SKPD yg Mengumpulkan RKA SKPD tepat waktu sesuai SE Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA (%)	10	15	20	25	30
c. RKA SKPD yg sesuai dengan SE Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA (%)	55	60	65	70	75

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Dalam 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil menetapkan APBD tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat kegiatan pembangunan dan menghindari sanksi dari pemerintah pusat. Keterlambatan penetapan perda APBD akan berakibat akan ada sanksi, baik itu administrasi, maupun sanksi lainnya yang lebih tegas. Salah satu sanksinya, kepala daerah dan anggota DPRD bisa tidak digaji selama enam bulan.

c) Pengelolaan Barang Milik / Aset Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Perda No 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD terdiri dari 11 Jenis/bentuk Pengelolaan yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dari 11 tersebut maka dirata-rata menjadi indikator Pengelolaan BMD yang baik dan benar, berikut capaian 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 148 Indikator kinerja Program Pengelolaan Barang Milik/Aset Daerah Tahun 2015 - 2019

Indikator	Realisasi Capaian				
	2015	2016	2017	2018	2019
OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar (%)	30	40	50	60	55
Jumlah OPD yang telah mengelola BMD yang baik dan benar	17	22	24	24	26
Jumlah seluruh OPD	56	56	48	48	48

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Dalam 5 tahun terakhir, OPD yang telah mengelola barang milik daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2018 sudah mencapai 60%. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik /aset daerah negara telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan

mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah.

d) Perencanaan, Pengendalian dan Operasional Pendapatan

Perencanaan, pengendalian dan operasional pendapatan melakukan upaya survei untuk mengidentifikasi laporan pajak daerah. Berikut data kinerja selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 149 Capaian Kinerja Realisasi Perencanaan Pendapatan Tahun 2015 - 2019

Indikator	Realisasa Capaian				
	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi perencanaan pendapatan (%)	72,10	82,27	84,21	88,27	88,27

Sumber : BP2D Kabupaten Tegal tahun 2019.

Perencanaan dan monev yang tertib dan terkendali masih kurang ditandai dengan persentase laporan pajak daerah yang tersaji belum teridentifikasi secara optimal disebabkan oleh keterlambatan didalam pelaporan masing-masing OPD setiap bulannya. Disamping itu juga dikarenakan sistem online perbankan belum sepenuhnya dilaksanakan secara host to host, sehingga terdapat jeda yang akhirnya terdapat selisih angka dan data, meskipun pada akhir periode menjadi sama. Sistem pengelolaan data dan penetapan pajak daerah belum optimal ditandai persentase potensi pajak yang ditetapkan masih kurang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak didalam membayar pajaknya. Untuk itu diperlukan updating data pajak secara menyeluruh dan komprehensif.

e) Pengelolaan PBB dan BPHTB

Pengelolaan PBB dan BPHTB merupakan salah satu pendatan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian daerah. Hasil dari upaya pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 150 Capaian Kinerja Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih Tahun 2015 - 2019

Indikator	Realisasa Capaian				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih (%)	98	94,5	100	97,5	100

Sumber : BP2D Kabupaten Tegal tahun 2020.

penerimaan pajak daerah belum maksimal. Faktornya adalah Kurangnya sosialisasi, publikasi, penyuluhan dan desiminasi ke Wajib Pajak; Spot-spot pelayanan dan sarana pembayaran pajak melalui perbankan dan pihak swasta/PPOB masih sangat kurang; dan Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai, seperti mobil pelayanan pajak yang bersifat mobile online, ruang pelayanan pajak yang terkoneksi dengan perbankan.

f) Pajak non PBB dan BPHTB

Pajak Non PBB dan BPHTB merupakan salah satu pendapatan daerah yang juga perlu ditingkatkan untuk mendukung kemandirian daerah. Hasil dari upaya pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 151 Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih Tahun 2015 - 2019

Indikator	Realisasa Capaian				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih	98	94,5	100	97,5	100

Sumber : BP2D Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Penerimaan pajak daerah non PBB dan BPHTB belum maksimal. Faktornya adalah Kurangnya sosialisasi, publikasi, penyuluhan dan desiminasi ke Wajib Pajak; Spot-spot pelayanan dan sarana pembayaran pajak melalui perbankan dan pihak swasta/PPOB masih sangat kurang; dan Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai, seperti mobil pelayanan pajak yang bersifat mobile online, ruang pelayanan pajak yang terkoneksi dengan perbankan.

4) Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

a) Pendidikan dan Pelatihan ASN

Dengan Program Pendidikan dan Pelatihan ASN diharapkan persentase PNS yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL, persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar/prajabatan sesuai dengan peraturan dan persentase PNS yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dan mendapatkan sertifikat/STTPL akan meningkat. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan dukungan anggaran yang cukup karena indeks dari kegiatan-kegiatan ini sudah ditentukan oleh Lembaga Adiminsitrasi Negara (LAN). Sebagai ilustrasi tersaji data jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan PNS yang mengikuti Pelatihan dasar dan pelatihan dalam jabatan.

Tabel 2. 152 Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim	24	32	53	37	8
2.	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional	253	374	234	111	191
3	Jumlah CPNS yang mengikuti Prajabatan	373	-	-	252	276

Sumber : BKD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim jumlahnya relatif kecil dalam setiap tahun. Hal ini mengakibatkan sampai dengan tahun 2019, masih terdapat ± 209 pejabat struktural yang belum mengikuti Diklatpim. Jumlah ini akan semakin bertambah apabila dalam kurun waktu 5 tahun

kedepan terdapat promosi jabatan. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional jumlahnya perlu ditingkatkan kembali. Sedangkan jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 276.

b) Pengembangan Karir Dan Penilaian Kompetensi ASN

Dengan Program Pengembangan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN diharapkan persentase Jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi, persentase Jabatan Fungsional non guru dan non kesehatan terisi dan persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya akan bertambah secara signifikan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan keras BKD Kabupaten Tegal selaku perangkat daerah yang bertugas dalam bidang kepegawaian. Sebagai ilustrasi tersaji data persentase jabatan struktural terisi, jumlah pejabat fungsional non guru/kesehatan, dan jumlah PNS yang telah mengikuti uji kompetensi mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan persentase PNS yang memiliki kompetensi, persentase jabatan struktural terisi dan persentase jabatan fungsional non guru dan non kesehatan akan bertambah.

Tabel 2. 153 Pengembangan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase jabatan struktural terisi	91 %	93 %	94 %	85 %	83%
2.	Jumlah pejabat fungsional non guru/kesehatan pengangkatan pertama	6	34	22	37	15
3.	jumlah JPT dan Administrasi yang telah dilakukan uji kompetensi	43	1	44	434	526

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jabatan struktural terisi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan cukup signifikan. Bahwa PNS di Kabupaten Tegal mendapatkan jaminan pengembangan karirnya salah satunya melalui promosi dan mutasi jabatan. Sampai dengan tahun 2019, 83 % formasi jabatan sudah terisi. Minat PNS untuk menduduki Jabatan Fungsional non guru/kesehatan mulai tahun 2015-2018 jumlahnya semakin bertambah, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan.

Uji kompetensi terhadap PNS di Kabupaten Tegal dilakukan dalam rangka melakukan pemetaan kompetensi, sehingga jabatan struktural dapat diisi oleh PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai. Sampai dengan tahun 2018, baru kepala OPD yang menduduki JPT Pratama yang dipastikan sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sedangkan jabatan administrator dan pengawas belum dilakukan sehubungan dengan kegiatan uji kompetensinya dilakukan pada tahun 2019.

c) Mutasi Dan Pengelolaan Data ASN

Dengan Program Mutasi Dan Pengelolaan Data ASN diharapkan persentase sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, persentase realisasi SK Kenaikan Pangkat yang tepat waktu dan tepat bayar dan persentase realisasi SK Pensiun tepat waktu akan tercapai. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras khususnya dari BKD Kabupaten Tegal dan pihak-pihak yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data jumlah SK Kenaikan Pangkat, Jumlah SK Pensiun dan

jumlah SIM Kepegawaian yang sudah terbangun mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan kepada ASN di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 154 Data Pengelolaan ASN Tahun 2015-20219

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah SIM Kepegawaian	-	6	1	1	1
2.	Jumlah SK Kenaikan Pangkat	994	1.012	1.036	1.565	1.655
3.	Jumlah SK Pensiun	258	439	463	491	491

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SIM Kepegawaian yang sudah terbangun sejumlah 9 SIM, dan masih terdapat ± 3 SIM yang harus dibangun dalam rangka menunjang layanan kepegawaian. Sedangkan SIM kepegawaian yang sudah terintegrasi dengan SIMPEG sejumlah 3 SIM. Jumlah PNS dan CPNS tiap tahun pertumbuhannya selalu berkurang karena jumlah PNS pensiun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penambahan pegawai/CPNS, hal ini karena adanya moratorium penundaan pengadaan pegawai sebagaimana surat Menpan RB nomor: B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015.

d) Pembinaan Dan Kesejahteraan ASN

Dengan Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN diharapkan persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin semakin berkurang, dan persentase PNS yang mendapatkan pembekalan menjelang purna tugas semakin bertambah. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dalam rangka meningkatkan disiplin ASN, dan komitmen dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan profesionalisme sebagai aparatur birokrasi yang bersih dan melayani. Sebagai ilustrasi tersaji data jumlah PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin dan PNS yang mendapatkan pembekalan menjelang purna tugas selama kurun waktu 5 tahun seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2. 155 Data Pembinaan dan Kesejahteraan ASN

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin	26	34	26	52	14
2.	Jumlah kasus-kasus kepegawaian	46	52	26	41	16

Sumber : BKD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Namun dengan masih terbatasnya jumlah PNS dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, diharapkan PNS yang sudah ada dapat bekerja secara maksimal dan memiliki tingkat disiplin tinggi yang diwujudkan dengan tidak adanya PNS yang mendapatkan hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun tingkat berat. Jumlah kasus-kasus kepegawaian yang ditangani persentasenya cukup kecil, namun ada kecenderungan tiap tahun mengalami kenaikan.

5) Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan fungsi perencanaan pembangunan.. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil-hasil dari penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan upaya yang telah berjalan maka hasil kelitbangan yang termamfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 semakin meningkat sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 156 Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 - 2019

Indikator	Realisasa Capaian				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil kelitbangan yang termamfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	90,24	90,65	91,18	92,21	93,76

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2019.

Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dimasa mendatang. Sistem pendataan dan pelaporan kelitbangan yang belum terintegrasi dalam satu lembaga dimana masing-masing lembaga/instansi yang melakukan fungsi kelitbangan belum sepenuhnya melakukan koordinasi dan sinergi menjadi salah satu kendala yang perlu dibenahi. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK, maka pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Pengawasan

a) Pengawasan oleh Inspektorat (Wilayah I s.d. IV)

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut.

b) Pengawasan Intern dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengawasan Intern dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dilakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara reguler. Kegiatan-kegiatan dalam program ini menghasilkan analisis dan

rekomendasi terhadap perbaikan kinerja pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun Aparatus Sipil Negara (ASN). Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/pengawasan dapat menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menunjukkan sejauhmana rekomendasi terhadap perbaikan akuntabilitas kinerja dan keuangan telah dilakukan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh pihak yang terkait, baik Inspektorat selaku APIP maupun perangkat daerah selaku pelaksana rekomendasi atas temuan LHP. Sebagai ilustrasi tersaji data tingkat penyelesaian tindak lanjut LHP baik dari pemeriksa eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun pengawas internal (APIP) mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 157 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	65	67,90	84,88	90,08	90,38
2	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi	16,58	27,66	73,27	67,08	100
3	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten	51,28	47,27	71,11	43,81	23,22

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK mengalami peningkatan, namun penyelesaian atas tindak lanjut temuan APIP yaitu justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perangkat daerah belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan pada LHP Inspektorat Provinsi dan Kabupaten tahun 2018 tidak segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk penyelesaian temuan hasil Pemeriksaan Khusus menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

c) Manajemen Risiko

Manajemen Risiko dilakukan dalam rangka pengawalan pencapaian tujuan organisasi, baik pada level perangkat daerah maupun pemerintah daerah. Program ini merupakan implementasi dari pengawasan intern berbasis risiko yang mengamankan hasil pengawasan intern harus dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang menunjukkan perbaikan budaya kinerja menuju penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil

Berdasarkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Tegal masih rendah jika dibandingkan hasil kerjanya. Hasil penilaian SAKIP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 158 Nilai SAKIP Tahun 2015-2019 (N-1)

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Skor	50,58	55,54	57,01	60,10	60,36
2	Nilai	CC	CC	CC	B	B

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, efektifitas pencapaian tujuan pembangunan daerah yang dinilai dari hasil (*outcome*) program pada Pemerintah Kabupaten Tegal masih rendah.

d) Pembangunan Budaya Integritas.

Pembangunan budaya integritas dilakukan untuk mengakselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Program ini bertujuan untuk menghasilkan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh instansi terkait yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data unit kerja yang telah ditetapkan menuju WBK/WBBM sebagai berikut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2. 159 Unit Kerja Ditetapkan Menuju WBK/WBBM

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah unit kerja	-	2	2	6	8
2	Persentase	0	4,16	4,16	12,48	16,67

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2020

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal masih perlu ditingkatkan.

e) Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan.

Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan melalui perencanaan yang baik, instrumen pengawasan yang memadai dan kompetensi aparatus pengawas yang mencukupi diharapkan. Program ini diharapkan akan meningkatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki sertifikasi keahlian profesi baik nasional maupun internasional sebagai ukuran meningkatnya mutu pengawasan. Sebagai ilustrasi tersaji data APIP yang memiliki sertifikat keahlian mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 160 Jumlah APIP Memiliki Sertifikasi Keahlian

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah APIP	-	-	-	1	17
2	%	0	0	0	1,96	33,32

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, APIP Kabupaten Tegal belum memiliki sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi keahlian profesional yang memadai. Hal ini perlu perhatian tersendiri karena tuntutan APIP ke depan semakin berat, terutama dalam perannya sebagai tenaga ahli profesional dalam proses litigasi/penegakan hukum terkait kasus yang menyebabkan kerugian negara/daerah.

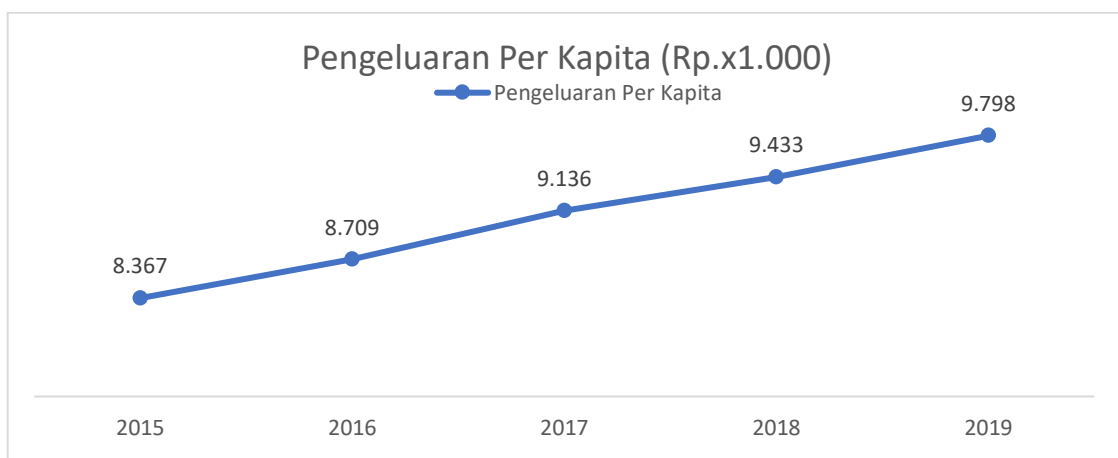
2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan

A. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Penghitungan paritas daya beli pada meode baru menggunakan 96 komoditi dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Pengeluaran per kapita di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Tegal mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tegal. Data tahun 2016 menunjukkan angka 8.709 ribu rupiah/orang/kapita, meningkat menjadi angkanya menjadi 9.433 ribu rupiah/orang/tahun.

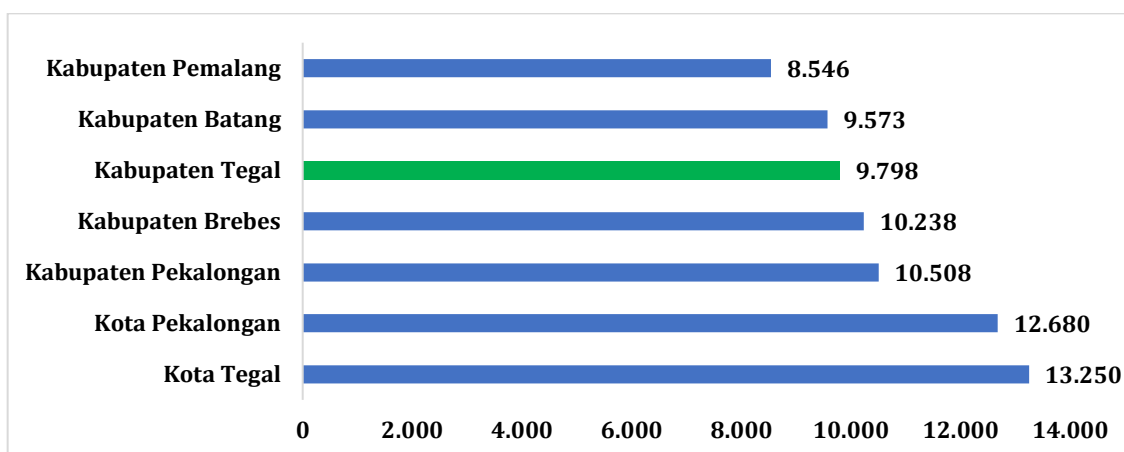
Gambar 2. 39. Pengeluaran per kapita disesuaikan



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten /Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Pengeluaran Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah 9.798 Ribu Rupiah/Orang/Tahun menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pengeluaran paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (8.546 Ribu Rupiah/orang/tahun) sedangkan Pengeluaran yang paling tinggi adalah Kota Tegal (13.250 ribu rupiah/orang/tahun).

Gambar 2. 40. Perbandingan Angka Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Eks Karisidenan Pekalongan (Rp.x1000)



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

B. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat. Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan lain. Oleh karena itu pengeluaran makanan dan non makanan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok.

Tabel 2. 161 Rata-rata Pengeluaran (Rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Tegal

TAHUN	MAKANAN	NON MAKANAN
2015	310.000	225.860
2016	340.313	281.668
2017	377.317	346.992
2018	451.189	350.816
2019	449.371	402.025

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Konsumsi makanan penduduk Kabupaten Tegal mencapai Rp.402.025 atau 52,78% dari total pengeluaran. Dari total pengeluaran makanan sebesar 13,94% digunakan untuk padi-padian. Pengeluaran makanan terbesar lainnya adalah konsumsi makanan/minuman jadi dan rokok masing-masing sebesar 34,05% dan 14,57% dari total pengeluaran konsumsi makanan, sedangkan pengeluaran konsumsi paling sedikit adalah umbi-umbian sebesar 0,59%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 162 Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Tahun 2019

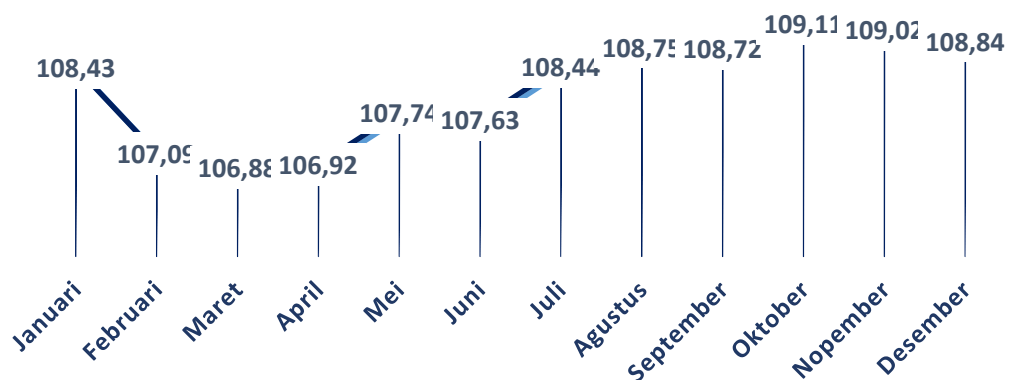
MAKANAN	%	NON MAKANAN	%
Padi-padian	13,94	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	43,38
Umbi-umbian	0,59	Aneka Barang dan Jasa	25,90
Ikan, Udang, Cumi, Kerang	3,33	- Kesehatan	6,21
Daging	3,20	- Pendidikan	6,46
Telur dan Susu	5,07	- Lainnya	13,22
Sayur-sayuran	6,73	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	5,94
Kacang-kacangan	3,63	Barang Tahan Lama	15,27
Buah-buahan	4,07	Pajak, pungutan dan Asuransi	4,85
Minyak dan Kelapa	2,35	Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	4,66
Bahan Minuman	3,64		
Bumbu-bumbuan	2,63		
Konsumsi Lainnya	2,18		
Makanan dan Minuman Jadi	34,05		
Rokok	14,57		
Jumlah	100	Jumlah	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

C. Nilai Tukar Petani (NTP)

Mulai Bulan Januari 2013, penghitungan nilai tukar petani menggunakan diagram timbang yang baru, yaitu diagram timbang tahun 2012 yang merupakan hasil Survei penyempurnaan Diagram Timbang Tahun 2007.

Gambar 2. 41. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)



Sumber : Data Olah, BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Kondisi petani Kabupaten Tegal tahun 2019 secara umum mengalami surplus. Hal tersebut terlihat dari NTP yang berada di atas 100. Keadaan tersebut menunjukkan nilai yang diterima petani dari komoditas pertanian naik lebih besar dibandingkan kenaikan nilai yang dibayar petani untuk barang/jasa konsumsi dan biaya produksi. Pada Januari 2019 NTP Kabupaten Tegal mencapai 108.43 sedangkan di akhir tahun, NTP mengalami kenaikan sebanyak 0.38 persen dibandingkan bulan Januari atau NTP mencapai 108,84 di Bulan Desember 2019.

NTP tertinggi dicapai pada bulan Oktober 2019 yaitu mencapai 109,11. Sedangkan capaian NTP terendah pada bulan Maret 2019 yaitu hanya mencapai 106.88.

Kenaikan nilai NTP akan terjadi apabila perubahan nilai I_t (Indeks yang diterima petani) lebih besar dibandingkan perubahan nilai I_b (Indeks yang dibayar petani). Sebaliknya penurunan nilai NTP terjadi apabila perubahan nilai I_t (Indeks yang diterima petani) lebih kecil dibandingkan perubahan nilai I_b (Indeks yang dibayar petani). Kenaikan NTP tertinggi pada bulan Juli 2019 yaitu naik sebesar 0.76 persen dari bulan Juni 2019, disusul Bulan Mei dan Oktober yaitu terdapat kenaikan sebesar 0.76 persen dan 0.36 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Selama tahun 2019, penurunan NTP terendah terjadi pada bulan Februari yaitu NTP turun sebesar 1.23 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan di bulan lainnya relatif rendah yang terjadi pada Bulan Maret, Juni, September, November sampai Desember.

Indeks harga yang diterima petani (I_t) pada tahun 2019 relatif mengalami kenaikan, hal ini ditunjukkan oleh perubahan nilai indeks dari bulan Januari ke bulan Desember yang naik sebesar 2.71 persen. Pada awal tahun 2019, yaitu pada bulan Januari I_t berada pada posisi 165.46 dan terus berfluktuasi hingga nilai I_t di bulan Desember sebesar 169.95.

Kenaikan I_t terbesar terjadi pada Bulan Juli sebesar 1.16 persen disusul Bulan Mei dan Oktober yaitu sebesar 1.03 persen dan 0.68 persen. Pada Juli 2019 terjadi kenaikan I_t di seluruh sub sektor kecuali di Sektor Perkebunan rakyat dan Perikanan Tangkap. Kenaikan terbesar terjadi pada sub sektor tanaman pangan. Kenaikan harga gabah menjadi pemicu kenaikan I_t pada sub sektor tersebut. Kenaikan I_t yang cukup besar pada Bulan Mei terjadi pada sub sektor hortikultura. Perlu diketahui bahwa kedua sub sektor tersebut menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pembentukan nilai NTP. Perubahan yang terjadi pada kedua sub sektor tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap nilai NTP. Kenaikan I_t di Bulan Mei pada sub sektor hortikultura karena kenaikan harga terjadi pada kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenaikan I_t di bulan Oktober 2019, di sumbang oleh kenaikan I_t pada sub sektor tanaman perkebunan rakyat yang memiliki kenaikan I_t tertinggi di bulan Oktober. Disusul oleh sub sektor Tanaman Pangan dan Perikanan Tanagkap yang memiliki kenaikan I_t tertinggi kedua dan ketiga di Bulan Oktober 2019.

Tabel 2. 163 Perkembangan Indeks Terima (I_t) dan Indeks Bayar (I_b) Tahun 2019

No.	Bulan	I_t	Perubahan	No	Bulan	I_b	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Januari	165.46	0.44	1.	Januari	152.60	0.04
2.	Februari	162.93	-1.53	2.	Februari	152.14	-0.30
3.	Maret	162.76	-0.10	3.	Maret	152.28	0.09
4.	April	163.10	0.21	4.	April	152.53	0.17
5.	Mei	164.78	1.03	5.	Mei	152.95	0.27
6.	Juni	165.33	0.33	6.	Juni	153.61	0.43
7.	Juli	167.25	1.16	7.	Juli	154.22	0.40
8.	Agustus	168.00	0.45	8.	Agustus	154.48	0.17
9.	September	167.90	-0.06	9.	September	154.43	-0.03
10.	Oktober	169.04	0.68	10.	Oktober	154.93	0.32
11.	November	169.20	0.10	11.	November	155.20	0.18
12.	Desember	169.95	0.44	12.	Desember	156.15	0.61

Sumber: Data Olahan, BPS Kabupaten Tegal Tahun 2020

Penurunan I_t tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu terjadi penurunan sebesar 1.53 persen dibanding bulan sebelumnya. Pada bulan ini, semua sub sektor pada bulan Februari mengalami penurunan I_t . Hal ini kemungkinan disebabkan pada bulan tersebut musim hujan sedang berlangsung, sedangkan produk pertanian sangat bergantung pada cuaca. Sedangkan kenaikan I_t tertinggi terjadi pada Bulan Juli dan Mei yaitu 1.16% dan 1.03%. hal tersebut dimungkinkan karena pada bulan-bulan tersebut terjadi kenaikan harga-harga produk pertanian salah satunya kelompok sayur-sayuran.

Indeks yang dibayar petani (I_b) terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) dan kelompok biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM). Kelompok IKRT terdiri dari beberapa sub kelompok, yaitu bahan makanan, perumahan, sandang dan aneka barang jasa (kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga, serta transportasi dan komunikasi. Perubahan Indeks harga konsumsi rumah tangga (IKRT) mencerminkan angka inflasi/deflasi di wilayah pedesaan. Sedangkan Kelompok BPPBM terdiri dari bibit, obat-obatan, pupuk, sewa, upah buruh tani, penambahan barang modal dan lainnya.

Pada Januari 2019 nilai I_b mencapai 152.60 dan terus naik hingga mencapai 156.15 persen di Bulan Desember atau naik sebesar 2.33 persen. Nilai I_b terus naik disetiap bulannya kecuali di Bulan Februari dan September. Kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu mencapai 0.43 persen. Sedangkan penurunan terbesar di Bulan Februari hingga 0.30 persen. Hal ini disebabkan karena penurunan IKRT yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pada BPPBM.

D. Sumber Daya Manusia

Tingkat ketergantungan penduduk atau Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang menunjukkan jumlah kelompok usia non produktif (0-15 tahun dan di atas 65 tahun) yang ditanggung oleh kelompok usia produktif (diatas 15-65 tahun). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 2. 164 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tegal

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penduduk Produktif	929.207	945.509	949.810	953.218	956.072
2.	Penduduk Non Produktif	495.683	483.877	483.705	484.007	484.626
3.	Rasio Ketergantungan	53,34	51,17	50,92	50,77	50,69

Sumber BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Rasio ketergantungan Kabupaten Tegal dalam 5 tahun terakhir relatif berimbang, proporsi penduduk produktif dan nonproduktif relatif sama. Hal ini mengindikasikan bonus demografi belum terjadi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan angka kelahiran masih di atas rata-rata 2 kelahiran/per keluarga. Di samping itu jumlah penduduk lansia semakin bertambah yang menyumbang angka penduduk non produktif yang tinggi. Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 165 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2018 JUMLAH (JIWA)	%	2019* JUMLAH (JIWA)	(%)
1	SD/lebih rendah	532.320	50,44	470.540	44,31
2	SMP/ sederajat	234.740	22,24	246.786	23,24
3	SMA Umum	108.708	10,30	93.621	8,82
4	SMA Kejuruan	111.044	10,52	196.658	18,52
5	Diploma I/II/III	16.084	1,52	18.183	1,71
6	Universitas	52.514	4,98	36.224	3,41
	J U M L A H	1.055.410	100	1.062.011	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2020 (diolah)

* Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Sementara itu penduduk yang tidak/belum sekolah semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi sekolah penduduk meningkat setiap tahunnya. Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 166 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2019

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	2019 JUMLAH (JIWA)*	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	107.929	17,12
2	Pertambangan dan Penggalian	7.490	1,19
3	Industri Pengolahan	149.754	23,75
4	Listrik, Gas dan Air	1.524	0,24
5	Bangunan	47.779	7,58
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel	184.184	29,21
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	29.785	4,72
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah	13.362	2,12
9	Jasa Kemasyarakatan	88.786	14,08
	JUMLAH	630.593	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Tahun 2020 (diolah)















*Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Urusan Pendidikan

Pelaksanaan Urusan Pendidikan diintervensi melalui 5 program untuk mencapai 40 indikator kinerja. Urusan Pendidikan kesemuanya dilaksanakan oleh Dikbud. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pendidikan pada tahun 2019.

Tabel 2. 167 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini						
1	APK PAUD/TK (4-6 th)	80.00	80.00	53,04	66,3	Dikbud	
2	APK PAUD/KB (0-4 th)	75.00	75.00	3,49	4,65	Dikbud	
3	APM PAUD TK	66.02	66.02	25,87	39,19	Dikbud	
4	Persentase PAUD terakreditasi	30.00	30.00	14,16	47,2	Dikbud	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
1	APK SD/SDLB/MI/Paket A	113.00	113,00	104,4	91,58	Dikbud	
2	APM SD/SDLB/MI/Paket A	99.00	99,00	96,49	97,46	Dikbud	
3	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99.00	99,00	119,78	120,99	Dikbud	
4	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	93.49	93,49	95,69	102,35	Dikbud	
5	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0.13	0,13	0,06	153,84	Dikbud	
6	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0.50	0,50	0,13	74,00	Dikbud	
7	Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A	99.99	99,99	100	100,01	Dikbud	
8	Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99.99	99,99	99,96	99,97	Dikbud	
9	Nilai rata-rata UN SD/MI/SDLB/Paket A	22.71	22,71	65,80	289,74	Dikbud	
10	Nilai rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs/Paket B	23.74	23,74	50,83	214,11	Dikbud	
11	Persentase Ruang Kelas SD/MI sesuai SPM	93.54	93,54	80,3	85,85	Dikbud	

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
12	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai SPM	85.13	85,13	77,68	91,25	Dikbud	★
13	Persentase Perpustakaan SD/MI sesuai SPM	33.82	33,82	55,29	163,48	Dikbud	★
14	Persentase Perpustakaan SMP/MTs sesuai SPM	50.00	50,00	70,16	140,32	Dikbud	★
15	Persentase SD/MI memiliki sanitasi layak	56.00	56,00	100	178,57	Dikbud	★
16	Tersedianya Lab IPA SMP/MTs	27.00	27,00	0	0	0	↓
17	Tersedianya Peralatan Lab IPA SMP/MTs	24.00	24,00	0	0	0	↓
18	Persentase SMP/MTs memiliki sanitasi layak	56.00	56	100	178,57	Dikbud	★
19	Persentase SD/MI melaksanakan Kurikulum 2013	45.00	45	100	222,22	Dikbud	★
20	Persentase SMP/MTs melaksanakan Kurikulum 2013	21.20	21,2	100	471,70	Dikbud	★
3	Program Pendidikan Non Formal						
1	Angka Kelulusan Paket A	99.99	99,99	84,87	84,88	Dikbud	★
2	Angka Kelulusan Paket B	99.99	99,99	93,92	93,93	Dikbud	★
3	Angka Kelulusan Paket C	99.99	99,99	97,46	97,47	Dikbud	★
4	Persentase LKP kinerja A dan B	10.00	10,00	32,26	322,6	Dikbud	★
5	Persentase Buta Aksara > 15 tahun	2.50	2,50	2,33	93,2	Dikbud	★
6	Persentase Kecamatan memiliki PKBM	100.00	100,00	127,78	127,78	Dikbud	★
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
1	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/DIV	35.00	35,00	45,39	129,69	Dikbud	★
2	Persentase Pendidik SD/SDLB/MI/Paket A berkualifikasi S1/DIV	85.00	85,00	95,48	112,33	Dikbud	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
3	Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs/Paket B berkualifikasi S1/DIV	100.00	100,00	95,75	95,75	Dikbud	★
4	Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik	26.00	26,00	50,23	193,19	Dikbud	★
5	Persentase Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik	84.50	84,50	97,97	115,94	Dikbud	★
6	Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik	81.50	81,50	97,7	119,88	Dikbud	★
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						
1	Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi	12.00	12,00	99,55	829,58	Dikbud	★
2	Persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	25,5	25,5	97,21	381,22	Dikbud	★
3	Persentase SD/SDLB/MI yang melaksanakan MBS dengan baik	79.50	79,5	94,43	118,78	Dikbud	★
4	Persentase SMP/SMPLB/MTs yang melaksanakan MBS dengan baik	76.00	76,00	95,81	126,10	Dikbud	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari target kinerja Program PAUD yang ada, Indikator PAUD yang terakreditasi yaitu 14,16% dari target 30,00%. Kriteria indikator ini Sangat Rendah (tercapai 47,2%). Sementara indikator-indikator lain seperti APK PAUD/TK (4-6 tahun) status kinerjanya masih sedang (tercapai 66,3%), yaitu terealisasi 53,04% dari target 80%. Hal ini disebabkan oleh data dasar tentang penduduk usia yang tidak relevan dengan tahun berjalan; motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak di usia 0-4 Tahun masih kurang; sarana dan prasarana PAUD yang kurang memadai. Untuk mengurai hal tersebut dibutuhkan data dasar penduduk usia yang valid setiap tahunnya; pengadaan sarana dan prasarana PAUD serta dukungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung langkah Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Untuk APK SD/SDLB/MI/Paket A realisasi kinerja di tahun 2019 sebesar 104,40% dari target 113%. Kriteria indikator ini juga Sangat Tinggi (tercapai 91,58%). Sementara APK dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B telah terealisasi masing-masing 119,78% dan 95,89% dari target masing-masing 99,00% dan 93,49%. Kedua indikator ini capaian kinerjanya sangat tinggi dan tinggi (masing-masing tercapai 120,99% dan 102,35%).

Sementara itu Persentase Ruang Kelas SD/MI sesuai SPM dan Persentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai SPM dapat direalisasikan masing-masing dengan kriteria Tinggi (masing-masing tercapai 85,85% dan 91,25%). Kondisi ini disebabkan oleh sarana dan prasarana sekolah terutama gedung sekolah sangat mempengaruhi layanan pendidikan.

Angka kelulusan Program Pendidikan Non Formal pada jenjang Paket A, B dan C dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2019, yaitu masing-masing tercapai 84,87% untuk Paket A, 93,92% untuk Paket B dan 97,46% untuk paket C dari target masing-masing 99,99% untuk Paket A, 99,99% untuk Paket B, dan 99,99% untuk Paket C. Kriteria kinerja indikator ini Sangat Tinggi (masing-masing tercapai 84,88%, 93,93% dan 97,47%). Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal diantaranya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan Non Formal masih kurang; belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan non formal. Untuk meningkatkan kinerja Program Pendidikan Non Formal perlu dikembangkan keberadaan Pendidikan Non Formal pada setiap PKBM di Kecamatan serta penyediaan layanan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal.

Sementara untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, capaian kinerja Pendidik PAUD yang berkualifikasi S1 mendapat kriteria Sangat Tinggi (tercapai 129,69%), yaitu terealisasi 45,39% dari target 35,00%. Pendidik SD Berkualifikasi S1 dapat direalisasikan 95,48% dari target 85,00%, atau dengan kriteria Sangat Tinggi (tercapai 112,33%).

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur, standar minimal pendidikan daerah, maupun kode etik profesional kinerja yang mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal; belum optimalnya akses teknologi informasi dan penerapan TIK untuk pengelolaan pendidikan dan mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel; belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal; belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan; ketimpangan kualifikasi sumberdaya manusia aparatur yang ada dengan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks.

Meskipun demikian, capaian kinerja program ini cukup menggembirakan. Persentase SD yang terakreditasi telah berpredikat Sangat Tinggi (tercapai 99,5%), yaitu terealisasi 99,55% dari target 10%. Sejumlah usaha masih perlu dilakukan, diantaranya pembuatan SOP dalam setiap kegiatan; optimalisasi akses teknologi data pendidikan; peningkatan tata kelola dunia pendidikan yang lebih baik; dan optimalisasi pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.

2.2.2. Urusan kesehatan

Urusan Kesehatan diampu oleh Dinkes, RSUD dr. Soeselo dan RSUD Suradadi. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kesehatan pada tahun 2019.

Tabel 2. 168 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2019	Status Kinerja 2019
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					
1	Persentase sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	★
2	Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	100	99,07	99,07	★
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
1	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	98	98	98,01	100,01	★
2	Persentase Puskesmas PONED sesuai SPM	100	100	100	100	★
3	Rasio Puskesmas: Penduduk (1:10.000)	1:48,79	1:48,79	1:49,3	101,05	★
4	Persentase PPK BLUD Puskesmas	100	100	100	100	★
5	Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	72	72	90	125	★
6	Cakupan Penduduk yang menggunakan jamban sehat	96,9	96,9	100	103,2	★
7	Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat	90	90	90	100	★
8	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80	80	81	101,25	★
9	Cakupan desa yang melaksanakan STBM	48,78	48,78	66,2	135,7	★
10	Cakupan desa ODF (Open Defecation Free) / SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	7,7	7,7	100	1.305	★
11	Cakupan pembinaan pengelolaan limbah medis fasyankes	45	45	76	169	★
12	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	75	75	75	100	★
13	Jumlah Puskesmas terakreditasi	29	29	29	100	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2019	Status Kinerja 2019
14	Persentase Puskesmas terakreditasi	100	100	100	100	★
15	Jumlah paket Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar	29	29	29	100	★
16	Cakupan pelayanan perijinan	100	100	100	100	★
17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100	100	100	★
18	Cakupan pelayanan kesehatan khusus	100	100	100	100	★
19	Cakupan Call Center dan Jejaring Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100	100	100	100	★
20	Persentase Tenaga Kesehatan terlatih PPGD, BCLS dan ATLS	100	100	100	100	★
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan					
1	Jumlah inspeksi obat dan makanan	2	2	10	500	★
4	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia					
1	Jumlah Unit Pelayanan Kesehatan tradisional di Puskesmas	1	1	1	100	★
2	Jumlah kelompok petani pemasok bahan baku	3	3	3	100	★
3	Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional /hari	50	50	50	100	★
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					
1	Jumlah promosi WKJ	1	1	1	100	★
2	Jumlah regulasi tentang kesehatan (ASI, PSN dll)	10	10	10	100	★
3	Desa Siaga Strata Mandiri	5	5	11,7	234	★
4	Cakupan penjangkaran Siswa SD/MI	100	100	98,1	98,1	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2019	Status Kinerja 2019
5	Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	4	4	4	100	★
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					
1	Prevalensi Balita gizi buruk	0,2	0,2	0,1	150	★
2	Prevalensi Balita gizi baik	99,8	99,8	99,7	99,9	★
3	Cakupan Balita gizi buruk dan gizi kurang mendapat PMT	60	60	100	166,7	★
4	Cakupan Anak usia 6-24 bln dari Gakin mendapat MP-ASI	25	25	92	368	★
5	Cakupan Ibu Hamil KEK mendapat PMT	100	100	100	100	★
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					
1	Jumlah kajian pengembangan lingkungan sehat	1	1	1	100	★
2	Jumlah pengembangan lingkungan sehat	8	8	7	87,5	★
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					
1	Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap	100	100	100,4	100,4	★
2	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	★
3	Prevalensi AFP Rate kasus Lumpuh layuh penderita per 100.000 penduduk <15th	2	2	2	100	★
4	Angka Penemuan kasus baru TB	110	110	256	232,7	★
5	Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB	90	90	82	91,1	★
6	Jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS	130	130	151	116,1	★
7	Cakupan HIV/AIDS yang mendapat pengobatan ARV	80	80	73,4	91,75	★
8	Angka Penemuan kasus baru Kusta	1,6	1,6	1,47	91,88	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2019	Status Kinerja 2019
9	Angka kesakitan DBD	8	8	25,8	-122,5	
10	Angka kematian DBD	75	75	90	80	
11	Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani	100	100	101,1	101,1	
12	Cakupan penderita Diare yang ditangani	100	100	100	100	
13	Cakupan desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	130	130	151	116,1	
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
1	Jumlah Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan yang tersusun	1	1	1	100	
2	Jumlah sistem informasi pelayanan kesehatan	1	1	1	100	
10	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin					
1	Jumlah penduduk miskin non kuota PBI APBN	66.000	66.000	66.000	100	
11	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya					
1	Jumlah Puskesmas 24 Jam/Rawat Inap	29	29	100	100	
2	Persentase Puskesmas memiliki sarana dan prasarana lengkap	100	100	100	100	
3	Jumlah paket pelatihan Pokjandal Posyandu	1	1	1	100	
4	Jumlah paket Alat Kesehatan di Fasyankes Primer	1	1	2	200	
5	Jumlah ambulance di Fasyankes Primer	58	58	52	90	
12	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah					

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2019	Status Kinerja 2019
	sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata					
1	Jumlah pelayanan rawat jalan RSUD	85.000	85.000	148,854	175,122	★
2	Jumlah pelayanan rawat inap RSUD	35.000	35.00	79,58	227,37	★
13	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan					
1	Jumlah Faskes. Primer yang melayani JKN	29	29	29	100	★
14	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita					
1	Angka Kematian Bayi	7,6	7,6	6,1	119,7	★
2	Angka Kematian Balita	8,30	8,30	6,9	116,87	★
3	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani	97	97	100	103	★
4	Cakupan kunjungan bayi	99	99	100,2	101,2	★
5	Cakupan Pelayanan Anak Balita	89	89	95,35	107,1	★
15	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia					
1	Jumlah Lansia	3.752	3.752	76.131	2.029	★
2	Cakupan Lansia terlayani kesehatan	12,2	12,2	49,02	401,8	★
16	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan					
1	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	75	75	75	100	★
2	Jumlah Pengendalian Kesehatan Makanan pada UKM	65	65	63	96,92	★
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak					

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2019	Status Kinerja 2019
1	Cakupan ibu hamil mendapat layanan kesehatan	100	100	102,5	102,5	★
2	Angka Kematian Ibu	93,3	93,3	44,54	152,27	★
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95	95	98,15	103,3	★
4	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	97	97	100	103,9	★
5	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	97	97	96,68	99,67	★
6	Cakupan Ibu Hamil K4	94	94	94,7	100,74	★
18	Program Peningkatan Pelayanan					
1	Klasifikasi RS dr Soeselo menjadi kelas B Pendidikan	100	100	75,00	75	➡
2	Layanan Unggulan RSUD dr Soeselo	100	100	90	90	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinkes; RSUD dr Soeselo, RSUD Suradadi Kab. Tegal, Tahun 2020












Semua indikator kinerja Dinas Kesehatan tahun 2019 berstatus sangat tinggi. Hanya satu indikator berstatus sangat rendah, yaitu Angka kesakitan DBD. Hal ini disebabkan oleh angka kesakitan DBD yang memang bisa terjadi diluar prediksi. Selain itu masih belum optimalnya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat. Fogging minded juga masih terjadi di masyarakat. Fogging minded adalah masyarakat berpikir bahwa Demam Berdarah bisa langsung diatasi dengan fogging. Padahal cara yang paling efektif adalah dengan PSN. Oleh karena itu Dinas Kesehatan selalu melakukan sosialisasi pada masyarakat dan juga melaksanakan program 1 rumah 1 jumentik (juru pemantau jentik).

Layanan unggulan di RSUD dr Soeselo Slawi yang belum terealisasi adalah untuk pelayanan jantung terpadu, sudah ada pelayanan terhadap pasien dengan tenaga profesional yaitu dokter spesialis jantung, akan tetapi RSUD dr Soeselo belum memiliki gedung pelayanan jantung nya. RSUD dr. Soeselo Slawi melakukan penilaian akreditasi SNARS edisi.1 pada bulan September tahun 2019 dan mendapatkan status Madya.

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum terdiri dari 13 program dan 22 indikator. Urusan Pekerjaan Umum diampu oleh DPU. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2019.

Tabel 2. 169 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						
1	Persentase panjang jalan kabupaten baik sesuai standar Bina Marga	68	68,00	52,75	77,57	DPU	
2	Jumlah panjang jalan dengan lebar 6 m	147,7	147,7	71,71	48,55	DPU	
3	Jumlah panjang jalan lebar 9 m	71,5	71,5 km	15,58	21,79	DPU	
4	Jumlah panjang jalan kolektor	194	194	194	100,00	DPU	
2	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						
1	Persentase drainase jalan kabupaten berfungsi baik	45	45,00	57,85	128,56	DPU	
3	Program Pembangunan turap/talud/bronjong						
1	Panjang talud jalan kabupaten terbangun	20.500	20.500	41.458	202,23	DPU	
2	Panjang talud pengairan yang terbangun	650	650	845	130,00	DPU	
3	Panjang talud pengairan yang direhabilitasi	630	630	837	132,86	DPU	
4	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan						
1	Panjang jalan direhabilitasi	220	220	220	100	DPU	
2	Jumlah jembatan direhabilitasi	210	210	136	64,76	DPU	
5	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud / bronjong						
1	Persentase panjang talud direhabilitasi	15,00	15,00	15,00	100	DPU	
6	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base Jalan dan Jembatan						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
1	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan yang aktif	1	1	1	100	DPU	★
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan						
1	jumlah inspeksi jalan dan jembatan	300	300	453	151,00	DPU	★
8	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya						
1	panjang irigasi dalam kondisi baik	7.500	7.500	164.5	2.632,00	DPU	★
9	Program pengendalian banjir						
1	Persentase kawasan rawan banjir	4,5	4,5	4,26	92,60	Dinas Perkimtaru	★
10	Program Perencanaan Tata Ruang						
1	Jumlah RDTR sesuai UU Penataan Ruang	18	18	18	100	Bappeda & Litbang	★
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang						
1	Jumlah Penindakan Pelanggaran tata ruang	10	8	11	137.5	Bappeda & Litbang	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DPU; Disperkimtaru; Bappeda dan Litbang Kab. Tegal, Tahun 2020.

Dinas Pekerjaan Umum kabupaten tidak dapat melakukan pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga realisasinya cenderung status capaiannya sangat rendah. Capaian indikator kinerja program (outcome) pada jumlah panjang jalan dengan lebar 6 m dan 9 m status kinerjanya sangat rendah dikarenakan efisiensi anggaran, adanya paket yang gagal lelang dan usulan yang tidak mendapat persetujuan, hal tersebut juga terdapat pada kegiatan panjang Jalan yang direhabilitasi, jumlah jembatan yang direhabilitasi, persentase panjang talud yang direhabilitasi dan panjang irigasi dalam kondisi baik yang status kinerjanya juga sangat rendah atau rendah.

Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal diantaranya adalah Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Indikator dari semua program yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang memiliki capaian yang sangat tinggi yaitu 100 %, pada indikator Program Perencanaan Tata Ruang Bappeda dan Litbang telah melakukan penyusunan RDTR setiap kecamatan yang merupakan turunan dari RTRW Kabupaten sesuai dengan UU Penataan Ruang.

Bentuk pelanggaran terhadap Tata Ruang sangat banyak, sehingga perlu adanya penindakan terhadap para pelanggar, pada Tahun 2019 Bappeda dan Litbang menargetkan 8 tindakan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut sebelum adanya penerbitan perizinan perlu adanya Keterangan Informasi Tata Ruang dari Bappeda dan Litbang, dengan adanya sistem tersebut beberapa upaya tindakan yang telah dilakukan terhadap pelanggaran tata ruang memperoleh Hasil Capaian 137,5 % atau 11 tindakan pelanggaran pada Tahun 2019.




2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat terdiri dari 5 program dan 11 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat yang diampu oleh Bapermasdes, Satpol PP dan Dinsosnakertrans pada tahun 2019.

Tabel 2. 170 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
1	Program Pengembangan Perumahan						
1	Persentase rumah layak huni	91,35	91,35	90,07	98,602	Dinas Perkimtaru	★
2	Jumlah rumah tidak layak huni direhabilitasi	600	600	6.648	1.108	Dinas Perkimtaru	★
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan						
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	82,25	82,25	87,44	106,31	Dinas Perkimtaru	★
2	Jumlah paket pelatihan BP-SPAM	1	1	1	100,00	Dinas Perkimtaru	★
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan						
1	Jumlah kegiatan pemukiman berbasis masyarakat	15	15	15	100	Dinas Perkimtaru	★
2	jumlah kelompok pelestarian lingkungan perumahan	15	15	15	100	Dinas Perkimtaru	★
4	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
1	Rasio jumlah petugas Damkar : penduduk	0,000030	0,000030	0,000039	130	Satpol PP	★
2	Jumlah mobil damkar	7	7	6	85,7	Satpol PP	➡
3	Persentase kasus kebakaran ditangani	100,00	100,00	100,00	100	Satpol PP	★
4	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	42,76	42,76	42,75	99,97	Dinas Perkimtaru	★
5	Program pengelolaan areal pemakaman						
1	Jumlah areal pemakaman	282	282	432	153,19	Dinsos	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disperkimtaru; Satpol PP; Dinsos, Tahun 2020.

Mendasari data PPLS Tahun 2011 dari 7 indikator, maka target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Tegal yang menjadi skala prioritas sejumlah 1.331 rumah/unit, sedangkan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tegal mengalokasikan sebanyak 704 unit/rumah dengan masing-masing rumah mendapat Rp.20.000.000,- Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2019 Pemerintah Desa lebih fokus pada program DD dan ADD akhirnya pencairan dana bantuan oleh masing-masing desa pada akhir tahun dan pelaksanaan fisiknya juga akhir tahun.

Indikator Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi dari target 600 rumah, terealisasi 6.648 rumah dengan kriteria capaian kinerja Sangat Tinggi (tercapai 1.108%).

Capaian kinerja Program lingkungan sehat perumahan, yaitu persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih mendapat kriteria Sangat Tinggi. RPJMD menargetkan pada tahun 2019 sebesar 82,25% rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, terealisasi sebesar 87,44% dengan predikat Sangat Tinggi (tercapai 106,31%).






Capaian kinerja Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, terlihat bahwa persentase kasus kebakaran yang ditangani mencapai 100% dari target 100% kejadian kebakaran. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah sarana pemadam kebakaran dan jumlah tenaga pemadam kebakaran yang memadai. Meskipun mobil pemadam kebakaran pada tahun 2019 mengalami kecelakaan yang berakibat tidak bisa beroperasi lagi dalam proses pemadaman. Guna menunjang kinerja program ini Pemerintah Kabupaten Tegal akan menambah armada dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran.




2.2.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP, BPBD dan Kesbangpolinmas. Urusan ini terdiri dari 7 program dan 34 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2018.

Tabel 2. 171 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Program	Target RPJMD (2019)	Target 2019	Realisasi 2019	Persentase Capaian (%)	OPD	Status Capaian
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri							
1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal							
1	Jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhan kam)	60	12	12	100	Kesbangpolimas	★
2 Program pengembangan wawasan kebangsaan							
1	Jumlah dialog umat beragama	60	25	25	100	Kesbangpolimas	★
2	Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	1	2	2	100	Kesbangpolimas	★
3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan							
1	Jumlah dialog wawasan kebangsaan	1	11	11	100	Kesbangpolimas	★
2	Jumlah kerjasama umat beragama	1	1	1	100	Kesbangpolimas	★
4 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan							
1	Cakupan siskamling dengan jumlah desa	75	70	71	101,43	Satpol PP	★
5 Program pendidikan politik masyarakat							
1	Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas	100	100	100	100	Kesbangpolimas	★
2	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Legislatif	70	62,06	60,4	97,33	Kesbangpolimas	★
3	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Presiden	70	62,88	60,4	96,06	Kesbangpolimas	★
4	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Gubernur	70	70,00	70,04	100	Kesbangpolimas	★
5	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Bupati	70	70,00	65,59	93,7	Kesbangpolimas	★

No	Program	Target RPJMD (2019)	Target 2019	Realisasi 2019	Persentase Capaian (%)	OPD	Status Capaian
6	Rata-rata persentase pengguna hak pilih Pilkades	90	90	76,60	85,11	Kesbangpolimas	
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan						
1	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	1:59,37	1:59,38	1:59,38	100	Satpol PP	
2	Rasio Linmas terlatih	5	4	4	100	Satpol PP	
7	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam						
1	Jumlah Kegiatan mitigasi bencana	1	1	2	200	BPBD	
2	Jumlah kegiatan tanggap darurat bencana	8	8	8	100	BPBD	

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Badan Kesbangpol; BPBD; Satpol PP, Tahun 2020.

Capaian kinerja outcome pada Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhan kam) tercapai 100% (sangat tinggi). Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Capaian kinerja outcome program pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Indikator pertama yaitu jumlah dialog antarumat beragama dari target yang ditetapkan 25 kali telah tercapai 25 kali (100%) yakni 25 kali dialog rutin intern anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dan 1 kali dialog tiga daerah yaitu dialog yang melibatkan pengurus FKUB Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Dialog tersebut membahas berbagai permasalahan seputar potensi-potensi konflik dan kejadian konflik antar umat beragama di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes, dengan dialog tiga daerah diharapkan akan diperoleh wawasan yang lebih luas seputar solusi dan teknik dalam mencegah dan menanggulangi konflik keagamaan yang akan dan telah terjadi. Indikator kedua yaitu jumlah media publikasi kerukunan umat beragama yang untuk saat ini hanya 2 judul buku yaitu berupa buku saku yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, buku saku yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 – Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 – Nomor 199 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Capaian kinerja outcome program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan

kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat sebanyak 11 kali di Kecamatan Balapulang dengan Peserta Kepala Desa se Kecamatan Balapulang, Pagerbarang dan Lebaksiu, Forkompincam Balapulang, Pagerbarang dan Lebaksiu. Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menagani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal.

Capaian kinerja outcome program pendidikan politik masyarakat dengan indikator outcome pertama yaitu Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% dengan rincian yaitu 76 buah LSM Lokal, 7 Buah LSM Nasional, terdapat 81 buah organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi dalam system database ormas Kabupaten Tegal dengan rincian 23 buah ormas berlandaskan profesi, 19 buah berlandaskan agama, 18 buah berlandaskan nasionalis, 21 buah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) namun di tahun 2019 telah dilakukan pendataan Ormas dan LSM yang aktif beroperasi hanya 4 Ormas dan 12 LSM.

Indicator outcome persentase pengguna hak pilih Pemilu Legislatif tercapai 97,33% dikarenakan target yang ditetapkan sebesar 62,06% pengguna hak pilih menggunakan hak pilihnya dan terealisasi sebesar 60,4%, Persentase pengguna hak pilih Pemilu Presiden tercapai 96,06% dikarenakan target yang ditetapkan sebesar 62,88% pengguna hak pilih menggunakan hak pilihnya dan terealisasi sebesar 60,4%. Persentase pengguna hak pilih Pemilu Gubernur tercapai 100% dikarenakan target yang ditetapkan 70% pengguna hak pilih menggunakan hak pilihnya dan terealisasi bahkan 70,04%, 0,04% melebihi target yang ditetapkan, dan Persentase pengguna hak pilih Pemilu Bupati tercapai 93,7% dikarenakan target yang ditetapkan sebesar 70% pengguna hak pilih menggunakan hak pilihnya dan terealisasi hanya sebesar 65,59%, 4,41% lebih rendah dari perkiraan target tercapai. Indicator outcome Rata-rata persentase pengguna hak pilih Pilkades mencapai 85,11 % dari yang telah ditetapkan hal ini masih termasuk ke dalam kategori tinggi.

2.2.6. Urusan Sosial

Urusan Sosial diampu oleh Dinsos. Urusan Sosial terdiri dari 7 program. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Sosial tahun 2019.

Tabel 2. 172 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya						
1	Persentase korban bencana yang ditangani	100	100	149	149	Dinsos	★
2	Persentase PMKS ditangani	30	30	30	100	Dinsos	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
3	Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	350	350	350	100	Dinsos	★
4	Persentase perintis kemerdekaan/ warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial	8,20	8,20	8,20	100	Dinsos	★
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
1	Persentase PMKS direhabilitasi sosial	30	30	28,31	94,36	Dinsos	★
3	Program pembinaan anak terlantar						
1	Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	450	450	92	26,28	Dinsos	↓
2	Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi sosial	16,00	16,00	26,28	164,25	Dinsos	★
4	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma						
1	Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	350	350	559	160	Dinsos	★
2	Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	7,20	7,20	7,20	100	Dinsos	★
5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo						
1	Jumlah panti asuhan/panti jompo	24	24	24	100	Dinsos	★
2	Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina	24	24	24	100	Dinsos	★
6	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)						
1	Jumlah lansia terlantar yang direhabilitasi	70	70	60	85	Dinsos	➡
2	Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi	12,20	12,20	12,20	100	Dinsos	★
3	Jumlah pengidap narkoba yang direhabilitasi	50	50	53	100,60	Dinsos	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
4	Persentase pengidap narkoba yang direhabilitasi	14,50	14,50	14,6	100,68	Dinsos	★
5	Jumlah pengidap PMS yang direhabilitasi	170	170	0	0	Dinsos	↓
6	Persentase pengidap PMS yang direhabilitasi	7,20	7,2	0	0	Dinsos	↓
7	Jumlah pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	50	50	40	80	Dinsos	➡
8	Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	8,20	8,2	9,2	112,19	Dinsos	★
9	Jumlah eks WTS yang diberdayakan	50	50	56	112	Dinsos	★
10	Persentase eks WTS yang diberdayakan	9,8	9,8	80,84	824,89	Dinsos	★
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
1	Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	300	300	759	276	Dinsos	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tegal, Tahun 2020.

Capaian kinerja persentase korban bencana yang ditangani sebanyak 149 % dimana hal ini telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014 – 2019, adapun target penanganan korban bencana Alam sebanyak 625 KK namun realisasinya mencapai 935 KK atau sekitar 3.740 Jiwa (Bencana Puting Beliung, Banjir dan Kebakaran Rumah) hal ini disebabkan adanya Bencana alam yang tidak bisa diprediksi kapan waktu terjadinya dan berapa jumlah korbanya.

Capaian Kinerja Jumlah Anak Terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban kekerasan dan pekerja anak yang direhabilitasi Sosial Tahun 2019 sebanyak 92 anak atau 26,28 % .

Dari jumlah 92 anak tersebut merupakan Anak Jalanan hasil Rasia Satpol PP dan Polres yang telah di rujuk di Panti Pelayanan Sosial yang ada di Semarang.

Capaian kinerja presentase Jumlah Eks WTS yang diberdayakan sebesar 824,89 % dari Target Kinerja Tahun 2019, hal ini dikarenakan masih banyaknya Eks WTS yang terjaring Rasia Satpol PP sehingga Dinas Sosial wajib menangani dan memfasilitasi pengiriman Eks WTS untuk dikirim ke Panti Rehabilitasi. Adapun Untuk Tahun 2019 terdapat 56 Eks WTS yang telah direhabilitasi ke Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Jakarta sebanyak 9 Orang dan di Panti Sosial Penyandang Wanita Utama (PWSWU) Surakarta sebanyak 47 Orang.

Capaian Kinerja Jumlah Panti Asuhan mencapai 100% atau sebanyak 21 LKSA yang menjadi binaan Dinas Sosial di Kabupaten Tegal, Adapun untuk Panti Jompo di wilayah Kabupaten Tegal belum ada untuk sementara penanganan Lansia Terlantar masih bekerjasama dengan Panti Jompo milik Pemerintah Propinsi Jawa

Tengah.Lansia yang di rujuk ke Panti milik Pemerintah Propinsi adalah hasil penjangkauan TKSK, PSM, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat. Adapun lokasi Panti : Bojong Bata Pemalang, PPSK Klampok Brebes dan Bisma Upakara Pemalang.

Capaian Kinerja Jumlah Pengidap Narkoba yang direhabilitasi adalah 100,60 % Hal ini dikarenakan di Tahun 2019 masih banyak pengidap narkoba yang direhabilitasi.

Capaian Kinerja Jumlah Pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi oleh Dinas Sosial sebanyak 80 % atau dari Target Kinerja 2019 sebanyak 50 Orang namun 40 orang yang direhabilitasi.

Capain Kinerja Jumlah Kelompok Peduli Sosial yang di bina oleh Dinas Sosial di Tahun 2019 mencapai 276% atau sejumlah 759 dari Teget Kinerja Tahun 2019 sejumlah 275.




2.2.7. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja diampu oleh Disperinaker, terdiri dari 6 program dan 18 indikator. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2019.

Tabel 2. 173 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
I	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						
1	Penempatan AKAD	13.000	13.000	4.918	37,83	Disperinaker	↓
2	Penempatan AKAN	8.300	8.300	2.802	33,76	Disperinaker	↓
3	Penempatan AKL	300.000	300.000	3.443	1,15	Disperinaker	↓
4	Jumlah Instruktur BLK	40	40	17	42,5	Disperinaker	↓
5	Jumlah Pelatihan Berbasis Masyarakat	58	58	48	82,76	Disperinaker	→
6	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi	65	65	50	76,92	Disperinaker	→
II	Program Peningkatan Kesempatan Kerja						
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.86	3.86	8,36	-16,58	Disperinaker	↓
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	88.02	88.02	65,26	74,14	Disperinaker	→
3	Tingkat Kesempatan Kerja	96.15	96.15	91,55	95,22	Disperinaker	★
4	Jumlah LPKS	60	60	48	80,00	Disperinaker	→
5	Jumlah Bursa Kerja Khusus	52	52	40	76,92	Disperinaker	→
6	Jumlah PPTKIS	18	18	7	46,67	Disperinaker	↓
7	Jumlah Pelatihan Kerjasama LPKS	65	65	48	73,84	Disperinaker	→
8	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai	10	10	50	500 %	Disperinaker	★
III	Program Perlindungan						

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
	Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
1	Persentasi UMR : KHL	100	100	100	100	Disperinaker	★
2	Jumlah Sengketa Industrial	8	8	14	175	Disperinaker	★
3	Jumlah Sengketa Industrial ditangani	8	8	14	175	Disperinaker	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disperinaker Kab. Tegal, Tahun 2020.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pelatihan Prakerin dengan output tercapainya pelatihan ketrampilan bagi siswa sesuai dengan kejuruan dan program ganda dari SMK untuk kebutuhan dunia usaha dan industry. Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat dengan output pelatihan ketrampilan kepada masyarakat (tata boga, komputer, menjahit, border, servis sepeda motor, pengelasan, setir mobil, dan rias pengantin. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja dengan output tercapainya diklat bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan usaha mandiri dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran.

Program peningkatan kesempatan kerja. Penyusunan Informasi Bursa TK dengan output tercapainya cetak Kartu AK.1 dan Informasi Pasar Kerja (IPK). Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai dengan output pelatihan/kursus Bahasa Korea sebanyak. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan output monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap Kantor Pusat PPTKIS yang membuka cabang di Kabupaten Tegal. Fasilitasi TKI Bermasalah dengan output sosialisasi calon TKI dan penanganan kasus TKI yang bermasalah.

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan output terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial (antara perusahaan dan pekerja, antar pekerja, dan antar anggota serikat pekerja). Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan dengan output sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan terhadap perwakilan perusahaan di Kabupaten Tegal. Pelaporan dan Sinergitas Pendataan Sarana Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Perusahaan dengan output tercapainya data sarana hubungan industri dan jaminan social. Pembinaan dan Verifikasi SP/SB di dalam dan luar Perusahaan dengan output pembinaan serikat pekerja/serikat buruh di dalam dan luar perusahaan. Workshop dan Pelatihan Sistem Pengupahan di Perusahaan dengan output pelatihan dan penyusunan sistem pengupahan perusahaan.










Beberapa pelayanan dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal urusan Ketenagakerjaan adalah : pelayanan AK.1, pelayanan rekomendasi paspor bagi tenaga kerja yang akan bekerja diluar negeri, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), izin dan perpanjangan LPKS, izin dan perpanjangan BKK, penempatan tenaga kerja, pelayanan pemberi kerja (loker), penyelesaian hubungan industrial, pengesahan Peraturan Perusahaan, pendaftaran Perjanjian Kerja Sama, pelatihan pencari kerja, pelatihan

calon transmigran serta pembinaan keikutsertaan Jamsostek.

2.2.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 4 program. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diampu oleh DP3AP2KB dan Dispermasdes. Berikut disajikan tabel capaian, indikator dan target kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tabel 2. 174 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019
Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan						
1	Pencapaian Kota Layak Anak	Kab Tegal KLA	KabTegal KLA	KLA Pratama	80.00	Dinas P3A & P2KB	
2	Jumlah kebijakan perlindungan anak	2,00	2,00	2.00	100.00	Dinas P3A & P2KB	
3	Jumlah pengaduan KDRT ke PPT	90,00	90,00	60	133,33	Dinas P3A & P2KB	
4	Persentase pengaduan KDRT ke PPT yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100.00	100.00	Dinas P3A & P2KB	
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						
1	Jumlah SKPD melaksanakan PPRG	54,00	54,00	54.00	100	Dinas P3A & P2KB	
2	Jumlah pengambil kebijakan di Tingkat desa yg memahami kebijakan yg responsif gender	47,00	47,00	50.00	106.38	Dinas P3A & P2KB	
3	Jumlah SKPD yang mendapat pelatihan Data pilah	50,00	50,00	40.00	80.00	Dinas P3A & P2KB	
4	Jumlah masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	50,00	50,00	50.00	100.00	Dinas P3A & P2KB	
5	Jumlah Tim Kab. Dan Upt kec. Yang memahami	50,00	50,00	40.00	80.00	Dinas P3A & P2KB	

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
	kesetaraan dan keadilan gender						
6	Cakupan tersusunnya profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat (difabel)	100,00	100	100	100	Dinas P3A & P2KB	★
7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
9	Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan petugas sosial terlatih	75,00	75,00	75,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
10	Cakupan pelayanan bimbingan rokhani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	75,00	75,00	75,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
11	Cakupan masyarakat & lembaga yang paham UU No 23 tahun 2002	25,00	25,00	50,00	200,00	Dinas P3A & P2KB	★
12	Cakupan anak yang memiliki kemandirian dan ketrampilan	50,00	50,00	70,00	140,00	Dinas P3A & P2KB	★
13	Cakupan Desa yg melaksanakan "Cinta anak"	67,00	67,00	67,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
14	Jumlah PAUD yg melaksanakan penitipan anak	25,00	25,00	83,00	328,00	Dinas P3A & P2KB	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
15	Jumlah Pelaksanaan KLA di Kecamatan	4,00	4,00	18,00	450,00	Dinas P3A & P2KB	★
16	Jumlah Forum anak yang aktif	5,00	5,00	5,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
17	Cakupan data anak terpilah sesuai indikator KLA	100 % (31 indikator)	100,00	80,00	80,00	Dinas P3A & P2KB	➡
18	Jumlah desa binaan PKK	33,00	33,00	33	100	Dinas Permasdes	★
19	Jumlah masyarakat mitra P2MBG	60,00	60,00	48	80	Dinas Permasdes	➡
20	Jumlah Pengajar PAUD yang terlatih	18,00	18,00	18	100	Dinas Dikbud	★
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						
1	IPG	65,72	65,72	86,95	132,30	Dinas P3A & P2KB	★
2	IDG	70,16	70,16	69,25	98,70	Dinas P3A & P2KB	★
3	Persentase perempuan bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, teknisi	57,54	57,54	49,81	86,56	Dinas P3A & P2KB	➡
4	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	15,00	15,00	24,00	160,00	Dinas P3A & P2KB	★
5	Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	41,17	41,17	32	77,72	Dinas P3A & P2KB	➡
6	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
	oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS						
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
9	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	75,00	100,00	133,33	Dinas P3A & P2KB	★
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80,00	80,00	100,00	125,00	Dinas P3A & P2KB	★
11	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	80,00	80,00	100,00	125,00	Dinas P3A & P2KB	★
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan						
1	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang	40,00	40,00	41	102,5	Bappeda dan Litbang	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.
 Sumber: DP3AP2KB, Dispermasdes, Bappeda & Litbang, Tahun 2020.

Beberapa capaian kinerja kegiatan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakan beberapa upaya / kegiatan, yaitu :
 - a. Tersusunnya buku profil anak Kabupaten Tegal tahun 2019, buku dimaksud berisi tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan yang terintegrasi dan terukur dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan buku profil ini merupakan salah satu indikator Kabupaten Layak Anak.
 - b. Terbentuknya Gugus Tugas KLA Kecamatan sudah di 18 Kecamatan (100%)
 - c. Terbentuknya Desa Layak Anak di 59 desa (20,5% dari 287 desa se-Kabupaten Tegal)
 - d. Terbentuknya Forum Anak Tingkat Kecamatan di 18 Kecamatan (100 %) dan terbentuknya Forum Anak Tingkat Desa di 14 desa (4,87 % dari 287 desa yang ada). Tujuan pembentukan Forum Anak di Tingkat Desa dan Kecamatan adalah untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi kebutuhan dan keinginan dalam pembangunan yang berhubungan dengan anak di lingkungannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
 - e. Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2019, yaitu pada tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Pendopo Amangkurat dengan berbagai kegiatan diantaranya senam bersama, donor darah, pemeriksaan kesehatan, festival dolanan anak, kampanye gemar makan ikan, musikalisasi anak sebagai pelapor dan pelopor, stand sekolah Ramah Anak.
 - f. Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Pengelola Taman Penitipan Anak pada tanggal 27 Agustus 2019
2. Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Tegal melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, kekerasan terhadap Anak, Pelecehan Seksual, perkosaan dan masalah Anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Terlaksananya Pelatihan Penganggaran Responsif Gender yang dilaksanakan di Gedung Muslimat NU Kabupaten Tegal dengan peserta sebanyak 54 orang

terdiri dari perencanaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

4. Terlaksananya Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender di Kecamatan Dukuhturi pada tanggal 2 Juli 2019
5. Terlaksananya Sosialisasi Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2019 di Pendopo Kecamatan Tarub.
6. Peringatan Hari Kartini pada tanggal 18 April 2019 dan Hari Ibu tingkat Kabupaten Tegal yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2019 di Pendopo Amangkurat, dengan kegiatan : senam bersama, donor darah, pemeriksaan kesehatan, lomba gerak dan lagu, lomba memakai dasi, lomba membuat tas dari limbah/sampah.

2.2.9. Urusan Pangan

Urusan Pangan diampu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari 1 program dan 12 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pangan pada tahun 2019.

Tabel 2. 175 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan						
1	Jumlah sistem informasi pasar (buah)	1	1	1	100,00	Dinas Tan & KP	★
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal)	2.000	2.000	2.171	108,55	Dinas Tan & KP	★
3	Penguatan cadangan pangan (ton)	150,40	150,40	196	130,31	Dinas Tan & KP	★
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	71	71	58,72	82,70	Dinas Tan & KP	➡
5	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	75,00	75,00	107,40	143,20	Dinas Tan & KP	★
6	Skor pola pangan harapan (%)	95	95	81,56	85,85	Dinas Tan & KP	➡
7	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	90,00	90,00	93	103	Dinas Tan & KP	★
8	Penanganan daerah rawan pangan (kejadian)	23,00	23,00	89,00	387	Dinas Tan & KP	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
9	Peraturan daerah /Perbup terkait ketahanan pangan (buah)	1	1	2	200	Dinas Tan & KP	★
10	Jumlah LDPM (lembaga)	7	7	7	100	Dinas Tan & KP	★
11	Jumlah lumbung (lembaga)	39	39	23	59	Dinas Tan & KP	➡
12	Jumlah sarana prasarana pengolahan (unit)	20	20	20	100	Dinas Tan & KP	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: *Distan KP Kabupaten Tegal, Tahun 2020*

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan

Apabila dilihat komposisi pengeluaran masyarakat kabupaten Tegal, maka pengeluaran untuk makanan semakin tahun semakin menurun, atau dengan kata lain, berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Tegal sudah semakin baik. Rumah tangga dikatakan sejahtera jika persentase pengeluaran untuk makanan lebih kecil dibandingkan untuk bukan makanan. Pada tahun 2019, BPS Kabupaten Tegal menerbitkan analisis Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tegal 2019 yang menyatakan pola pengeluaran masyarakat Kabupaten Tegal masih didominasi oleh pengeluaran makanan yaitu sebesar 53,83% Namun demikian angka ini jauh menurun bila dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar 56,26%. Jika dilihat dari kecukupan gizinya, ternyata masyarakat Kabupaten Tegal secara umum juga sudah bisa mencukupi standar kecukupan kalori yang diisyaratkan dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. Menurut peraturan tersebut rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2100 Kkalori dan 57 gr perorang perhari pada tingkat konsumsi.

Pada tahun 2019, rata-rata konsumsi kalori dan protein perkapita sehari penduduk Kabupaten Tegal sebesar 2.148,83 Kkal dan 65,35 gr. Artinya penduduk di Kabupaten Tegal sudah bisa mencukupi kecukupan energi. Apabila dilihat lebih mendalam, kelompok pengeluaran 40% pengeluaran terbawah belum bisa

mencukupi Angka Kecukupan Gizinya karena konsumsi kalori dan proteinnya masih dibawah standar Angka Kecukupan Gizi yaitu masing-masing sebesar 1791,04 Kkal dan 52,60 gr. Sedangkan kelompok pengeluaran 40% tengah dan 20% tinggi sudah dapat memenuhi rata-rata kecukupan energi dan protein. Berdasarkan komoditas makanannya, penduduk pada kelompok 40% terbawah konsumsi kalori terbesar berasal dari padi-padian, sedangkan pada kelompok 40% tengah dan 20% tinggi konsumsi kalori terbesar berasal dari konsumsi makanan dan minuman jadi. Kelompok 40% terbawah mengonsumsi komoditas kelompok padi-padian yang cukup tinggi yakni mencapai 15,29% terhadap total pengeluaran makanannya. Sedangkan penduduk pada kelompok 40% tengah dan 20% tinggi konsumsi komoditas padi-padian terhadap total pengeluaran makanannya hanya sekitar 10,77% dan 8,04%. Apabila keadaan ini terus terjadi dalam jangka panjang pada kelompok penduduk dengan pengeluaran 40% terbawah maka hal ini bisa menyebabkan dampak serius terutama kasus stunting karena masalah kekurangan gizi. Malnutrisi sudah terjadi dalam kandungan lalu mulai tampak saat berumur dua tahun. Akibatnya anak tersebut mudah sakit, kemampuan kognitif berkurang, fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang, postur tubuh tidak maksimal saat dewasa dan sebagainya. Begitu pentingnya pemenuhan kalori dan protein terutama bagi anak dan ibu hamil.

Jumlah kalori dan protein yang masih kurang di kalangan rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah bisa dipenuhi apabila pola konsumsi pangan mereka diperbaiki. Pemenuhan konsumsi pangan yang tinggi kalori dan protein tidak selalu mahal. Misalnya kacang-kacangan mempunyai kandungan kalori dan protein yang cukup tinggi yakni 427 kalori dan 17,3 gram. Selain itu, makanan olahan kacang-kacangan seperti tempe juga memiliki kandungan protein dan kalori yang cukup tinggi, dalam 100 gram tempe mengandung 15,4 gr protein dan 160 kalori.

Gambaran pola konsumsi masyarakat Kabupaten Tegal di atas dapat menjelaskan Skore Pola Pangan Harapan Kabupaten Tegal masih belum dapat mencapai angka yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019.

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh UndangUndang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Selanjutnya indikator PPH digunakan sebagai indikator kinerja di bidang ketahanan pangan yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Pencapaian Skore Pola Pangan Harapan di Kabupaten Tegal baru mencapai 81,56 %. Bila dilihat dari pola konsumsi yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, produksi bahan makanan utama yang menunjukkan surplus serta posisi geografis Kabupaten Tegal yang memiliki garis pantai, sebenarnya skore pola pangan harapan harusnya bisa lebih tinggi dibanding angka pencapaian tersebut. Dari beberapa kasus hasil survey PPH, terdapat budaya masyarakat yang kurang gemar makan protein hewani dan perlu diperangi. Gerakan "Gemari" Gemar Makan Ikan yang dicanangkan oleh Bupati Tegal adalah bentuk promosi dan sosialisasi dalam rangka memerangi gizi buruk dan stunting yang berkorelasi dengan peningkatan angka PPH.

2.2.10. Urusan Pertanian

Indikator kinerja pada Urusan Pertanahan sebanyak 2 buah, dengan 2 program dan diampu oleh Disperkimtaruna. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pertanahan pada tahun 2019.

Tabel 2. 176 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah						
1	Jumlah sertifikasi tanah pemerintah	60	60,00	57,00	95,00	Disperkimtaru	★
2	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						
1	Penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang)	60	60,00	42,00	70	Disperkimtaru	➡

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disperkimtaru Kab. Tegal, Tahun 2020.

Dari 2 indikator kinerja Urusan Pertanahan, yaitu jumlah sertifikasi tanah pemerintah dan penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang) terealisasi 42 dari target 60 (tercapai 70%). Pada tahun 2019 ditetapkan target 60 sertifikat, dapat direalisasikan 57 sertifikat dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 95%).

Sifat data bersifat kumulatif, sehingga capaian tahun 2019 juga memperhitungkan capaian tahun sebelumnya. Penyediaan tanah instansi terkait dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk melakukan penyediaan tanah. Apabila instansi dalam tahun berjalan tidak membutuhkan penyediaan tanah, maka indikator ini dilaksanakan sesuai kebutuhan instansi..

2.2.11. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan hidup terdiri dari 8 program dan 14 indikator kinerja. Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh DLH. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2019.

Tabel 2. 177 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						
1	Persentase TPA sesuai standar	34,63	34,64	41,70	123,96	DLH	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
2	Persentase TPS sesuai standar	82,81	82,81	79,68	96,22	DLH	★
3	Rasio Luas Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk	0,01459	0,01459	0,0132	91,73	DLH	★
4	Persentase sampah yang terangkut	75,25	75,25	80	107,74	DLH	★
5	Jumlah Bank Sampah	56	56	129	230,35	DLH	★
6	Persentase kawasan tercemar polutan	0,2	0,40	0,75	12,50	DLH	↓
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						
1	Persentase UKL-UPL yang dipantau	70	70	123,33	176,18	DLH	★
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						
1	Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH	30	30	58	123,33	DLH	★
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						
1	Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH	1	1	1	100,00	DLH	★
2	Jumlah Sarana / media penyampaian informasi lingkungan hidup	1	1	1	100,00	DLH	★
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi						
1	Persentase kawasan tercemar polutan udara	0,75	0,75	0,82	95,45	DLH	★
2	Persentase kawasan tercemar polutan air	3,75	3,75	3,81	103,54	DLH	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan capaian kinerja TPA sesuai standar realisasi kinerjanya yaitu 41,70% berbanding 34,64% untuk persentase TPA sesuai standar. Dengan demikian indikator kinerja ini statusnya capaiannya Sangat Tinggi (tercapai 123,96%). Sementara untuk indikator

TPS sesuai standar realisasinya 79,68% atau dengan status kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan Capaian kinerja indikator persentase sampah terangkut yaitu 80% melebihi target awal sebesar 75,25. Hal ini antara lain di samping karena semakin banyaknya sarana armada angkutan sampah (truk) dan meningkatnya jumlah bank sampah di masyarakat.

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan juga terdapat indikator kinerja Jumlah Bank Sampah. Target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 untuk tahun 2019 sebanyak 56 Bank Sampah, sedangkan target tahun 2018 sebanyak 51 bank sampah. Sampai dengan akhir tahun 2019 telah terbentuk bank sampah di Kabupaten Tegal sebanyak 129 bank sampah dan telah ditetapkan keberadaannya dengan SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dengan demikian target untuk tahun 2018 maupun tahun 2019 telah terpenuhi. Namun demikian, proses pembinaan bank sampah harus terus dilaksanakan baik untuk menambah jumlah bank sampah di Kabupaten Tegal maupun untuk memastikan bank sampah yang telah didirikan bisa beroperasi secara maksimal.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, untuk indikator kinerja Persentase UKL-UPL yang dipantau, target yang ditetapkan untuk tahun 2019 sebanyak 70 Perusahaan, sedangkan realisasinya sebesar 123,33 Perusahaan.

Untuk Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, indikator kinerja Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berizin lingkungan, telah dilaksanakan pengawasan sebanyak 58 usaha/kegiatan dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 30 usaha/kegiatan yang termasuk target operasi maupun pengawasan terhadap sengketa /kasus lingkungan. Sementara pada Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, untuk indikator kinerja Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH, target yang ditetapkan untuk tahun 2019 sebanyak 1 paket. Target ini telah tercukupi dengan adanya penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai bagian dari sistem informasi sumber daya alam dan LH di Kabupaten Tegal. Indikator Kinerja Jumlah sarana/media penyampaian informasi lingkungan hidup untuk tahun 2019 telah terpenuhi melalui pameran lingkungan hidup, maupun sosialisasi.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi, untuk indikator kinerja Persentase kawasan tercemar polutan udara pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 0,75% dengan realisasi 0,82%. Target ini membutuhkan upaya keras karena kompleksitas permasalahan yang ada mengingat pencemaran ini akibat aktivitas usaha kecil yang telah digeluti masyarakat selama bertahun-tahun lamanya. Upaya yang telah dilakukan baru sebatas fasilitasi relokasi unit usaha yang menimbulkan pencemaran udara ke area yang menjauh dari permukiman warga, namun demikian ke depan perlu ditingkatkan fasilitasi alih teknologi yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat agar pencemaran udara dapat diminimalisir.

Untuk indikator Persentase Kawasan tercemar polutan air tahun 2019 ditargetkan sebesar 3,75%, dengan realisasi 3,81%. Target ini membutuhkan upaya keras dalam pencapaiannya. Hal ini disebabkan karena mayoritas terjadinya pencemaran air adalah akibat aktivitas industri kecil seperti industri tahu, tempe, dan batik. Pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tegal memfasilitasi melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) maupun

pembangunan biodigester baik dari ternak sapi maupun dari Pondok Pesantren. Akan tetapi semenjak tahun 2015, fasilitasi ini tidak dapat dilanjutkan akibat terganjal aturan hibah sehingga upaya penanganan pencemaran air khususnya yang diakibatkan oleh aktivitas usaha kecil tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ke depan diharapkan ada upaya swadaya masyarakat untuk bisa mengatasi pencemaran di lingkungan masing-masing sehingga tidak menimbulkan permasalahan kesehatan di lingkungan sekitar.

2.2.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 1 program dengan 4 indikator dan diampul oleh Disdukcapil. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

**Tabel 2. 178 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019 %	OPD	Status Kinerja 2019
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan						
1	Persentase penduduk memiliki KTP	100	100	97,08	97,08	Disduk capil	★
2	Persentase penduduk memiliki kartu keluarga	100	100	90,86	90,86	Disduk capil	➡
3	Persentase penduduk memiliki akta kematian	30	30	66,48	221,6	Disduk capil	★
4	Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	100	100	79,93	79,93	Disduk capil	➡

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: 1. DKB Semester II Tahun 2019

2. Data Pelayanan SIAK per 31 Desember 2019

3. Data Pelayanan KTP-el per 31 Desember 2019

4. Data Pelayanan Sistem Informasi Registrasi Penduduk Desa/Kelurahan

Indikator persentase penduduk memiliki KTP terealisasi 97,08 % dari target 100%, dengan demikian status kinerjanya Sangat Tinggi (tercapai 97,08 %). Meskipun belum memenuhi target dalam hal kepemilikan KTP, akan tetapi untuk perekaman bagi wajib KTP el sudah mencapai 100 % dari jumlah penduduk wajib KTP-el sebanyak 1.189.092 orang. Untuk indikator persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga terealisasi 90,86% dari target 100 % dengan status kinerja Tinggi (tercapai 90,86 %). Sedang persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran sebesar 79,93%, dari target yang ditetapkan sebesar 100 %, atau dengan status kinerja Tinggi (tercapai 79,93%). Untuk persentase penduduk memiliki akta kematian yang diperoleh dari data SIAK dan data Pelayanan Sistem Informasi Registrasi Penduduk Desa/Kelurahan (SIREP) tahun 2019 tercatat sebesar 66,48%, dari target yang ditetapkan sebesar 30 %.

Sampai dengan Desember tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan sebanyak 6.726 akta kematian. Dengan adanya

aplikasi Pelayanan Sistem Informasi Registrasi Penduduk Desa/Kelurahan (SIREP) data pembandingan jumlah penduduk yang meninggal dunia tercatat 10.118 orang.




2.2.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diampu oleh Dispermasdes dengan 5 program dan 23 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019.

Tabel 2. 179 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan						
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi aktif	617	617	617	100,00	Dispermasdes	★
2	Jumlah paket pelatihan keterampilan TTG	1	1	1	100,00	Dispermasdes	★
2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan						
1	Jumlah pelatihan pengelola Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	1	1	1	100,00	Dispermasdes	★
2	Jumlah gelar TTG Tingkat Nasional	1	1	1	100,00	Dispermasdes	★
3	Jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan	1	1	1	100,00	Dispermasdes	★
4	Jumlah Kelompok Lembaga Ekonomi Masyarakat (UEDSP) yang difasilitasi	7	7	7	100,00	Dispermasdes	★
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa						
1	Jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi	281	281	281	100,00	Dispermasdes	★
2	Jumlah UPK	13	13	13	100,00	Dispermasdes	★
3	Jumlah juara lomba desa	3	3	3	100,00	Dispermasdes	★
4	Jumlah TMMD manunggal	2	2	3	150,00	Dispermasdes	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
	sengkuyung Kab Tegal						
5	Jumlah penunjang kegiatan TMMMD manunggal sengkuyung Kab. Tegal	2	2	3	150,00	Disperm asdes	★
6	Jumlah dukungan pelaksanaan TMMMD Sengkuyung (2P0A)	3	3	3	150,00	Disperm asdes	★
7	Jumlah penunjang kegiatan karya Bhakti TNI Kab. Tegal	4	4	6	150,00	Disperm asdes	★
8	Jumlah pelaksanaan Karya Bakti TNI	4	4	6	150,00	Disperm asdes	★
9	Jumlah kader P3MD terlatih	54	54	54	100	Disperm asdes	★
10	Jumlah desa penerima PDPM yang difasilitasi	281	281	281	100	Disperm asdes	★
11	Jumlah BKM	116	116	116	100	Disperm asdes	★
12	Jumlah BPD	281	281	281	100,00	Disperm asdes	★
13	Jumlah pencanangan kegiatan gerakan nasional bulan bhakti gotong royong	1	1	1	100,00	Disperm asdes	★
14	Jumlah Desa penerima alokasi Gerakan Cinta Desa	281	281	281	100,00	Disperm asdes	★
4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa						
1	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	2	2	3	150,00	Disperm asdes	★
2	Jumlah tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang terfasilitasi	281	281	281	100,00	Disperm asdes	★
5	Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan						
1	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa	40	40	40	100,00	Disperm asdes	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disperm asdes Kab. Tegal, Tahun 2020

Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terdapat sejumlah target kinerja, diantaranya Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif dari target sebanyak 588 lembaga dapat direalisasikan sebanyak 588 lembaga, atau dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%).

Sementara indikator jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan UMKM pedesaan ditargetkan 1 kali pada tahun 2019 terealisasi 1 kali dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%), yaitu pelaksanaan Pameran Hari Jadi Kabupaten Tegal. Kendala dalam fasilitasi kemitraan swasta dan UMKM pada Pameran hari Jadi Kabupaten Tegal adalah transaksi yang terjadi tidak bersifat langsung (harus pesan terlebih dahulu) sehingga tidak dapat dikawal dampak dari fasilitasi yang dilakukan. Untuk indikator jumlah lembaga ekonomi masyarakat (UED-SP) yang difasilitasi.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa menetapkan target 1 kali pencaangan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) dan terealisasi 1 kali pada tahun 2019. Sementara indikator paket pelatihan keterampilan TTG terealisasi 1 dari target kinerja 1 kali.





Indikator jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi sebanyak 281 desa, sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja target ini antara lain sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada kecamatan dan desa.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa dilaksanakan sebanyak 3 kali dari target sebanyak 2 kali. Pelatihan dilakukan pada dengan menghadirkan perangkat desa. Sementara indikator kinerja penghasilan tetap kades dan perangkat desa yang terfasilitasi telah terlaksana sesuai target, yaitu kades dan perangkat desa di 281 desa yang dianggarkan melalui ADD.

2.2.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 9 program dan 17 indikator kinerja dan diampu oleh DP3AP2KB dan Dinsos. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**Tabel 2. 180 Evaluasi Kinerja Program RKPd Tahun 2019
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
1	Program Keluarga Berencana						
1	Peserta KB aktif	287.800	287.800	205.527	71,41	Dinas P3A & P2KB	
2	Persentase DO	10,13	10,13	11.00	91,41	Dinas P3A & P2KB	
3	Persentase Unmeet Need	13,77	13,77	15.47	87,65	Dinas P3A & P2KB	
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja						
1	Jumlah sosialisasi KRR	300	300	300	100	Dinas P3A & P2KB	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
3	Program pelayanan kontrasepsi						
1	jumlah tempat pelayanan kontrasepsi	65	65	66	101.54	Dinas P3A & P2KB	★
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri						
1	Rasio Akseptor KB	97,10	97,10	67,91	69,93	Dinas P3A & P2KB	➡
2	Cakupan anggota UPPKS ber-KB	87,00	87,00	79.26	91.10	Dinas P3A & P2KB	★
3	Cakupan data mikro keluarga di desa setiap tahun	100,00	100,00	100	100	Dinas P3A & P2KB	★
5	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat						
1	Cakupan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD aktif	80,00	80,00	70,00	87.50	Dinas P3A & P2KB	➡
2	Rasio Kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) Aktif	1,00	1,00	1.00	100	Dinas P3A & P2KB	★
6	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR						
1	Jumlah Pusat Konseling KRR	1	1	1	100	Dinas P3A & P2KB	★
7	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS						
1	Jumlah pengidap Narkoba	372	372	507	136,29	Dinsos	★
2	Jumlah pengidap PMS	476	476	454	95,38	Dinsos	★
3	Jumlah Pengidap HIV/AIDS	189	189	431	228,04	Dinsos	★
8	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak						
1	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	1	1	1	100	Dinas P3A & P2KB	★
9	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga						
1	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	1	1	1	100	Dinas P3A & P2KB	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
10	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU						
1	Jumlah BKB-Posyandu-PADU terintegrasi	92	92	112	121.74	Dinas P3A & P2KB	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.
 Sumber: DP3AP2KB; Dinsos, Tahun 2020.

Capaian kinerja pada indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dari capaian indikator kinerja tersebut diharapkan dapat menjaga kesehatan ibu dalam pengaturan jangka waktu untuk kelahiran berikutnya, mengatur dan merencanakan jumlah anak untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penduduk, sehingga berdampak terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.


Jumlah peserta KB aktif terealisasi sebanyak 205.527 sementara targetnya sebanyak 287.800, atau dengan status capaian kinerja Sedang (71,41%). Terutama KB MKJP yang rendah, hal ini karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB khususnya KB MKJP.




2.2.15. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan diampu oleh Dishub dan terdiri dari 4 program dengan 3 indikator. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perhubungan pada tahun 2019.

**Tabel 2. 181 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019
Urusan Perhubungan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						
1	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78,00	78,00	100	129,27	Dishub	★
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						
1	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78,00	78,00	100	129,27	Dishub	★
3	Program peningkatan pelayanan angkutan						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja
1	Persentase AKDP berijin	100,00	100	80,00	80	Dishub	
2	Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	67,00	67,00	105,47	157,41	Dishub	
4	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.						
1	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78,00	78,00	100	129,27	Dishub	

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, Tahun 2020

Indikator Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yaitu persentase sarana perhubungan berfungsi baik dari target kinerja sebesar 78 terealisasi 100 dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 129,27%). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan mengalami kenaikan. Indikator capaian dapat dilihat dari terealisasinya kegiatan seperti : Pemilihan pelajar pelopor keselamatan dg capaian realisasi 74,18 , Penataan Lingkungan Terminal Dukuhsalam 89,39, Penyusunan Naskah kajian Akademis dan Draft KAK Perda Perhubungan 83,23, Pengadaan SIM Pelayanan Angkutan 93,23, Pembuatan Papan Informasi/stiker Trayek 99,26, Penyempurnaan Selter Yomani 90,32 dan Pengadaan Kartu Uji dan Kartu Tanda Lulus Uji 82,63 serta DED Parkir Tuwel 98,23.

Indikator Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ adalah persentase sarana perhubungan berfungsi baik, dari target sebesar 78 realisasi sebesar 100 dengan status kinerja sangat tinggi. Indikator capaian dapat dilihat dari terealisasinya kegiatan seperti : Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 98,37, Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan 94,60 dan Pemeliharaan Halted an Terminal 97,16 serta Rehabilitasi Pemeliharaan dan Penataan Lingkungan Pos Petugas Pelayanan Pelayaran 98,41.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan indikator persentase AKDP berizin dan persentase kendaraan umum yang diuji KIR, dari target kinerja 67 telah terealisasi sebesar 105,47 dengan persentase capaian Sangat Tinggi dibandingkan target hal ini dikarenakan : Masih banyaknya angkutan yg tidak masuk terminal sehingga pengawasan dan penertibannya kurang dan masih banyaknya pengusaha angkutan umum yang enggan mengurus perijinan trayek angkutan dg alasan pendapatan menurun, karena ada ojek on line. Persentase kendaraan umum yang diuji KIR, dari target 67, realisasi tahun 2019 sebesar 105,47 %. Uji Kendaraan bermotor mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin keselamatan kendaraan bermotor. SDM yang profesional ditunjang dengan peralatan uji yang memadai diharapkan mampu meningkatkan kinerja perhubungan dibidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Program Peningkatan dan Pengamanan lalu Lintas dengan indikator Persentase sarana perhubungan berfungsi baik, dari target 78 tersalisasi 100 % dengan status kinerja sangat tinggi. Indikator capaian ini dapat dilihat dari terealisasinya kegiatan seperti di bawah ini dengan % capaian sbb : Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas 98,70 %, Pengadaan Marka Jalan 98,40 %, Pengadaan dan

pemasangan Traffic light 98,43 %, Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 84,66 %, Halte dan Fasilitas Pendukung Halte 99,30 %, Pengadaan Traffic Cone 98,43 %, Pengadaan rambu-rambu lalin pada perlintasan sebidang 92,32 %, Pengadaan Palang Pintu KA 92,32 %, Pengadaan RPPJ Terpadu 98,80 %, Pengadaan dan Pemasangan Delinder 98,41 %, Pengadaan dan Pemasangan Cermin Cekung 98,89 %, dan Pengadaan Watter Barrier 99,16 %.

2.2.16. Urusan Komunikasi dan Informasi

Program dalam Urusan Komunikasi dan Informasi terdapat sebanyak 3 program dengan 5 indikator. Urusan Komunikasi dan Informasi diampu oleh Diskominfo. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2. 182
Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						
1	Jumlah layanan pemerintah secara elektronik	3	3	23	766,67	Dinas Kominfo	★
2	Jumlah sistem informasi/website instansi	54	54	78	144,44	Dinas Kominfo	★
2	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi						
1	Jumlah pelatihan bidang TIK	1	1	3	300	Dinas Kominfo	★
3	Program kerjasama informasi dan media massa						
1	Jumlah kerjasama dengan media massa	6	6	6	100,00	Dinas Kominfo	★
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi						
1	Jumlah data base aktif	28	28	90	321,43	Dinas Kominfo	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Jumlah layanan pemerintah secara elektronik terealisasi 23 layanan dari target sebanyak 3 layanan, dengan demikian status kinerjanya Sangat Tinggi (tercapai 766,67%). Jumlah Sistem Informasi (SIM) / Website Instansi yang ada pada Tahun 2019 telah terealisasi dibanding target yang telah ditetapkan, yaitu 78 dibanding 54 SIM dan Web dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 144,44%). Sementara database yang masih aktif pada Tahun 2019 telah terealisasi dibanding

target yang telah ditetapkan, yaitu 28 dibanding 90 database dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 321,43%).

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan TIK di Kabupaten Tegal adalah kurangnya sarana dan prasarana memadai, kurangnya SDM yang kompeten dibidang TIK serta budaya TIK yang belum terbangun dengan baik. Ke depan, diharapkan pembangunan TIK dapat lebih berkembang di Kabupaten Tegal, untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan kepada publik.

2.2.17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari 5 indikator dan 2 program. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diampu oleh DisdagkopUKM. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Tabel 2. 183 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja	
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah							
	1	Jumlah pelatihan kewirausahaan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	Dinas Dagkop UKM	★
2	Jumlah Wirausahawan Baru	35 UKM	35 UKM	72 UKM	205%	Dinas Dagkop UKM	★	
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							
	1	Jumlah UMKM mengakses kredit perbankan	1.830 UKM	1.830 UMKM	1.995 UMKM	109%	Dinas Dagkop UKM	★
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi							
	1	Jumlah koperasi aktif	425 Koperasi	425 Koperasi	350 Koperasi	82%	Dinas Dagkop UKM	➡
	2	Jumlah BPR dan LKM aktif	590	595	12 (11 BPR dan 1 LKM)	NA	Bag. Perekonomian	NA

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal Tahun 2020

Jumlah pelatihan kewirausahaan telah mencapai target yang diharapkan yaitu 4 kali terealisasi sebanyak 4 kali pelatihan dengan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan indeks kinerja Sangat Tinggi. Pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain : Pelatihan TataRias, Pelatihan Tataboga, Pelatihan Asesoris Batik dan Pelatihan Finishing Meubelair. Jumlah wirausaha baru juga mengalami peningkatan

dari target yang ditetapkan yang semula ditargetkan 35 UKM telah melampaui sebanyak 72 UKM baru. Hal ini dikarenakan berhasilnya kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Tegal. Jumlah UMKM mengakses kredit perbankan mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan sebanyak 1.995 UMKM, hal ini dikarenakan sosialisasi mengenai kredit perbankan yang dilaksanakan berhasil.

Indikator jumlah Koperasi Aktif pada Program Peningkatan Koperasi dari terget 425 Koperasi dapat direalisasikan sebanyak 350 Koperasi yang aktif ditandai dengan aktifitas dan pelaksanaan RAT masing-masing koperasi. Status indikator Kinerja ini mencapai 82% dengan Predikat Tinggi. Dari pencapaian tersebut, pembinaan yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi UKM perlu untuk ditingkatkan dan dioptimalkan karena masih adanya sumberdaya manusia pengelola koperasi yang rendah dan kesadaran anggota untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi masih minim. Selain itu koperasi tersebut tidak memiliki daya saing dengan koperasi-koperasi yang sudah ada.

Indikator jumlah BPR dan LKM Aktif, untuk jumlah BPR di Kabupaten Tegal sebanyak 11 unit, 2 BPR milik Pemkab Tegal dan 9 BPR milik swasta. Sementara jumlah LKM sesuai UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terdapat 1 LKM, yaitu Koperasi LKM Arta Surya. Target Indikator Jumlah BPR dan LKM aktif berdasarkan tahun 2014 disusun belum sesuai Undang – Undang, karena masih mengkatagorikan lembaga keuangan desa sebagai LKM. Dengan demikian indikator ini dikeluarkan dari penghitungan (N/A) karena target indikator tidak relevan lagi dengan kondisi Eksisting.

2.2.18. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal terdiri dari 4 program dengan 9 indikator. DPMPSTSP adalah OPD yang mengampu Urusan Penanaman Modal. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Penanaman Modal.

Tabel 2. 184 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						
1	Jumlah investor PMA	4,00	4	8	200	Dinas PM dan PTSP	★
2	Jumlah investor PMDN	3.070	3.070	747	24,33	Dinas PM dan PTSP	↓
3	Jumlah nilai investasi PMA	48 miliar	48 Miliar	820.334.969.198	170	Dinas PM dan PTSP	★
4	Jumlah nilai investasi PMDN	825.500.000.000	825.500.000.000	1.418.065.799.693	172	Dinas PM dan PTSP	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
5	Jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN	6.670	6.670	6.681	100	Dinas PM dan PTSP	★
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						
1	Jumlah ijin usaha dikeluarkan	6.200	6.200	7.072	114	Dinas PM dan PTSP	★
3	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah						
1	Jumlah aparatur yang kompeten	27	27	27	100	Dinas PM dan PTSP	★
2	Jumlah sistem informasi investasi	1	1	2	200	Dinas PM dan PTSP	★
4	Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan						
1	Survei Indeks kepuasan pelanggan layanan perijinan	1	1	1	100	Dinas PM dan PTSP	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DPM PTSP Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Capaian Kinerja Tahun 2019 pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi berupa Jumlah Izin Usaha yang diterbitkan tercapai. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 yaitu 6.200 Izin Usaha sedangkan pencapaian Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tegal telah mencapai 7.072 Izin Usaha dengan status capaian Tinggi (tercapai 114%).

Jumlah Investor PMA dapat direalisasikan sebanyak 8 PMA dari target 4 PMA, sehingga kriteria indikator ini Sangat Tinggi (tercapai 200%). Nilai investasi PMA yang diperoleh juga di atas target, yaitu sebesar Rp. 820.334.969.198,00 dari target sebanyak Rp. 48 miliar dan memperoleh predikat Sangat Tinggi (tercapai 170%).

Capaian Kinerja Tahun 2019 pada Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan berupa Survei Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Perizinan telah tercapai. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 yaitu 1 Kali Kegiatan Per Tahun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tegal telah melaksanakan Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator masing-masing kinerja adalah penyelenggaraan pameran investasi; penyebarluasan informasi

pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk tata cara pengaduan; penelitian kepuasan masyarakat serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dengan adanya penanaman modal baik dari PMA maupun PMDN telah mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Dari target penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.670, dengan adanya investasi baik dari PMA dan PMDN telah mampu menyerap tenaga kerja sebesar 6.681 orang.

2.2.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga diampu oleh Disparpora. Urusan Pemuda dan Olahraga terdiri dari 4 program dan 10 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Kepemudaan dan Olahraga.

**Tabel 2. 185 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019
Urusan Pemuda dan Olahraga**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja 2019
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan						
1	Jumlah pelatihan pemuda	9,00	9,00	11,00	122,22	Dinas Parpora	★
2	Jumlah pemuda yang dilatih	450,00	450	492	109,33	Dinas Parpora	★
3	Jumlah pemuda pelopor	252,00	252	252	100	Dinas Parpora	★
4	Jumlah organisasi pemuda dibina	33,00	33	33	100	Dinas Parpora	★
2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda						
1	Jumlah pelatihan kewirausahaan	1,00	1	1	100	Dinas Parpora	★
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga						
1	Jumlah kompetisi olahraga amatir	28,00	28	28	100	Dinas Parpora	★
2	Jumlah kompetisi olahraga profesional	18,00	18	18	100	Dinas Parpora	★
3	Jumlah atlet dibina	215,00	215	300	139,53	Dinas Parpora	★
4	Program Peningkatan Sarana dan						

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja 2019
	Prasarana Olahraga						
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	181,00	181,00	313,00	172,92	Dinas Parpora	★
2	Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik	816,00	816	816	100	Dinas Parpora	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disparpora, Kabupaten Tegal 2020

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan indikator program Jumlah pemuda yang dilatih dari target 450 orang dapat direalisasikan sebanyak 492 orang, dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 109,33%). Sementara jumlah organisasi pemuda yang dibina dapat direalisasikan sebanyak 33 orang dari target 33 orang, dengan status kinerja Sangat Tinggi.

Capaian Kinerja Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, untuk indikator jumlah pelatihan kewirausahaan telah mencapai target capaian, yaitu 1 kali pelatihan dari target kinerja sebanyak 1 kali pelatihan juga. Meski demikian kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kewirausahaan sedikit menghambat pelaksanaan program untuk lebih optimal lagi.

Capaian Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga untuk indikator jumlah atlet yang dibina baru sebanyak 300 atlet, sementara targetnya sebanyak 215 atlet. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga sudah meningkat; perkembangan prestasi pemuda dan olahraga; dan optimalnya pembinaan keolahragaan dan atlet-atlet berbakat. Ke depan, perlu dilakukan optimalisasi sarana dan prasarana olahraga masyarakat; penghargaan pada atlet yang berprestasi; serta fasilitasi olahraga bagi masyarakat penyandang cacat agar pembangunan bidang olah raga di Kabupaten Tegal dapat lebih semarak lagi.

Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga di tahun 2019 juga sudah berpredikat Sangat Tinggi. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang berfungsi baik ditarget sebanyak 816 unit dan teralisasi 816 unit.

2.2.20. Urusan Statistik

Urusan Statistik diampu oleh Dinas Kominfo, terdiri dari 1 program dan 1 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Statistik.

Tabel 2. 186
Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah						
1	Jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan	6	6	6	100	Dinas Kominfo	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Tegal, Tahun 2020.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah terdiri dari 1 indikator, yaitu jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan. Capaian kinerjanya sebanyak 6 dokumen dengan status capaian kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%). Dokumen data statistik yang dipublikasikan berupa Indeks Harga Konsumen (IHK), Nilai Tukar Petani (NTP), Selayang Kecamatan, Selayang Pandang Kabupaten, Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan target kinerja ini adalah kurangnya ketepatan data dalam kompilasi sehingga rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi yang intens dengan SKPD lain sehingga data yang diperoleh lebih tepat, komplit dan up to date.




2.2.21. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan terdiri dari 3 program dan 11 indikator kinerja. Urusan Kebudayaan diampu oleh Dikbud. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2018.

**Tabel 2. 187 Evaluasi Kinerja Program RKPd Tahun 2019
Urusan Kebudayaan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Program Pengembangan Nilai Budaya						
1	Jumlah pertunjukan seni	3	3	3	100	Disdikbud	★
2	Jumlah pameran seni	1	1	1	100	Disdikbud	★
3	Jumlah misi/muhibah kesenian	1	1	1	100	Disdikbud	★
4	Jumlah sarana pertunjukan seni	19	19	19	100	Disdikbud	★
5	Jumlah pelaku seni yang dibina	3110	3110	3110	100	Disdikbud	★
6	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	397	397	378	100	Disdikbud	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
7	Jumlah kebijakan pengembangan seni dan budaya	4	4	4	100	Disdikbud	★
8	Jumlah maestro seni	3	3	3	100	Disdikbud	★
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya						
1	Jumlah BCB dan situs budaya yang dibangun/rehabilitasi	3	3	6	200	Disdikbud	★
2	Jumlah naskah kuno yang dikaji	1	1	1	100	Disdikbud	★
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya						
1	Jumlah pentas seni bukan asli Tegal	2	2	3	150	Disdikbud	➡

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Dikbud Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Capaian kinerja Urusan Kebudayaan menunjukkan semakin membaik dengan rata-rata capaian diatas tinggi. Namun demikian ke depan diharapkan peran serta aktif masyarakat untuk memasyarakatkan seni dan budaya di Kabupaten Tegal. Terlebih kebudayaan merupakan salah satu misi dalam RPJMD tahun 2014-2019. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan umum urusan kebudayaan adalah (1) Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisional; (2) Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; (3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional.

2.2.22. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan terdiri dari 1 program dan 9 indikator. Urusan Perpustakaan diampu oleh Dinas Arpus. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perpustakaan.

**Tabel 2. 188 Evaluasi Kinerja Program RKPd Tahun 2019
Urusan Perpustakaan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						
	Jumlah perpustakaan daerah	1	1	1	100	Dinas Arpus	★
	Jumlah perpustakaan desa	41	41	64	156	Dinas Arpus	★
	Jumlah Perpustakaan instansi	48	48	26	54	Dinas Arpus	↓
	Jumlah Perpustakaan Keliling	2	2	3	150	Dinas Arpus	★
	Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah	16	16	21	131	Dinas Arpus	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
	Jumlah Perpustakaan Ekstensi	16	16	31	193	Dinas Arpus	★
	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Daerah	21.600	21.600	21.780	100,8	Dinas Arpus	★
	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling	13.200	13.200	14.129	107	Dinas Arpus	★
	Jumlah Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan Daerah	40.000	40.000	50.631	126	Dinas Arpus	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.
 Sumber: Dinas Arpus Kab. Tegal, Tahun 2020.

Urusan Perpustakaan prosentase rata-rata Sangat Tinggi, ada permasalahan di Jumlah Kunjungan Perpustakaan Daerah yang tidak memenuhi target dengan Status Capaian Sedang. Hal ini disebabkan fasilitas perpustakaan yang kurang memadai, koleksi buku yang kurang lengkap dan rendahnya koordinasi dengan pihak luar.

Dengan melihat permasalahan tersebut, maka di tahun yang akan datang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, mengupayakan perluasan ruang baca, gedung dan lahan parkir, menambah koleksi judul buku dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait secara intensif, terutama UPTD Sekolah.

2.2.23. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan diampu oleh Dinas Arpus. Indikator kinerja Urusan Kearsipan sebanyak 3, sementara programnya sebanyak 3 pula. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kearsipan.

**Tabel 2. 189 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019
 Urusan Kearsipan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah						
1	Jumlah Dokumen/Arsip yang dikelola	33.000	10.000	10.000	100	Dinas Arpus	★
2	Jumlah Desa yang telah dibenahi	80	36	36	100	Dinas Arpus	★
3	Jumlah peserta bintek kearsipan	124	36	36	100	Dinas Arpus	★
2.	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan						

1	Jumlah sarana kearsipan OPD yang berfungsi baik	65	48	48	100	Dinas Arpus	★
3.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi						
1	Jumlah OPD yang telah melakukan digitalisasi arsip	70	30	30	100	Dinas Arpus	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Arpus Kab. Tegal, Tahun 2020.

Dilihat dari prosentase rata-rata Capaian Kinerja Program (Outcome) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal untuk Urusan Kearsipan dengan Status Capaian Sangat Tinggi.

2.2.24. Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebanyak 14 dengan 8 program. Urusan Kelautan dan Perikanan diampu oleh DKPP. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan.

Tabel 2. 190 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
1	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir						
1	Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp)	8.283.746,00	8.283.746,00	12.887.350	155,57	DKPP	★
2	Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp)	1.564.155	1.564.155	104.779.484	6.698	DKPP	★
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan						
1	Jumlah kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan terbentuk	10	10	10	100	DKPP	★
2	Jumlah kegiatan masyarakat pengawasan sumber daya	10	10	11	110	DKPP	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
	kelautan terlaksana						
3	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut						
1	Jumlah pemberdayaan masyarakat	2	2	3	150	DKPP	★
4	Program pengembangan budidaya perikanan						
1	Jumlah produksi perikanan darat (kg)	162.510	162.510	251.133	154,53	DKPP	★
5	Program pengembangan perikanan tangkap						
1	Jumlah produksi perikanan laut (kg)	1.006.905,00	1.006.905	1.664.974	165,36	DKPP	★
6	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan						
1	Persentase penyuluh perikanan memiliki kompetensi	93	93	93	100	DKPP	★
2	Jumlah penyuluhan perikanan	18	18	17	94,44	DKPP	★
7	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan						
1	Jumlah produksi perikanan laut (kg)	1.006.905,00	1.006.905	1.664.974	165,36	DKPP	★
2	Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp)	8.283.746,00	8.283.746,00	12.887.350	155,57	DKPP	★
3	Jumlah produksi perikanan darat (kg)	162.510	162.510	251.133	154,53	DKPP	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
4	Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp)	1.564.155	1.564.155	104.779.484	6.698	DKPP	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.
 Sumber: DKPP Kab. Tegal, Tahun 2020.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, realisasi capaian target indikator program nilai produksi perikanan laut pada tahun 2019 tercapai sebesar 155% dengan status capaian sangat tinggi. Tingginya nilai produksi ini disebabkan karena meningkatnya produksi perikanan laut pada tahun 2019 yang mencapai 1.664.974 kilogram dengan nilai produksi Rp. 12.887.350.000,-.

Pada tahun 2019 target indikator nilai produksi perikanan darat tercapai 669% dengan status capaian sangat tinggi. Tingginya persentase pencapaian target ini disebabkan selain meningkatnya produksi perikanan darat (2.511.329Kg), juga dipengaruhi oleh harga jual dari beberapa komoditas perikanan yang cukup tinggi salah satunya adalah harga udang vaname.

Program pengembangan budidaya perikanan, persentase capaian target indikator jumlah produksi perikanan darat pada tahun 2019 mencapai 154% dengan status capaian sangat tinggi. Tingginya persentase pencapaian target produksi perikanan darat ini selain disebabkan karena berkembangnya jumlah pembudidaya ikan dan meningkatnya fungsi dari Balai Benih ikan (BBI) dalam menyediakan stok bibit ikan perairan air tawar. Selain itu juga didukung oleh kegiatan restocking di perairan umum.

Program pengembangan perikanan tangkap, persentase capaian target indikator jumlah produksi perikanan laut pada tahun 2019 mencapai 165%. Tingginya capaian target jumlah produksi perikanan laut ini akibat dari meningkatnya sarana prasarana pelabuhan diantaranya lancarnya alur sungai, penambahan armada kapal dan meningkatnya sarana prasarana TPI Suradadi yang berdampak pada meningkatnya semangat para nelayan untuk melakukan aktifitas melaut (mayang). Selain itu adanya pelatihan mesin temple perahu juga mendukung terhadap tingginya pencapaian produksi perikanan laut.

2.2.25. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata diampu oleh Diporapar. Terdapat 3 program dengan 6 indikator kinerja Urusan Pariwisata. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pariwisata pada tahun 2019.

Tabel 2. 191 Evaluasi Kinerja Program RKPd Tahun 2019 Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja 2019 (%)	OPD	Status Kinerja
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja 2019 (%)	OPD	Status Kinerja
1	Jumlah kunjungan Wisman	289,00	289	3.247	1.124	Diporapar	★
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						
1	Jumlah promosi pariwisata	4,00	4	4	100	Diporapar	★
2	Jumlah kunjungan Wisatawan nusantara	426.081,00	426.081	1.186.630	278	Diporapar	★
3	Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS)	1,00	1,00	7,00	350	Diporapar / Dikbud	★
3	Program Pengembangan Kemitraan						
1	Jumlah kampung wisata	4,00	4,00	4	100	Diporapar	★
2	Jumlah promosi wisata melalui media massa	3,00	2,00	2	100	Diporapar	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Diporapar Kab. Tegal, Tahun 2020.

Indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah memenuhi target, yaitu 3.247 orang dibanding target sebanyak 289 orang. Hal ini mengindikasikan bila pariwisata di Kabupaten Tegal cukup dikenal wisatawan mancanegara.

Selain itu capaian yang menggembirakan adalah jumlah kunjungan wisatawan nusantara, dari target sebanyak 426.081 orang, terealisasi 1.186.630 orang, atau dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 278%). Hal ini juga menunjukkan sektor pariwisata masih berpotensi untuk dikembangkan.

Pada indikator jumlah kampung wisata juga telah melebihi target yang diberikan pada tahun 2019, yaitu terealisasi 4 buah dari target 4 buah pada tahun 2019 ini, juga dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%). Membangun kampung wisata yang benar-benar eksis memang membutuhkan komitmen dan perhatian semua pihak, terutama pelaku pariwisata di Kabupaten Tegal dan pelaku pariwisata di tingkat nasional dan internasional.

2.2.26. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian diampu oleh Distankp dan DKPP. Urusan Pertanian terdiri dari 10 program dan 33 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target

dan capaian kinerja Urusan Pertanian pada tahun 2019.

Tabel 2. 192 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019 Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						
1	Jumlah sistem insentif pertanian	10	10	11	110,00	Dinas Tan & KP	★
2	jumlah petani yang terlatih pertahun	50	50	130	260,00	Dinas Tan & KP	★
3	Nilai Tukar Petani	112,00	112,00	108,36	96,75	Dinas Tan & KP	★
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perke bunan						
1	Jumlah pasar induk pertanian	1	1	1	100	Dinas Tan & KP	★
2	Jumlah promosi produk pertanian	4	4	4	100,00	Dinas Tan & KP	★
3	Jumlah petani bekerjasama dengan pelaku agribisnis	90	90	300	333,33	Dinas Tan & KP	★
4	Jumlah sarana prasarana infrastruktur pertanian	20	20	307	1.535,00	Dinas Tan & KP	★
5	Jumlah sistem informasi potensi pertanian	2	2	2	100,00	Dinas Tan & KP	★
3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perke bunan						
1	Jumlah litbang/pemanfaatan litbang TTG pertanian yang dimanfaatkan	3	3	3	100,00	Dinas Tan & KP	★
2	Jumlah penyuluhan TTG	4	4	5	125,00	Dinas Tan & KP	★
3	Jumlah Rumah Pintar Petani (RPP)	5	5	15	375,00	Dinas Tan & KP	★
4	Program peningkatan produksi pertanian/perke bunan						
1	Jumlah produksi padi (ton) (GKG)	359.538	359.538	360.431	100,24	Dinas Tan & KP	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja	
	2	Jumlah produksi jagung (ton)	116.844	116.344	132.047 PROV. 75,43	113,50	Dinas Tan & KP	★
	3	Jumlah produksi bawang merah (ton)	26.841	26.841	25.990	96,82	Dinas Tan & KP	★
	4	Jumlah produksi kentang (ton)	4.756	4.756	8.020	168,63	Dinas Tan & KP	★
	5	Jumlah produksi cabe (ton)	5.128	5.128	2.643	51,54	Dinas Tan & KP	↓
	6	Jumlah produksi kelapa (ton)	1.780	1.780	1.814	101,91	Dinas Tan & KP	★
	7	Jumlah produksi cengkeh (Ton)	112	112	112,22	100,20	Dinas Tan & KP	★
	8	Jumlah produksi Teh (Ton)	61	61	61,40	100,71	Dinas Tan & KP	★
	9	Jumlah produksi Gula (Ton)	9.531	9.531	7.516	78,99	Dinas Tan & KP	➡
	10	Persentase RDKK yang diimplementasikan disusun tepat waktu (April)	100	100	100	100,00	Dinas Tan & KP	★
5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan							
	1	Jumlah Penyuluh yang Lulus Sertifikasi	58	58	41	70,68	Dinas Tan & KP	➡
	2	Jumlah Penyuluh Swadaya	187	187	173	92,51	Dinas Tan & KP	★
6	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak							
	1	Persentase penurunan intensitas luas serangan OPT	1,14	1,14	1,14	100,00	DKPP	★
7	Program peningkatan produksi hasil peternakan							
	1	Jumlah produksi daging (kg)	5.808.587	5.808.587	10.167.793	175	DKPP	★
	2	Jumlah produksi susu (liter)	719.950	719.950	705.877	98	DKPP	★
	3	Jumlah produksi telur (kg)	4.954.109	4.954.109	10.261.185	207	DKPP	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
8	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan						
1	Konsumsi daging (Kg/kapita/tahun)	28,96	28,96	5,79	19	DKPP	↓
2	Konsumsi telur (Kg/kapita/tahun)	8,06	8,06	6,02	75	DKPP	→
3	Konsumsi susu (Kg/kapita/tahun)	26,47	26,47	3,53	13	DKPP	↓
9	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan						
1	Jumlah penerapan TTG peternakan	3	3	3	100,00	DKPP	★
10	Program Pengembangan Peternakan						
1	Jumlah Ternak terpelihara di Taman Satwa	28	28	70	250	DKPP	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Tan & KP; DKPP, Tahun 2020

Capaian kinerja Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dapat dilihat dari salah satu alat ukur yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani yaitu Nilai Tukar Petani (NTP). Perkembangan Nilai Tukar Petani selama tahun 2019 (NTP= 108,36) berada di bawah target RPJMD senilai (NTP= 111). Target RPJMD yang ditetapkan memang sangat tinggi dan merupakan gambaran cita-cita yang diharapkan. Namun demikian, dengan berbagai upaya yang dilakukan, nilai NTP yang dicapai Kabupaten Tegal sudah termasuk sangat tinggi, jauh melampaui NTP Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Kegiatan utama sektor pertanian adalah mempertahankan surplus komoditas pangan pokok di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2019, produksi padi sebagai bahan pangan pokok tetap mengalami surplus, meskipun produksi tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya.

Tahun 2019 terjadi kemarau panjang sebagai dampak badai la nina yang mempengaruhi iklim di Indonesia. El Nino-Southern Oscillation (ENSO) atau La Nina merupakan salah satu fenomena iklim yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan atau anomali iklim di Indonesia. Fase hangat dari ENSO biasa dikenal dengan istilah El Nino dapat menyebabkan kekeringan panjang. Pengamatan kondisi ENSO pada menjelang akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019 menunjukkan berlangsungnya fenomena El Nino di Samudera Pasifik. Dampak El Nino berupa kemarau dapat berpotensi mengganggu produksi padi pada musim tanam kedua, dan mengubah pola tanam untuk musim tanam berikutnya.

Iklim di Kabupaten Tegal sepanjang Tahun 2019 ikut terdampak dengan adanya badai tersebut. Data BMKG menyatakan untuk Kabupaten Tegal terjadi 7

bulan tanpa hujan yang turun di wilayah ini. Kesimpulan ini diperoleh dari stasiun pengamatan cuaca di Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

Untukantisipasi kekurangan air irigasi sebagai dampak kemarau yang berkepanjangan, maka Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan terutama Pemerintah Kabupaten berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan air irigasi pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan irigasi tanah dangkal, pembangunan dam parit untuk menaikkan tinggi permukaan saluran dan perbaikan jaringan irigasi di tingkat usaha tani. Pembangunan Dam Parit mengandalkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus, sedangkan ITD dan JITUT mengandalkan APBD Kabupaten Tegal, baik dari usulan masyarakat melalui Musrenbang maupun penjarangan aspirasi.

Meskipun mengalami penurunan produksi, namun produksi padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir masih dapat melampaui target RPJMD 2014 -2019. Grafik berikut menggambarkan capaian produksi padi dari tahun 2014 - 2019. Dengan pencapaian produksi padi sebesar 360,431 ton dan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tegal sebanyak 1.566.587 jiwa, maka surplus beras di Kabupaten Tegal sebesar 68.143 ton.

Penurunan luas tanam padi, ternyata diikuti dengan kenaikan luas tanam untuk jagung. Kekurangan air irigasi menyebabkan petani beralih komoditas dari padi ke jagung. Bila luas tanam jagung pada tahun 2018 adalah 16.235 ha, maka untuk tahun 2019 luas tanam jagung adalah 21.238 ha. Kenaikan luas tanam ini diikuti dengan kenaikan produksi jagung dimana pada tahun 2019 produksi jagung sebesar 117.236 ton sehingga juga melampaui target RPJMD 2014-2019.

Namun demikian untuk komoditas pertanian lainnya rata-rata mengalami penurunan. Bawang merah yang selama ini mampu melampaui target, untuk tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah petani bawang merah di Kabupaten Tegal menurun dari tahun sebelumnya. Selain faktor iklim, harga yang tidak stabil menyebabkan petani enggan untuk menanam bawang merah.

Produksi melati sudah beberapa tahun terakhir tidak mencapai target RPJMD. Pada awal penyusunan RPJMD lahan budidaya melati masih cukup luas yaitu 371 ha, maka pada akhir tahun 2019 ini luas tanaman melati tinggal 150 ha dan terus mengalami penurunan akibat abrasi pantai. Bila dilihat harga, melati adalah komoditas ekspor yang harganya cukup menjanjikan. Oleh karenanya, kedepan akan diupayakan budidaya melati diluar kawasan pantai.

Secara umum, kinerja pertanian masih sangat dipengaruhi oleh iklim yang berubah-ubah. Data curah hujan BMKG selama 10 tahun terakhir, apabila curah hujan mencukupi, maka produksi hampir semua komoditas pertanian meningkat, namun sebaliknya, bila curah hujan kurang, maka produksi komoditas pertanian juga mengalami penurunan. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengingat stigma Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar masyarakat masih menggantungkan mata pencahariannya di sektor ini. Permasalahan lingkungan juga menjadi isu strategis. Rusaknya daya dukung lingkungan di wilayah hulu berimbas pada ketersediaan air irigasi, juga merusak bendungan-bendungan yang ada akibat sedimentasi yang tidak terkendali.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak lebih tepat menggunakan indikator persentase ternak tervaksinasi atau persentase ternak terobati. Oleh karena itu data capaian target indikator program tidak dapat disajikan karena data penurunan intensitas luas serangan OPT pada Dinas KPP

tidak tersedia.

Pada tahun 2019, persentase capaian target indikator program peningkatan produksi hasil peternakan antara lain jumlah produksi daging (kg), jumlah produksi susu (liter), dan jumlah produksi telur (kg) tercapai dengan status pencapaian sangat tinggi bahkan jumlah produksi daging dan telur tercapai lebih dari 100%. Peningkatan produksi hasil peternakan ini didukung beberapa kegiatan antara lain kegiatan sentra peternakan rakyat, peningkatan sarana prasarana RPH penusupan dan pengolahan hasil peternakan.

Pada tahun 2019 persentase capaian target indikator program belum tercapai secara maksimal. Indikator konsumsi daging (Kg/kapita/tahun) dan konsumsi telur dan susu (Kg/kapita/tahun) mendapat status capaian sangat rendah. Bahwasanya standar konsumsi protein hewani yang ditetapkan FAO, minimal enam gram/kapita/hari atau setara daging sebanyak 10,1 kg, telur 3,5 kg, dan susu 6,4 kg/kapita/tahun. Dari data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat konsumsi daging dan susu di Kabupaten Tegal masih tergolong sangat rendah atau masih dibawah standar FAO. Sedangkan untuk tingkat konsumsi tekur sudah melebihi standart international (minimal).

Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian pada indikator konsumsi daging dan konsumsi susu ini disebabkan karena harga daging dan susu yang relatif lebih mahal dan juga faktor daya beli masyarakat yang masih rendah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konsumsi daging dan susu antara lain melalui kampanye gemar makan daging dan minum susu.

2.2.27. Urusan Perdagangan




Urusan Perdagangan terdiri dari 16 indikator kinerja dan 4 program. Urusan perdagangan diampu oleh Disdagkop UKM. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perdagangan padat tahun 2019.

**Tabel 2. 193 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019
Urusan Perdagangan**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.						
01	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen	5	5	5	100	Disdagkop UKM	★
02	Prosentase Pengaduan Konsumen ditangani	90	90	90	100	Disdagkop UKM	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
03	Prosentase Alat Ukur yang ditera.	85	85	85	100	Disda gkop UKM	★
2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor						
01	Nilai Ekspor Non Migas (Rp.000)	121.280.610	121.280.610	205.000.000	169,3	Disda gkop UKM	★
02.	Volume Ekspor Non Migas (ton)	21.000	21.000	23.000	109,52	Disda gkop UKM	★
03.	Ekspor bersih perdagangan (Rp.000)	101.000.000	101.000.000	102.000.000	100	Disda gkop UKM	★
3.	Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri						
01.	Jumlah Pasar Lelang Daerah	1	1	2	200	Disda gkop UKM	★
02.	Jumlah Sistem Informasi Perdagangan	1	1	1	100	Disda gkop UKM	★
03.	Jumlah Pasar Tradisional yang representative.	10 Pasar	10 Pasar	10 Pasar	100	Disda gkop UKM	★
04.	Jumlah Retribusi Pasar	26 Pasar	26 Pasar	26 Pasar	100	Disda gkop UKM	★
05.	Jumlah alat kebersihan pasar	5 Unit	5 Unit	10 Unit	100	Disda gkop UKM	★
4.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima						
01.	Jumlah kelompok pedagang kaki lima	55	55	56	101,81	Disda gkop UKM	★
02.	Jumlah kelompok pedagang kaki lima dibina	14	14	15	107,14	Disda gkop UKM	★
03.	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan	6.560	6.560	6.560	100	Disda gkop UKM	★
04.	Jumlah kawasan PKL dan asongan	30	30	30	100	Disda gkop UKM	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja
05.	Jumlah kawasan PKL dan asongan yang dibina	20	20	20	100	Disdagkop UKM	

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.
 Sumber: Disdagkop UKM Kab. Tegal, Tahun 2020

Sektor perdagangan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dan potensi sehingga arah kebijakan bidang perdagangan ditujukan untuk menciptakan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing dengan berwawasan lingkungan dengan cara :

1. Meningkatkan sosialisasi kepada konsumen agar bijak melakukan transaksi perdagangan.
2. Melakukan pembinaan secara intensif kepada kelompok pkl agar tertib berjualan.
3. Melakukan penataan pasar-pasar tradisional secara berkala dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan ekspor non migas serta mengembangkan kerjasama perdagangan.
5. Mengagendakan mengikuti pameran-pameran nasional maupun internasional.
6. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha/ pedagang tentang kewajiban meneraulangkan uttp yang dimiliki sesuai uu no. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan aturannya turunannya.
7. Meningkatkan prosentasi uttp yang tertera ulang melalui penambahan jumlah hari sidang tera ulang dan perluasan cakupan wilayah melaksanakan sidang tera ulang.
8. Meningkatkan intensitas pengawasan kemetrolagian dengan memperluas objek pengawasan seperti pasar-pasar tradisional, pusat-pusat perbelanjaan modern, perusahaan/ pabrik, toko-toko yang tersebar di desa-desa atau jalan-jalan perkotaan, jasa-jasa pengiriman paket, jasa laundry, klinik, apotek dll.




Jumlah pasar lelang daerah yang ditargetkan sebesar 1 pasar telah mencapai realisasi sebanyak 2 pasar lelang dengan capaian prestasi sebesar 200% atau sangat tinggi. Pasar yang dilelangkan tahun 2019 adalah Pasar Pesayangan dan Pasar Jejeg. Jumlah Pasar Tradisional yang representatif dari target 10 pasar di tahun 2019 terealisasi sudah 8 pasar yang representatif (dilakukan rehab dan revitalisasi) atau 80% dengan capaian Tinggi. Pasar tradisional yang representatif antara lain Pasar Pepedan, Pasar Kemantran, Pasar Pesayangan Pasar Kedungsukun, Pasar Pangkah, Pasar Bojong, Pasar Margasari dan Pasar Lebaksiu. Untuk kedepannya agar dapat meningkatkan aggaran revitasisai / rehabilitasi pasar tradisional agar jumlah pasar tradisional yang representatis semakin meningkat.

2.2.28. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Disperinaker dengan 4 program dan 5 indikator kinerja. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perindustrian pada tahun 2019.

**Tabel 2. 194 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019
Urusan Perindustrian**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja 2019
1	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi						
1	Jumlah pembinaan IKM	45	45	180	400	Disperinaker	★
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						
1	Jumlah Izin Usaha IKM Baru	35	35	63	180	Disperinaker	★
2	Jumlah kerjasama IKM	16	16	16	100	Disperinaker	★
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri						
1	Jumlah produk SNI	12	12	2	16,66	Disperinaker	↓
4	Program Penataan Struktur Industri						
1	Jumlah klaster industri aktif	17	17	17	100	Disperinaker	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disperinaker, 2020.

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi dengan capaian fisik 100%, realisasi keuangan sebesar 87% telah dilaksanakan melalui beberapa Kegiatan seperti ;

- a. Penyusunan Database Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan di Kecamatan Talang tahun 2019 dengan perolehan data IKM sebanyak 36 sentra terdiri dari 1.251 IKM, Kegiatan Pengembangan Desain Kemasan dan Fasilitas Peralatan dan Kemasan Produk IKM dilaksanakan melalui Pelatihan Kemasan kepada 60 IKM di Desa Pangkah, Kelurahan Slawi Wetan dan Desa Margasari,
- b. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi Bahan Bangunan bagi IKM Kab. Tegal dilaksanakan pada 1-3 Juli 2019 dengan jumlah peserta 20 IKM,
- c. Kegiatan Pelatihan Teknologi Proses Finishing Industri Mebeluer bagi IKM Kab. Tegal dilaksanakan pada 8-11 Oktober 2019 dengan jumlah peserta 20 IKM di Balai Desa Balapulung Kulon,
- d. Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan bagi IKM Makanan dan Minuman Kab. Tegal dilaksanakan dengan peserta 25 IKM Makanan dan Minuman.
- e. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha bagi IKM Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui kegiatan Achievement Motivation Training (AMT) yang diikuti 40 IKM.

Berdasarkan data diatas jumlah pembinaan terhadap IKM dengan berbagai fasilitasi dan didukung oleh capaian program lain ada 180 IKM di tahun 2019.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 88,41% dilaksanakan melalui beberapa kegiatan ;

- a. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, kecil dan menengah dengan capaian pelaksanaan Pelatihan Tenun dan Batik bagi 6 IKM ATBM dan 6 IKM Batik di Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta
- b. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Perkuat Kluster Industri melalui Dekranasda dengan capaian terpenuhinya undangan dan partisipasi Dekranasda Kab. Tegal terhadap Dekranasda Provinsi Jateng, Dekranas maupun Dekranasda Kab/Kota lain, peningkatan kompetensi bagi ketua dekranasda melalui kegiatan Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Dekranasda Jawa Tengah, promosi produk-produk kriya dalam event pameran Dekranas, terlaksananya kegiatan lomba fashion show dalam rangka Hari Batik Nasional di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tegal
- c. Pengembangan Akses Pasar IKM dengan dibuatnya media pemasaran IKM berupa website mocibae.com.

Berdasarkan data capaian diatas dan didukung capaian program atau kegiatan lainnya, jumlah izin IKM yang dapat dicapai melalui pendampingan IKM sejumlah 63 IKM berupa 30 IUMK dan 33 Izin PIRT.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 83,2% dilaksanakan melalui kegiatan ;

- a. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur berupa kegiatan fasilitasi sertifikasi halal bagi 10 IKM, uji nutrisi 24 produk IKM, uji lab pangan 38 Produk IKM dan uji kadaluarsa bagi 5 IKM.
- b. Penyusunan Dokumen Sistem Mutu dengan peserta Industri bidang Perlogaman yaitu PT. BIMUDA KARYA TEKNIK, PT. TIGA BERSAUDARA MANUFAKTUR, dan PT. MITRA KARYA TEGAL

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan diatas, pada tahun 2019 ada dua IKM yang didaftarkan untuk mendapat sertifikasi SNI yaitu IKM Pelita Prima Jaya dengan jenis produk Bola Sepak dan IKM Tri Sakti dengan Jenis Produk Shuttle Cock dan ada beberapa IKM yang tidak di daftar kan ke SNI terkait Sertifikasi SNI namun sebagai peningkatan kualitas atau pengembangan IKM, fasilitasi diberikan pada penyusunan dokumen mutu dan penerapan manajemen ISO pada IKM sejumlah 6 IKM (Manajemen Mutu) dan 3 IKM (Manajemen Lingkungan).



2.2.29. Urusan Transmigrasi

Urusan transmigrasi terdiri dari 1 program dengan 2 indikator kinerja. Urusan Transmigrasi diampu oleh Disperinaker. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2019.

**Tabel 2. 195 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019
Urusan Transmigrasi**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Jumlah kerjasama transmigrasi	1	1	1	100	Disperinaker	★
2	Jumlah transmigran	67	67	78	116,41	Disperinaker	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disperinaker, 2020.

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Untuk memberikan kesempatan pada masyarakat/keluarga yang tidak mempunyai aset/fasilitas tapi memiliki kemampuan untuk bekerjaterutama mengelolahan di bidang tanah dimungkinkan untuk mengikuti Transmigrasi di luar pulau Jawa. Capaian jumlah transmigran tahun 2014 - 2018 adalah 13 KK dengan jumlah 62 jiwa dan Pelaksanaan Tranmigrasi Tahun 2019 sejumlah 3 KK 16 Jiwa. Sehingga Jumlah Transmigran hingga tahun 2019 adalah 78 jiwa.

2.2.30. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan terdiri dari 9 program dan 9 indikator kinerja. Urusan Perencanaan Pembangunan diampu oleh Bappeda dan BPBD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2018.

Tabel 2. 196 Evaluasi Kinerja Program RKPDP Tahun 2019 Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Program Pengembangan data/informasi						
1	Jumlah sistem informasi daerah aktif	3	3	3	100	Bappeda & Litbang	★
2	Program Kerjasama Pembangunan						
1	Jumlah kerjasama pembangunan yang termanfaatkan	5	5	7	140,00	Bappeda & Litbang	★
3	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh						
1	Jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah ditindaklanjuti	4	4	4	100	Bappeda & Litbang	★
4	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Cakupan pelayanan SPAM di kota kecamatan	18	18	18	100	Bappeda & Litbang	★
5	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah						
1	Jumlah aparatur perencana kabupaten yang memiliki kompetensi perencana	15	15	32	213,33	Bappeda & Litbang	★
6	Program perencanaan pembangunan daerah						
1	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	11	11	11	100,00	Bappeda & Litbang	★
7	Program perencanaan pembangunan ekonomi						
1	Jumlah klaster yang difasilitasi	30	30	30	100,00	Bappeda & Litbang	★
8	Program perencanaan sosial budaya						
1	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan	5	5	6	120,00	Bappeda & Litbang	★
9	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana						
1	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	2	2	2	100,00	BPBD	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Bappeda & Litbang, BPBD Kab. Tegal, Tahun 2020

Untuk indikator jumlah kerjasama pembangunan yang termanfaatkan tercapai 7 kerjasama dari target 5 kerjasama dengan demikian indikator ini berpredikat Sangat Tinggi (tercapai 140%). Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama pembangunan dengan IPB, BPPT, Kemendikbud, UPS, UGM, Unsoed dan Universitas Guna Dharma. Pada indikator jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah ditindaklanjuti belum ada. Hal ini karena kebijakan yang ada saat ini masih bersifat makro (dalam lingkup Kabupaten) dan belum ada kebijakan satu sektor (lingkup kecamatan). Sedangkan indikator cakupan Pelayanan SPAM di Kota Kecamatan telah tercapai 18 Kecamatan dari target 18 kecamatan atau dengan predikat Sangat Tinggi (tercapai 100%). Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan indikator ini adalah beberapa kecamatan memiliki kontur yang relatif susah untuk penyediaan SPAM dan belum disertai adanya saluran SPAM di setiap kecamatan.

Jumlah Aparatur Perencana Kabupaten yang memiliki kompetensi perencana adalah 32 orang, telah mencapai target yaitu 15 orang dengan status

kinerja Sangat Tinggi (tercapai 213,33%). Permasalahan yang dihadapi adalah minat yang rendah terhadap jabatan fungsional termasuk fungsional perencana. Untuk itu rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu dengan arahan dan dorongan dari pimpinan kepada karyawan/wati agar mengikuti diklat fungsional dimaksud.

Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu ada 2, yaitu RKPd dan RKPd Perubahan. Untuk mewujudkan indikator ini realtif tidak ditemui hambatan.

Indikator jumlah klaster yang difasilitasi adalah 30 klaster, sementara target indikator ini sebanyak 30 klaster. Pelaksanaan indikator ini melalui program perencanaan pembangunan ekonomi, kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (FEDEP). Permasalahan yang dihadapi adalah keseriusan semua pihak dalam upaya mempertahankan klaster dan meningkatkan status sentra menjadi klaster.

Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan sebanyak 6 dokumen terdiri dari RAD SDG's, RAD PSH (Pendidikan Sepanjang Hayat), RAD PMG (Penanggulangan Masalah Gizi), RAD Penanggulangan Stunting, RAD PPK (RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi), Masterplan TIK. Jumlah ini di atas target sebanyak 5 dokumen, sehingga capaian kinerjanya Sangat Tinggi (tercapai 120%). Indikator ini dicapai melalui kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta Koordinasi Pelaksanaan Program SDG's.

Sementara untuk indikator jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana telah tercapai 2 dokumen dari target 2 dokumen.




2.2.31. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan dari 1 program, 3 indikator dan diampu oleh BPKAD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pengawasan.

Tabel 2. 197 Evaluasi Kinerja Program RKPd Tahun 2019 Urusan Keuangan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
1	Rata-Rata Waktu Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	100	BPKAD	★
2	Jumlah peraturan tentang APBD	7	7	7	100	BPKAD	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
		1 perda APBD, 1 perda perubahan APBD, 1 Perbup Penjabaran Penetapan APBD, 1 Perbup penjabaran perubahan APBD, 1 perbup penggeseran APBD, 1 perda pertanggungjawaban APBD, 1 perbup penjabaran pertanggungjawaban APBD,, 1 Perbup Pengelolaan BMD	1 perda APBD, 1 perda perubahan APBD, 1 Perbup Penjabaran Penetapan APBD, 1 Perbup penjabaran perubahan APBD, 1 perbup penggeseran APBD, 1 perbup penggeseran APBD, 1 perda pertanggungjawaban APBD, 1 perbup penjabaran pertanggungjawaban APBD,, 1 Perbup Pengelolaan BMD	1 perda APBD, 1 perda perubahan APBD, 1 Perbup Penjabaran Penetapan APBD, 1 Perbup penjabaran perubahan APBD, 1 perbup penggeseran APBD, 1 perbup penggeseran APBD, 1 perda pertanggungjawaban APBD, 1 perbup penjabaran pertanggungjawaban APBD, 1 Perbup Pengelolaan BMD			
3	Jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah	2 (1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD)	4 1,00 (1 SIMDA Keuangan Online berbasis cloud server 1 SIMDA BMD) 1 SP2D Online i-btl	4 1,00 (1 SIMDA Keuangan Online berbasis cloud server 1 SIMDA BMD) 1 SP2D Online, 1 i-btl,	100	BPKAD	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

BPKAD sebagai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah mempunyai indikator pada Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :







- i. Rata-rata waktu Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- ii. Jumlah Peraturan tentang APBD dan Aset Daerah
- iii. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi masing masing 100%, 100% dan 150%.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penunjang pengelolaan pendapatan untuk tahun ini memperoleh prestasi yang patut dibanggakan dalam rangka penggalan pendapatan daerah khususnya pajak bumi dan bangunan yang selama ini tidak pernah mencapai target, tetapi pada tahun 2019 telah mencapai target realisasi sebesar 105,16 % dan untuk BPHTB mencapai target realisasi sebesar 132,44 %.

2.2.32. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian dari 3 program, 11 indikator dan diampu oleh BKD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pengawasan.

**Tabel 2. 198 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2019
Urusan Kepegawaian**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
1	Program Pendidikan Kedinasan						
	Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan	20 0 PNS (II=11, III=36, IV=153)	4 0 PNS (II=4, III=10, IV=26)	8 PNS (II=0, III=0, IV=8)	20,00	BKD	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya						
	Jumlah Peserta Diklat Teknis	70 PNS	70 PNS	136 PNS	194,29	BKD	
	Jumlah Peserta Diklat Fungsional	40 PNS	40 PNS	55 PNS	137,50	BKD	
	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	94,00%	94,00%	78,03%	83,01%	BKD	
	Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	100,00%	100,00 %	89,61%	89,61%	BKD	
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						
	Jumlah CPNS	2.000 CPNS	300 CPNS	308 CPNS	102,67	BKD	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Kinerja 2019
	Jumlah PNS Tugas Belajar	24 PNS	24 PNS	8 PNS	33,33	BKD	★
	Jumlah Kasus Kepegawaian	40 kasus	40 kasus	16 kasus	160,00	BKD	➡
	Jumlah PNS yang mendapat Hukuman Disiplin	20 PNS	20 PNS	14 PNS	130,00	BKD	➡
	Jumlah Pejabat Struktural yang dinilai kompetensinya	6 Pejabat	6 Pejabat	161 Pejabat	2.683,33	BKD	
	Jumlah Jabatan Fungsional Baru (non Guru dan Kesehatan)	43 JF	43 JF	15 JF	34,88	BKD	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Program pendidikan kedinasan pada tahun 2019 jumlah peserta Diklatpim adalah sejumlah 8 orang dari target 40 orang dan capaian kinerjanya adalah 20,00 %. Indikator Peserta Diklatpim dipengaruhi oleh alokasi anggaran, sehingga semakin besar anggaran yang disediakan maka akan semakin tinggi realisasi kinerja yang diperoleh. Sampai dengan tahun 2019 terdapat ± 201 pejabat yang belum mengikuti Diklatpim merupakan salah satu permasalahan tersendiri karena dibutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk biaya pengiriman peserta belum termasuk adanya promosi pejabat baru.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jumlah peserta diklat teknis ditargetkan untuk mengirimkan 70 orang. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal baik dengan pola cost sharing maupun penyelenggaraan sendiri dengan realisasi sejumlah 136 orang peserta dengan capaian kinerja 194.29 %. Adanya kewajiban ASN harus mendapatkan pengembangan kompetensi melalui pelatihan minimal 20 jp dalam setahun merupakan permasalahan yang cukup mendasar karena diperlukan pendanaan besar.

Jumlah Peserta Diklat Fungsional ditargetkan untuk mengirimkan 40 peserta dengan realisasi sebanyak 55 orang peserta dengan capaian kinerja sebesar 137,50 %. Diklat fungsional yang dilaksanakan adalah Diklat Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional Tertentu dengan pola cost sharing dan Diklat Jabatan Fungsional Dasar dan Penjurusan dengan pola pengiriman.

Indikator kinerja Presentasi Jabatan Struktural yang Terisi ditargetkan sebesar 94 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 83.01%. Adanya perubahan susunan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan pada akhir tahun 2019 menyebabkan pengisian jabatan baru dilakukan pada awal tahun 2020.

Terdapat 308 CPNS formasi tahun 2018 yang diangkat pada tahun 2019, adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan Pelatihan Dasar/Prajabatan pada masa percobaan satu tahun, CPNS yang mengikuti pelatihan dasar/prajabatan sejumlah 276 orang dari target 277 CPNS sehingga capaian kinerjanya adalah 99,64 %.

Program pembinaan dan pengembangan aparatur indikator kinerja Jumlah CPNS pada tahun 2019 ditargetkan sejumlah 2.000 orang, dan terealisasi sejumlah 308 orang yang berasal dari formasi umum tahun 2018 dan bidang PTT Kemenkes. Sedangkan formasi tahun 2019 sejumlah 499 orang baru melakukan tahapan seleksi administrasi sedangkan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang akan dilakukan pada tahun 2020. Formasi CPNS ditetapkan oleh Kementerian PAN RB berdasarkan usulan dari pemerintah daerah, oleh karena itu capaian dari indicator ini adalah sebesar 15,40 %.

Indikator jumlah PNS Tugas Belajar ditargetkan sejumlah 24 orang dan terealisasi hanya sejumlah 8 orang Tugas Belajar. Indikator ini dipengaruhi oleh jumlah lembaga pemerintah pusat yang memberikan beasiswa tugas belajar. Hal ini karena adanya keterbatasan anggaran sehingga pemerintah daerah tidak dapat memberikan beasiswa kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formalnya.

Jumlah Kasus Kepegawaian pada tahun 2019 ditargetkan sejumlah 40 kasus. Sehubungan dengan merupakan target kinerja negative yaitu realisasi yang lebih rendah dari target yang telah ditetapkan merupakan prestasi, maka BKD telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai, Pengelolaan Presensi Pegawai, dan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS. Adapun realisasi kinerjanya adalah sejumlah 16 kasus kepegawaian yang ditangani atau sekitar 160 %.

Target yang ditetapkan untuk indicator ini adalah sejumlah 20 PNS dengan realisasi sejumlah 14 kasus atau dengan realisasi capaian untuk indicator kinerja ini sebesar 130.00 % karena keberhasilan dari indicator ini adalah apabila realisasinya lebih sedikit daripada target yang telah ditetapkan.

Indikator jumlah Pejabat Struktural yang dinilai Kompetensinya ditargetkan sejumlah 6 orang. Pada tahun 2019, Penilaian kompetensi dilakukan dalam rangka pengisian jabatan Administrator dan Pengawas dengan menggunakan metode penelusuran Kader Potensial (*talent scouting*) dan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan metode Seleksi Terbuka. Oleh karena itu capaian realisasi pejabat structural yang dinilai kompetensinya sangat besar yaitu sejumlah 161 orang atau 2.683 %..

Jumlah Jabatan Fungsional Baru (non guru dan kesehatan) ditargetkan sejumlah 43 orang. Adanya kebijakan Inpassing Jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh BKN, dan dan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Jabatan Fungsional tertentu dan rencana Pemberian Gaji dan Tunjangan Kinerja yang disesuaikan dengan Kelas Jabatan belum berdampak pada realisasi capaian kinerja indicator ini. Pada tahun 2019, realisasi Jumlah Jabatan Fungsional Baru sejumlah 15 orang dengan capaian kinerja sebesar 34.88 %.

2.2.33. Urusan Pengawasan

Urusan Pengawasan dari 3 program, 6 indikator dan diampu oleh Inspektorat. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pengawasan.

Tabel 2. 199 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Pengawasan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	OPD	Status Capaian 2019
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH						
	1 Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	144	136	136	100	Inspektorat	★
	2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	95,00	95,00	90,38	95,14	Inspektorat	★
3	Opini WTP BPK	WTP	WTP	WTP	100	Inspektorat	★
2	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan						
	Jumlah aparatur pemeriksa memiliki kompetensi	35	35	41	117,14	Inspektorat	★
	Jumlah pelatihan teknis aparatur pemeriksa	4	4	56	1400,00	Inspektorat	★
3	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan						
	Jumlah kebijakan/pedoman prosedur pengawasan	6	6	12	200,00	Inspektorat	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penyelenggaraan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan pada 3 program utama yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Berdasarkan data capaian kinerja program, dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, pada indikator Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan terealisasi 92 obyek pengawasan dari target sebesar 136 obyek pengawasan atau tercapai sebesar 67,65 %. Pada indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan terealisasi sebesar 90,08 % dari target sebesar 93,00 % atau tercapai sebesar 96,86 % . Sedangkan pada indikator Opini WTP BPK, tercapai opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 yang diterima pada tahun 2018.

Untuk opini LKPD Tahun 2018 baru didapatkan pada tahun 2019. Belum tercapainya Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan disebabkan oleh banyaknya temuan BPK yang sulit ditindaklanjuti dan temuan pengembalian kerugian negara/daerah yang terkait dengan pihak ketiga serta beberapa temuan yang terkait dengan proses peradilan. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengusulkan penghapusan melalui usulan status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah) kepada BPK RI, namun hingga saat ini belum ada keputusan. Permasalahan dalam pencapaian opini WTP untuk LKPD Tahun 2018 adalah penataan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hal tersebut dikarenakan rentang kendali yang cukup panjang sehingga membutuhkan koordinasi yang intensif. Permasalahan lainnya pada Sistem aplikasi yang terdapat pada BPKAD yang belum selesai. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah percepatan kegiatan verifikasi dan rekonsiliasi aset tetap (BMD), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kegiatan monitoring, evaluasi, konsultasi, reuiu, dan audit, serta optimalisasi peran pendampingan Inspektorat dalam penyusunan LKPD Tahun 2018 melalui asistensi, monitoring, dan reuiu.

Dalam Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, pada indikator Jumlah aparatur pemeriksa memiliki kompetensi tercapai 45 orang dari target sebesar 25 orang atau tercapai sebesar 180,00 %, dan pada indikator Jumlah pelatihan teknis aparatur pemeriksa terlaksana 30 pelatihan dari target 4 pelatihan atau tercapai 750 %. Pencapaian program ini tidak mendapatkan kendala karena terdapat peningkatan jumlah auditor dari pembentukan dan inpassing jabatan, dan banyaknya kegiatan pelatihan/diklat yang direncanakan pada tahun 2018 dengan anggaran yang mencukupi. Pencapaian tersebut berdampak positif pada peningkatan level Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Tahun 2018, atas dasar penilaian dari BPKP RI Inspektorat Kabupaten Tegal telah mencapai Level 3.

Dalam Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, hingga akhir tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Tegal telah menyusun 33 kebijakan/prosedur pengawasan yang terdiri dari Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Inspektur Kabupaten Tegal dari target sampai dengan akhir 2018 sebanyak 5 kebijakan/prosedur atau tercapai 660 %. Dalam program ini tidak terdapat kendala, dan faktor pendorong percepatan penyusunan kebijakan dan prosedur adalah berlakunya peraturan perundang-undangan dan upaya peningkatan kapabilitas APIP yang mengamanatkan pemerintah daerah menyusun beberapa kebijakan/prosedur tentang pengawasan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Mendasarkan berbagai capaian kinerja pembangunan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal, maka permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 dapat dirumuskan sebagai berikut :

A. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas pertama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Merealisasikan agenda SDGs menjadi strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal pada 4 tahun ke depan. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal masih tinggi. Penduduk miskin Kabupaten Tegal pada tahun 2019 tercatat sebanyak 109,94 ribu jiwa (berkurang 4,12 ribu jiwa) atau 7,64% terhadap total jumlah penduduk, jumlah ini turun sebesar 0,3% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018 mencapai 114,06 ribu jiwa atau 7,94 %.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan. Untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut, perlu adanya kemitraan, baik antara Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah/ Swasta/ Masyarakat atau Komunitas Peduli, maupun sinergi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Desa. Sasaran dan permasalahan pokok penyebab kemiskinan sudah terdata dengan baik, yang utama adalah terbangunnya komitmen semua pemangku kepentingan untuk menyepakati program dan kegiatan di sektor nya masing-masing agar target penurunan angka kemiskinan pada 5 tahun ke depan dapat tercapai.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tegal dari tahun 2015 – 2019 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung turun, pada tahun 2017 adalah 1,27, tahun 2018 naik menjadi 1,41 selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 0,64. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil. Ada kenaikan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tegal dari tahun 2015 – 2019 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung turun. Dari angka Indeks Keparahan Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin rendah. Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin homogen kasus/karakter/ keadaannya.

Permasalahan penanggulangan kemiskinan utamanya menyangkut perilaku dan budaya masyarakat, akses terhadap program penanggulangan kemiskinan, serta data kemiskinan yang masih belum sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi lapangan.

B. Tingkat Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Sedangkan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal meningkat antara tahun 2012-2015, tetapi menurun di tahun 2017 - 2019. Angka TPT Kabupaten Tegal Tahun 2019 turun menjadi 8,21% dari tahun 2018 sebesar 8,45. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal pada Tahun 2019 menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan pada 4 (empat) tahun ke depan.

Berdasarkan klasifikasi wilayah, 6,77 persen pengangguran berada di wilayah perdesaan dan 8,99 persennya di wilayah perkotaan. Penyerapan tenaga kerja di wilayah perdesaan mencapai 2 kali lipat penyerapan tenaga kerja di wilayah perkotaan. Hal ini dimungkinkan terkait efektifitas dana desa yang berhasil menumbuhkan perekonomian di wilayah perdesaan, selain adanya penyerapan lulusan sekolah oleh pasar tenaga kerja di Kabupaten Tegal yang mengalami perbaikan ekonomi khususnya di sektor perdagangan.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pengangguran di kabupaten Tegal terdiri dari 28,45% pengangguran berpendidikan SD kebawah, 29,81% berpendidikan SMP, 9,01% berpendidikan SMU, 29,20% berpendidikan SMK, dan sisanya lulusan perguruan tinggi. Pencari kerja di Kabupaten Tegal cenderung memilih pekerjaan yang disukai dan memilih menunda memperoleh pekerjaan ketimbang bekerja namun bukan pada pekerjaan yang diinginkan atau lebih suka menganggur.

Permasalahan pengangguran harus dapat diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan program oleh Pemerintah Daerah, antara lain dengan memperluas lapangan pekerjaan, melalui upaya menarik investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri agar mendirikan ruang usaha padat karya. Untuk itu perlu kemudahan prosedur investasi dan ketersediaan peruntukan tata ruang industri yang memadai.

C. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Tegal pada Tahun 2013-2018 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tersebut, IPM Kabupaten Tegal meningkat dari 63,50 pada Tahun 2013, menjadi 64,10 pada Tahun 2014, kemudian meningkat menjadi 65,04 pada Tahun 2015, dan kembali meningkat menjadi 65,84 pada Tahun 2016, kemudian menjadi 66,44 pada Tahun 2017, dan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 67,33. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 sebesar 0,77. Komponen utama yang menjadi tolok ukur pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah dari sektor kesehatan, sektor pendidikan dan daya beli masyarakat.

Dari sektor kesehatan, IPM dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2018 angkanya menunjukkan 71,28

tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71,14 tahun pada tahun 2017 atau 71,02 tahun pada tahun 2016. Isu strategis terkait Angka Harapan Hidup yaitu dengan kebijakan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak, penanganan stunting, hingga penanganan lansia secara komprehensif serta penanganan penyakit menular dan tidak menular dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dalam sektor pendidikan, IPM dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2016 angkanya 12,01 tahun, pada tahun 2017 menjadi 12,06 tahun dan tahun 2018 sebesar 12,34 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2016 menunjukkan angka 6,54 tahun, meningkat menjadi 6,55 tahun pada tahun 2017. tahun 2018 angkanya menjadi 6,70 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tahun 2017, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

Sedangkan pembangunan sektor pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat serta pemenuhan akses layanan pendidikan.

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Tegal mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tegal. Data tahun 2016 menunjukkan angka 8.709 ribu rupiah/orang/kapita, meningkat menjadi angkanya menjadi 9.433 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2018. Isu Pembangunan terkait pendapatan dihadapkan pada permasalahan rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, rendahnya *entrepreneurship* serta terbatasnya daya saing dan inovasi.

D. Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif

Kondisi daya saing Kabupaten Tegal dilihat dari PDRB. PDRB Kabupaten Tegal tahun 2018 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp33.079.234,10 juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2018 mencapai Rp23.552.548,37 juta. Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal tahun 2018 mencapai 5,51 %, sedangkan tahun 2017 sebesar 5,38 %.

Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar mata pencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya kluster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan

rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthor, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat dan teh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsuhnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil – hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor *ekstraktif* untuk maju dan mendorong sektor tersier untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya outlet penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi. Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkuat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun. Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi

sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong. Perikanan yang merupakan salah satu komponen PDRB sektor pertanian, diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam menyumbang PDRB Kabupaten Tegal yang dilakukan dengan pengembangan perikanan laut melalui penyediaan sarana dan prasarana tangkap dan pengembangan perikanan budidaya di Lebaksiu.

Industri kreatif menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri konveksi dan industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal serta Industri kreatif lain diantaranya produk kriya yang berasal dari kayu. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Pemerintah Kabupaten Tegal wajib melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan untuk mendorong peningkatan daya saing ekonomi lokal, diantaranya pembangunan pasar tradisional, fasilitasi merk, fasilitasi SNI, dan pendampingan manajemen pelaku usaha. Daya saing ekonomi lokal harus didukung dengan inovasi dan kreativitas daerah sehingga dapat terus menumbuhkan pelaku-pelaku usaha baru terutama pada lapangan usaha industri kreatif. Menumbuhkembangkan industri kreatif harus didukung oleh kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, jejaring informasi dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, teknik rekayasa dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual.

E. Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait dengan infrastruktur antara lain infrastruktur jalan / transportasi, air bersih, persampahan, dan sanitasi. Total panjang jalan di Kabupaten Tegal 958,32 km (terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten), Kondisi Jalan Kabupaten yang terkategori baik saat ini mencapai 528,9 km (62,42%) dari total 847 km. Jika dilihat dari strategis dan fungsinya, seharusnya ada upaya distribusi pembagian kewenangan jalan kepada desa, sehingga dengan adanya anggaran DD/ADD di Desa maka menjadi potensi dalam akselerasi dalam pencapaian pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tegal.

Infrastruktur sistem jaringan bersih di Kabupaten Tegal dibagi menjadi jaringan perpipaan dan non perpipaan. Jaringan air minum perpipaan untuk wilayah perkotaan sampai pada akses layanan rumah tangga dilayani oleh PDAM. Sedangkan untuk perpipaan wilayah perdesaan difasilitasi melalui program Pamsimas. Untuk jaringan non perpipaan masyarakat di Kabupaten Tegal dipenuhi dari layanan. Capaian kinerja Program lingkungan sehat perumahan, yaitu persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dalam RPJMD menargetkan pada tahun 2018 sebesar 80,25% rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, terealisasi sebesar 86,23% .

Infrastruktur sumberdaya air berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air, meliputi: wilayah sungai, jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan sistem pengendalian banjir. Kebutuhan air Daerah Irigasi kabupaten tersebut dipenuhi melalui jaringan irigasi. Panjang Saluran irigasi saat ini mencapai 291,7 km, dengan kondisi jaringan irigasi yang mantap 231,7 km (79,36%). Sedangkan yang mengalami kerusakan 60,28 km (20,63%). Jaringan irigasi di Kabupaten Tegal terdiri dari jaringan teknis (primer, sekunder, tersier) dan jaringan non teknis. Kedua jaringan ini hampir tersebar merata di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tegal. Kondisi saluran-saluran irigasi ini perlu perawatan karena sebagian dari saluran-saluran ini, terutama saluran teknis mengalami kerusakan pada fisik bangunannya. Selain itu perlu juga adanya peningkatan terhadap saluran non teknis dan ssemi teknis lainnya agar berfungsi lebih optimal untuk mengairi seluruh persawahan areal persawahan yang ada di Kabupaten Tegal.

Infrastruktur sanitasi di Kabupaten Tegal fokus pada prasarana sanitasi permukiman yaitu pada akses pada jamban sehat. Dalam rentang waktu tahun 2015 – 2019 Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruk jamban sehat dari 55,8 % menjadi 100%. Implementasi PDPM-DM selama empat tahun berturut-turut telah mampu membangun jamban keluarga sehat bagi rumah tangga miskin sebanyak 32.625 unit untuk melayani kebutuhan sanitasi 97.875 KK. Peningkatan akses sanitasi juga signifikan dengan menurunnya angka kejadian diare dari 58.316 kasus di tahun 2014 menjadi 22.100 kasus di tahun 2019. Sehingga tepat saat ini akses sanitasi kita mencapai 100%.

Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Dengan adanya penambahan armada ini seiring dengan peningkatan kapasitas sampah yang terangkut menjadi 80% pada tahun 2018 dari 70% pada tahun 2017. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 113 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 222,75 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem controlled landfill sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

Dalam hal konsep pengembangan wilayah, berdasarkan tingkat pelayanan dan pusat kegiatan, Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 4 wilayah: 1) Kecamatan Slawi, Adiwerna, dan Kramat yang merupakan wilayah yang mempunyai sarana dan prasarana memadai, 2) Pangkah, Talang, Tarub, Margasari, Dukuhhuri, Dukuhwaru, dan Balapulung dimana didominasi oleh kegiatan perdagangan dan industri seperti di Kecamatan Pangkah yang terdapat pasar sebanyak 3 dan di Kecamatan Talang dengan sentra industrinya; 3) Kecamatan Lebaksiu, Suradadi, Bumijawa, Warureja, Bojong, Jatinegara dimana memiliki kegiatan perekonomian yang cukup beragam dan potensi pertanian yang cukup bagus. Dan 4) Kecamatan Pagerbarang dan Kedungbanteng dimana perkembangan masing-masing kecamatan masih tergolong lamban karena terdapat faktor-faktor yang menghambat perkembangannya. Wilayah 4 ini yang perlu perhatian khusus untuk agar dapat sejajar dengan kecamatan lainnya. Beberapa permasalahan dalam pengembangan wilayah antara lain pembangunan infrastruktur belum berorientasi bagaimana

mensinergikan anatara wilayah perkotaan dengan wiayah wilayah yang masih tertinggal, sedangkan khusus untuk wilayah perbatasan jaringan infrastruktur yang ada masih sangat terbatas.

F. Tata kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani. Masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal, jika dilihat dari delapan aspek yaitu aspek manajemen perubahan; aspek peraturan perundang-undangan; aspek kelembagaan; aspek ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik. Dalam hal ketatalaksanaan, e-goverment sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan secara optimal.

Capaian kinerja pembangunan untuk mewujudkan reformasi birokrasi pada tahun 2018 masih sangat rendah terlihat oleh masih banyaknya jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin pegawai (52 orang), Jumlah Kasus kepegawaian (41 kasus), Nilai SAKIP masih CC, serta persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) 16,67 % (8 Perangkat Daerah)

Peningkatan kualitas pelayanan publik dasar perlu menjadi perhatian utama, dimana pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik akan langsung mendapatkan respon dari masyarakat dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Salah satu wujudnya berupa penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.

G. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata akan memberikan kontribusi dalam mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan “pariwisata yang kekinian” tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangkan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara.

Kewenangan daerah pada urusan bidang pariwisata mencakup: (1). Destinasi Pariwisata, dengan kewenangan: pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/ kota; (2). Pemasaran pariwisata, dengan kewenangan: pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri tentang daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (3). pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kewenangan: penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota; dan (4). pengembangan

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan kewenangan: pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Isu terkait dengan budaya dan kearifan lokal adalah perlunya upaya menggali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat yang mengedepankan pengetahuan, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif melalui pengembangan strategi kebudayaan sebagai sarana pembinaan mental yang berbudi luhur yang dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai tradisi, sejarah dan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, yang didukung dengan pengembangan sistem informasi budaya, tanpa mengesampingkan upaya pelestarian dan pengembangan potensi budaya lokal.

H. Penanganan Pra dan Pasca COVID-19

Awal tahun 2020 seluruh negara dihantam *pandemi COVID-19*. *Pandemi COVID-19* tersebut tidak hanya memunculkan masalah dibidang kesehatan saja, namun juga memberikan tekanan struktur ekonomi secara massive keseluruh negara. Di Indonesia *COVID-19* mampu mengacak-acak struktur ekonomi nasional. Hal ini memaksa pemerintah mengoreksi berbagai target ekonomi ditahun 2020. Beberapa skenario berat diputuskan dimana pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 2,3 persen. Padahal pada asumsi dasar ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pertumbuhan ekonomi sebelumnya ditarget sebesar 5,3 persen. Skenario berat tersebut didasarkan pada hasil pertimbangan dan masukan Satgas *COVID-19* yang memperkirakan puncak kasus *COVID-19* terjadi pada Juni dan Juli 2020. Adapun masa darurat bencana akibat *COVID-19* ditetapkan hingga 29 Mei 2020. Pada kuartal I-2020, skenario berat memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di level 4,7 persen. Sementara kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi RI diramal anjlok ke 1,1 persen. Di kuartal III-2020 pertumbuhannya berada pada posisi 1,3 persen, dan kemudian naik di kuartal IV-2020 menjadi 2,4 persen. Selain itu sejumlah perusahaan dari yang skala besar hingga kecil mengalami defisit yang cukup signifikan hingga menimbulkan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan bahkan di-PHK.

Di Kabupaten Tegal sendiri *COVID-19* memberikan pukulan ekonomi yang tidak kecil. Berbagai sektor perekonomian baik formal maupun informal melaporkan penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian yang cukup besar yang memaksa perusahaan juga merumahkan bahkan mem-PHK karyawan. Dari laporan yang ada, sudah ada 161 karyawan dirumahkan dan 461 karyawan di-PHK. Bahkan disinyalir sudah ada ribuan karyawan dari berbagai skala industri di PHK namun tidak dilaporkan. Disektor informal, sektor usaha mikro, pedagang eceran, serta pelaku usaha transportasi juga mengalami dampak yang cukup berat. Pelaku usaha transportasi mulai dari tukang ojek online, ojek pangkalan, kusir andong, sopir angkot, tukang becak yang jumlahnya tidak kurang dari 2.765 orang yang sebagian besar berada di Kecamatan Slawi dan Adiwerna dilaporkan pendapatannya menurun hingga 26,02%.

Dalam hal ekonomi, diperkirakan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal tahun 2020 menurun hingga 8%. Hal tersebut terutama dipengaruhi karena adanya pengurangan pemasukan daerah dari dana transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) yang dipotong 11% dan pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut semakin memperparah dan menekan keuangan daerah Kabupaten Tegal dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan beberapa kali *refocusing* anggaran belanja Perangkat Daerah yang dialokasikan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan *COVID-19* yang nominalnya mencapai Rp. 156,955 miliar. Anggaran BTT tersebut dimanfaatkan untuk percepatan penanganan *COVID-19* diantaranya untuk pencegahan

dan penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Ada beberapa hal yang dirasa bisa memperlama eksistensi *COVID-19* di Kabupaten Tegal jika tidak segera diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat. Hal tersebut berkaitan dengan perilaku masyarakat yang sangat ditentukan oleh latar belakang sosial, budaya dan religi. Dengan melihat latar belakang masyarakat Kabupaten Tegal yang penuh dengan kegiatan sosial, budaya, keagamaan, ditambah dengan aktifitas ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah, maka pola penanganan *COVID-19* yang berupa *Work From Home* dan *Social distancing* akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Apalagi saat ini sudah mendekati hari raya Idul Fitri. Buktinya kondisi saat ini di Kabupaten Tegal jalanan masih padat, kerumunan masih banyak dijumpai, dan gerakan mudik dari zona merah yang massive sulit bisa dicegah dan tidak terpantau. Sementara itu jika kondisi tersebut dibiarkan, sektor-sektor ekonomi besar-kecil semakin lama akan semakin lumpuh. Akan lebih banyak lagi tambahan karyawan di PHK bahkan perusahaan gulung tikar. Sementara keberhasilan pencegahan dan penanggulangan wabah dari sisi kesehatan belum bisa diukur dengan jelas. Untuk itu kecepatan dan ketepatan menangani pandemic ini sangat menentukan kecepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelahnya.

Beberapa kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, jika tidak dicarikan dan diimplementasikan suatu alternatif yang solutif ditahun in (2020), maka muncul kemungkinan ditahun 2021 *COVID-19* masih eksis merusak perekonomian wilayah Kabupaten Tegal. Untuk itu setidaknya isu strategis yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2021 terkait *COVID-19* antara lain:

a. Penanganan Lanjutan *COVID-19*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika penanganan *COVID-19* Kabupaten Tegal tahun 2020 tidak solutif, maka masalah *COVID-19* masih akan dialami ditahun 2021. Untuk itu sebagai langkah antisipasi ditahun 2021, maka penanganan *COVID-19* tahun 2020 perlu dievaluasi sebagai dasar perbaikan penanganan *COVID-19* yang lebih efektif dan efisien.

b. Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca *COVID-19*

Pemulihan sosial ekonomi pasca *COVID-19* sangat tergantung kecepatan dan ketepatan penanganannya. Semakin lama proses penanganannya maka semakin lama pula proses pemulihannya. Hal tersebut terkait dengan seberapa besar kerusakan sosial-ekonomi yang dialami. Untuk itu tahun upaya-upaya pemulihan sosial-ekonomi pasca *COVID-19* ditahun 2021 harus menjadi salah satu guideline program/kegiatan perangkat daerah ditahun 2021. Berbagai kebijakan khususnya terkait stimulus ekonomi masyarakat mulai pelaku ekonomi skala besar hingga kecil harus dikeluarkan melalui berbagai program/kegiatan seluruh Perangkat Daerah yang terkait. Selain itu mengingat potensi meningkatnya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Kabupaten Tegal yang cukup besar, maka Perangkat Daerah terkait khususnya (Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM) perlu merumuskan kebijakan strategis yang efektif dan efisien ditahun 2021.

c. Transformasi ekonomi wilayah potensial

Pandemi *COVID-19* secara luas telah merusak struktur ekonomi secara luas. Rantai-rantai perekonomian-pun secara umum telah rusak. Belajar dari realita yang ada, transformasi ekonomi wilayah perlu mendapatkan perhatian. Ada

beberapa potensi transformasi ekonomi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Tegal antara lain:

- Digitalisasi ekonomi wilayah mulai skala kecil hingga besar. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya pandemi *COVID-19* di Kabupaten Tegal telah memunculkan ekonomi digital masyarakat di semua lini bahkan penjual sayur eceran telah masuk kedalamnya. Kemunculan ekonomi digital ini mempunyai potensi pengembangan mulai dari hulu-hilirnya. Untuk itu perlu di-manage keterkaitan hulu hilirnya (*supply chain management*).
- Rusaknya struktur ekonomi secara luas berpotensi semua pelaku usaha (besar) bisa mengambil peran pelaku usaha lain. Kabupaten Tegal cukup terkenal dengan khususnya di industri logam dan pengolahan hasil pertanian. Untuk itu industri-industri tersebut harus didorong agar bisa berperan masuk ke sektor ekonomi yang sama yang ditinggalkan oleh industri sejenis di tempat lain yang tidak adaptif bahkan gulung tikar. Atau minimal peran sektor industri lokal tidak diambil oleh pelaku dari luar.
- Perlu dilakukan suatu inovasi dan inkubasi usaha ekonomi yang potensi permintaannya besar akibat pandemic *COVID-19* namun supply-nya masih sangat rendah. Untuk itu perlu dilakukan riset pasar yang tepat. Misalnya, adanya potensi industri kesehatan. Tidak cukup hanya menjelaskan bisnis kesehatan saja, tetapi harus lebih fokus misalkan APD, *handsanitizer*, dll.

2.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a) Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD dan Angka Partisipasi PNFI.
- b) Angka Putus Sekolah SD dan SMP perlu terus ditekan.
- c) Rasio Guru terhadap kelas dan mata pelajaran masih belum ideal.
- d) Persentase bangunan dan sarana prasarana SD dan SMP yang dalam kondisi baik masih belum optimal.

2. Urusan Kesehatan

- a) Belum optimalnya upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
- b) Belum optimalnya penerapan pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, serta kurangnya kualitas tatalaksana kegawatdaruratan neonatus.
- c) Pelayanan dan sumber daya kesehatan masih terkendala, dikarenakan program promotif dan preventif di puskesmas belum optimal.
- d) Masih terdapat masalah terkait tingkat kematian ibu, bayi, balita dan gizi buruk serta masih ditemukannya kasus stunting.
- e) Pelayanan RSUD Soeselo masih terkendala pada belum terpenuhinya jenis pelayanan dan SDM medis, penetapan rumah sakit kelas B pendidikan, masih tingginya angka kematian lebih dari 48 jam, ada batas waktu

sertifikat kompetensi SDM medis, belum maksimalnya kepuasan pelanggan medis, masih lamanya waktu tunggu pelayanan medis di poli klinik, masih lamanya waktu tunggu operasi elektif serta belum optimalnya visit dokter spesialis.

- f) Persentase Layanan Rumah Sakit pada RSUD Suradadi belum sesuai Standar Pelayanan Minimal.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- a) Pekerjaan Umum: berdasarkan data kondisi capaian 5 tahun ke belakang, setidaknya terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu:
- Dinamika kerusakan jalan dan jembatan masih cukup tinggi yang mengakibatkan pencapaian atau persentase peningkatan kondisi jalan jembatan masih rendah.
 - Masih adanya jalan dan jembatan Kabupaten yang secara dimensi di bawah standar (lebar 6 m), terutama pada Jalan – Jalan Strategis (JJS) yang menghubungkan pusat pertumbuhan maupun kawasan unggulan seperti kawasan industri dan pariwisata.
 - Belum tersedianya *database* jalan, jembatan, dan irigasi yang baik yang mudah diupdate dan berbasis spasial, sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi masih berbasis anggaran di mana belum berbasis *database* dan kebutuhan.
- b) Penataan Ruang: berdasarkan data kondisi capaian 5 tahun ke belakang, setidaknya terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu:
- Dari hasil peninjauan kembali Perda Kabupaten Tegal No 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2012 – 2032 perlu dilakukan revisi dalam rangka peningkatan kualitas dokumen dan dinamika pembangunan di Kabupaten Tegal.
 - Belum adanya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang wilayah Strategis Kabupaten yang telah diperdakan.

4. Urusan Permukiman dan Perumahan

- a) Permukiman : berdasarkan data kondisi capaian 5 tahun ke belakang, setidaknya terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu:
- Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah dan penanganan rumah di daerah rawan bencana yang belum optimal.
 - Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), terdapat 2 wilayah yang merupakan bukan Cadangan Air Tanah (CAT) belum terakses oleh SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan, sehingga sebagai besar masyarakat memanfaatkan sumur dangkal untuk pemenuhan kebutuhan air minumnya.
 - *Idle Capacity* Sumber Air Baku SPAM Perkotaan saat ini di bawah 100 lt/detik sehingga SPAM Perpipaan Perkotaan sudah tidak dapat lagi melakukan sambungan baru.
 - Belum adanya upaya kolaboratif dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh antara *stakeholder*.
- b) Perumahan : berdasarkan data kondisi capaian 5 tahun ke belakang, setidaknya terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (*Backlog* Rumah) yang masih tinggi.
- Masih banyaknya bangunan gedung dan rumah yang belum mempunyai dokumen legalitas kepemilikan maupun izin mendirikan bangunan.
- Masih kurangnya proporsi PSU dan RTH dibandingkan dengan luas kawasan permukiman khususnya permukiman perkotaan.
- Belum adanya mekanisme penyerahan aset utilitas perumahan yang dikembangkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a) Perlunya peningkatan penegakan peraturan daerah yang dinilai melalui cakupan patroli siaga dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang belum optimal.
- b) Rasio Linmas per RT belum merata terutama pada jumlah Linmas per RT dan rasio Linmas terlatih belum optimal.
- c) Persentase kasus kebakaran tertangani belum optimal.
- d) Adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan adanya jaringan kelompok teroris, keberadaan kelompok radikal, potensi konflik berlandaskan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).
- e) Belum optimalnya pembinaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada daerah-daerah rawan bencana.

6. Urusan Sosial

- a) Persentase PMKS berfungsi sosial masih kurang disebabkan belum optimalnya penanganan PMKS dan rehabilitasi sosial.
- b) Persentase PSKS yang aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial masih kurang, disebabkan belum optimalnya peran dan fungsi pilar-pilar potensi kesejahteraan sosial, termasuk dunia usaha.
- c) Persentase masyarakat rentan yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial masih kurang, di sebabkan belum optimalnya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada masyarakat.
- d) Persentase fakir miskin yang diberdayakan masih kurang, disebabkan belum optimalnya penanganan fakir miskin dan kurangnya akurasi data kemiskinan.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1.) Urusan Tenaga Kerja

- a) Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka dan belum optimal penempatan tenaga kerja karena kurangnya kompetensi pencari kerja dan masih perlunya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang sudah bekerja.
- b) Perlunya perhatian terhadap hubungan antara pengusaha dan pekerja terkait pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- c) Kurangnya optimalnya fungsi Mediator Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2.) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Capaian kinerja APE telah menunjukkan kinerja yang baik, Kabupaten Tegal berada pada posisi APE Madya. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan yang lebih baik lagi.
- b) Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.

3.) Urusan Pangan

- a) Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).
- b) Masih belum optimalnya usaha-usaha berbasis pertanian yang menunjang upaya pemenuhan unsur ketahanan pangan.
- c) Masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian.

4.) Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Terkait dengan urusan pertanahan maka pemerintah kabupaten Tegal hanya fokus pada koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan pertanahan serta memfasilitasi proses pengurusan sertifikasi tanah – tanah yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Tegal. Permasalahan dari Urusan Pertanahan yaitu belum optimalnya sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah.

5.) Urusan Lingkungan Hidup

- a) Pengelolaan Sampah, meliputi:
 - Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang belum sebanding dengan cakupan pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah.
 - Rendahnya kapasitas daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Penujah yang diprediksikan hanya dapat menampung sampai dengan 5 tahun ke depan. Selain itu pemrosesan sampah di TPA Penujah menggunakan metode *Controlled Landfill*.
- b) Limbah B3, meliputi:
 - Terdapat lokasi permukiman yang tercemar Limbah B3 sebagai aktifitas masyarakat pengrajin industri logam (kawasan Pesarean) dan aktifitas pembakaran kapur (kawasan Karangdawa).
- c) Kualitas Lingkungan, meliputi:
 - Tercemarnya sungai oleh limbah rumah tangga khususnya sungai – sungai yang melintas di tengah kawasan permukiman.
 - Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energi dan transportasi.

6.) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Persentase Penduduk yang memiliki KK, KTP-el dan KIA masih belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga perlu optimalisasi layanan hingga ke desa.
- b) Persentase jaminan pelayanan SIAK, dan layanan database kependudukan sesuai masih belum optimal.
- c) Masih kurangnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

- d) Belum optimalnya desiminasi, komunikasi dan informasi kepada masyarakat dalam melengkapi dokumen admindukcapil dan *updating* data kependudukan.

7.) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan desa sehingga perlu program dan kegiatan peningkatan SDM melalui pendampingan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi.
- b) Perlunya peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa.
- c) BUMDes yang masih perlu terus ditumbuhkan, sedangkan BUMDes yang sudah ada untuk terus ditingkatkan kemampuan pengelolaannya.
- d) Masih rendahnya kerjasama antardesa dan perlunya dibangun rencana pengembangan kawasan perdesaan.
- e) Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif.

8.) Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- 1) Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) karena belum optimalnya program pengendalian penduduk mengingat program dan institusinya masih tergolong baru.
- 2) Masih rendahnya CPR karena terbatasnya ketersediaan Penyuluh KB.
- 3) Masih rendahnya pemakaian kontrasepsi metode jangka panjang (MKJP).
- 4) Masih rendahnya capaian anggota kelompok kegiatan menjadi akseptor KB sehingga ketahanan keluarga belum tercapai.

9.) Urusan Perhubungan

- a) Di bidang keselamatan jalan, terdapat beberapat titik daerah rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan kabupaten dan perlintasan sebidang dengan jalur rel kereta
- b) Terdapat titik – titik lokasi parkir yang berada pada ruas jalan Kabupaten Tegal yang berpotensi menimbulkan kemacetan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan lokasi parkir;
- c) Di bidang angkutan penumpang dan barang, pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, dan kawasan perbatasan.
- d) Selain itu belum optimalnya pelayanan uji kendaraan khususnya kendaraan yang berfungsi sebagai angkutan barang
- e) Masih redahnya rasio ketercukupan kelengkapan jalan (Rambu Jalan dan Lampu Penerangan Jalan Umum) dengan panjang jalan di Kabupaten Tegal.

10.) Urusan Komunikasi & Informatika

- a) Masih rendahnya indeks SPBE.
- b) Belum optimalnya kinerja LPSE karena strandarisasi LPSE masih rendah.
- c) Masih rendahnya Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

11.) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Perlunya pembinaan dan pemberdayaan bagi koperasi, agar koperasi menjadi aktif.
- b) Belum optimalnya dukungan iklim usaha terhadap pemberdayaan koperasi.
- c) Masih rendahnya kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- d) Belum optimalnya pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e) Kurang optimalnya penumbuhan wirausaha baru.

12.) Urusan Penanaman Modal

- a) Persentase kepatuhan perusahaan masih kurang disebabkan oleh belum optimalnya pemenuhan syarat pendirian usaha.
- b) Perlunya disediakan kawasan industri dan peruntukkan ruang industri pada lokasi-lokasi yang strategis secara bisnis sehingga para calon investor mendapatkan lahan yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan.
- c) Kepuasan masyarakat dalam layanan perizinan masih kategori sedang disebabkan oleh layanan perizinan belum optimal.

13.) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a) Masih tingginya tingkat pengangguran Pemuda yang didominasi oleh lulusan SMK dan SMA. Karena pemuda lebih banyak yang berminat untuk menjadi karyawan dibandingkan menjadi wirausaha. Sehingga perlu dilakukan penumbuhan kewirausahaan pemuda.
- b) Organisasi kepemudaan kurang aktif karena belum optimalnya pembinaan dan dukungan bagi aktifitas kepemudaan. Aktivitas kepemudaan relatif baru terpusat di wilayah Kecamatan Slawi.
- c) Prestasi olahraga Kabupaten Tegal di tingkat Provinsi masih rendah karena belum optimalnya pembinaan, maupun perpindahan atlet berprestasi asal Kabupaten Tegal ke daerah lain.

14.) Urusan Statistik

- a) Belum optimalnya pengelolaan data sektoral statistik yang terintegrasi dengan *SIM Open Data*.
- b) Masih rendahnya laju pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral oleh pengunjung *SIM Open Data*.
- c) Belum optimalnya peningkatan kapasitas TIK aparatur dan masyarakat.

15.) Urusan Persandian

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi Publik, Informasi dan Transaksi Elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka Pemerintah Daerah bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting. Permasalahan urusan persandian yaitu masih rendahnya Indeks Keamanan Informasi menurut standar Nilai Kematangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

16.) Urusan Kebudayaan

- a) Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/rehabilitasi dan dikaji belum optimal disebabkan kurang adanya penanganan mendalam mengenai perlindungan Benda Cagar Budaya.

- b) Persentase tradisi yang dikembangkan belum optimal disebabkan pembinaan nilai tradisi terhadap generasi muda dan masyarakat masih kurang.

17.) Urusan Perpustakaan

- a) Kurangnya koleksi judul buku menjadikan minimnya literasi yang dapat diakses oleh pemustaka.
- b) Pengelolaan data dan informasi perpustakaan belum optimal sehingga mempengaruhi pelayanan dan kepuasan pemustaka.
- c) Belum optimalnya penumbuhan minat baca masyarakat, ini bisa dilihat dari jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah yang semakin menurun, ini dikarenakan masyarakat sekarang cenderung lebih berminat membaca lewat HP/Internet daripada membaca langsung di Perpustakaan Daerah.
- d) Aksesibilitas layanan perpustakaan desa dan PD masih terbatas.

18.) Urusan Kearsipan

- a) Audit kearsipan (LAKE, LAKI) yang merupakan penilaian tata kelola kearsipan belum optimal terutama layanan kearsipan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah rawan bencana.
- b) Belum optimalnya diseminasi tentang pengelolaan kearsipan di PD.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1.) Urusan Kelautan dan Perikanan

- a) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- b) Belum optimalnya fungsi kelembagaan serta manajemen pelaku utama dan pelaku usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- c) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
- d) Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan.
- e) Kurangnya penganekaragaman produk olahan berbahan baku ikan.
- f) Terjadinya kerusakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP).

2.) Urusan Pariwisata

- a) Belum optimalnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan yang bergerak di sektor pariwisata.
- b) Belum optimalnya promosi pariwisata yang memanfaatkan teknologi informasi.
- c) Belum terintegrasinya potensi wisata yang berbasis sektor industri, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lain.
- d) Masih belum optimalnya pengembangan potensi wisata desa sebagai destinasi wisata baru.

3.) Urusan Pertanian

- a) Daya tarik pertanian terutama pada kalangan muda semakin menurun.
- b) Efisiensi usaha di sektor pertanian yang masih rendah.
- c) Laju alih fungsi lahan yang terus meningkat.
- d) Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM Pertanian.

- e) Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang semakin beragam.
- f) Sumber-sumber air irigasi yang menurun.
- g) Masih belum optimalnya usaha-usaha berbasis pertanian.
- h) Masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian.
- i) Belum optimalnya produksi daging, telur dan susu.
- j) Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM peternakan.
- k) Belum maksimalnya penerapan teknologi tepat guna di bidang peternakan.

4.) **Urusan Perdagangan**

- a) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan serta pengelolaannya.
- b) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta penataan lahan relokasi PKL.
- c) Belum optimalnya pelayanan metrologi.
- d) Belum terbangunnya jejaring perdagangan antara suplai bahan baku untuk produksi dan pasar hasil produksi.

5.) **Urusan Perindustrian**

- a) Lembaga IKM belum berstandar (ISO, 5 R, Manajemen Mutu).
- b) Produk IKM belum berstandarisasi (SNI, BKI, LMK, TKDN).
- c) Sistem manajemen IKM masih cenderung konvensional.
- d) Produk/Lembaga IKM Agro belum memiliki legalitas (PIRT, Halal, Uji Nutrisi, Kadaluarsa, Merk dll).
- e) Kapasitas IPTEK IKM belum optimal.
- f) Akses pasar terbatas pada industri agro.

6.) **Urusan Transmigrasi**

Masih adanya animo masyarakat untuk mengikuti transmigrasi, tetapi masih terdapat kesenjangan kuota keberangkatan transmigrasi ke tempat tujuan.

D. **Urusan Penunjang Pemerintahan**

1.) **Urusan Pemerintahan**

- a) Sebagian pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berjalan meskipun belum menunjukkan hasil yang optimal. Layanan Reformasi Birokrasi membutuhkan koordinasi yang intensif sehingga di masa yang akan datang dapat terwujud secara prima.
- b) Sebagaimana besar capaian kinerja LKJIP PD masih kategori di bawah B, hal ini disebabkan masih lemahnya sistem pengendalian internal PD oleh Setda untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan.
- c) Nilai SAKIP Kabupaten belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini karena aspek perencanaan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah belum menerapkan *casecading* kinerja dengan baik.
- d) Masih belum optimalnya capaian IKM Kecamatan yang menjadi PD koordinasi Bagian Pemerintahan. Hal ini karena pelayanan di kecamatan dirasakan belum prima dan cepat oleh masyarakat.
- e) Persentase IKM Kabupaten masih perlu ditingkatkan. Hal ini karena masih banyak masyarakat pelanggan layanan pemerintah mengeluhkan pelayanan pemerintahan yang belum prima, meliputi kepatuhan pelaksanaan SOP dan ketepatan waktu pelayanan.

- f) Peraturan-peraturan pemerintah belum seluruhnya diturunkan dalam peraturan daerah, peraturan bupati maupun kebijakan daerah. Hal ini disebabkan koordinasi implementasi peraturan-peraturan pemerintah belum dilakukan lebih optimal lagi.
- g) Kerjasama daerah yang telah dilaksanakan melalui MoU atau PKS perlu dipertahankan implementasinya sehingga kerjasama yang ada bersifat implementatif.
- h) Pelaksanaan tugas Bagian Hukum belum optimal meliputi Persentase Pembentukan Peraturan daerah yang terselesaikan.
- i) Persentase penyelesaian masalah hukum yang terfasilitasi telah dilaksanakan secara optimal. Fasilitasi penyelesaian masalah hukum dapat dilakukan Bagian Hukum sampai diantar ke proses persidangan.
- j) Persentase OPD yang melakukan lelang selesai telah dapat dipenuhi. Namun proses selesai yang ada seringkali tidak di awal waktu hal ini terjadi karena terlambatnya PD dalam mengumumkan paket pekerjaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pelelangan (SIRUP) di awal tahun.
- k) Semua pengadaan pemerintah daerah telah dilakukan secara *online/e-procurement*. Dengan demikian tidak terdapat masalah berarti dalam pelayanan pengadaan secara *online* di Kabupaten Tegal.
- l) Kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat telah optimal. Hal ini menggambarkan upaya Bagian Humas mendiseminasikan informasi pembangunan kepada masyarakat telah berlangsung sesuai SOP.
- m) Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Peraturan Daerah dan Anggaran pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD belum optimal disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja (Renja) pada setiap alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tegal, sehingga kinerja DPRD Kabupaten Tegal belum sepenuhnya terarah dan akuntabel.
- n) Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD masih belum sepenuhnya sinkron disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja DPRD pada setiap alat kelengkapan DPRD sehingga ada beberapa program DPRD yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada atau tidak cukupnya anggaran.
- o) Belum optimalnya kinerja pemerintah desa dan *stakeholders* pembangunan desa dalam mewujudkan desa mandiri. Desa mandiri sebagai indikator kinerja *stakeholders* desa perlu didorong melalui peningkatan peran kecamatan dalam pembangunan desa.

b. Urusan Pengawasan

- a) Rendahnya penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK dan APIP. Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK mengalami peningkatan, namun penyelesaian atas tindak lanjut temuan APIP justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perangkat daerah belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan pada LHP Inspektorat Provinsi dan Kabupaten tidak segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk penyelesaian temuan hasil

Pemeriksaan Khusus menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

- b) Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena masih tingginya pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - c) Efektifitas pencapaian tujuan pembangunan daerah yang dinilai dari hasil (*outcome*) program pada Pemerintah Kabupaten Tegal masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada PD dan Pemerintah Daerah.
 - d) APIP Kabupaten Tegal belum memiliki sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi keahlian profesional yang memadai. Hal ini perlu perhatian tersendiri karena tuntutan APIP ke depan semakin berat, terutama dalam perannya sebagai tenaga ahli profesional dalam proses litigasi/penegakan hukum terkait kasus yang menyebabkan kerugian negara/daerah.
- c. Urusan Perencanaan Pembangunan**
- a) Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun pemkesos dengan perencanaan PD rumpun pemkesos belum dapat 100%. Hal ini disebabkan karena masih adanya kegiatan inisiatif dari PD yang muncul setelah penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai akibat adanya dinamika dalam pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan sosial.
 - b) Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun ekbangtur dengan perencanaan PD rumpun ekbangtur belum dapat 100%. Hal ini disebabkan karena dikarenakan masih adanya kegiatan inisiatif dari OPD yang muncul setelah penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai akibat adanya dinamika dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur.
 - c) Capaian kinerja pembangunan belum dapat memenuhi target sebesar 100% karena dalam pelaksanaan pembangunan terdapat deviasi antara target dan realisasi. Hal ini disebabkan manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal OPD belum berlangsung secara optimal.
- d. Urusan Keuangan**
- a) SP2D tepat waktu belum optimal karena tidak lengkapnya persyaratan administrasi. Untuk itu perlu adanya koordinasi antar semua pihak agar persyaratan administrasi dalam penerbitan SP2D dapat dipenuhi serta pengajuan menumpuk di akhir tahun.
 - b) Keterlambatan penetapan perda APBD akan berakibat akan ada sanksi, baik itu administrasi, maupun sanksi lainnya yang lebih tegas, salah satu sanksinya, kepala daerah dan anggota DPRD bisa tidak digaji selama enam bulan, maka perlu adanya perhatian yang khusus dalam melaksanakan tahapan penganggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c) Persentase OPD yang telah mengelola Barang Milik Daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat namun demikian masih perlu terus optimalkan.

- d) Perencanaan dan monev yang tertib dan terkendali masih kurang ditandai dengan persentase laporan pajak daerah yang tersaji belum teridentifikasi secara optimal disebabkan oleh keterlambatan didalam pelaporan masing-masing OPD setiap bulannya.
 - e) Persentase penerimaan pajak daerah belum maksimal karena masih kurangnya sosialisasi, publikasi, penyuluhan dan desiminasi ke Wajib Pajak; titik-titik pelayanan dan sarana pembayaran pajak melalui perbankan dan pihak swasta/PPOB masih sangat kurang; dan sarana prasarana yang dimiliki belum memadai, seperti mobil pelayanan pajak yang bersifat *mobile online*, ruang pelayanan pajak yang terkoneksi dengan perbankan.
- e. Urusan Kepegawaian**
- a) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas belum semua terisi disebabkan karena PNS non fungsional belum seluruhnya dilakukan uji kompetensi, namun pemetaan kompetensi PNS melalui uji komptensi yang telah dilakukan.
 - b) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terintegrasi belum seluruhnya terbangun sesuai kebutuhan, dan SIM yang sudah terbangun belum maksimal dalam integrasi dengan SIMPEG disebabkan oleh data kepegawaian dalam SIMPEG belum ter-*update* seluruhnya dan SIM yang sudah ada dibangun oleh pengembang yang berbeda sehingga diperlukan *platform* yang sama. Selain itu PNS yang akan pensiun menerima SK Pensiun belum tepat waktu disebabkan karena keterlambatan pengiriman berkas usulan dari perangkat daerah dan pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh BKN.
 - c) Pemberian *reward* dan *punishment* belum optimal terhadap kinerja aparatur, salah satunya adalah pemberima tunjangan kinerja belum diberikan, walaupun tunjangan perbaikan penghasilan sudah diberikan kepada PNS namun belum sesuai dengan beban kerja yang telah dilakukan.
 - d) Pejabat Administrator belum sepenuhnya mengikuti Pelatihan Kepemimpinan sehingga kapasitas dan kinerjanya belum optimal.
- f. Urusan Kelitbangan**
- a) Sistem pendataan dan pelaporan kelitbangan belum terintegrasi dalam satu lembaga. Masing-masing lembaga/instansi yang melakukan fungsi kelitbangan belum sepenuhnya melakukan koordinasi dan sinergi.
 - b) Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian maupun Perguruan Tinggi terutama dalam penerapan hasil-hasil penelitian dan inovasi yang dapat mendukung secara langsung pelaksanaan berbagai sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

